



RPJMD

KABUPATEN MERANGIN

TAHUN
2025–2029



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2030;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin;
2. Bupati adalah Bupati Merangin;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merangin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya;
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
18. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran;
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi serta memperhatikan :
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW; dan
 - c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD meliputi :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara perubahan RPJMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 19 - 8 - 2025

BUPATI MERANGIN,

M. SYUKUR



Diundangkan di Bangko
pada tanggal 19 - 8 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


EAJARMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN (1-35/2025)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR GRAFIK.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan Antardokumen.....	I-9
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029	I-10
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029	I-10
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan RTRW Kabupaten Merangin 2014–2034	I-11
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Merangin tahun 2025–2045	I-12
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.4.1 Maksud.....	I-13
1.4.2 Tujuan	I-13
1.5 Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-2
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-6
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-15
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.....	II-24
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-28
2.1.6 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim	II-31
2.1.7 Aspek Demografi.....	II-43
2.1.3 Proyeksi Kependudukan	II-48
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-50
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-51
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua	II-61
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-63
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-69
2.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-70
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-78
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-78
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-80
2.3.3 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-88
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-95
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	II-96
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial.....	II-100
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	II-101
2.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan daerah.....	II-102
2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-144



2.6 Gambaran Keuangan Daerah	II-146
2.6.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II-147
2.6.2 Kerangka Pendanaan	II-156
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	II-163
2.7.1 Permasalahan Pembangunan	II-163
2.7.2 Isu strategis	II-169
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	III-1
3.1 Visi.....	III-1
3.2 Misi.....	III-2
3.3. Tujuan dan Sasaran.....	III-6
3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-14
3.4.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Merangin 2025-2029.....	III-14
3.4.2 Pentahapan Pembangunan Daerah	III-16
3.4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Merangin 2025-2029	III-18
3.4.4 Arah Pembangunan Kewilayahan	III-21
3.4.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-33
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	IV-71
4.2.1 Indikator Kinerja Utama	IV-71
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah	IV-73
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Pedoman Transisi.....	V-2
5.3 Kaidah Pelaksanaan	V-3
5.4 Pengendalian dan Evaluasi	V-Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Merangin	II-4
Tabel 2.2 Populasi Peternakan Kabupaten Merangin 2024	II-7
Tabel 2.3 Luas Area Budidaya Perairan Kolam, Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Merangin, 2024	II-8
Tabel 2.4 Luas Kawasan (ha) Pertanian untuk Kelompok Komoditi Padi, Non-Padi, dan Sayuran Semusim Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	II-9
Tabel 2.5 Luas Kawasan (ha) Pertanian untuk Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Merangin Tahun 2024	II-10
Tabel 2.6 Daftar Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Merangin ..	II-11
Tabel 2.7 Wilayah Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.....	II-19
Tabel 2.8 Luas Produktivitas Akuifer di Kabupaten Merangin.....	II-20
Tabel 2.9 Wilayah Cekungan Air Tanah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.....	II-20
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Merangin	II-43
Tabel 2.11 Rasio Penduduk Kabupaten Merangin	II-45
Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk Kabupaten Merangin 2020-2024	II-46
Tabel 2.12 Penduduk Disabilitas Kabupaten Merangin 2023-2024	II-48
Tabel 2.14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Merangin	II-48
Tabel 2.15 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029	II-49
Tabel 2.16 Proyeksi Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029.....	II-49
Tabel 2.17 Gini Ratio Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi 2020-2023	II-55
Tabel 2.18 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Merangin	II-57
Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Merangin Tahun 2020 – 2024	II-80
Tabel 2.20 Statistik Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Merangin dalam kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024.....	II-87
Tabel 2.21 Indeks Daya Saing Daerah	II-102
Tabel 2.22 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2.23 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.24 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Merangin 2020-2024	II-106
Tabel 2.25 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Merangin 2020-2024	II-108
Tabel 2.26 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Merangin 2020-2024.....	II-110
Tabel 2.27 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten Merangin 2020-2024	II-111



Tabel 2.28 Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Merangin 2020-2024	II-113
Tabel 2.29 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2020-2024	II-114
Tabel 2.30 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin 2020-2024	II-116
Tabel 2.31 Urusan Pangan Kabupaten Merangin 2020-2024	II-117
Tabel 2.32 Urusan Pertanahan Kabupaten Merangin 2020-2024	II-118
Tabel 2.33 Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2020-2024 ..	II-119
Tabel 2.34 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin 2020-2024	II-121
Tabel 2.35 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin 2020-2024	II-122
Tabel 2.36 Urusan Perhubungan Kabupaten Merangin 2020-2024	II-124
Tabel 2.37 Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin 2020- 2024	II-124
Tabel 2.38 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Merangin 2020-2024	II-125
Tabel 2.39 Urusan Penanaman Modal Kabupaten Merangin 2022-2024 ..	II-126
Tabel 2.40 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Merangin 2020- 2024	II-127
Tabel 2.41 Urusan Statistik Kabupaten Merangin 2020-2024	II-128
Tabel 2.42 Urusan Persandian Kabupaten Merangin 2020-2024	II-129
Tabel 2.43 Urusan Kebudayaan Kabupaten Merangin 2020-2024	II-130
Tabel 2.44 Urusan Perpustakaan Kabupaten Merangin 2020-2024	II-131
Tabel 2.45 Urusan Kearsipan Kabupaten Merangin 2020-2024	II-131
Tabel 2.46 Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merangin 2020-2024	II-133
Tabel 2.47 Urusan Pariwisata Kabupaten Merangin 2020-2024	II-133
Tabel 2.48 Urusan Pertanian Kabupaten Merangin 2020-2024	II-135
Tabel 2.49 Urusan Perdagangan Kabupaten Merangin 2020-2024	II-136
Tabel 2.50 Urusan Perindustrian Kabupaten Merangin 2020-2024	II-137
Tabel 2.51 Urusan Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Merangin 2020- 2024	II-138
Tabel 2.52 Urusan Pengadaan Kabupaten Merangin 2020- 2024	II-140
Tabel 2.53 Urusan Kepegawaian Kabupaten Merangin 2020-2024	II-141
Tabel 2.54 Urusan Manajemen Keuangan Kabupaten Merangin 2020 - ..	II-142
Tabel 2.55 Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Merangin 2020-2024	II-143
Tabel 2.56 Capaian SPM Kabupaten Merangin 2022-2024	II-145
Tabel 2.57 Realisasi Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 ..	II-149
Tabel 2.58 Neraca daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.59 Data Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029	II-157
Tabel 2.60 Data Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029	II-157
Tabel 2.61 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Merangin Tahun 2024-2029	II-159
Tabel 2.62 Perumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Merangin 2025-2029	II-181
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029	III-3



Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029.....	III-12
Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Merangin 2025-2029	III-17
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Merangin 2025-2029	III-18
Tabel 3.6 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Merangin 2025-2029	III-34
Tabel 3.7 Dukungan Program Unggulan Kepala Daerah terhadap prioritas pembangunan kewilayahan berbasis RPJMN	III-41
Tabel 3.8 Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Merangin 2025-2029	III-43
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Merangin 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama	IV-72
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah kabupaten Merangin 2025-2029	IV-75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain	I-10
Gambar 2.1 Jarak Kecamatan Menuju Ibu Kota Kabupaten Merangin	II-5
Gambar 2.2 Peta Sebaran Objek Wisata Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	II-13
Gambar 2.3 Peta Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan di Kabupaten Merangin Tahun 2016	II-17
Gambar 2.4 Peta Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Merangin Tahun 2016	II-18
Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Merangin	II-21
Gambar 2.6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Merangin	II-22
Gambar 2.7 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Merangin	II-23
Gambar 2.8 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Merangin	II-34
Gambar 2.9 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Merangin	II-35
Gambar 2.10 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Merangin	II-36
Gambar 2.11 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Merangin	II-37
Gambar 2.12 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Merangin	II-38
Gambar 2.13 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Merangin	II-39
Gambar 2.14 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Letusan Gunung Berapi di Kabupaten Merangin	II-40
Gambar 2.15 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Longsor di Kabupaten Merangin	II-41
Gambar 2.16 Peta Tingkat Kerawanan Multi Bahaya di Kabupaten Merangin	II-42
Gambar 2.17 Megatren Global	II-169
Gambar 3.1 Kontribusi Misi Kabupaten Merangin terhadap Astacita	III-4
Gambar 3.2 CASCADING MISI 1: Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya	III-10
Gambar 3.3 CASCADING MISI 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata dan UMKM)	III-10
Gambar 3.4 CASCADING MISI 3: Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0)	III-11
Gambar 3.5 Pilar Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Merangin 2025-2029	III-40



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	II-6
Grafik 2.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Merangin 2020-2024.....	II-25
Grafik 2.3 Indeks Ketahanan Pangan	II-26
Grafik 2.4 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) Kabupaten Merangin 2020-2024.....	II-27
Grafik 2.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Merangin 2020-2024	II-29
Grafik 2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-30
Grafik 2.7 Indeks Risiko Bencana.....	II-32
Grafik 2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Merangin 2020-2024	II-44
Grafik 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-52
Grafik 2.10 Angka Kemiskinan Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 ...	II-56
Grafik 2.11 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Merangin	II-59
Grafik 2.12 Usia Harapan Hidup	II-62
Grafik 2.13 Prevalensi Stunting.....	II-63
Grafik 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah.....	II-64
Grafik 2.15 Harapan Lama Sekolah.....	II-65
Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	II-68
Grafik 2.17 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Merangin 2022-2024 ...	II-89
Grafik 2.18 <i>Universal Health Coverage</i> Kabupaten Merangin 2021-2024 ...	II-69
Grafik 2.19 Indeks Pembangunan Keluarga	II-70
Grafik 2.20 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Merangin	II-72
Grafik 2.21 Indeks Ketimpangan Gender	II-74
Grafik 2.22 Indeks Pemberdayaan Gender	II-77
Grafik 2.23 Angka Ketergantungan.....	II-79
Grafik 2.24 PDRB Riil Kabupaten Merangin.....	II-83
Grafik 2.25 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Merangin 2020-2024.....	II-85
Grafik 2.26 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Merangin	II-86
Grafik 2.27 Indeks Daya Saing Infrastruktur	II-92
Grafik 2.28 Peningkatan Desa Mandiri	II-93
Grafik 2.29 Persentase Rumah Layak Huni.....	II-94
Grafik 2.30 Capaian Aksi HAM.....	II-101



BAB I PENDAHULUAN





LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
MERANGIN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah, dalam rangka dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespon permasalahan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan langkah langkah masa depan dalam prinsip sinergi, kolaborasi, dan harmoni. Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan pembangunan yang didasarkan pada perintah Peraturan Perundang-Undangan dengan mengacu kepada kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi (*top down*).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan



daerah. Penyusunan Dokumen RPJMD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, atas terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut mengacu pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menekankan bahwa setiap kepala daerah wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dan berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut meliputi kinerja dan periodisasi, serta mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD ini juga dirancang untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya 8 (Delapan) Asta Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2025–2029

RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Merangin tahun 2025–2045 khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025–2029. RPJMD merupakan fondasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029, adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin dimulai setelah pelantikan H. M. Syukur, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Khafidh, M.M., yang telah dilantik secara sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025. Kepala daerah yang dilantik akan menjalani masa bakti selama lima tahun mencakup periode perencanaan, pelaksanaan, serta

evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah. RPJMD disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kepala daerah yang baru terpilih. Selain itu, RPJMD juga dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mengatasi tantangan pembangunan yang ada, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Merangin adalah Kabupaten terluas di Provinsi Jambi yang terbagi menjadi 24 kecamatan dan beribukota di Kecamatan Bangko. Kabupaten Merangin termasuk salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Batanghari. Pembentukan Kabupaten Merangin dimulai Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 di mana daerah Keresidenan Jambi yang terdiri dari beberapa kewedanaan, di antaranya adalah Kewedanaan Bangko, Kewedanaan Sarolangun, Kewedanaan Muara Bungo, dan Kewedanaan Tebo tergabung dalam Provinsi Sumatra Tengah. Dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, termasuk wilayah kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah, Kerinci Hilir, serta Kota Praja Jambi. Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 terbentuk Kabupaten Sarolangun dengan Ibu Kota Sarolangun, dan Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin dengan Ibu Kota Bangko.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018



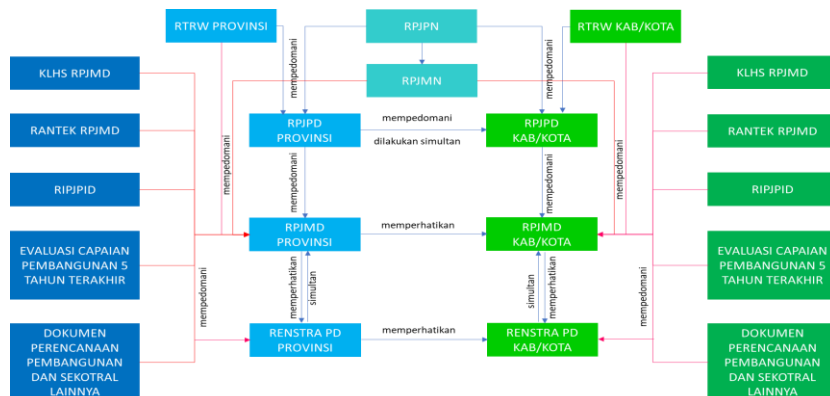
- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 Nomor 27); dan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 9).

1.3 Hubungan Antar dokumen

Hubungan antardokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antardokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD Kabupaten Merangin harus diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jambi, KLHS RPJMD, RIPJPID, Evaluasi Capaian Pembangunan 5 tahun terakhir, dan dokumen perencanaan/sektoral lainnya.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya

Sumber: Inmendagri 02 Tahun 2025

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029

RPJMD Kabupaten Merangin disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara program-program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Merangin tidak hanya menjadi panduan bagi pembangunan daerah tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target-target nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Sinergi antara kedua dokumen ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Merangin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029

RPJMD Kabupaten Merangin harus memastikan bahwa visi, misi, dan program strategis yang dirumuskan dalam RPJMD-nya selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Integrasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keselarasan antara kedua dokumen perencanaan ini juga akan

memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah Kabupaten dan provinsi, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Merangin tidak hanya merupakan pedoman pembangunan lima tahunan bagi Kabupaten tersebut, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pembangunan yang lebih luas di tingkat provinsi.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan RTRW Kabupaten Merangin 2014–2034

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Merangin dengan RTRW Kabupaten Merangin adalah untuk memastikan keselarasan dan sinergi dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terarah. RTRW Kabupaten Merangin sebagai dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menyediakan kerangka acuan bagi penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan infrastruktur. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 harus disusun dengan mempertimbangkan ketentuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Merangin. Selain itu, keselarasan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, integrasi antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 menjadi fundamental dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Ini memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Merangin tidak hanya sejalan dengan visi dan misi jangka menengah daerah, tetapi juga mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi, menciptakan harmonisasi kebijakan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan di masa depan. Ruang lingkup penyelarasan ini juga mempedomani Surat Edaran Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Merangin tahun 2025–2045

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029 berfungsi sebagai fondasi awal yang merumuskan langkah-langkah taktis dan implementatif yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD. RPJMD Kabupaten Merangin ini dirancang dengan mempertimbangkan data empiris, analisis situasi, serta proyeksi kebutuhan dan potensi daerah, sehingga memastikan kesinambungan pembangunan dan menghindari adanya kebijakan yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Selain itu, RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029 juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, memberikan masukan berharga bagi penyesuaian dan penyempurnaan strategi jangka panjang dalam RPJPD. Dengan demikian, harmonisasi antara RPJMD dan RPJPD sangat krusial untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan visi jangka panjang Kabupaten Merangin, sehingga mampu menjawab tantangan masa depan serta memaksimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2025–2045

Hubungan antara Rencana RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2045 merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. RPJMD 2025–2029 berfungsi sebagai dokumen operasional lima tahunan yang merinci visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah, sementara KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS memberikan analisis terhadap dampak lingkungan dari rencana pembangunan, serta rekomendasi untuk mitigasi dan adaptasi, sehingga pembangunan yang direncanakan tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keterpaduan antara

RPJMD dan KLHS ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Merangin tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari upaya pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

1.4.2 Tujuan

1. Menjadi acuan strategis guna mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah dalam periode lima tahun.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah daerah dan perangkat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD dengan perumusan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029, identifikasi dasar hukum yang relevan dan

signifikan, penjelasan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025–2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya, penjelasan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029, serta penjelasan sistematika dokumen RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis sekurang-kurangnya menggunakan data lima tahun sebelumnya dengan memuat beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS, serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Aspek Demografi menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek ini terdiri dari subaspek Kesejahteraan Ekonomi dan sub-aspek Kesejahteraan Sosial Budaya. Kesejahteraan ekonomi menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Kesejahteraan sosial budaya menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

3. Aspek Daya Saing

Aspek ini terdiri atas beberapa subaspek, yaitu Daya Saing Ekonomi Daerah, Daya Saing SDM, Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, dan Daya Saing Iklim Investasi. Daya saing ekonomi daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Daya saing SDM menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Daya saing

fasilitas/infrastruktur wilayah menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah, baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dibangun sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional/sektoral lainnya. Daya saing iklim investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik, serta keamanan dan ketertiban daerah.

4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek ini menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menyajikan kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

5. Gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

6. Permasalahan dan isu strategis daerah. Permasalahan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari evaluasi capaian pembangunan 5 tahun sebelumnya, Laporan KLHS RPJMD ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Kabupaten Merangin. Sementara isu strategis daerah mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu dalam bab ini disajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan pentahapan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program prioritas pembangunan



daerah 2025-2029 yang akan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan daerah, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif. Selain itu pada bab ini disajikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disajikan beserta target setiap tahun, mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas disusunnya RPJMD.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan mengenai kondisi geografi dan demografi Kabupaten Merangin serta hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan daerah dan berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan wilayah. Gambaran kondisi daerah secara menyeluruh memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan atau mengidentifikasi landasan atau pijakan bagi proses perumusan rencana pembangunan daerah, termasuk geografi, demografi serta hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi sangat penting bagi perkembangan terhadap pembangunan suatu wilayah dikarenakan dalam melaksanakan rencana pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografis daerah tersebut agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat tujuan. Analisis pada aspek geografis yang terdapat pada Kabupaten Merangin perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi Kabupaten Merangin dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara eksplisit mengamanatkan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai asas dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini turut didukung oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang juga menegaskan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai dasar penyusunan tata ruang wilayah. UU PPLH mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah,

air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Ekoregion adalah bentuk metode perwilayahan untuk manajemen pembangunan yang didasarkan pada batasan dan karakteristik tertentu (delineasi ruang). Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antarekosistem di wilayah ekoregion. Pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horizontal antarwilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang terkait dengan persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam, maupun permasalahan lingkungan hidup.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Merangin merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah. Regulasi tersebut diubah Kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Merangin meliputi:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Tebo (Permendagri No: 81 Tahun 2016), Kabupaten Muara Bungo (Permendagri No:82 Tahun 2016).
- b. Sebelah timur : Kabupaten Sarolangun (Permendagri No 62 Tahun 2019).
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Muko Muko (Permendagri No: 25 Tahun 2013), Kabupaten Bengkulu Utara (Permendagri No:



25 Tahun 2013), Kabupaten Lebong (Permendagri No: 25 Tahun 2013), Kabupaten Musi Rawas Utara (Permendagri No: 131 Tahun 2017).

d. Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci (Permendagri No:80 Thn 2016).

Kabupaten Merangin memiliki Luas wilayah 755.424 Ha berdasarkan lampiran luasan batas permendagri dan terbagi menjadi 24 Kecamatan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Jangkat sebesar 951.54 Km² atau sebesar 12,60% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin, diikuti oleh Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Lembah Masurai masing-masing sebesar 733.28 Km² dan 672.9 Km².

Luas wilayah Kabupaten Merangin secara astronomis, terletak pada titik koordinat antara 101o 32'39" – 102o 38'35" Bujur Timur dan antara 1o 39'23" – 2o 46'9" Lintang Selatan. Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko dengan jarak dari Kota Jambi (Ibu Kota Provinsi Jambi)±256 Km. Secara administrasi pemerintahan, pembagian wilayah Kabupaten Merangin meliputi 24 wilayah pemerintahan kecamatan. Salah satu upaya meningkatkan peran pemerintah kecamatan, Pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, melalui penyelenggaraan pelayanan tingkat desa. Maka dari itu, terdapat sebanyak 205 desa dan tingkat kelurahan sebanyak 10 kelurahan. Upaya pemekaran Kecamatan yang juga diiringi dengan pemekaran desa ini diharapkan mampu memperpendek rentang kendali, jarak dan waktu guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, berikut ini disajikan nama kecamatan beserta luas wilayahnya yang terdapat di Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin secara administratif pemerintahannya berdasarkan perkembangan wilayah-wilayah pemekaran kecamatan baru, untuk nama kecamatan dan luas wilayah kecamatan sampai dengan tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini.



Tabel 2.1 Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Merangin

Kecamatan	Luas Wilayah
Kecamatan Jangkat	967,23 km ² (12,60 %)
Kecamatan Jangkat Timur	593,46 km ² (7,73 %)
Kecamatan Muara Siau	655,06 km ² (8,53 %)
Kecamatan Lembah Masurai	688,99 km ² (8,97 %)
Kecamatan Tiang Pumpung	274,86 km ² (3,58 %)
Kecamatan Pamenang	346,54 km ² (4,51 %)
Kecamatan Pamenang Barat	199,55 km ² (2,60 %)
Kecamatan Renah Pamenang	107,58 km ² (1,40 %)
Kecamatan Pamenang Selatan	167,47 km ² (2,18 %)
Kecamatan Bangko	168,39 km ² (2,19 %)
Kecamatan Bangko Barat	196,47 km ² (2,56 %)
Kecamatan Batang Masumai	111,34 km ² (1,45 %)
Kecamatan Nalo Tantan	206,58 km ² (2,69 %)
Kecamatan Sungai Manau	295,50 km ² (3,85 %)
Kecamatan Renah Pembarap	272,86 km ² (3,55 %)
Kecamatan Pangkalan Jambu	427,05 km ² (5,56 %)
Kecamatan Tabir	333,33 km ² (4,34 %)
Kecamatan Tabir Ulu	219,64 km ² (2,86 %)
Kecamatan Tabir Selatan	196,25 km ² (2,56 %)
Kecamatan Tabir Ilir	158,92 km ² (2,07 %)
Kecamatan Tabir Timur	108,75 km ² (1,42 %)
Kecamatan Tabir Lintas	115,38 km ² (1,50 %)
Kecamatan Margo Tabir	128,30 km ² (1,67 %)
Kecamatan Tabir Barat	739,50 km ² (9,63 %)

Sumber Data: Merangin Dalam Angka, 2025



Gambar 2.1 Jarak Kecamatan Menuju Ibu Kota Kabupaten Merangin

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2025

Jarak antara ibu kota kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Merangin berkisar antara 1 hingga 142 Km. Ibu kota kecamatan terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Merangin adalah Kecamatan Jangkat Timur yang mencapai 142 Km. Sedangkan jarak paling dekat antara ibu kota kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Merangin adalah Ibukota Kecamatan Bangko yang hanya berjarak 1 Km.

Dalam melihat posisi dan peran strategis daerah di Kabupaten Merangin terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, di antaranya adalah:

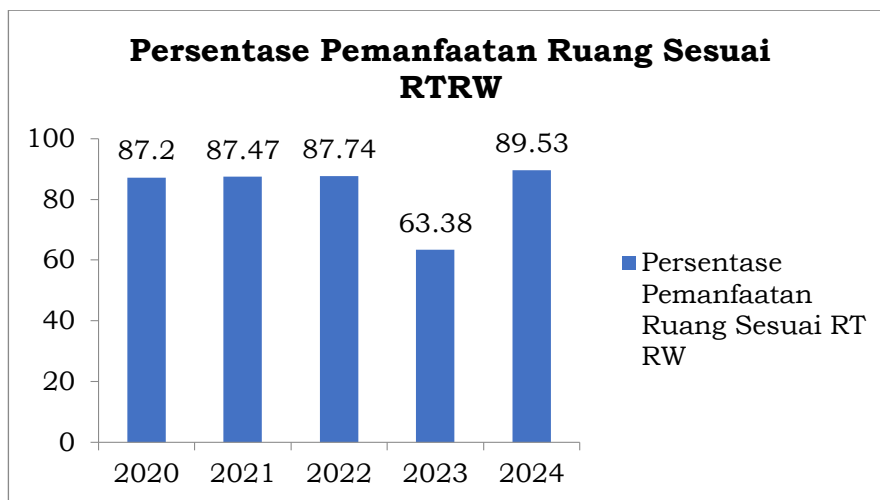
2.1.1.1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW

Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi unsur penting dalam upaya mengatur pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan berpedoman kepada dokumen RTRW, Kabupaten Merangin mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi dengan semangat pelestarian lingkungan. Pemanfaatan ruang yang mengacu kepada dokumen RTRW Kabupaten Merangin menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat



untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen RTRW dapat membuka peluang untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama dalam hal akses infrastruktur dasar, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau.

Berikut merupakan grafik mengenai Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW.



Grafik 2.1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Sumber Data: Dinas PUPR Kabupaten Merangin 2025

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW, pada tahun 2020 persentase pemanfaatan ruang berada di angka 87,2% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai angka 87,74%. Sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 63,38%. Terdapat peningkatan Kembali pada tahun 2024 sebesar 89,53%. Penyebab kenaikan persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RT RW adalah semakin baiknya tata kelola penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang juga menjadi faktor pendorong persentase penataan ruang sesuai dengan RTRW terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1 Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan di Kabupaten Merangin terdapat di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan populasi peternakan terbesar berada di



Kecamatan Tabir Lintas dengan jumlah 1.411.453. Sementara Kecamatan dengan populasi peternakan terkecil berada di Kecamatan Jangkat dengan jumlah 5.5671.

Tabel 2.2 Populasi Peternakan Kabupaten Merangin 2024

Kecamatan	Ternak				Unggas				Total
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras	Ayam Petelur	Itik	
Jangkat	384	135	532	173	13.070	1.565	4.812	35.000	5.5671
Jangkat Timur	371	103	502	167	53.184	1.136	17.011	1.226	73.700
Muara Siau	134	47	3.238	169	49.848	–	34.378	1.305	89.119
Lembah Masurai	88	83	621	181	73.941	–	3.000	436.000	513.914
Tiang Pumpung	225	88	435	173	75.363	–	70.708	918.000	1.064.992
Pamenang	1.756	200	6.000	157	101.349	2.665	188.362	4.311	304.800
Pamenang Barat	840	128	485	168	66.393	–	129.347	1.920	199.281
Renah Pamenang	1.050	74	2.616	–	172.336	967.000	159.154	1.727	1.303.957
Pamenang Selatan	429	115	712	–	133.038	272.000	143.172	309.000	858.466
Bangko	112	53	1.139	84	11.635	1.749	252.204	1.629	268.605
Bangko Barat	617	92	1.020	63	59.729	1.300	159.869	974.000	1.196.690
Nalo Tantan	207	100	718	387	65.796	–	165.601	291.000	523.809
Batang Masumai	480	103	1.003	179	98.664	–	139.572	573.000	813.001
Sungai Manau	366	304	582	158	64.326	189.000	194.615	2.519	451.870
Renah Pembarap	126	147	615	157	131.902	289.000	194.163	315.000	931.110
Pangkalan Jambu	338	168	613	159	57.877	344.000	168.690	1.279	573.124
Tabir	235	443	5.256	153	29.877	1.461	188.163	1.494	227.082
Tabir Ulu	258	433	5.994	107	138.225	–	130.866	713.000	988.883
Tabir Selatan	3.776	135	6.567	140	63.243	–	222.251	127.000	423.112
Tabir Ilir	205	144	632	169	170.044	–	34.995	487.000	693.189
Tabir Timur	940	189	4.086	152	65.248	500.000	73.893	567.000	1.211.508
Tabir Lintas	329	133	684	174	121.428	527.000	169.705	592.000	1.411.453
Margo Tabir	1.137	113	1.359	169	112.034	248.000	171.072	508.000	1.041.884
Tabir Barat	257	485	457	128	95.960	–	–	510.000	607.287
Merangin	14.660	4.015	45.866	3.567	2.024.510	3.345.876	3.015.603	7.372.410	15.826.507

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2025

2.1.2.2 Kawasan Budidaya Perikanan

Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Merangin terdapat di seluruh kecamatan untuk jenis perairan kolam. Kecamatan yang memiliki luas kolam terluas berada di Kecamatan Pamenang Barat dengan luas 32,12 Ha, sementara untuk wilayah paling sedikit budidaya perikanan kolamnya berada di Kecamatan Tiang Pumpung dengan luas 3,28 Ha. Sementara untuk sistem budidaya keramba jaring apung (KJA) hanya terdapat di 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Tabir Lintas dengan total 128 unit.



Tabel 2.3 Luas Area Budidaya Perairan Kolam, Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Merangin, 2024

Kecamatan	Kolam (Ha)	Keramba Jaring Apung (Unit)
Jangkat	17,22	–
Jangkat Timur	6,52	–
Muara Siau	6,27	–
Lembah Masurai	13,11	–
Tiang Pumpung	3,28	–
Pamenang	21,78	–
Pamenang Barat	32,12	–
Renah Pamenang	21,16	–
Pamenang Selatan	16,96	–
Bangko	12,62	–
Bangko Barat	5,85	–
Nalo Tantan	7,33	–
Batang Masumai	15,32	–
Sungai Manau	22,67	–
Renah Pembarap	13,75	–
Pangkalan Jambu	16,02	–
Tabir	12,66	–
Tabir Ulu	5,22	–
Tabir Selatan	11,05	–
Tabir Ilir	7,32	–
Tabir Timur	7,43	–
Tabir Lintas	12,68	128
Margo Tabir	11,32	–
Tabir Barat	3,12	–
Merangin	302,78	128

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2025

2.1.2.3 Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Merangin yang dihitung dalam pembangunan daerah terdiri dari luas panen untuk komoditi pertanian yang ditanam secara umum di wilayah kecamatan di Kabupaten Merangin. Komoditi tersebut dikelompokkan menjadi tanaman pangan padi, tanaman pangan nonpadi dan tanaman sayuran semusim serta luas areal untuk komoditi perkebunan.

Tanaman pangan padi yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang; tanaman pangan nonpadi yang terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar; dan tanaman sayuran semusim yang terdiri dari kentang, ketimun, dan kacang panjang. Berdasarkan luas panen komoditi tersebut, luas kawasan untuk pertanian padi, nonpadi dan sayuran semusim pada tahun 2024 di Kabupaten Merangin adalah seluas 13.123 Ha.



Kawasan terluas terletak di Kecamatan Tabir dengan luas panen 2.130 ha atau sebesar 16%. Sedangkan luas terkecil terletak di Kecamatan Tabir Ilir dengan luas hanya 42 Ha atau sebesar 0,86%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Luas Kawasan (Ha) Pertanian untuk Kelompok Komoditi Padi, Nonpadi, dan Sayuran Semusim Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2024

No	Kecamatan	Padi (Sawah dan Ladang)	Tanaman Pangan Nonpadi	Sayuran Semusim	Total (Ha)	Persentase (%)
1	Jangkat	885	80	61	1.026	8%
2	Jangkat Timur	1.044	52	28	1.124	9%
3	Muara Siau	467	82	8	557	4%
4	Lembah Masurai	729	112	68	909	7%
5	Tiang Pumpung	45	44	19	108	1%
6	Pamenang	249	18	33	300	2%
7	Pamenang Barat	13	62	24	99	1%
8	Renah Pamenang	12	39	3	54	0%
9	Pamenang Selatan	68	36	1	105	1%
10	Bangko	37	82	37	156	1%
11	Bangko Barat	245	138	76	459	3%
12	Nalo Tantan	71	26	7	104	1%
13	Batang Masumai	197	10	9	216	2%
14	Sungai Manau	1.205	13	20	1.238	9%
15	Renah Pembarap	304	42	14	360	3%
16	Pangkalan Jambu	651	2	6	659	5%
17	Tabir	1.852	174	103,5	2.130	16%
18	Tabir Ulu	804	2	0,4	806	6%
19	Tabir Selatan	28	105	46	179	1%
20	Tabir Ilir	14	21	7	42	0%
21	Tabir Timur	24	19	0	43	0%
22	Tabir Lintas	734	49	39	822	6%
23	Margo Tabir	784	76	55	915	7%
24	Tabir Barat	665	31	17	713	5%
Merangin		11.127	1.314	681,9	13.123	100%

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2025

Luas Kawasan Pertanian untuk Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Merangin terbanyak berada di Kecamatan Pamenang dengan luas kawasan perkebunan sebesar 22.161 Ha. Sementara Kecamatan Jangkat memiliki luas kawasan perkebunan dengan jumlah 421 Ha.

**Tabel 2.5 Luas Kawasan (Ha) Pertanian untuk Komoditi Perkebunan
Rakyat di Kabupaten Merangin Tahun 2024**

Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Total
Jangkat	–	–	–	420	1	421
Jangkat Timur	40	–	260	906	2	1.208
Muara Siau	179	137	13.482	158	–	13.956
Lembah Masurai	624	63	3.240	1.880	8	5.815
Tiang Pumpung	300	35	3.418	77	–	3.830
Pamenang	18.959	170	3.029	1	2	22.161
Pamenang Barat	1.550	65	2.868	–	–	4.483
Renah Pamenang	7.408	67	782	–	4	8.261
Pamenang Selatan	6.084	67	2.329	–	–	8.480
Bangko	7.400	3	4.305	–	2	11.710
Bangko Barat	1.940	23	3.746	6	4	5.719
Nalo Tantan	927	29	3.009	–	7	3.972
Batang Masumai	860	51	2.845	1	4	3.761
Sungai Manau	385	1	1.487	1	2	1.876
Renah Pembarap	769	33	5.203	93	–	6.098
Pangkalan Jambu	196	76	1.162	97	–	1.531
Tabir	2.463	142	5.016	–	–	7.621
Tabir Ulu	1.684	52	4.757	45	4	6.542
Tabir Selatan	8.119	14	389	–	1	8.523
Tabir Ilir	2.968	5	12.736	–	–	15.709
Tabir Timur	3.308	7	4.557	–	3	7.875
Tabir Lintas	954	51	6.086	–	5	7.096
Margo Tabir	1.237	90	4.153	–	7	5.487
Tabir Barat	2.310	137	6.939	292	3	9.681
Merangin	70.664	1.318	95.798	3.977	59	17.1816

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2025

2.1.2.4 Kawasan Pariwisata

Potensi Pariwisata Kabupaten Merangin dianugerahi berbagai objek dan daya tarik wisata yang alami serta didukung oleh budaya dan kesenian daerah yang beragam dan memiliki kekhususan/ kekhasan. Adapun potensi wisata unggulan baik yang telah dikembangkan maupun yang belum/sedang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



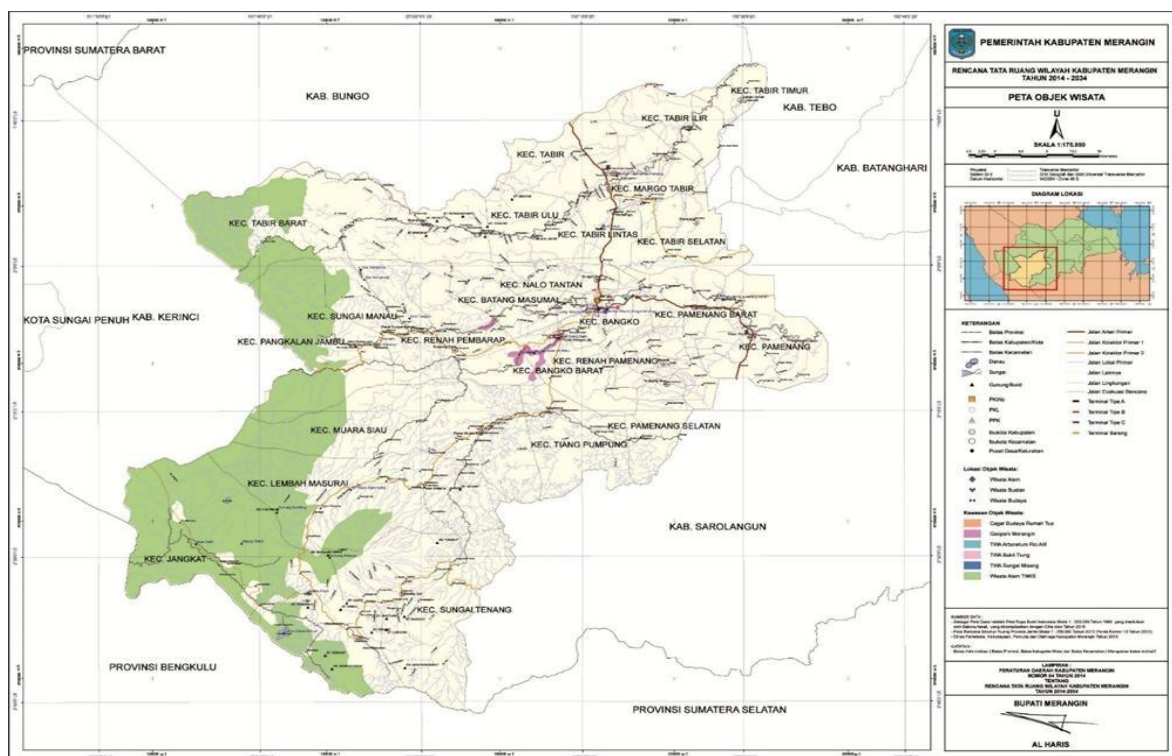
Tabel 2.6 Daftar Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Merangin

No	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1	Taman Wisata Arboretum Rio Alif	Desa Langling Kecamatan Bangko
2	Dam Betuk	Kecamatan Tabir Lintas
3	Jam Gento	Kota Bangko Kecamatan Bangko
4	Goa Sengayau	Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Manau
5	Teluk Wang Sakti	Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat
6	Taman Rekreasi Bukit Tiung	Kota Bangko Kecamatan Bangko
7	Wisata Sejarah Perkampungan Rumah Tuo	Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir
8	Wisata alam Danau Pauh	Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat
9	Wisata Alam Danau Depati empat	Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat
10	Wisata Alam Gunung Masurai	Kecamatan Lembah Masurai
11	Wisata Alam Air Panas / Grow	Desa Renah Kemumu Kecamatan Jangkat
12	Wisata Budaya Perkampungan Rumah Tuo	Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir
13	Benda Cagar Budaya Batu Bertulis Karang Berahi	Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat
14	Benda Cagar Budaya Batu larung atau batu persembahan dusun tuo	Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai
15	Benda Cagar Budaya Batu larung Nilo dingin	Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai
16	Benda Cagar Budaya Batu larung Desa Gedang	Desa Gedang Kecamatan Jangkat Timur
17	Benda Cagar Budaya Batu larung Lubuk Mentilin	Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Jangkat
18	Wisata Alam Air Terjun Segirincing dan Air Terjun Tepian Dukuh Betuah	Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Jangkat Timur
19	Agro Wisata	Kecamatan Sungai Manau
20	Wisata Alam Telun Air Batu	Desa Bukit Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu
21	Wisata Keunikan Geologi (<i>Geopark</i>)	Kawasan Batang Sungai Merangin antara Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap, Desa Biuku Tanjung (Teluk Wang Sakti) Sampai dengan Ujung Tanjung Kecamatan Bangko
22	Taman Wisata Bunga Hesti Garden	Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat
23	Taman Wisata Bunga Merangin Garden	Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko
24	Wisata Alam Sungai Mangkaring	Kecamatan Renah Pembarap



No	Nama Obyek Wisata	Lokasi
25	Wisata Alam Air Terjun 7 Bertingkat Bukit Batu	Air terjun ini merupakan salah satu air terjun terunik. Air terjun ini memiliki rangkaian batu yang membuatnya terlihat seperti bertingkat 7. Dengan ketinggian 40 meter, air terjun ini memiliki arus air yang tidak terlalu deras. Selain itu, air terjun ini memiliki permukaan deras air yang landai, sehingga Anda bisa melakukan seluncur mengikuti arus air, Lokasi Jalan Raya Bangko-Kerinci, Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin
26	Wisata Taman Batu	Jalan Lintas Sumatera Dusun Mudo Desa Langling Kecamatan Bangko (bersebelahan dengan Taman Wisata Arboretum Rio Alif)
27	Objek Wisata Telaga Biru dan Air Terjun Lima Belas Tingkat	Kecamatan Jangkat Timur
28	Wisata Buatan Taman Lubuk Pelayang	Perbatasan Desa Salam Buku dan Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai
29	Objek Wisata Talang Tirta Asri	Desa Talang Sagegah Kecamatan Renah Pembarap
30	Wisata Buatan Taman Tanjung Menanti	Lorong Tanjung Menanti Waskita Karya Pasar Atas Bangko
31	Wisata Buatan Taman Bukit Impian	Jalan ring road jalur 2 SMA 6, Sungai Ulak, Bangko, Kabupaten Merangin
32	Wisata Pemandian Wadas Genjleng	Desa Pulau Tujuh, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin
33	Wisata Embung Pinang Merah	Desa Pinang Merah (Trans Pamenang B1), Kecamatan Pamenang Barat
34	Wisata Buatan Trans Garden C2	jalan Talang Kawo - Trans C2 Kabupaten Merangin
35	Wisata Sikumbang Waterpark	Jl. Kebun Kelapa, Pasar Bangko, Bangko, Kabupaten Merangin
36	Tugu Pedang	Sebuah monumen senjata tradisional nenek moyang masyarakat Merangin pada zaman dahulu. Senjata pedang tegak terhunus ini juga menjadi bagian dari lambang daerah Merangin. Tugu ini terletak di kelurahan Dusun Bangko, Merangin, di pinggir Jalan Lintas Sumatera atau didepan rumah dinas Bupati Merangin.

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Merangin Tahun 2023



Gambar 2.2 Peta Sebaran Objek Wisata Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

2.1.2.5 Kawasan Pertambangan

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Merangin terdiri atas WUP Mineral Logam yang termasuk di dalamnya bijih besi dan emas, WUP Batubara, WUP Minyak Bumi, dan WUP Panas Bumi. WUP Minyak Bumi hanya terdapat di Kecamatan Pamenang, sementara WUP Panas Bumi hanya terdapat di Kecamatan Jangkat, Lembah Masurai dan sedikit di wilayah Kecamatan Jangkat Timur. Wilayah Kabupaten Merangin bagian tengah merupakan kawasan pertambangan batu bara memanjang dari timur ke arah barat mulai dari Kecamatan Pamenang sampai ke bagian timur wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu.

2.1.2.6 Geopark Merangin

Kawasan *Geopark* merupakan kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil yang berusia jutaan tahun. *Geopark* ini berada dalam wilayah Kecamatan Bangko Barat dan Kecamatan Renah Pembarap. Kawasan *Geopark* ini dapat dijadikan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan hidup dan Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi (wisata). Dengan status



yang disandang telah menjadi anggota *Geopark* secara internasional, maka posisi Kawasan ini bisa dijadikan *highlight* pariwisata kabupaten Merangin. Daya tarik *Geopark* ini menjadi penentu bagi segmen pasar yang ditargetkan dan juga menjadi *icon* pariwisata Kabupaten Merangin. Mengingat kawasan ini adalah kawasan yang sangat dilindungi maka tidak boleh terdapat pembangunan yang sangat masif.

Tujuan Pengembangan Kawasan *Geopark* Nasional Merangin Jambi memiliki tujuan pengembangan berupa:

- 1) Mewujudkan pengelolaan *Geobotanical Park* yang berakar di masyarakat, sinergis dengan pemerintah dan memiliki jejaring kerja yang luas di dalam maupun luar negeri;
- 2) Mewujudkan kualitas lingkungan *Geobotanical Park* Merangin melalui kerjasama kolaboratif para pihak yang peduli, berkompeten dan profesional;
- 3) Mewujudkan *Geobotanical Park* Merangin sebagai pusat penelitian dan pendidikan serta pengembangan pengetahuan jejak sejarah purba paleobotani dan kaldera Masurai; dan
- 4) Mewujudkan Ekonomi Kawasan yang Berbasis Pertanian Hortikultur dan Perkebunan Rakyat serta Geowisata yang Berkelanjutan.

2.1.2.7 Kawasan Agropolitan Kompleks-Masurai

Kawasan agropolitan Kompleks-Masurai meliputi wilayah Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Jangkat Timur. Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian hortikultura dan perkebunan, khususnya komoditas kentang, sayur-sayuran, nilam, dan kopi. Diharapkan kawasan ini dapat berkembang menjadi sentra pertanian hortikultura dan perkebunan yang tidak hanya sebatas skala lokal, tapi juga skala regional. Sebagai Kawasan yang sangat kaya dengan potensi pertanian dimana banyak dibudidayakan tanaman Hortikultura dan Industri, maka potensi wisata Agro dinilai cukup besar. Kawasan ini dapat dikembangkan dengan dua Model yaitu *Community Based Tourism* atau *Capital Based Tourism*.



2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin

Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan, sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*).

Kesesuaian lahan berhubungan dengan daya dukung lingkungan karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan lahan tertentu maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut.

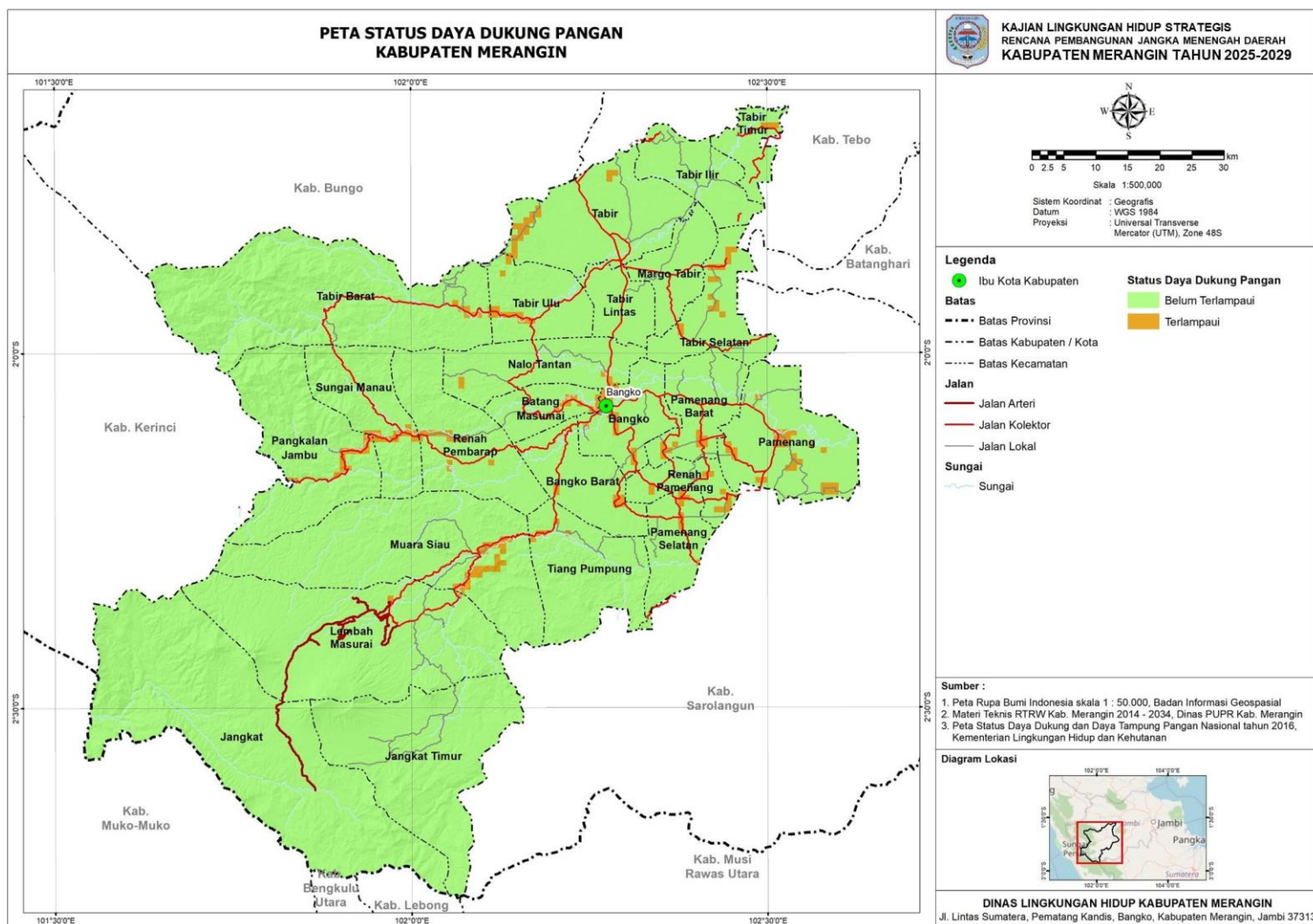
Lahan dikatakan sesuai atau tidak ketika akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut, maka digunakan mutu baku lingkungan untuk menilai bahwa apakah lingkungan telah rusak atau tercemar. Nilai ambang batas terbagi menjadi batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang memengaruhi mutu lingkungan. Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan.

Status daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Merangin pada tahun 2016 masih belum terlampaui pada area seluas 737.444 Ha atau sebesar 67,40% dari luas wilayah kabupaten. Hanya seluas 16.706 Ha atau 2,60% dari total area yang penyediaan pangannya berada dalam status

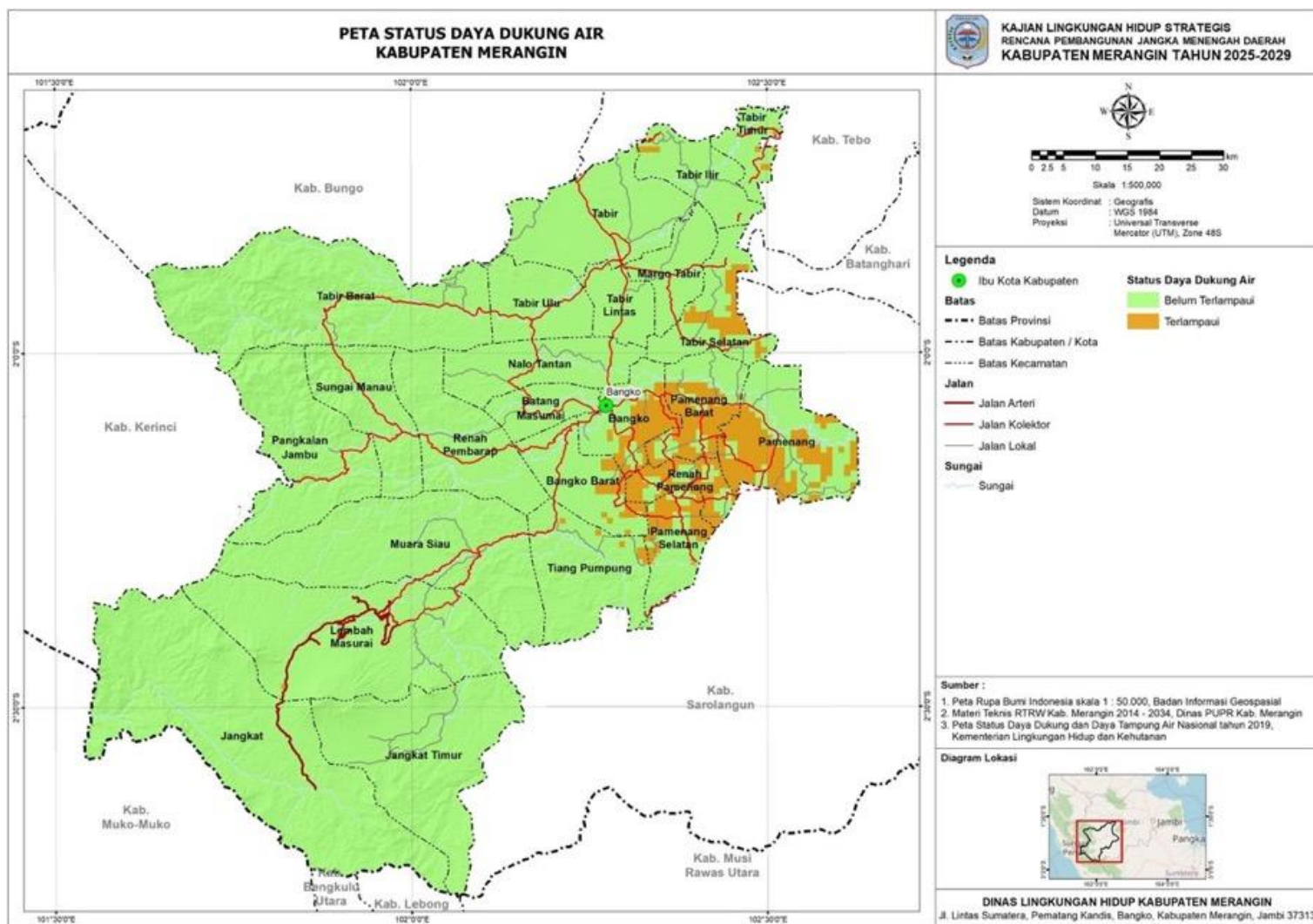


terlampau. Area ini tersebar di 16 kecamatan dengan areal terluas berada di Kecamatan Pamenang seluas 2.576 Ha dan Kecamatan Muara Siau seluas 2.113 Ha.

Peta status daya dukung pangan dan air di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Peta Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan di Kabupaten Merangin Tahun 2016



Gambar 2.4 Peta Status Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Merangin Tahun 2016



2.1.3.2 Wilayah Fungsional

2.1.3.2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Merangin termasuk ke dalam wilayah DAS Batang Hari dengan sub DAS yaitu Sub DAS Batang Tabir, Sub DAS Batang Tebo dan Sub DAS Batang Tembesi. Informasi berkaitan dengan masing masing DAS dan sub DAS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Wilayah Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Pemangku Wilayah	No	Nama DAS	Luas Wilayah	
			Ha	%
BPDAS Batanghari	1	DAS Batanghari		
	1.1	Sub DAS Batang Tabir	179.022,80	3,90
	1.2	Sub DAS Batang Tebo	1.765,90	0,03
	1.3	Sub DAS Batang Tembesi	469.457,91	10,23

Sumber: RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034

2.1.3.2.1 Cekungan Air Tanah (CAT)

Pembagian daerah hidrologi terdiri dari daerah air tanah langka/tak berarti, daerah produktivitas akuifer rendah, dan daerah akuifer produktif. Sebagian besar wilayah Kabupaten Merangin berada pada area dengan daerah air tanah langka dengan luas 263.666,25 Ha atau sebesar 38,25% dari luas total wilayah kabupaten. Seluruh wilayah Kecamatan Tabir Barat termasuk ke dalam area dengan kategori ini dan menyebar ke sebagian wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Renah Pembarap, dan Nalo Tantan. Lalu area dengan kategori air tanah langka ini kembali teridentifikasi di bagian timur dan selatan kabupaten, yakni di bagian selatan Kecamatan Jangkat dan Jangkat Timur dan sebagian besar wilayah Kecamatan Tiang Pumpung dan Muara Siau serta Lembah Masurai. Luas dan persentase produktivitas akuifer di Kabupaten Merangin selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Luas Produktivitas Akuifer di Kabupaten Merangin

No	Produktivitas Akuifer	Luas (Ha)	Persentase
1	Daerah air tanah langka	263.666,25	38,25%
2	Produktivitas akuifer kecil	181.128,65	23,56%
3	Produktivitas akuifer sedang	14.316,62	1,86%
4	Setempat akuifer produktif	278.755,16	36,30%
Grand Total		767.G00,00	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034

Sebesar 53,64% wilayah Kabupaten Merangin terletak pada tiga daerah Cekungan Air Tanah, yaitu CAT Bangko-Sarolangun pada areal seluas 365.477,66 ha atau sebesar 51,50%; wilayah CAT Muara Bungo seluas 8.261,20 ha atau sebesar 1,08%; dan wilayah CAT Painan-Lubuk pinang seluas 10.500,56 atau sebesar 1,37%.

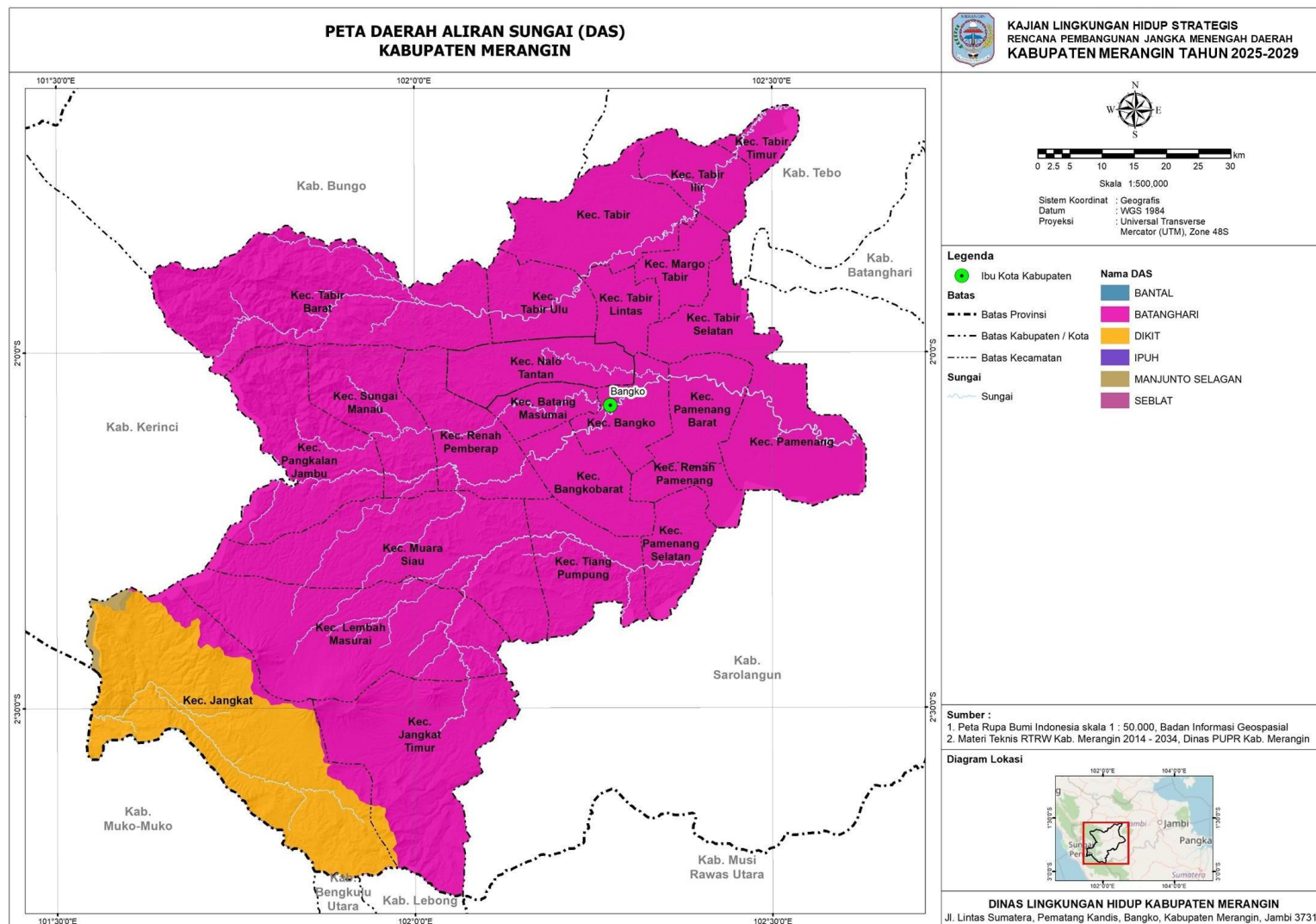
Wilayah CAT Painan-Lubuk pinang hanya terdapat di wilayah Kecamatan Jangkat. Demikian dengan wilayah CAT Muara Bungo yang hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tabir dan Kecamatan Tabir Timur.

**Tabel 2.9 Wilayah Cekungan Air Tanah di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi**

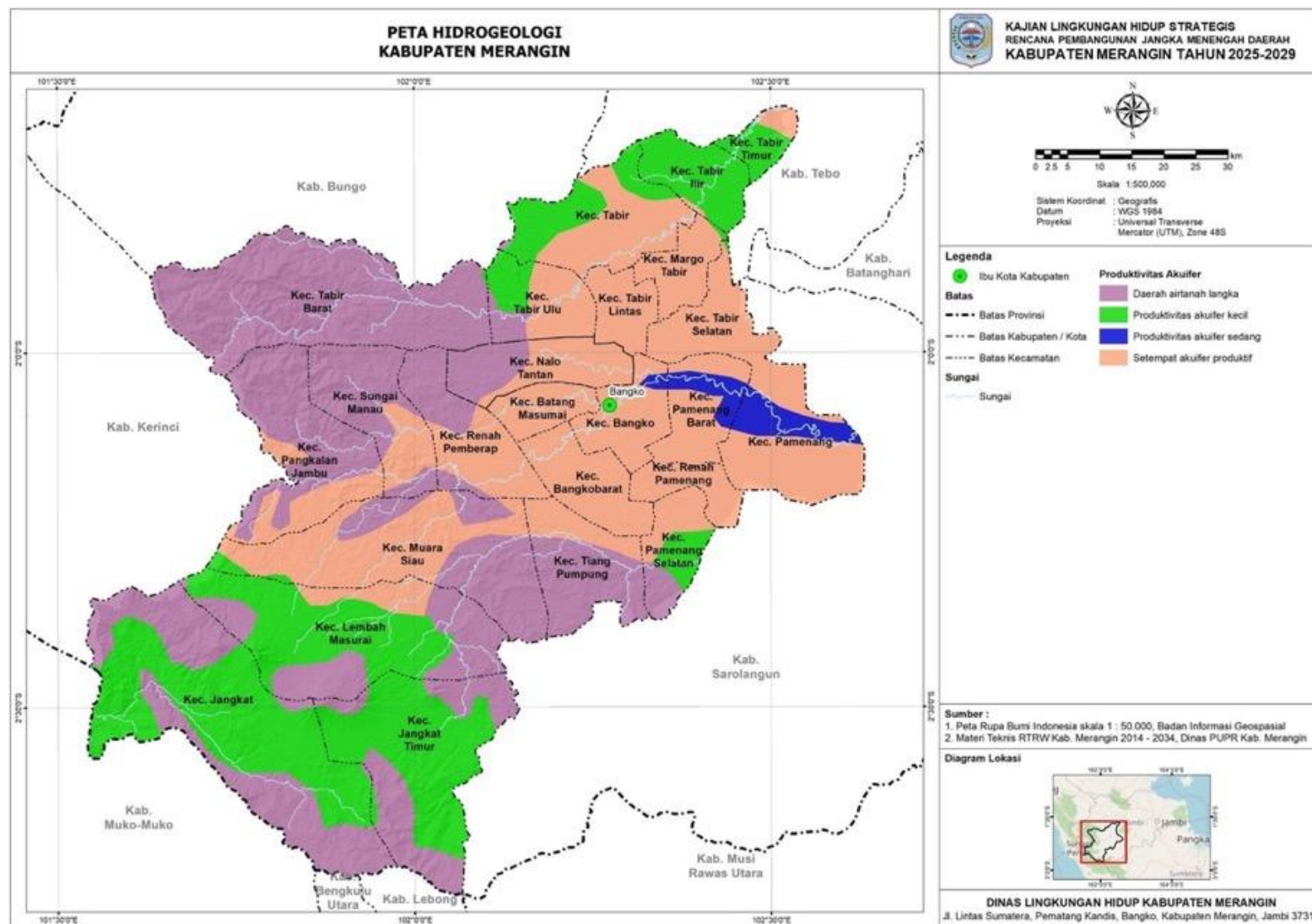
No	Wilayah Kabupaten	Nama CAT	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Area CAT		414.236,76	46,06
	1.1	CAT Bangko-Sarolangun	365.477,66	51,50
	1.2	CAT Muara Bungo	8.261,20	1,08
	1.3	CAT Painan-Lubuk pinang	10.500,56	1,37
2	Bukan Area CAT		353.660,21	46,06
Jumlah			1.152.136,39	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034

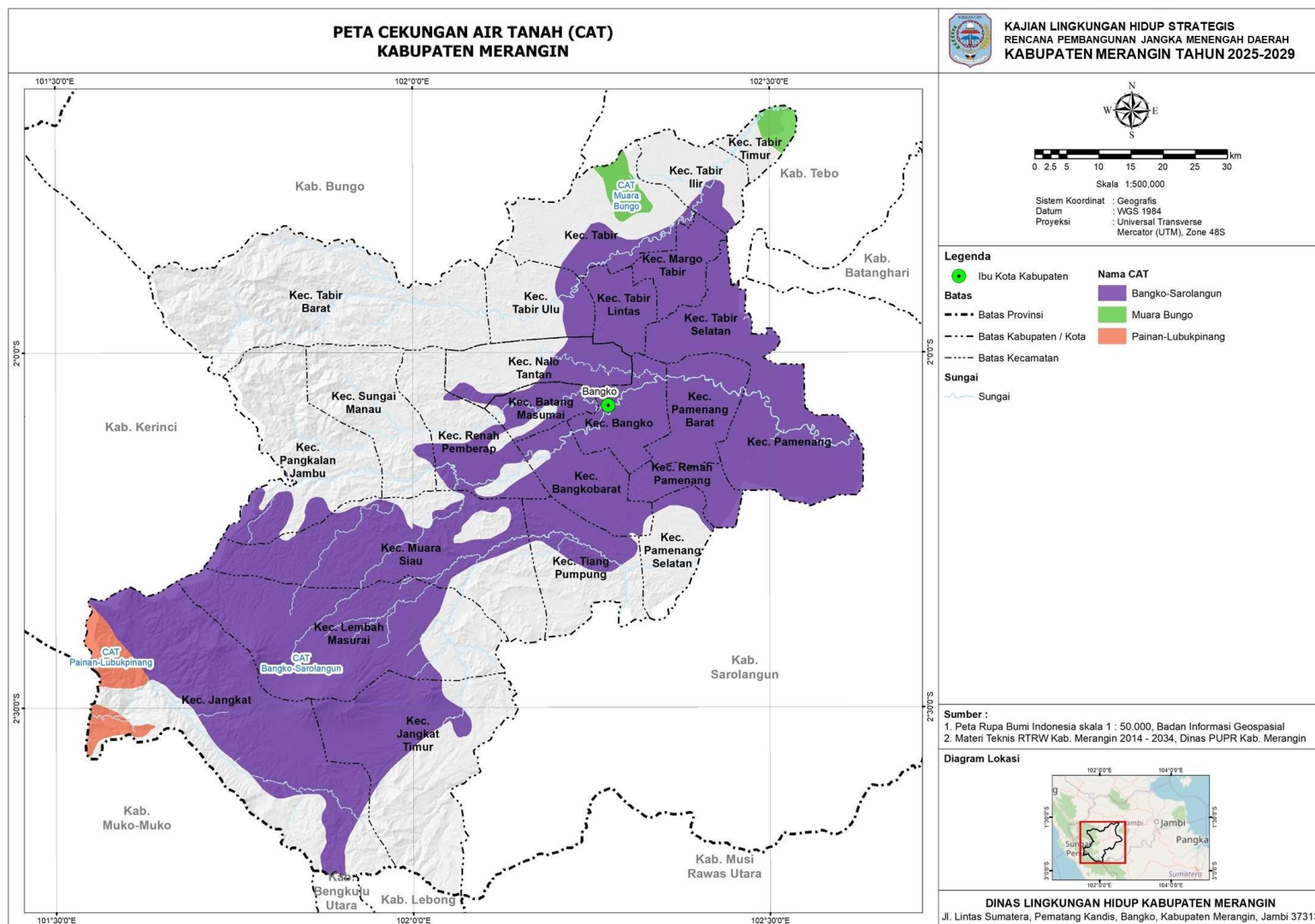
Peta wilayah CAT Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Merangin



Gambar 2.6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Merangin



Gambar 2.7 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Merangin



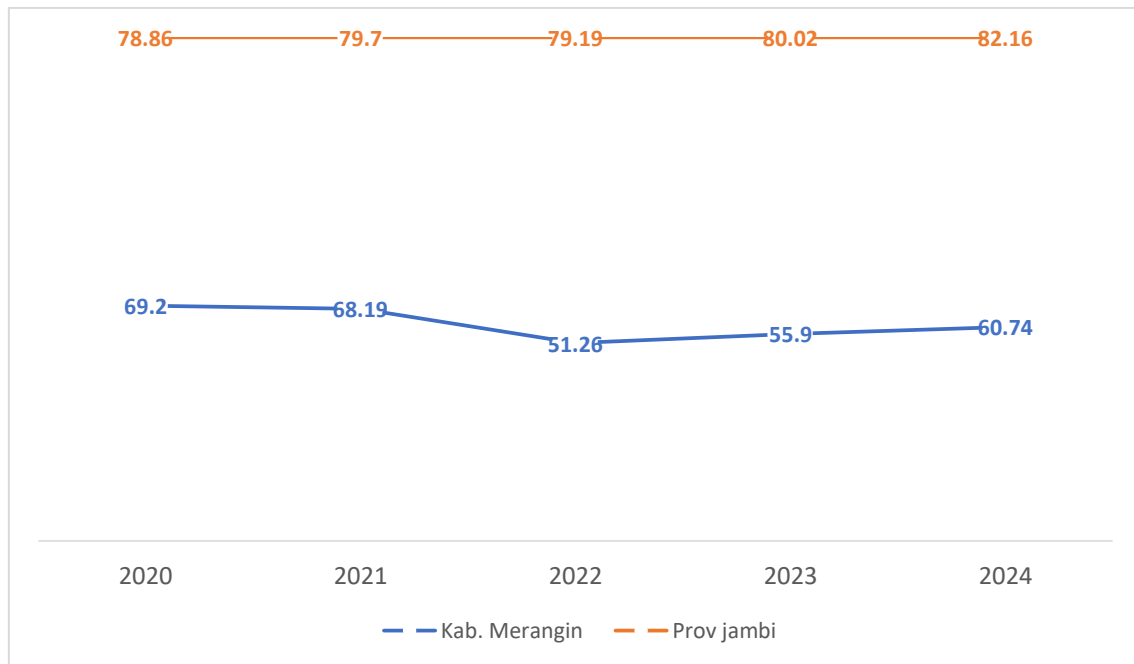
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak merupakan indikator krusial dalam menilai kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air minum yang aman dan dapat diakses dengan mudah berpengaruh langsung terhadap kesehatan, produktivitas, serta kualitas hidup penduduk. Air minum yang layak berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan penyakit kulit, serta mendukung tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu.

Selain sebagai kebutuhan dasar manusia, akses terhadap air minum layak juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi dan komitmen pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 tentang "air bersih dan sanitasi" dan SDG 3 tentang "kehidupan sehat dan sejahtera". Capaian akses air minum layak mencerminkan tingkat kepedulian dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam menjamin kesehatan lingkungan dan kesetaraan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.

Tingginya capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, sementara capaian yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan, intervensi infrastruktur, dan peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air di daerah.



Grafik 2.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Merangin 2020-2024

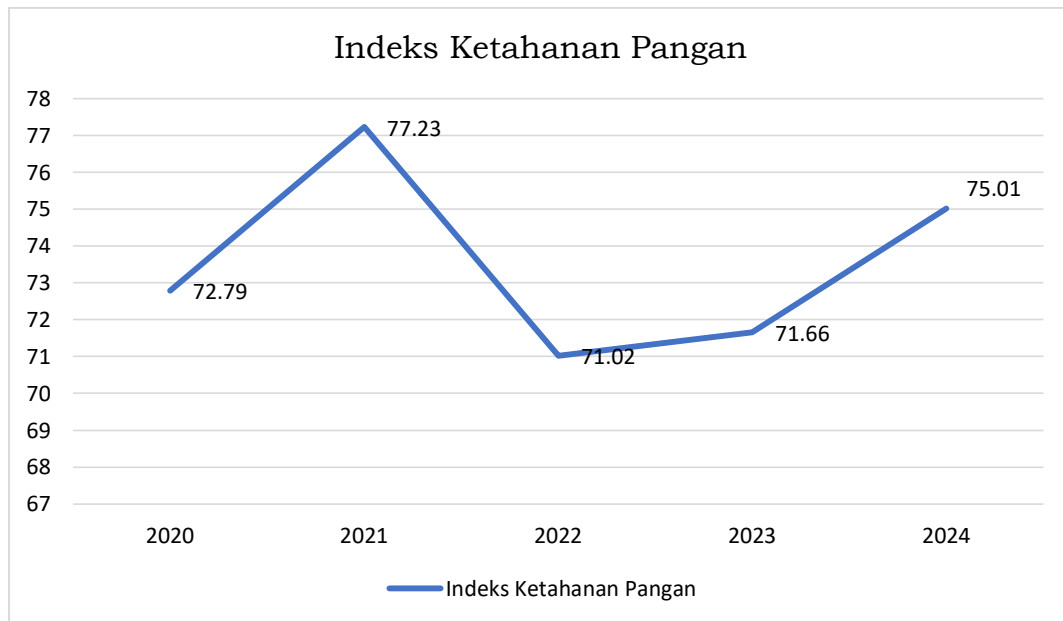
Sumber: Provinsi Jambi dalam angka 2025

Berdasarkan data di atas, Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya, dimulai dari 78,86% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 82,16% pada tahun 2024. Sebaliknya, Kabupaten Merangin mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan drastis pada tahun 2022, dari 69,2% pada tahun 2020 menjadi 51,26%, sebelum akhirnya sedikit meningkat menjadi 60,74% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan di kedua wilayah, Kabupaten Merangin memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak bagi warganya. Kondisi capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun Provinsi Jambi secara keseluruhan mengalami kemajuan dalam penyediaan air minum layak, Kabupaten Merangin masih menghadapi tantangan besar, yang perlu segera diatasi untuk memastikan pemerataan akses air minum layak di seluruh daerah.

2.1.4.2 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan pangan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami tingkat akses dan ketersediaan pangan, stabilitas pangan, serta pemanfaatan pangan yang cukup dan berkualitas sebuah daerah.

Tujuan utama dari parameter ini adalah untuk membantu merencanakan, mengawasi, dan mengembangkan kebijakan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ditopang melalui beberapa komposit seperti, akses pangan, ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan, dan pemanfaatan pangan yang terdapat di suatu daerah. Berikut merupakan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Merangin.



Grafik 2.3 Indeks Ketahanan Pangan

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Berdasarkan data pada grafik yang di atas, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks ketahanan pangan tercatat sebesar 72,79 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 mencapai 77,23. Namun, pada tahun 2022, indeks ketahanan pangan mengalami penurunan menjadi 71,02, yang menunjukkan tantangan dalam menjaga ketahanan pangan pada periode tersebut. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022, indeks ketahanan pangan kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2023, dengan angka mencapai 71,66. Pada tahun 2024, angka ini kembali meningkat menjadi 75,01, menggambarkan tren positif dalam upaya memperbaiki ketahanan pangan di wilayah ini.

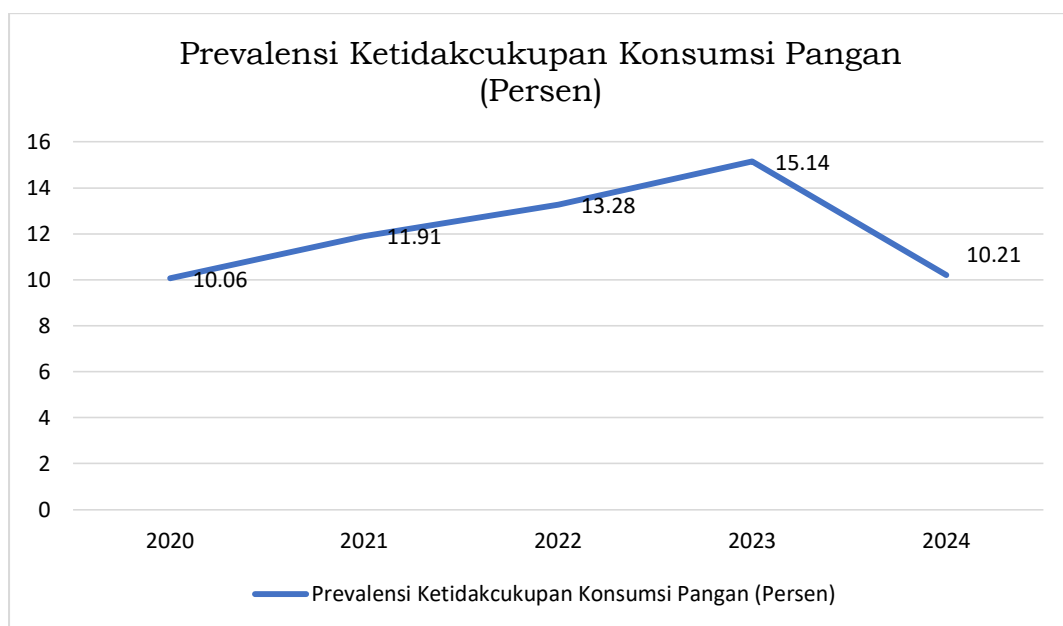
Fluktuasi ini menggambarkan dinamika yang terjadi dalam sistem ketahanan pangan daerah, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan perbaikan yang terus berlanjut pada tahun 2024. Penurunan pada

tahun 2022 mencerminkan beberapa faktor yang memengaruhi kestabilan ketahanan pangan, seperti gangguan distribusi atau ketidakstabilan ekonomi. Namun, tren perbaikan yang terlihat pada tahun 2024 menunjukkan adanya langkah kebijakan yang berhasil dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2022, tren kenaikan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dalam peningkatan ketahanan pangan. Keberlanjutan kebijakan yang mendukung penyediaan pangan yang merata dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa indeks ketahanan pangan tetap stabil atau terus meningkat di masa yang akan datang.

2.1.4.3 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)

PoU/*Prevalence of Undernourishment*/Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Gambaran Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Merangin 2020-2024 adalah sebagai berikut



**Grafik 2.4 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)
Kabupaten Merangin 2020-2024**

Sumber: BPS 2025

Berdasarkan data di atas, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tercatat sebesar 10,06%, dan



mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai 15,14% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, prevalensi ini mengalami penurunan kembali menjadi 10,21%.

Fluktuasi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan yang memadai bagi masyarakat. Kenaikan prevalensi yang signifikan pada tahun 2023 mencerminkan faktor-faktor eksternal atau gangguan dalam sistem ketahanan pangan yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Penurunan prevalensi pada tahun 2024 memberikan harapan bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil mulai menunjukkan hasil dalam mengurangi masalah ketidakcukupan konsumsi pangan di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2023, tren penurunan pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan pangan yang lebih merata dan mencukupi bagi masyarakat. Keberlanjutan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan distribusi yang lebih efisien akan sangat penting untuk memastikan bahwa angka prevalensi ini terus menurun di masa yang akan datang, serta mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merangin.

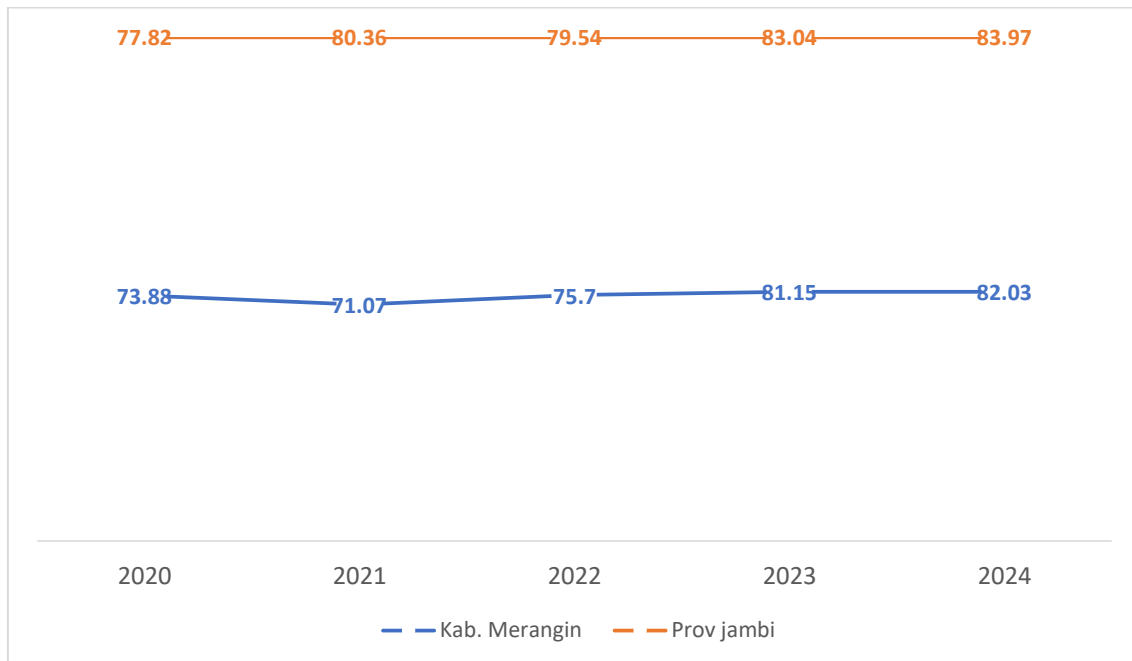
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap sanitasi layak mencerminkan sejauh mana suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang berpengaruh langsung pada penurunan risiko penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Sanitasi yang layak juga merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, mengurangi penyebaran penyakit berbasis sanitasi, serta mencegah pencemaran sumber daya air.

Selain itu, akses terhadap sanitasi layak juga merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar manusia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal kesehatan yang baik dan kesejahteraan (SDG 3) serta air bersih dan sanitasi (SDG 6). Kondisi ini

menunjukkan tingkat keberlanjutan dan efektivitas program pembangunan yang dijalankan di suatu daerah, serta seberapa besar perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.



Grafik 2.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Merangin 2020-2024

Sumber: Provinsi Jambi dalam angka 2025

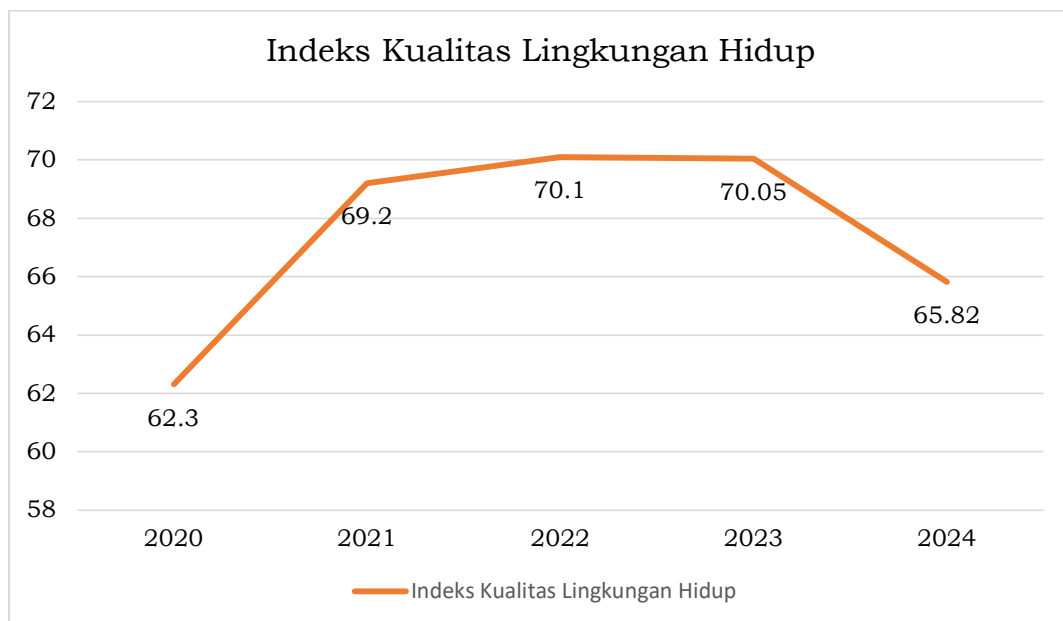
Berdasarkan data di atas, Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil dalam hal persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dimulai dari 77,82% pada tahun 2020, angka ini terus meningkat hingga mencapai 83,97% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dari pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas sanitasi di wilayahnya.

Sementara itu, Kabupaten Merangin juga menunjukkan peningkatan, meskipun dengan tren yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak berada di angka 73,88%, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 71,07%. Namun, kondisi ini membaik pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 82,03% pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam upaya penyediaan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Merangin, terutama setelah tahun 2021.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Merangin sempat mengalami penurunan, upaya yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir cukup berhasil mengejar ketertinggalan. Namun demikian, dibandingkan dengan Provinsi Jambi secara keseluruhan, Kabupaten Merangin masih menunjukkan adanya ketimpangan akses pada beberapa tahun, yang mengindikasikan perlunya perhatian khusus dan intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk menjamin akses sanitasi layak yang merata bagi seluruh masyarakat..

2.1.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang krusial. Kinerja pelaksanaan urusan lingkungan hidup dianalisis melalui perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dengan membagi bobot komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berikut merupakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Merangin.



Grafik 2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Merangin berada di angka 62,3 atau masuk dalam kategori "Kurang". Pada tahun 2021 meningkat secara drastis

di angka 69,2 atau meningkat sebesar 6,9 Poin dan berhasil memperbaiki kategori yang diraih dengan masuk kategori "Cukup", dan pada tahun selanjutnya atau pada tahun 2022 mengalami kenaikan tipis dengan menembus angka 70,1 dan pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan dengan meraih angka 70,05 dan 65,82 serta masih masuk dalam kategori "Cukup". Dapat disimpulkan bahwa Indeks Lingkungan Hidup Merangin mengalami kenaikan cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Penyebab fluktuasi capaian IKLH Merangin adalah:

1. Upaya Pengendalian Pencemaran Udara dengan melakukan pengelolaan industri dan membuka ruang terbuka hijau sesuai dengan dokumen RTRW.
2. Terjadinya pencemaran air di sekitar sungai Batang Merangin disebabkan oleh penambangan tanpa izin.
3. Belum optimalnya pencegahan pembuangan sampah ke sungai.
4. Menjaga area *Geopark* Merangin Jambi sebagai wilayah yang dilindungi dan dilestarikan karena dalam area tersebut terdapat beberapa unsur Lingkungan Hidup.
5. Belum Optimalnya upaya pengendalian dan penanganan sampah lokal.

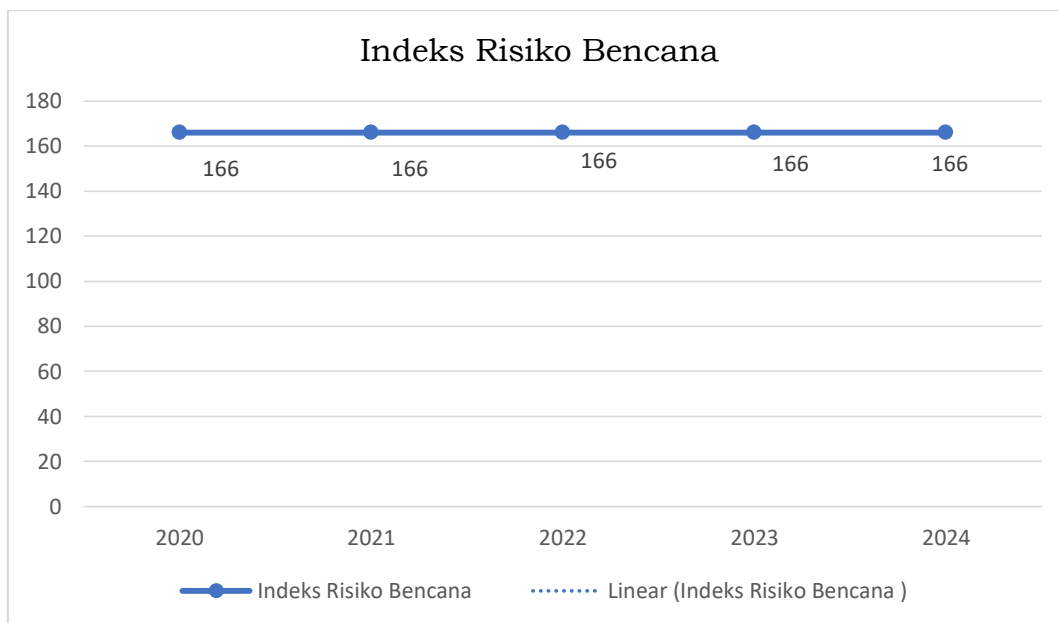
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1 Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Merangin memiliki beberapa kawasan yang berpotensi rawan bencana, seperti gempa, longsor dan banjir. Lokasi terutama rawan gempa dan longsor berada di sekitar jalur sesar dengan kemiringan lahan >40%, utamanya di sekitar kawasan pegunungan Taman Nasional Kerinci Seblat yang termasuk dalam jalur sesar gempa. Wilayah titik sesar gempa lain yang berada di Kabupaten Merangin antara lain, di sekitar Kecamatan Tabir Barat, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Renah Pembarap, Muara Siau, Tiang Pungpung, Lembah Masurai, Jangkat, dan Sungai Tenang dan di sekitar punggung bukit dan tebing. Di wilayah sekitar Kecamatan Lembah Masurai Jangkat dan Sungai Tenang sebelumnya pernah terjadi gempa bumi. Untuk wilayah dengan potensi banjir terdapat di sepanjang bantaran sungai dan wilayah dataran rendah, terutama di Tabir, Tabir Ilir, Nalo Tantan, Pamenang, dan sekitarnya.

Kerawanan bencana diukur dengan menggunakan Indeks Risiko Bencana. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau potensi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam atau bencana lainnya. Indeks risiko bencana dapat mencakup berbagai faktor, seperti geografi, iklim, infrastruktur, tingkat kesiapan Masyarakat (kepemimpinan dan kapasitas; sosial dan ekonomi) serta faktor lingkungan.

Berikut merupakan perbandingan dari Indeks Risiko Bencana Kabupaten Merangin.



Grafik 2.7 Indeks Risiko Bencana

Sumber: BNPB 2025

Berdasarkan dengan grafik di atas bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Merangin konsisten berada di angka 166, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Merangin relatif stabil dalam urusan kebencanaan.

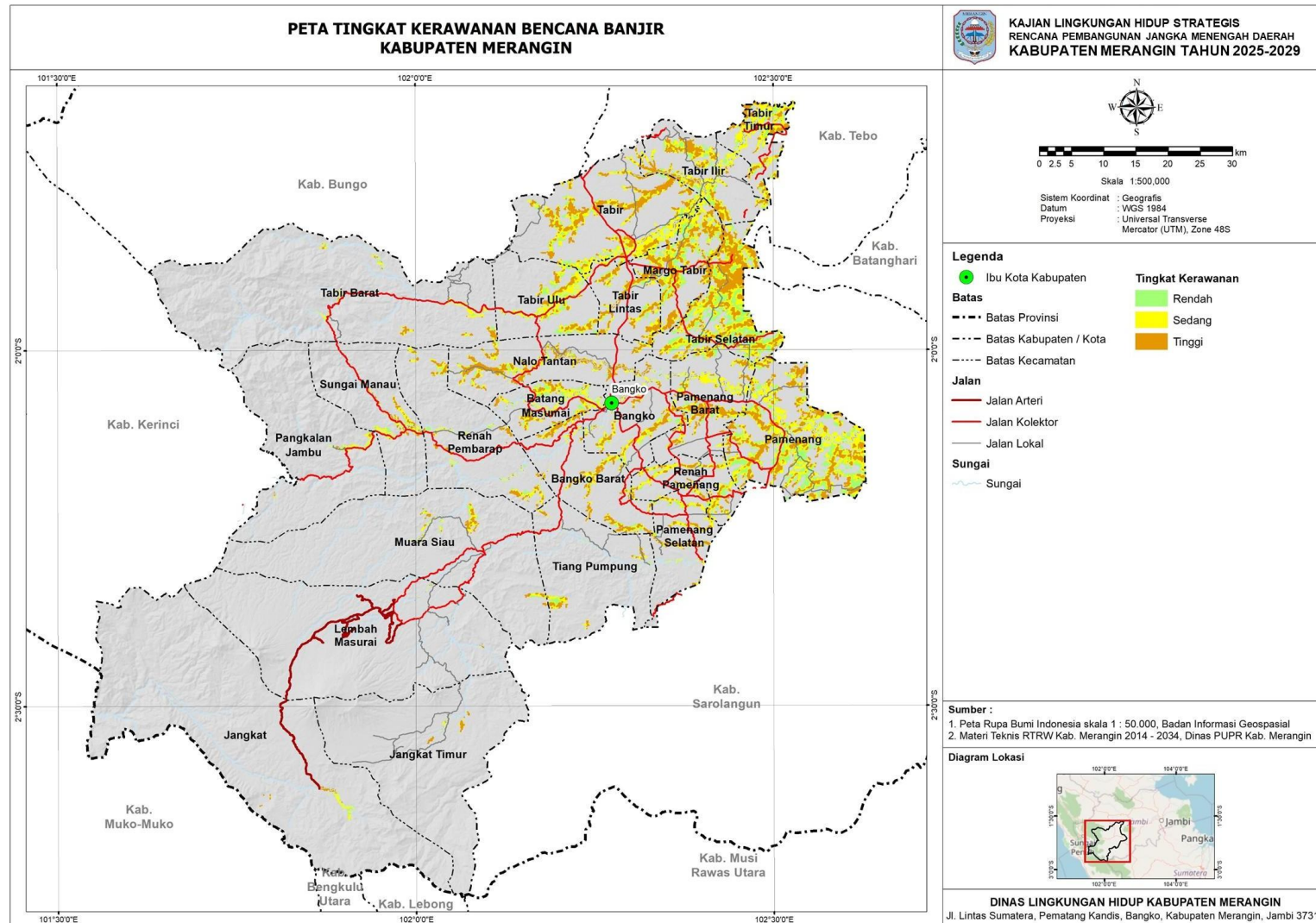
Pemerintah Kabupaten Merangin perlu melakukan antisipasi apabila di kemudian hari terjadi bencana tidak terduga baik bencana alam ataupun bencana sosial sehingga tidak mengurangi kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin akan terjadi ke depannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam menurunkan angka indeks risiko bencana yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Merangin. Elemen kunci yang menjadi perhatian dalam menurunkan indeks risiko bencana adalah kerentanan (*vulnerability*), Eksposur (*Exposure*), Kapasitas (*Capacity*),



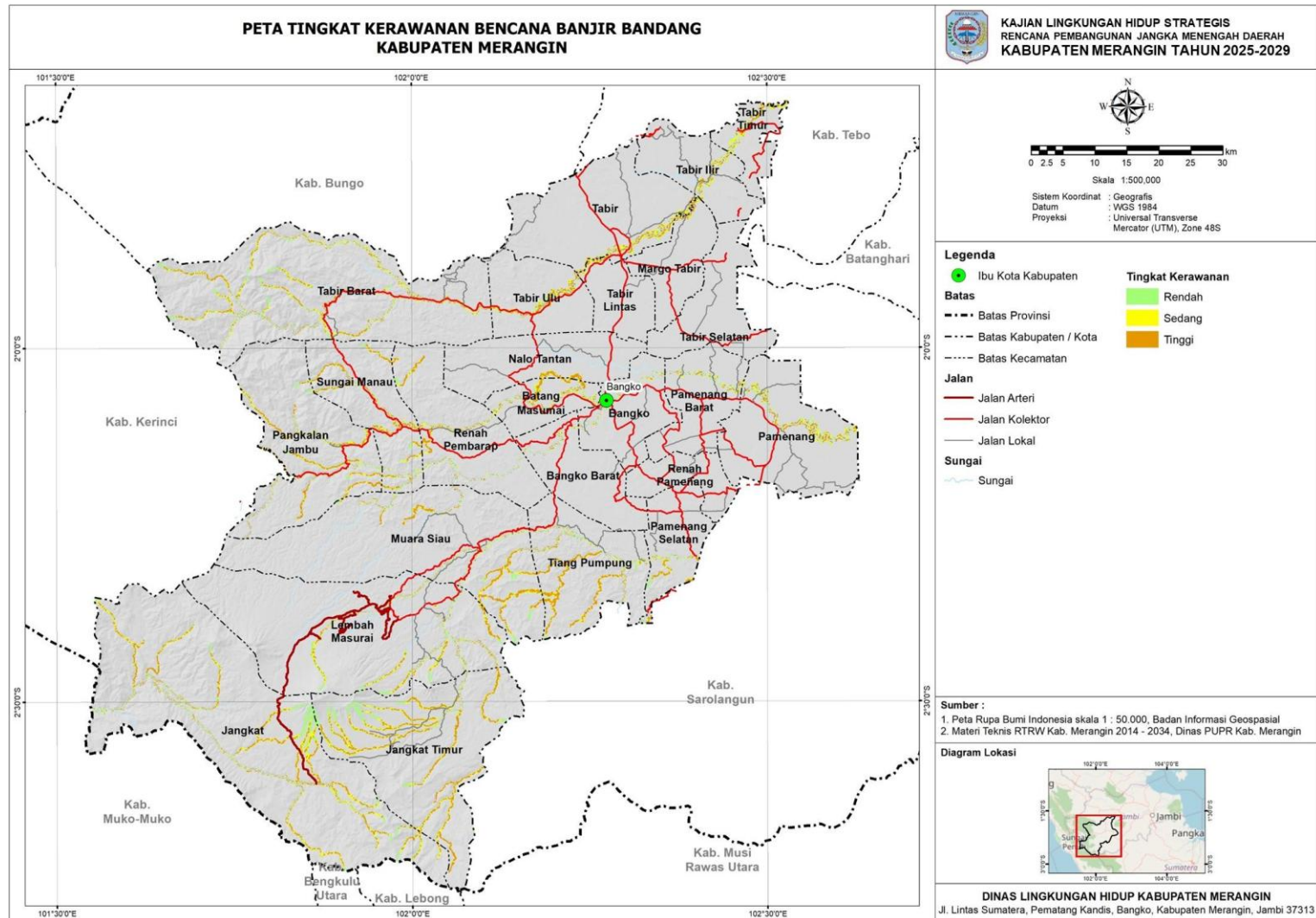
Resiliensi (*Resilience*) dan Ancaman atau Bahaya (*Hazard*). Beberapa faktor kunci tersebut dapat diintervensi lebih jauh oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan angka indeks risiko bencana di Kabupaten Merangin, sehingga masyarakat akan jauh merasa lebih aman dan kemudian dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan optimal.

2.1.6.1 Tingkat Kerawanan Bencana Alam

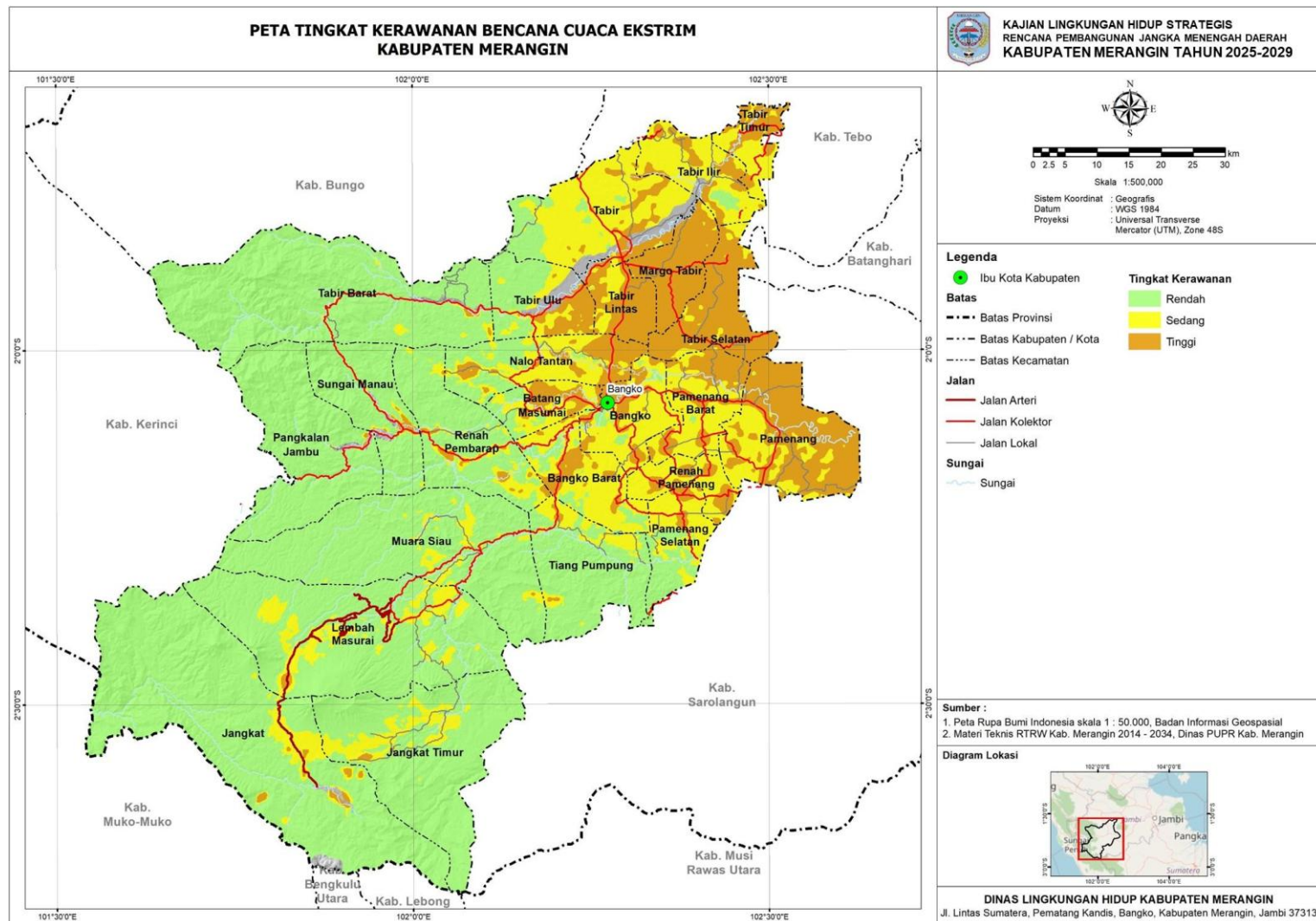
Tingkat kerawanan bencana alam di Kabupaten Merangin tersaji dalam beberapa peta rawan bencana sebagai berikut:



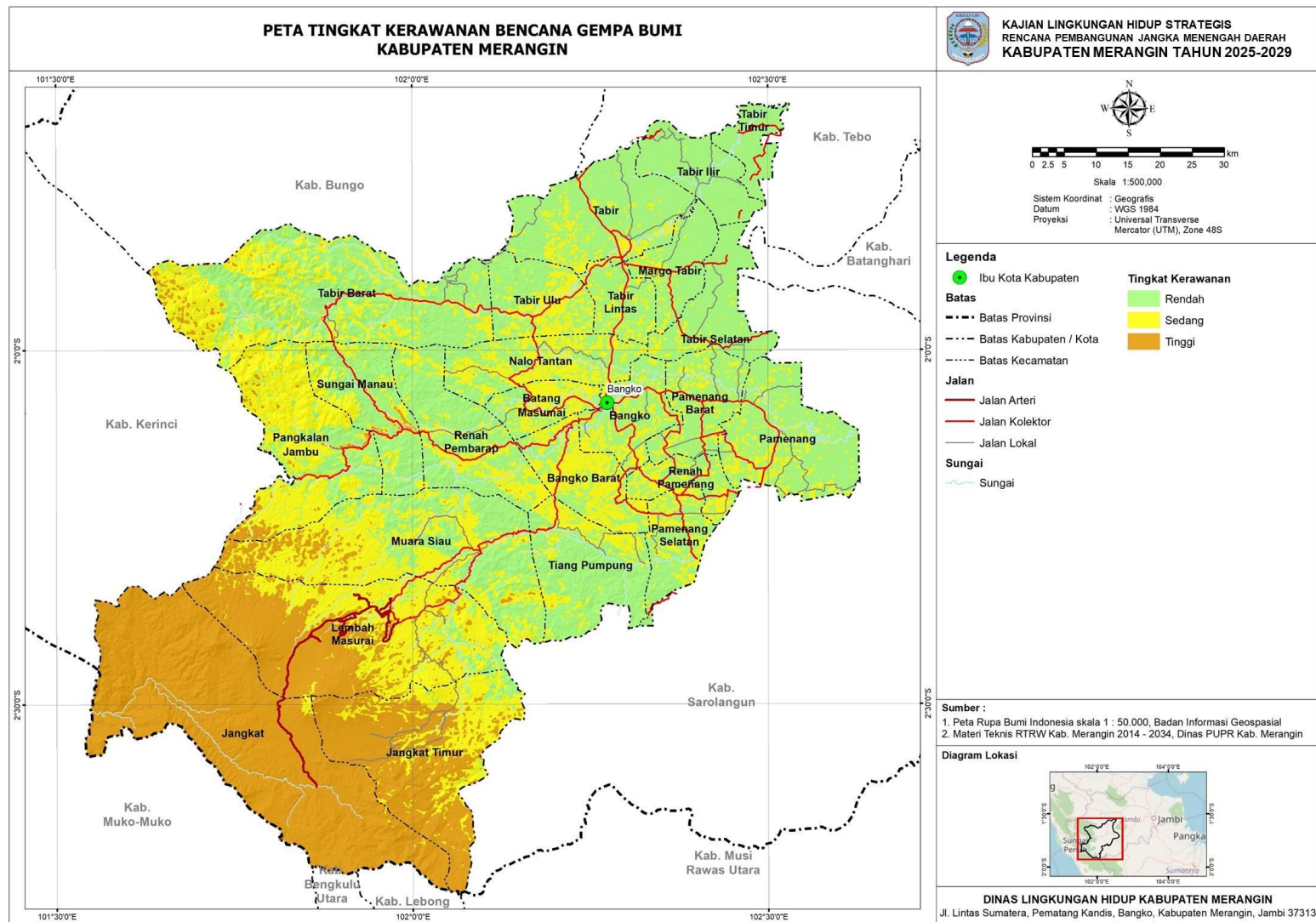
Gambar 2.8 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Merangin



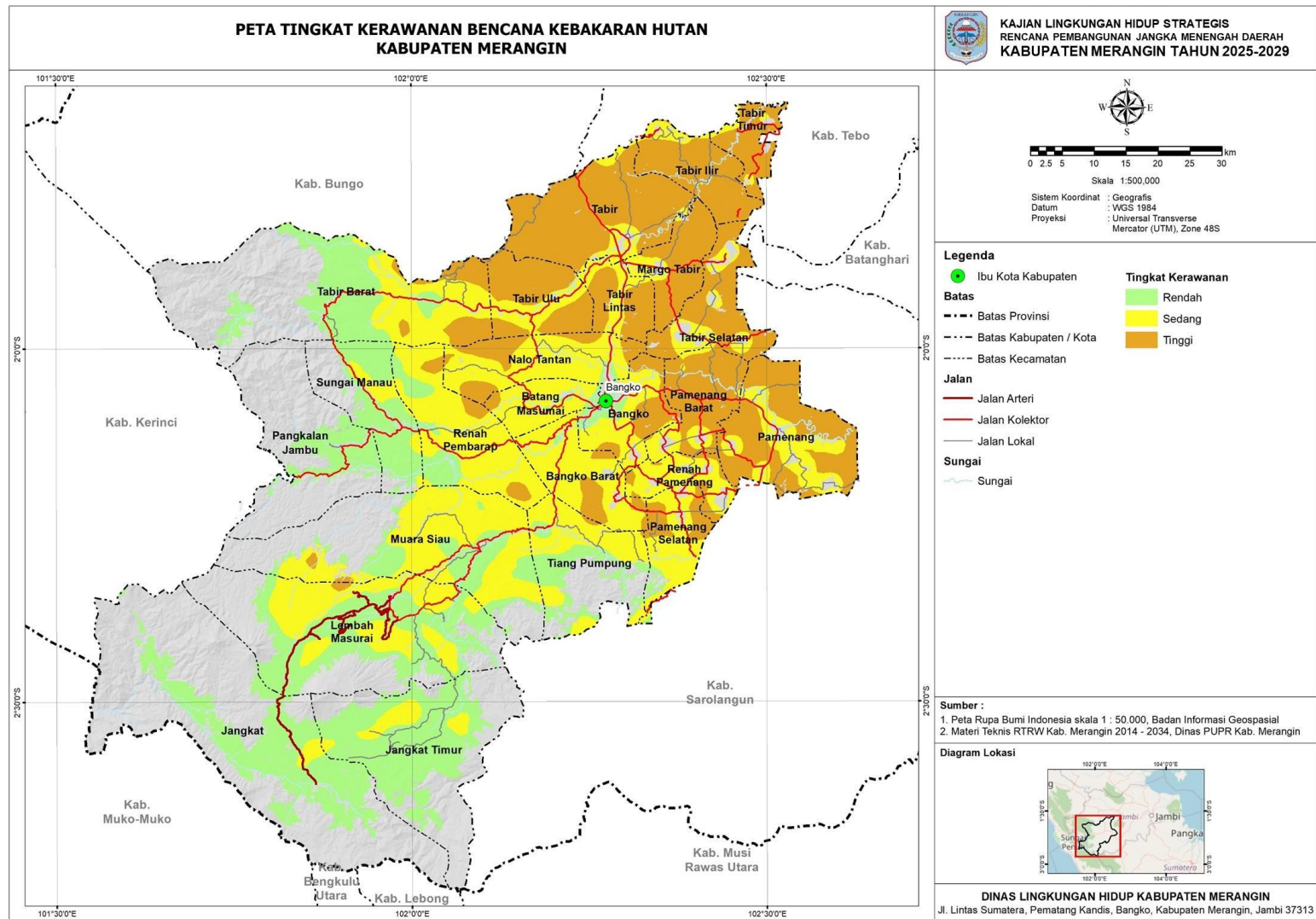
Gambar 2.9 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Merangin



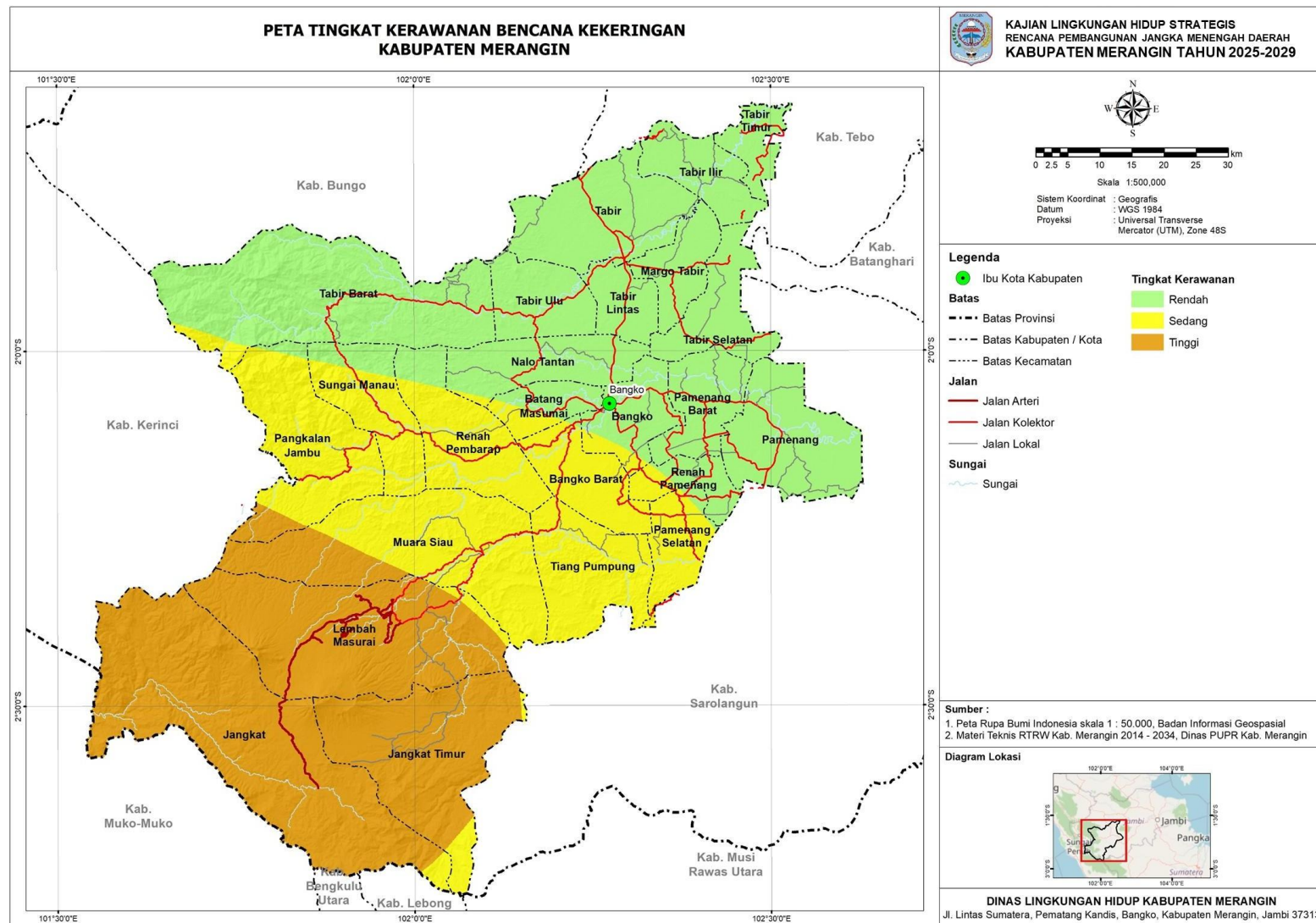
Gambar 2.10 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Merangin



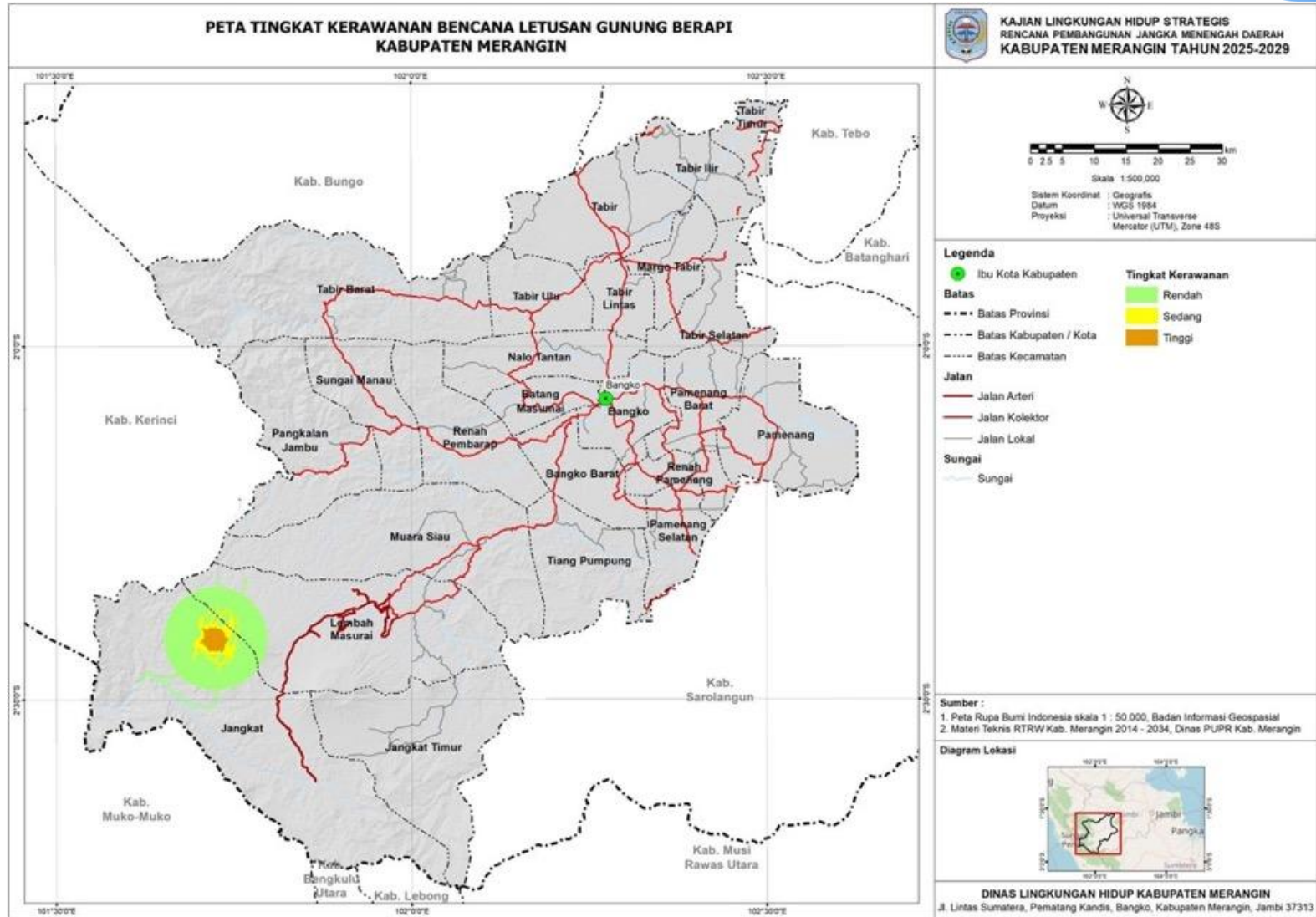
Gambar 2.11 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Merangin



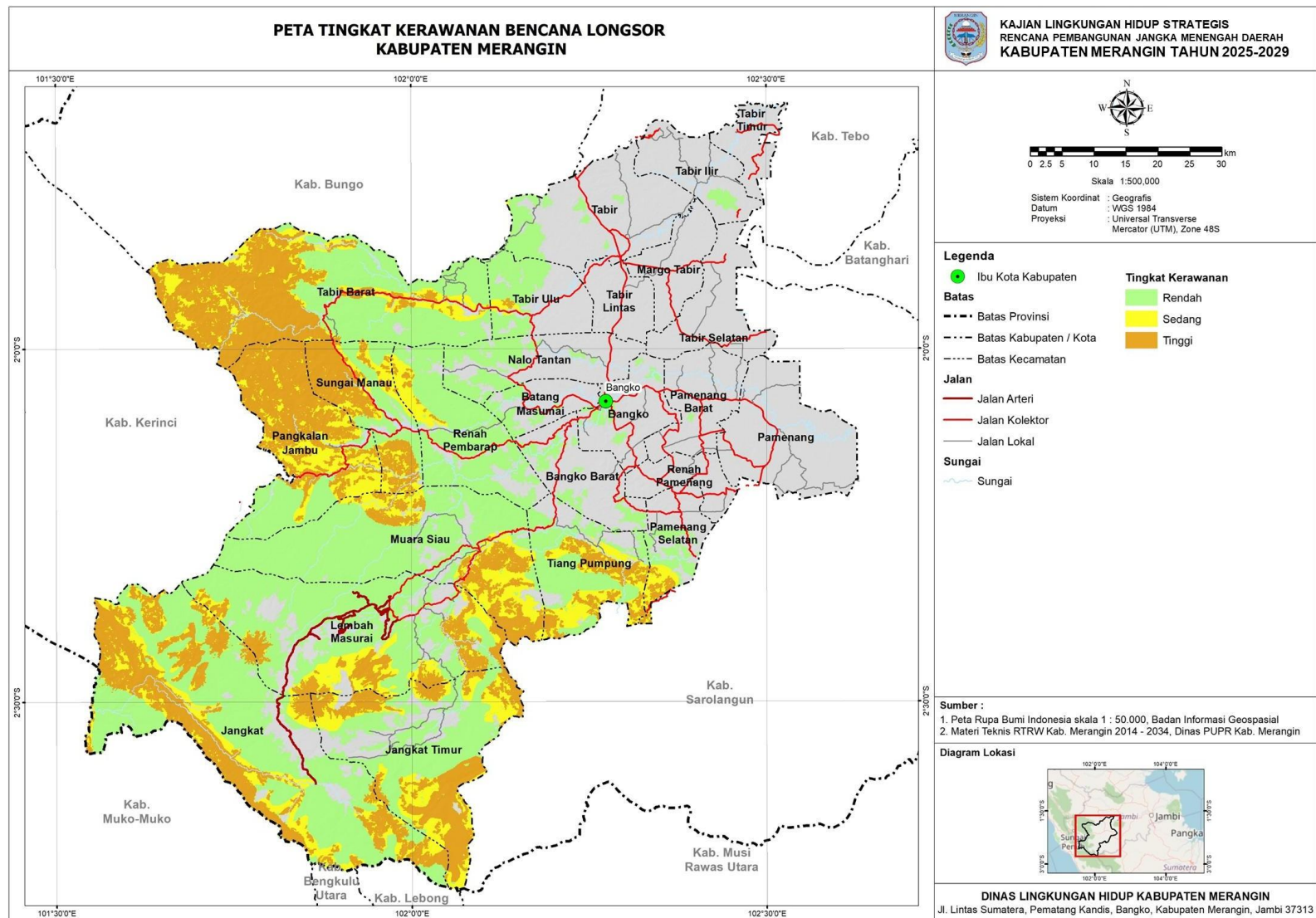
Gambar 2.12 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Merangin



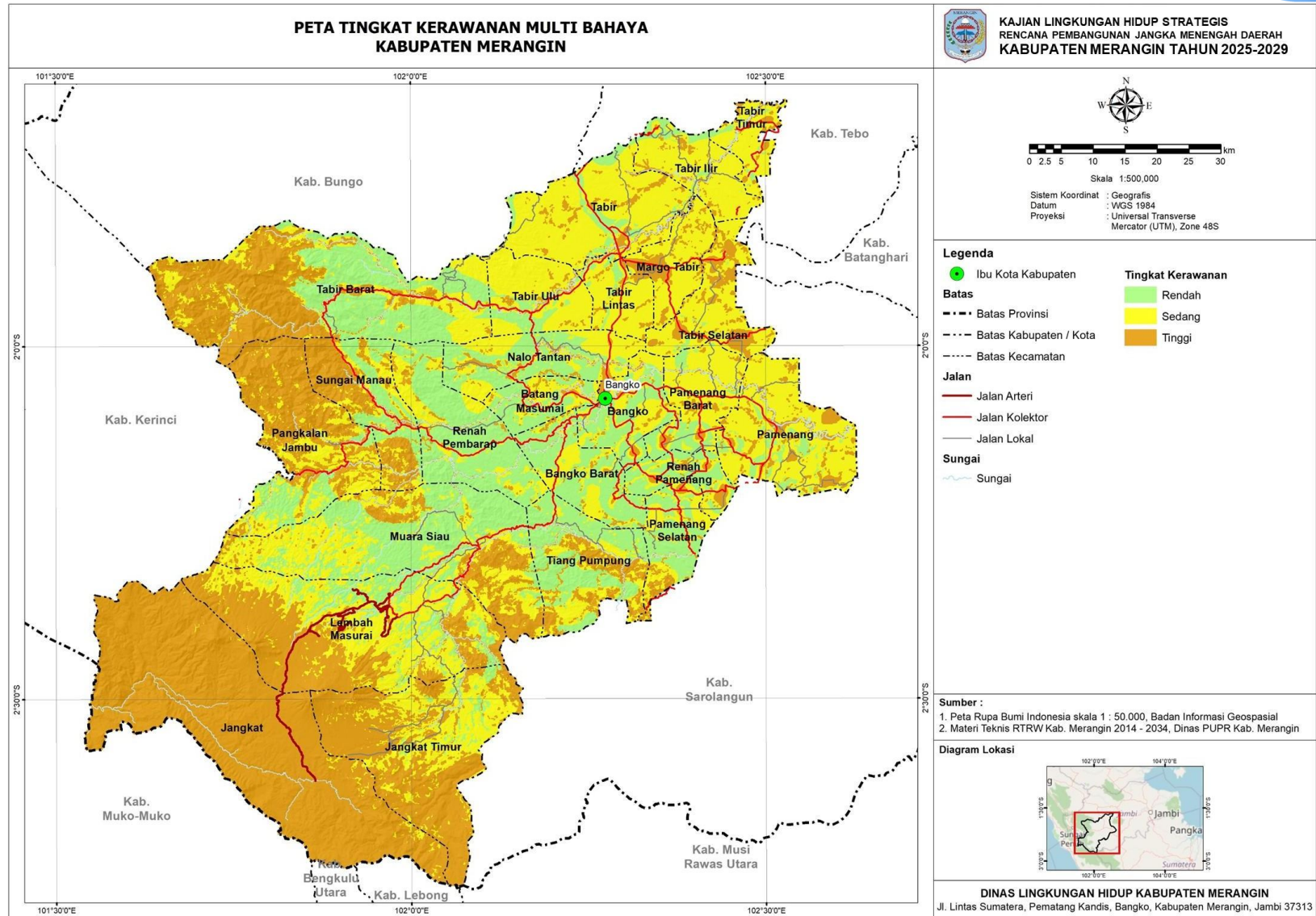
Gambar 2.13 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Merangin



Gambar 2.14 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Letusan Gunung Berapi di Kabupaten Merangin



Gambar 2.15 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Longsor di Kabupaten Merangin



Gambar 2.16 Peta Tingkat Kerawanan Multi Bahaya di Kabupaten Merangin



2.1.7 Aspek Demografi

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Subbab demografi menjadi bagian penting dalam proses pembangunan suatu daerah karena mendeskripsikan jumlah, struktur dan distribusi penduduk dalam kurun waktu tertentu. Adapun penyajian data demografi Kabupaten Merangin selama lima tahun terakhir dijabarkan sebagai berikut.

2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggal di suatu wilayah. Data jumlah penduduk di suatu wilayah akan terus berubah setiap waktunya. Berikut jumlah penduduk di Kabupaten Merangin tahun 2020-2024.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Merangin

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jangkat	9.420	9.436	9.457	9.712	9.813
2	Jangkat Timur	9.409	9.417	9.429	9.674	9.767
3	Muara Siau	10.063	10.103	10.147	10.444	10.576
4	Lembah Masurai	13.875	13.828	13.787	14.341	14.503
5	Tiang Pumpung	4.684	4.678	4.673	4.784	4.819
6	Pamenang	33.476	33.679	33.899	34.962	35.479
7	Pamenang Barat	17.294	17.393	17.501	18.044	18.306
8	Renah Pamenang	14.416	14.465	14.521	14.936	15.117
9	Pamenang Selatan	10.430	10.477	10.529	10.842	10.986
10	Bangko	48.857	49.023	49.211	50.619	51.229
11	Bangko Barat	10.985	10.985	10.990	11.266	11.364
12	Nalo Tantan	16.988	17.556	18.152	19.010	19.741
13	Batang Masumai	10.702	10.782	10.869	11.225	11.408
14	Sungai Manau	10.216	10.245	10.279	10.567	10.690
15	Renah Pembarap	12.987	13.083	13.185	13.616	13.835
16	Pangkalan Jambu	6.409	6.414	6.421	6.587	6.649
17	Tabir	28.594	28.594	28.608	29.327	29.583
18	Tabir Ulu	8.144	8.116	8.093	8.283	8.331
19	Tabir Selatan	29.313	29.511	29.724	30.677	31.153
20	Tabir Ilir	8.861	8.831	8.805	9.009	9.061
21	Tabir Timur	7.908	7.934	7.964	8.190	8.289
22	Tabir Lintas	8.112	8.159	8.211	8.466	8.589
23	Margo Tabir	13.604	13.624	13.649	14.012	14.154
24	Tabir Barat	9.305	9.386	9.473	9.796	9.967
MERANGIN		354.052	355.719	357.577	368.389	373.409

Sumber: BPS Kabupaten Merangin, 2025



Grafik 2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Merangin 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Merangin, 2025

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Merangin pada tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Merangin adalah sebesar 0,61. Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan terendah berada pada tahun 2021 dengan angka 0,35, namun angka ini kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 (0,52) dan puncaknya pada tahun 2023 dan 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk di angka 1,4 dan 1,43 Laju pertumbuhan Kabupaten Merangin tetap terbilang cukup rendah dan sejalan dengan angka nasional yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor Alami:

- **Tingkat Kelahiran (Natalitas) Tinggi:**
 - **Faktor budaya:** Nilai-nilai budaya yang mendorong pernikahan dini dan banyak anak.
 - **Kurangnya akses pendidikan:** Kurangnya pengetahuan tentang Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
 - **Kondisi ekonomi:** Kemiskinan yang mendorong orang tua memiliki banyak anak sebagai angkatan kerja tambahan.



- **Faktor agama:** Interpretasi agama yang mendorong memiliki banyak anak.
- **Tingkat Kematian (Mortalitas) Rendah:**
 - **Kemajuan di bidang kesehatan:** Peningkatan layanan kesehatan dan gizi yang menurunkan angka kematian bayi dan anak.
 - **Perbaikan sanitasi:** Akses yang lebih baik ke air bersih dan sanitasi yang mengurangi penyebaran penyakit menular.

2. Faktor Nonalami:

- **Migrasi:**
 - **Urbanisasi:** Perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik.
 - **Imigrasi:** Perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.

2.1.2.2 Rasio Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat menggambarkan perubahan-perubahan fertilitas, mortalitas dan migrasi. Ukuran paling lazim yang dipakai untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Rasio jenis kelamin menggambarkan banyaknya penduduk laki-laki tiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.11 Rasio Penduduk Kabupaten Merangin

Tahun	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
2020	180.357	173.695	354.052	103,8
2021	181.056	174.663	355.719	103,7
2022	181.850	175.727	357.577	103,5
2023	187.026	181.363	368.389	103,1
2024	189.365	184.044	373.409	102,9

Sumber: BPS Kabupaten Merangin, 2025

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Merangin pada Tahun 2024 adalah 102,9 artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Merangin setiap tahun selama periode 2020-2024 menunjukkan angka di atas 100. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tersebut proporsi penduduk



laki-laki lebih tinggi dibandingkan proporsi penduduk perempuan. Rasio Jenis kelamin Merangin dari tahun 2020-2024 juga memiliki angka yang cenderung stabil. Rasio penduduk laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan memiliki berbagai dampak kompleks yang perlu dikaji dan diatasi secara komprehensif. Upaya untuk mencapai keseimbangan gender dan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi swadaya masyarakat.

2.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Perkembangan Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk Kabupaten Merangin 2020-2024

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km)
1	2020	354.052	46,11
2	2021	355.719	47,09
3	2022	357.577	47,03
4	2023	368.389	48,86
5	2024	373.409	49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin Tahun 2025

Jika dilihat dari tabel di atas, dengan bertambah jumlah penduduk di Kabupaten Merangin mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2020-2024 tingkat kepadatan Merangin cenderung mengalami angka yang fluktuatif. Jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Merangin yang mencapai 7.540,13 Km², kategori kepadatan penduduk Merangin berdasarkan dengan peraturan adalah masuk dalam kategori "tidak padat". Merangin dengan kategori wilayah yang tidak padat dapat meningkatkan potensi yang dimiliki. Adapun potensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Ruang untuk Pertumbuhan:** Wilayah dengan kepadatan rendah sering memiliki banyak ruang kosong atau lahan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini memberikan kesempatan untuk pengembangan



infrastruktur baru, seperti pemukiman, industri, atau pariwisata, tanpa terlalu banyak tekanan atas ruang terbatas.

- 2. Kualitas Hidup yang Lebih Baik:** Kepadatan penduduk yang rendah sering berarti lingkungan yang lebih tenang, lebih sedikit polusi udara dan suara, serta tekanan sosial yang lebih rendah. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal.
- 3. Pengembangan Pariwisata:** Wilayah dengan kepadatan rendah sering kali memiliki keindahan alam yang masih utuh atau potensi atraksi pariwisata lainnya. Hal ini dapat menjadi basis untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan pendapatan tambahan bagi komunitas lokal.
- 4. Pertanian dan Pertanian Organik:** Lahan yang luas dan minim polusi di wilayah dengan kepadatan rendah mendukung pertanian dan peternakan yang berkelanjutan. Hal ini dapat mempromosikan produksi pangan organik dan menarik minat para petani untuk berinvestasi.
- 5. Keterhubungan dengan Alam:** Wilayah dengan kepadatan rendah sering memiliki akses yang lebih baik ke alam dan ekosistem yang beragam. Hal ini dapat mendukung aktivitas rekreasi luar ruangan, konservasi alam, dan pendekatan ekowisata.
- 6. Kesempatan Kerja Baru:** Dengan pengembangan infrastruktur dan sektor pariwisata yang lebih baik, wilayah dengan kepadatan rendah dapat menciptakan kesempatan kerja baru untuk penduduk lokal, termasuk dalam sektor pariwisata, pertanian, dan industri terkait.

Meskipun memiliki potensi, pengembangan wilayah dengan kepadatan penduduk rendah juga harus memperhatikan tantangan, seperti akses terhadap layanan publik, transportasi, dan infrastruktur yang mungkin kurang dikembangkan. Oleh karena itu, pendekatan yang berkelanjutan dan terencana adalah kunci untuk memanfaatkan potensi positif dari kepadatan penduduk yang rendah.

2.1.2.4 Penduduk Disabilitas

Penduduk disabilitas adalah data kependudukan Kabupaten Merangin yang masyarakatnya memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang ketika berinteraksi dengan lingkungan, mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat, sama seperti warga negara lainnya. Istilah ini

mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk beraktivitas dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.12 Penduduk Disabilitas Kabupaten Merangin 2023-2024

No	Kelompok	2023			2024		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	52	28	80	50	26	76
2	Disabilitas Tuna Netra / Buta	30	21	51	29	20	49
3	Disabilitas Tuna Rungu / Wicara	82	55	137	82	63	145
4	Disabilitas Mental / Jiwa	112	65	177	110	71	181
5	Disabilitas Fisik dan Mental	22	15	37	18	18	36
6	Disabilitas Lainnya	28	25	53	28	28	56

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Nasional Semester II 2023 dan 2024

2.1.3 Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang berdasarkan data dan tren demografis saat ini. Proyeksi ini dibuat dengan menggunakan berbagai metode statistik dan model matematika yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan demografis lainnya. Berikut adalah data proyeksi penduduk di Kabupaten Merangin dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tabel 2.14 Proyeksi Penduduk Kabupaten Merangin

Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	Jumlah Penduduk				
	Proyeksi Penduduk (ribu jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
368.389	378.357	382.015	386.673	391.331	396.989

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2024

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Merangin pada tahun 2023 dan proyeksi penduduk untuk tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 368.389 jiwa. Proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan jumlah penduduk secara bertahap. Pada tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk akan

mencapai 378.357 jiwa, kemudian meningkat menjadi 382.015 jiwa pada tahun 2026. Pada tahun 2027, jumlah penduduk diproyeksikan akan menjadi 386.673 jiwa, menjadi 391.331 jiwa pada tahun 2028, dan pada tahun 2029 dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 396.989 jiwa.

Tabel 2.15 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029

Luas Wilayah Kabupaten Merangin		Kepadatan Penduduk					
		Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kepadatan Penduduk				
			2025	2026	2027	2028	2029
Km ²	7.540,12	49	50	50	51	52	53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2024

Tabel di atas menyajikan data mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin, dengan luas wilayah sebesar 7.540,12 km². Pada tahun 2023, kondisi kepadatan penduduk tercatat sebesar 49 jiwa per km². Proyeksi kepadatan penduduk untuk tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan bertahap. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk diproyeksikan mencapai 50 jiwa per km². Pada tahun 2027, kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 51 jiwa per km², dan sedikit meningkat menjadi 52 jiwa per km² pada tahun 2028. Dilanjutkan dengan, proyeksi untuk tahun 2029 menunjukkan peningkatan kembali, dengan kepadatan penduduk diperkirakan mencapai 53 jiwa per km².

Tabel 2.16 Proyeksi Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029

Komposisi Umur						
Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
0-14 tahun	95.287	95.628	95.748	95.873	95.910	95.980
15-64 tahun	255.195	261.976	265.207	268.299	271.270	274.100
> 65 tahun	17.907	20.753	22.269	23.833	25.456	27.112
Angka Ketergantungan	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45
Anak-anak	25,87%	25,27%	24,98%	24,71%	24,43%	24,16%
Bonus Demografi	69,27%	69,24%	69,20%	69,15%	69,09%	69,01%
Lansia	4,86%	5,49%	5,81%	6,14%	6,48%	6,83%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada kelompok umur 0-14 tahun, jumlah penduduk tercatat sebanyak 95.287 jiwa pada tahun 2023 dan sedikit meningkat menjadi 95.980 jiwa pada tahun 2029. Sementara itu, kelompok umur 15-64 tahun yang terdiri dari penduduk usia produktif, dimulai dengan 255.195 jiwa pada tahun 2023 dan diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 274.100 jiwa pada tahun 2029. Di sisi lain, jumlah penduduk lanjut usia (>65 tahun) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 17.907 jiwa, dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 27.112 jiwa pada tahun 2029. Angka ketergantungan di tahun 2023 tercatat sebesar 0,44 dan diperkirakan tetap stabil hingga tahun 2026, kemudian sedikit meningkat menjadi 0,45 pada tahun 2027 hingga 2029. Ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi usia produktif tetap dominan, ketergantungan terhadap kelompok usia non-produktif (anak-anak dan lansia) semakin meningkat. Persentase anak-anak pada tahun 2023 adalah 25,87%, namun diperkirakan akan menurun sedikit setiap tahun, menjadi 24,16% pada tahun 2029. Bonus demografi, yang mencerminkan proporsi penduduk usia produktif, sedikit menurun dari 69,27% pada tahun 2023 menjadi 69,01% pada tahun 2029, meskipun tetap menjadi kelompok yang dominan. Adapun persentase lansia meningkat dari 4,86% pada tahun 2023 menjadi 6,83% pada tahun 2029, mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk yang memasuki usia lanjut. Proyeksi ini menunjukkan perlunya perencanaan yang matang terkait kebijakan sosial dan kesehatan, serta bagaimana daerah dapat memanfaatkan potensi bonus demografi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Merangin. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Merangin.



2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

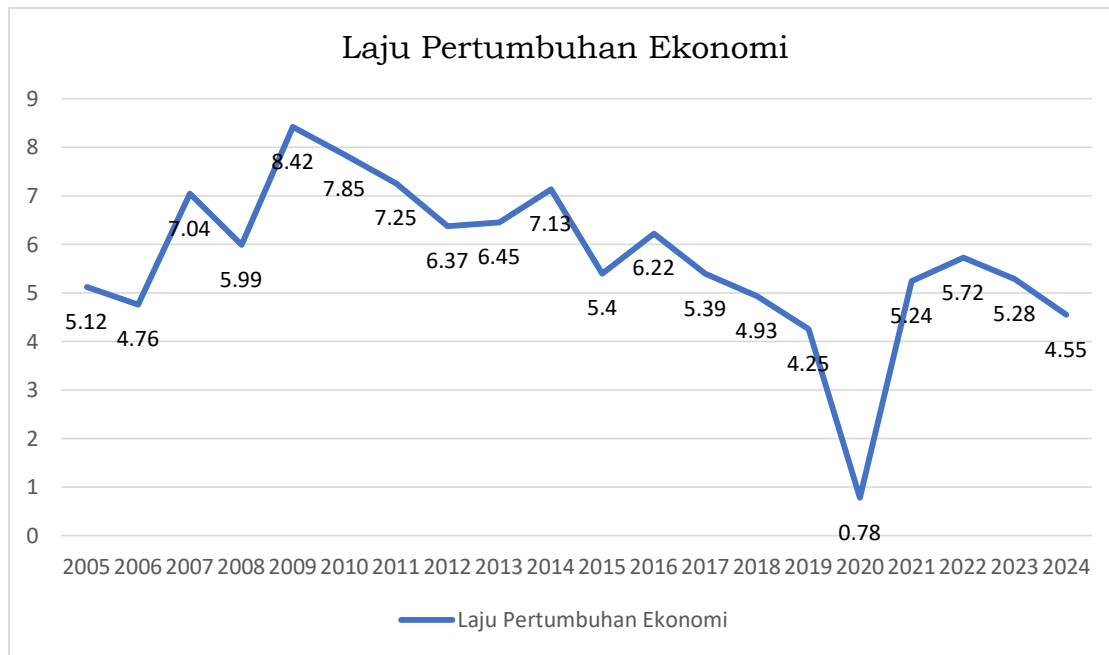
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup aspek-aspek yang tergabung dalam isu otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Secara lebih detail mencakup pertumbuhan PDRB, struktur ekonomi wilayah, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat kemiskinan. Berikut adalah gambaran umum mengenai beberapa data tersebut.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang terdapat di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan Angka Sangat Sementara BPS Kabupaten Merangin, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mencapai 5,24 persen. Berikut ini digambarkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2005– 2023 pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: BPS Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data di atas, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin mengalami fluktuasi dari tahun 2005-2024. Laju Pertumbuhan Ekonomi paling tinggi berada pada tahun 2009 dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8,42. Laju pertumbuhan ekonomi Merangin pada tahun 2024 berada di angka 4,55. Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pertumbuhan Sektor Unggulan:

- **Pertanian:** Merangin merupakan daerah penghasil karet, kelapa sawit, dan tanaman pangan utama seperti padi. Peningkatan harga komoditas ini dan perluasan area tanam menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
- **Perdagangan:** Aktivitas perdagangan, terutama perdagangan besar dan eceran, juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang semakin baik dan meningkatnya daya beli masyarakat.
- **Industri:** Sektor industri pengolahan, khususnya industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, menunjukkan pertumbuhan yang



stabil. Hal ini membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

2. Investasi:

- Meningkatnya investasi di berbagai sektor, seperti perkebunan, infrastruktur, dan pariwisata, turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Pemerintah Daerah gencar melakukan promosi investasi untuk menarik investor lokal dan asing.
- Kemudahan perizinan usaha dan iklim investasi yang kondusif menjadi daya tarik bagi para investor.

3. Infrastruktur:

- Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, membuka akses ke daerah-daerah terpencil dan memperlancar distribusi barang dan jasa.
- Hal ini meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.
- Infrastruktur yang memadai juga menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah.

4. Sumber Daya Manusia:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- Tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Pemerintah daerah memberikan perhatian serius pada pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program dan kebijakan.

5. Kebijakan Pemerintah:

- Pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, seperti pemberian insentif bagi investor, kemudahan perizinan usaha, dan peningkatan pelayanan publik.
- Stabilitas politik dan keamanan di daerah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Kebijakan pemerintah yang tepat dan berkelanjutan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin.



2.2.1.2 Indeks Gini

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antarwilayah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antarpenduduk. Hal ini dapat memicu peningkatan kesenjangan antarkelompok masyarakat di Kabupaten Merangin khususnya dan Provinsi Jambi umumnya. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:

- $0 < G \leq 0,35$ menunjukkan ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$ menunjukkan ketimpangan sedang
- $G \geq 0,50$ menunjukkan ketimpangan tinggi

Deskripsi data indeks gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17 Gini Ratio Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi 2020-2023

No	Kabupaten/Kota	Gini rasio Kabupaten / Kota				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kerinci	0,28	0,28	0,28	0,30	0,293
2	Merangin	0,32	0,29	0,35	0,36	0,241
3	Sarolangun	0,31	0,32	0,30	0,38	0,286
4	Batang Hari	0,32	0,31	0,29	0,36	0,312
5	Muaro Jambi	0,28	0,32	0,27	0,34	0,295
6	Tanjab Timur	0,25	0,25	0,27	0,31	0,305
7	Tanjab Barat	0,28	0,25	0,26	0,32	0,292
8	Tebo	0,30	0,30	0,30	0,24	0,257
9	Bungo	0,31	0,3	0,32	0,28	0,266
10	Kota Jambi	0,34	0,35	0,36	0,37	0,395
11	Sungai Penuh	0,31	0,31	0,29	0,31	0,305

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data di atas, ketimpangan yang terdapat di Kabupaten Merangin berada di ketimpangan rendah menuju ketimpangan sedang dengan capaian fluktuatif pada masing-masing tahun. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Merangin masih terjadi:

1. Ketidakmerataan Akses terhadap Sumber Daya:

- Akses terhadap sumber daya produktif, seperti tanah, modal, dan teknologi, masih belum merata di Kabupaten Merangin. Hal ini menyebabkan sebagian orang memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan mereka dibandingkan orang lain.
- Faktor-faktor seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat memperparah ketimpangan akses terhadap sumber daya.

2. Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja:

- Keterampilan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Merangin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi.
- Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dapat menyebabkan mismatch antara keterampilan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Dominasi Sektor Informal:

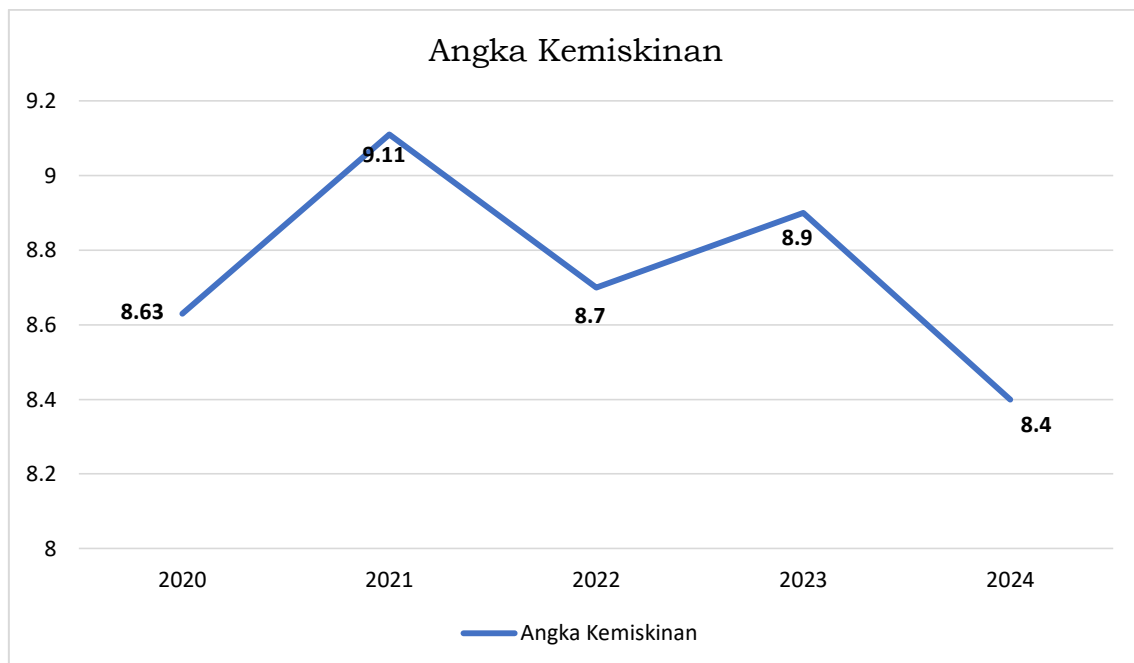
- Sektor informal, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih mendominasi perekonomian Merangin.
- Pekerja di sektor informal umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan pekerja di sektor formal.
- Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antarsektor.

4. Fluktuasi Harga Komoditas:

- Merangin merupakan daerah penghasil karet dan kelapa sawit. Harga komoditas ini dapat mengalami fluktuasi yang signifikan, yang dapat berdampak pada pendapatan masyarakat.
- Fluktuasi harga komoditas dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Perkembangan penurunan/peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.10 Angka Kemiskinan Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2025

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan



makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan nonmakanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan data tabel di atas, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Merangin mengalami angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 berada di angka 8,63 dan sampai tahun 2021 mengalami kenaikan di angka 9,11. Persentase kenaikan penduduk miskin ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19, yang kemudian pada tahun 2022 menurun secara drastis di angka 8,70, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai angka 8,90 dan pada tahun 2024 terjadi penurunan secara signifikan melebihi angka persentase 4 tahun terakhir yaitu di angka 8,40. Dapat disimpulkan selama 5 tahun terakhir angka kemiskinan penduduk memiliki angka yang fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan. Apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Jambi yang pada tahun 2024 berada di angka 7,1, persentase kemiskinan penduduk Merangin masih di atas angka yang dimiliki oleh provinsi. Sehingga diperlukan upaya tersistematis dari seluruh OPD untuk berfokus mengalami masalah kemiskinan.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Merangin, secara umum dihadapkan dengan beberapa persoalan mendasar antara lain masih tingginya jumlah pengangguran dan peluang kesempatan kerja pada sektor formal, belum tercapainya elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil dan siap kerja, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perselisihan hubungan industrial. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Merangin dimasa yang akan datang di bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya jumlah pencari kerja.

Tabel 2.18 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Merangin

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bekerja	190.731	192.138	193.723	186.400	199.503
2	Pengangguran	9.747	9.752	9.533	8.482	8705
3	Angkatan Kerja	200.478	201.890	203.256	194.882	208.208
4	bukan angkatan kerja	85.228	87.142	89.210	78.940	70404



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) TPT	4,86	4,83	4,69	4,35	4,18
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	70,17	69,85	69,50	71,7	74,73

Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024

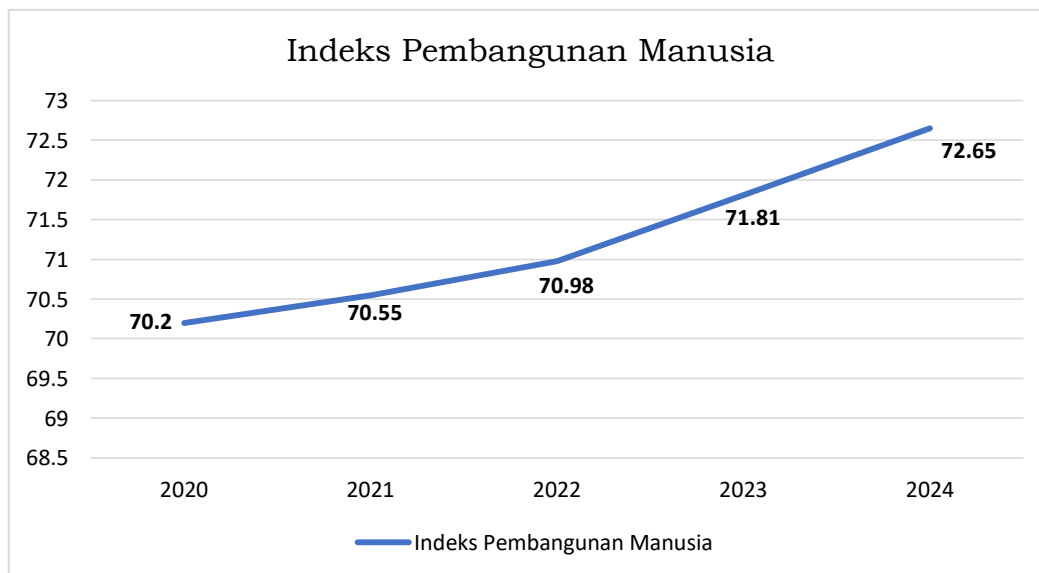
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2020 hingga 2024, jumlah tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 193.723 orang dan terendah pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 186.400 orang. Sementara itu, tingkat pengangguran cenderung menurun, dari 4,86% pada tahun 2020 menjadi 4,18% pada tahun 2024, menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Angkatan kerja mengalami peningkatan secara keseluruhan, dengan jumlah angkatan kerja tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 208.208 orang. Meskipun demikian, jumlah penduduk yang bukan bagian dari angkatan kerja juga mengalami penurunan signifikan, dari 85.228 orang pada tahun 2020 menjadi 70.404 orang pada tahun 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari 70,17% pada tahun 2020 menjadi 74,73% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya partisipasi penduduk dalam aktivitas ekonomi dan pencarian kerja di Kabupaten Merangin dalam lima tahun terakhir. Program-program pelatihan keterampilan dan wirausaha yang digalakkan pemerintah daerah juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya membantu mengurangi angka pengangguran. Kegiatan padat karya produktif dan inisiatif wirausaha baru turut menyediakan alternatif pekerjaan yang mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Secara keseluruhan, perbaikan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka ini.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia seharusnya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan; bukan sebatas alat pembangunan. Lebih khusus, pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi

penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.



Grafik 2.11 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Merangin

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2025

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme*

(UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski pertumbuhannya belum sepenuhnya optimal. IPM Kabupaten Merangin masuk dalam kategori "Tinggi" pada tahun 2024 yakni 71,66. Adapun penyebab kenaikan IPM di Kabupaten Merangin adalah

1. Peningkatan Ekonomi:

- Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan penurunan angka kemiskinan.
- Peningkatan ekonomi ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka.

2. Peningkatan Akses Pendidikan:

- Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kabupaten Merangin menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak di Kabupaten Merangin yang mendapatkan akses pendidikan.
- Peningkatan akses pendidikan ini meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

3. Peningkatan Akses Kesehatan:

- Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Merangin menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan gambaran kinerja atau tingkat keberhasilan dari Kabupaten Merangin dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
- Peningkatan akses kesehatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.



4. Peran Pemerintah:

- Pemerintah Kabupaten Merangin telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan IPM, seperti program wajib belajar 12 tahun, program jaminan kesehatan nasional (JKN), dan program pemberdayaan masyarakat.
- Program-program dan kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat Merangin.

5. Partisipasi Masyarakat:

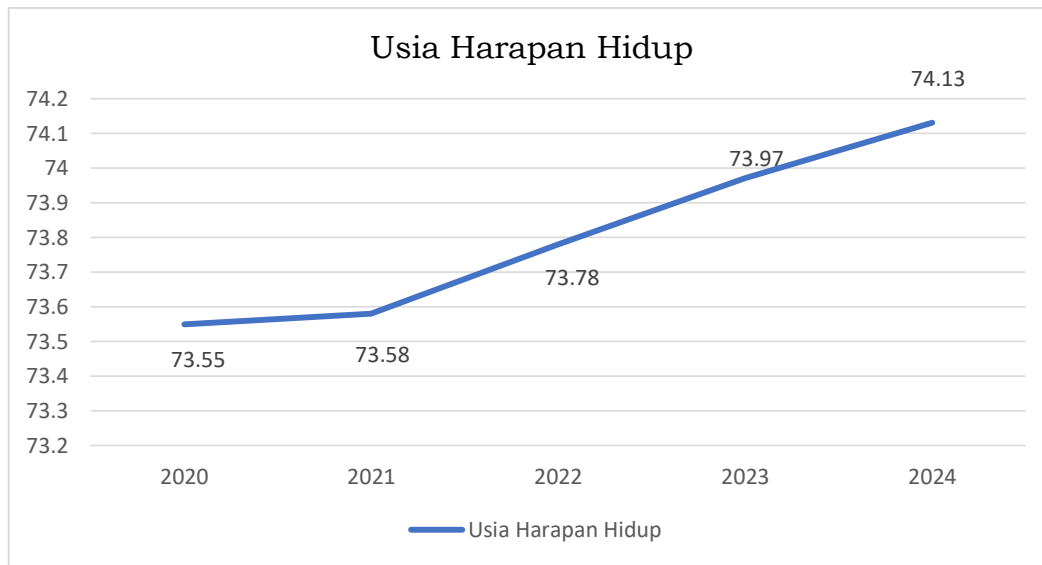
- Masyarakat Merangin semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Hal ini mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengenyam pendidikan dan menjaga kesehatan.

Partisipasi masyarakat ini juga merupakan salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan IPM Merangin.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH) adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan juga dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Perhitungan UHH Berdasarkan serangkaian *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian. Besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Berikut merupakan capaian UHH di Kabupaten Merangin 2020-2024:



Grafik 2.12 Usia Harapan Hidup

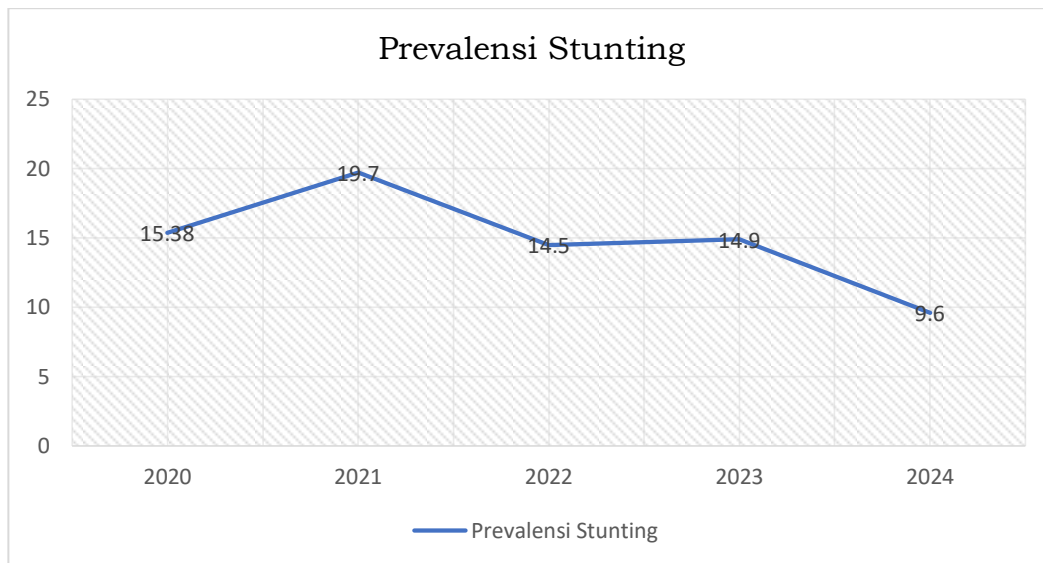
Sumber: BPS Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, usia harapan hidup di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan usia harapan hidup ini menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai sektor, seperti pelayanan kesehatan, kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses kesehatan, peningkatan gizi, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup memberikan dampak positif terhadap umur harapan hidup di Kabupaten Merangin.

2.2.2.2 Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Prevalensi stunting adalah persentase jumlah anak balita yang memiliki panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan untuk usia mereka, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Berikut

merupakan capaian penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Merangin 2020-2024:



Grafik 2.13 Prevalensi Stunting

Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, prevalensi stunting mengalami penurunan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 15,38%, kemudian meningkat menjadi 19,7% pada tahun 2021. Setelah itu, prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan, yaitu menjadi 14,5% pada tahun 2022, 14,9% pada tahun 2023, dan mencapai angka terendah sebesar 9,6% pada tahun 2024.

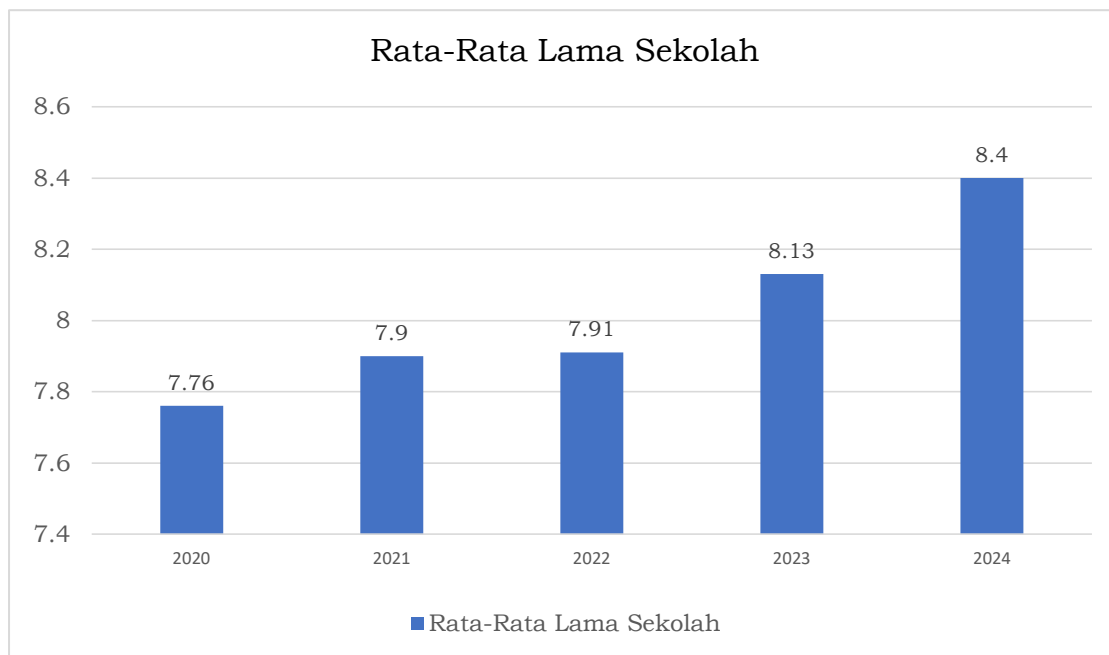
Penurunan prevalensi stunting ini mencerminkan efektivitas program-program yang diterapkan untuk menanggulangi stunting. Kebijakan yang fokus pada peningkatan gizi, akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, serta edukasi masyarakat mengenai pola makan sehat dan gizi seimbang telah berperan dalam pencapaian ini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan faktor sosial ekonomi turut mendukung penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Merangin.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Akses terhadap layanan pendidikan juga dapat diukur dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah tahun belajar

penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diikuti oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Capaian RLS di Kabupaten Merangin disajikan dalam grafik sebagai berikut.



Grafik 2.14 Rata-Rata Lama Sekolah

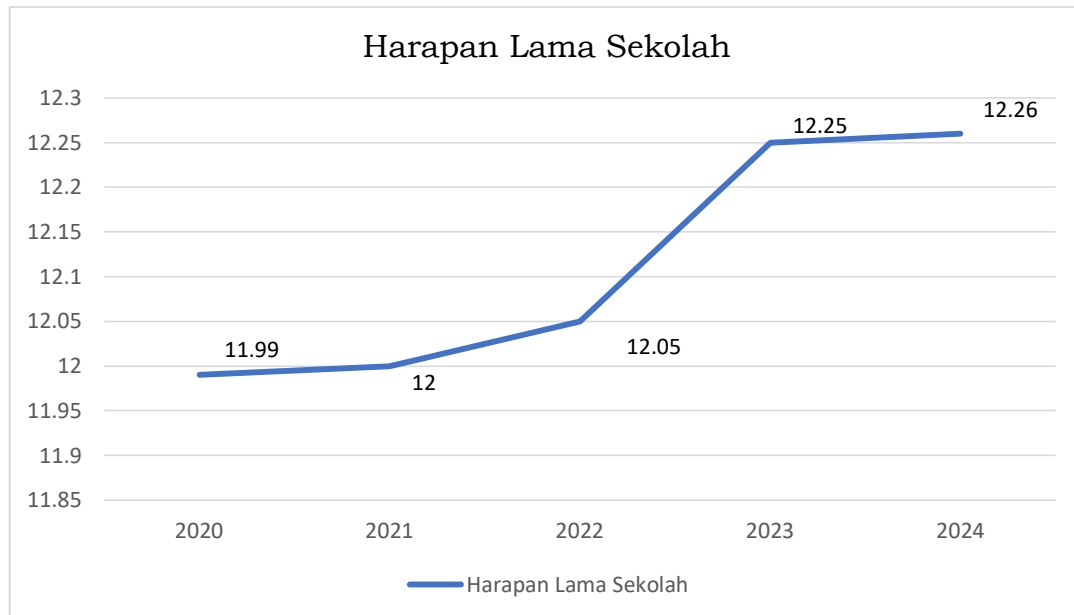
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan data di atas, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Merangin mengalami kenaikan yang cukup konsisten dari tahun 2010 hingga tahun 2024, dengan capaian akhir di tahun 2024 sebesar 8,4. Meskipun demikian angka ini masih berada di bawah capaian nasional dan capaian provinsi Jambi dimana capaian nasional untuk tahun 2024 adalah sebesar 8,85 sedangkan untuk capaian Provinsi Jambi sebesar 8,9. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, akses pendidikan yang belum optimal terutama pada daerah-daerah pedesaan dan terpencil, rendahnya kualitas sarana fisik pendidikan seperti gedung sekolah dan fasilitas pendukung lainnya, dan rendahnya kualitas guru yang masih perlu ditingkatkan.

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan durasi lama sekolah (tahun) yang diharapkan akan dilalui oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang (BPS, 2022). HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.



Grafik 2.15 Harapan Lama Sekolah

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan data di atas, terjadi kenaikan yang cukup konsisten mengenai HLS Kabupaten Merangin antara tahun 2020-2024. HLS tertinggi di Kabupaten Merangin sebesar 12,26 tahun yaitu terjadi pada tahun 2024. Artinya, rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,26 tahun atau sesuai dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman perlu dilakukan langkah percepatan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik di Kabupaten Merangin dapat menjadi solusi dalam upaya percepatan harapan lama sekolah. Selain itu faktor rendahnya perekonomian masyarakat dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan juga berpengaruh terhadap angka Harapan Lama Sekolah ini.

2.2.3.3 Angka Literasi

Literasi adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca mengacu pada proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa menjadi



pengertian, sedangkan menulis melibatkan mengungkapkan pemikiran melalui lambang-lambang bahasa. Namun, pemaknaan literasi telah berkembang lebih luas, dan di Indonesia, kata “literasi” lebih populer daripada istilah-istilah seperti “kemahirwacanaan,” “melek aksara,” dan “keberaksaraan.” Literasi juga menjadi gerakan yang didukung oleh pegiat pendidikan, baik secara formal maupun nonformal.

Beberapa alasan mengapa literasi semakin diperhatikan:

- Kemajuan Bangsa: Kesadaran akan pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia. Tingkat literasi yang tinggi mendukung kemajuan dan keunggulan suatu bangsa.
- Tradisi dan Budaya Literasi: Kesadaran bahwa kemajuan individu, masyarakat, dan bangsa ditentukan oleh tradisi dan budaya literasi yang baik.
- Dukungan Komunitas: Adanya dukungan dari komunitas-komunitas yang peduli dan bersemangat untuk menumbuhkan serta menyebarluaskan kegiatan, tradisi, dan budaya literasi.

Angka Literasi menjadi fokus dalam usaha pemerintah meningkatkan nilai literasi sebagai salah satu indikator kemajuan sumber daya manusia di wilayah Indonesia. Pada tahun 2022, tingkat literasi nasional Indonesia mengalami peningkatan dengan nilai budaya literasi mencapai 57,4 poin, naik dari 54,29 poin pada tahun sebelumnya dan target pemerintah untuk 2024 adalah mencapai *baseline* budaya literasi sebesar 71,04 persen.

Selain dari aspek pendidikan, Kabupaten Merangin juga fokus pada program literasi fungsional yang mendukung penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kampanye literasi masyarakat, seminar, dan *workshop*, Kabupaten Merangin berusaha membentuk masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang relevan dan bermanfaat.

Melalui upaya bersama ini, angka literasi di Kabupaten Merangin mencerminkan kesuksesan dalam memberikan akses pendidikan yang lebih baik, membentuk masyarakat yang melek huruf, dan menciptakan fondasi pengetahuan yang kokoh bagi perkembangan seluruh lapisan masyarakat.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan



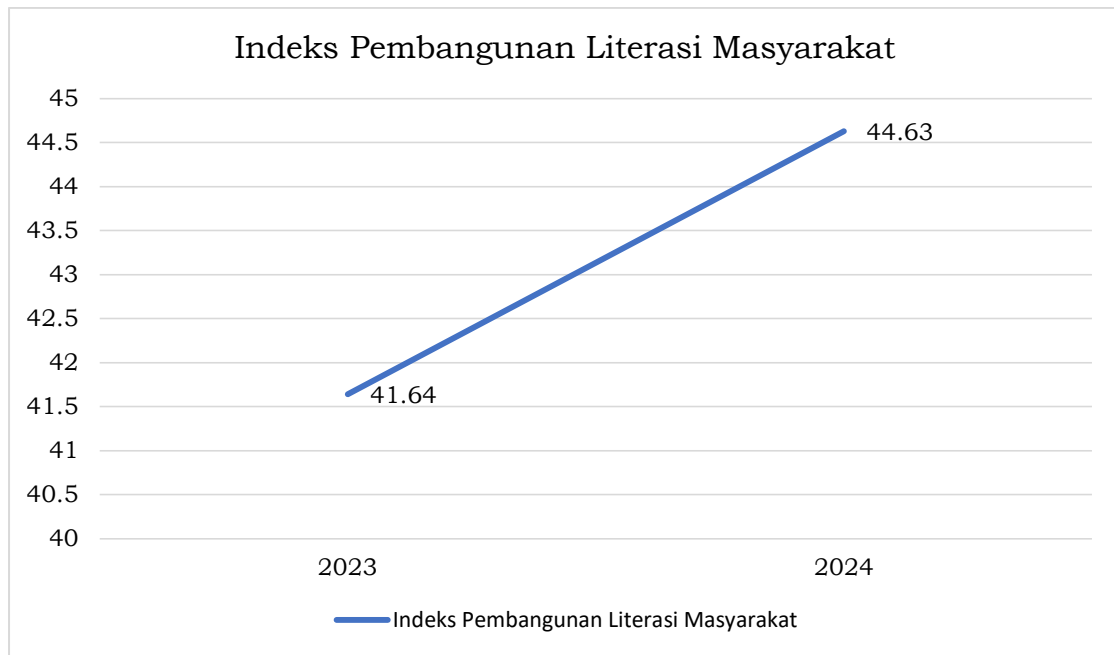
sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Dengan fokus pada literasi, IPLM membantu memahami sejauh mana kemajuan dalam mengadopsi ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ini menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan dan memastikan inklusi sosial serta kelestarian lingkungan dalam pembangunan negara kita. Tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat yang menjadi indikator dalam IPLM:

- Pemerataan Layanan Perpustakaan: Menilai sejauh mana layanan perpustakaan dapat diakses secara merata oleh masyarakat.
- Ketercukupan Koleksi Perpustakaan: Mengukur ketersediaan koleksi buku dan materi bacaan di perpustakaan.
- Ketercukupan Tenaga Perpustakaan: Menilai jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan yang ada.
- Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari: Mengukur seberapa sering masyarakat mengunjungi perpustakaan.
- Jumlah Perpustakaan Ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan): Menilai apakah perpustakaan memenuhi standar nasional yang ditetapkan.
- Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi/Promosi: Mengukur partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mempromosikan literasi.
- Jumlah Anggota Perpustakaan: Menilai seberapa banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan.

Indeks ini membantu kita memahami sejauh mana upaya pemerintah dalam memajukan literasi dan membina perpustakaan sebagai sarana belajar bagi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:



Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

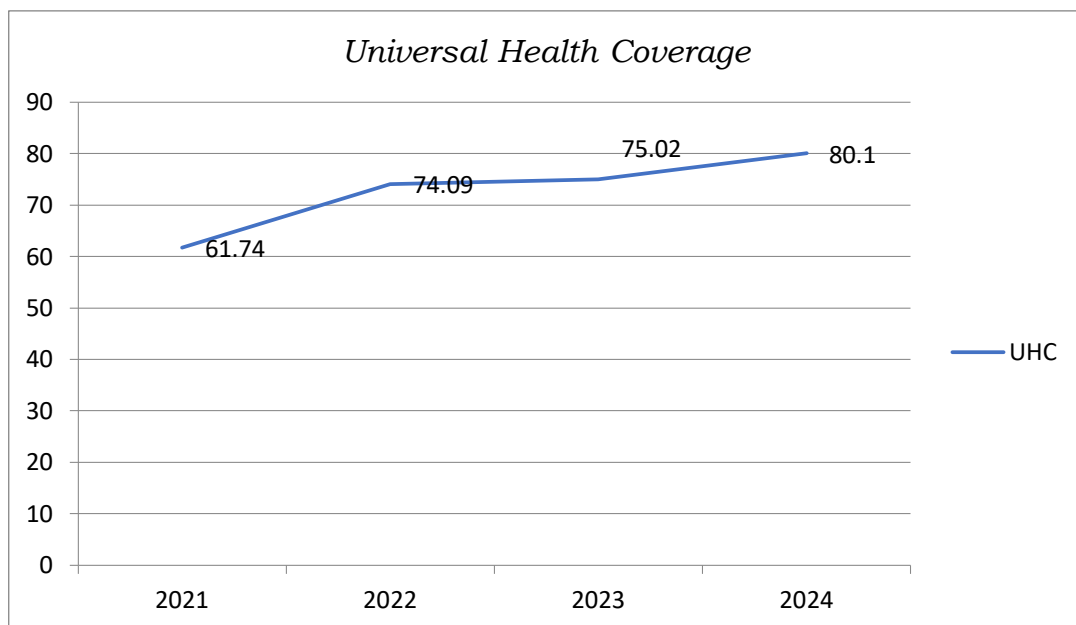
Sumber: BPS Provinsi Jambi 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 41,64 pada tahun 2023 menjadi 44,63 pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkontribusi seperti, peningkatan frekuensi membaca dari masyarakat yang semakin aktif dalam membaca, baik buku, artikel, maupun konten digital dan masifnya program-program yang mendorong frekuensi membaca, seperti kampanye literasi dan kegiatan perpustakaan, sehingga berdampak kepada kenaikan IPLM Kabupaten Merangin. Faktor selanjutnya adalah akses internet dan teknologi digital kemajuan teknologi memungkinkan akses lebih mudah ke informasi dan pengetahuan serta pemanfaatan internet dan perangkat digital membantu meningkatkan literasi di era digital. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan pemerintah telah efektif dalam mengatasi tantangan literasi, meskipun tetap diperlukan usaha berkelanjutan untuk memastikan literasi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Merangin.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Universal Health Coverage

Universal Health Coverage (UHC) adalah sistem jaminan kesehatan yang memastikan seluruh anggota populasi dapat mengakses pelayanan kesehatan secara adil, berkualitas, dan terjangkau, mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. UHC memiliki dua elemen utama, yaitu akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan kesehatan bagi setiap individu, dan Perlindungan terhadap risiko finansial bagi individu saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Capaian UHC Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:



Grafik 2.17 Universal Health Coverage Kabupaten Merangin 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Merangin, 2025

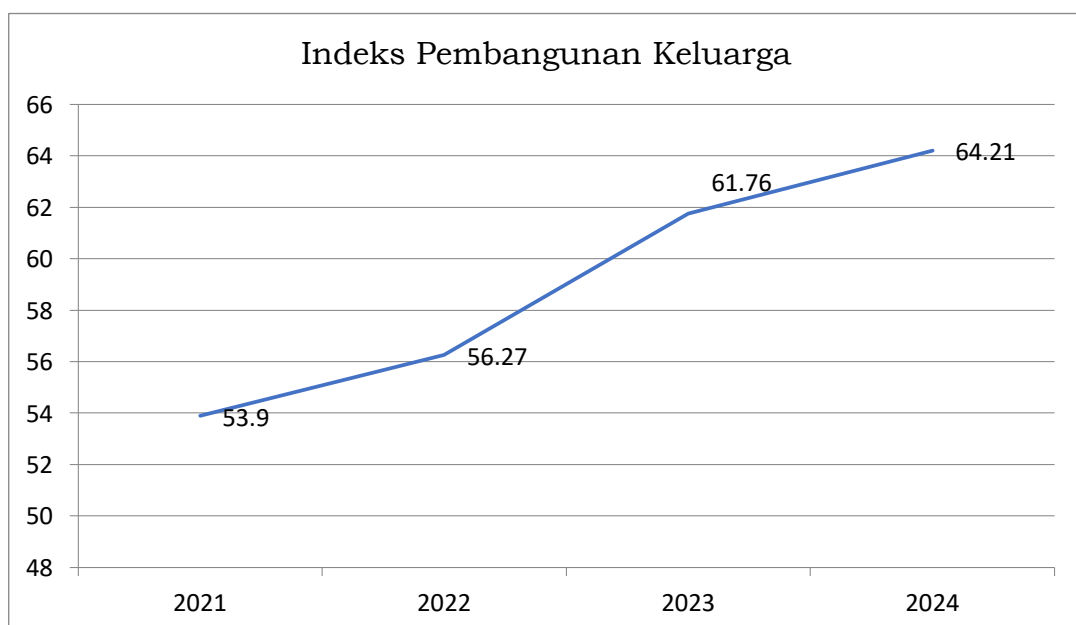
Grafik di atas menggambarkan perkembangan UHC di Kabupaten Merangin antara tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, persentase UHC di daerah ini tercatat sebesar 61,74%. Kemudian, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022, dengan persentase mencapai 74,09%. Pada tahun berikutnya, 2023, UHC terus mengalami kenaikan tipis menjadi 75,02%, dan diperkirakan pada tahun 2024, persentase UHC akan mencapai 80,1%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren positif dan konsisten dalam upaya memperluas cakupan kesehatan di Kabupaten Merangin, yang

mencerminkan kemajuan signifikan dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat.

2.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.5.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas keluarga di Indonesia, berfokus pada ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga dan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan serta program di tingkat pusat maupun daerah. Berikut merupakan capaian iBangga Kabupaten Merangin selama periode 2021-2024



Grafik 2.18 Indeks Pembangunan Keluarga

Sumber: BKKBN, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat kecenderungan kenaikan yang konsisten pada Indeks Pembangunan Keluarga yang tercatat dari tahun 2021 hingga 2024. Indeks ini menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya, dengan lonjakan signifikan yang terjadi pada beberapa periode. Beberapa sektor atau indikator mengalami kenaikan yang lebih stabil, sementara lainnya menunjukkan kenaikan yang lebih tajam.

Secara diagnostik, tren kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan keluarga yang lebih

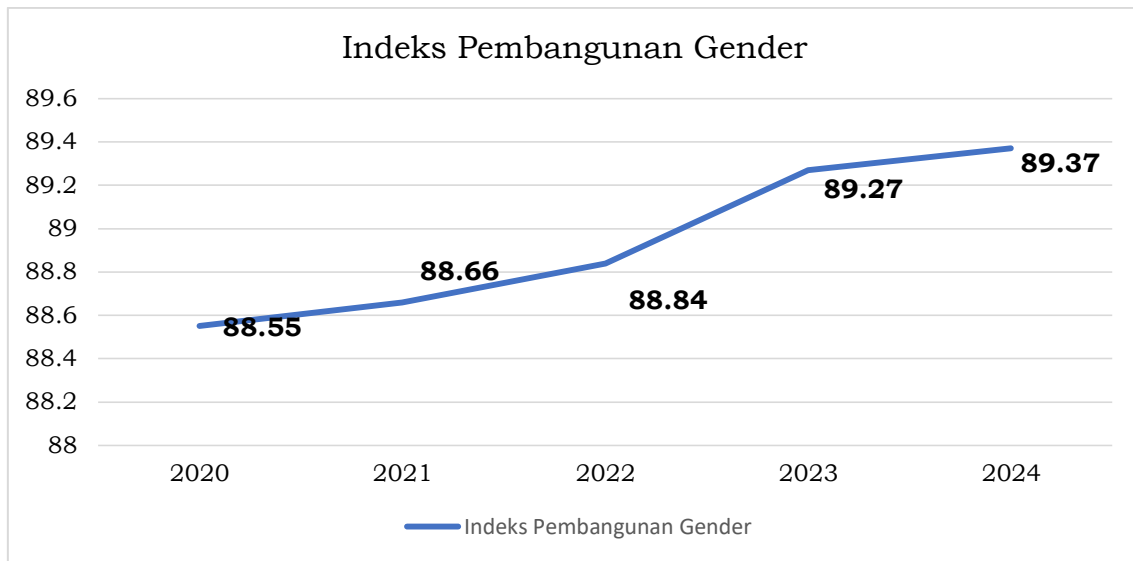


terfokus dan terintegrasi. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan keluarga. Selain itu, faktor sosial ekonomi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan keluarga juga bisa menjadi faktor pendorong. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab peningkatan ini, diperlukan analisis lebih mendalam terhadap pelaksanaan program-program terkait serta evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan yang diterapkan.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG diperoleh melalui perbandingan antara IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Metodologi penghitungan IPG mengacu pada yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Index* (HDI) pada tahun 2010.

Dengan demikian, IPG merupakan salah satu alat yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Penggunaan IPG membantu mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan, serta memperhatikan aspek kesejahteraan dan kesetaraan gender.



Grafik 2.19 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Merangin

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak terdapat kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG mendekati angka 100%. Tahun 2020-2024 capaian IPG Kabupaten Merangin mengalami kenaikan. Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Merangin menunjukkan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender di wilayah tersebut. Hal ini patut diapresiasi, namun penting untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya agar upaya untuk meningkatkan IPG dapat dilakukan secara lebih terarah. Berikut beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kenaikan IPG Merangin:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Perempuan:

- Meningkatnya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi, menunjukkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan Merangin.
- Hal ini berdampak pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja perempuan, sehingga meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

2. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Tenaga Kerja:

- Semakin banyak perempuan Merangin yang aktif dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal.
- Peningkatan partisipasi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi dan kesempatan untuk berkontribusi secara finansial bagi keluarga.

3. Peningkatan Kesadaran dan Peran Perempuan dalam Berpolitik dan Kepemimpinan:

- Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik dan kepemimpinan di berbagai tingkatan menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan semakin diakui dan dihargai.
- Hal ini menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender dalam ranah publik dan pengambilan kebijakan.

4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan:

- Meningkatnya angka harapan hidup perempuan dan menurunnya angka kematian ibu menunjukkan bahwa kesehatan perempuan di Kabupaten Merangin semakin membaik.
- Hal ini menunjukkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan gizi.

5. Peran Pemerintah dan Lembaga Masyarakat:

- Pemerintah Kabupaten Merangin telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, seperti program pemberdayaan perempuan, edukasi tentang kesetaraan gender, dan penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan.
- Lembaga masyarakat sipil dan organisasi perempuan juga aktif dalam mendorong kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan advokasi, edukasi, dan pendampingan perempuan.

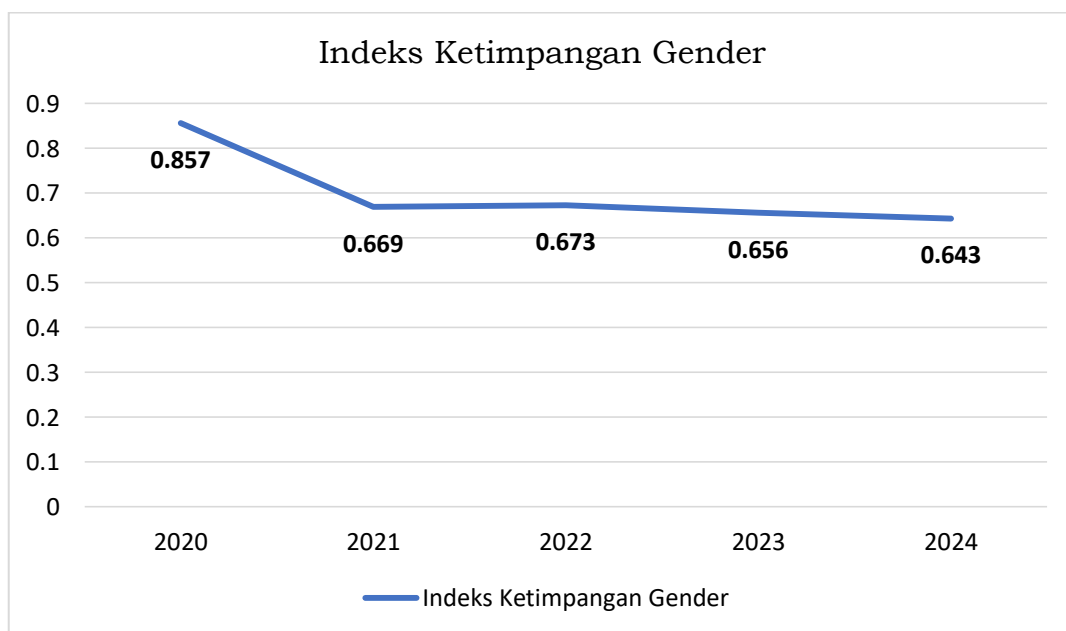
2.2.5.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur ketimpangan gender di Indonesia. IKG ini dibagi menjadi dua dimensi utama:

- 1. Kesehatan Reproduksi:** Dimensi ini mencakup indikator-indikator terkait kesehatan reproduksi perempuan. Pada tahun 2022, secara nasional terjadi perbaikan pada dimensi ini, terutama pada indikator perempuan

yang melahirkan hidup di fasilitas kesehatan. Persentase perempuan yang melahirkan hidup di fasilitas kesehatan meningkat dari 15,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14,0 persen pada tahun 2022.

- 2. Pemberdayaan:** Dimensi ini mencakup indikator-indikator yang menggambarkan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2022, terjadi perbaikan pada dimensi ini, terutama pada indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan setidaknya SMA. Persentase perempuan yang berpendidikan setidaknya SMA meningkat dari 34,87 persen pada tahun 2021 menjadi 36,95 persen pada tahun 2022 namun kembali menurun pada tahun 2023. IKG menggambarkan kerugian atau kegagalan dalam pencapaian pembangunan manusia akibat ketimpangan gender, yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, dan akses dalam pasar tenaga kerja.



Grafik 2.20 Indeks Ketimpangan Gender

Sumber: BPS Merangin 2025

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Merangin dari tahun 2020 sampai ke tahun 2024 mengalami penurunan secara konsisten. Pada 2020 IKG Kabupaten Merangin berada di angka 0,857. Di tahun berikutnya, tahun 2021, angka tersebut mengalami penurunan drastis di angka 0,669 dan pada tahun 2022 berada di angka 0,673. Penurunan terus terjadi, hingga pada tahun 2024 berada di angka 0,643.



Penurunan secara konsisten menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengatasi masalah indeks ketimpangan gender.

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Perempuan:

- Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan perempuan di Kabupaten Merangin menunjukkan semakin banyaknya perempuan yang mendapatkan akses pendidikan.
- Hal ini berdampak pada peningkatan tingkat literasi, keterampilan, dan peluang kerja perempuan, sehingga meningkatkan peran dan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.

2. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Tenaga Kerja:

- Data menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan Merangin dalam angkatan kerja, baik di sektor formal maupun informal.
- Peningkatan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi dan kesempatan untuk berkontribusi secara finansial bagi keluarga.

3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan:

- Meningkatnya angka harapan hidup perempuan dan menurunnya angka kematian ibu di Kabupaten Merangin menunjukkan adanya perbaikan kesehatan perempuan.
- Hal ini menunjukkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, peningkatan kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan gizi, serta peran aktif perempuan dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya.

4. Peran Pemerintah dan Lembaga Masyarakat:

- Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui program-program seperti pemberdayaan perempuan, edukasi tentang kesetaraan gender, dan penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan.
- Peran aktif organisasi perempuan dan lembaga masyarakat sipil dalam mendorong kesetaraan gender melalui advokasi, edukasi, dan pendampingan perempuan.

5. Faktor Lainnya:

- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, yang mendorong perubahan perilaku dan budaya yang lebih mendukung kesetaraan.



- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan akses perempuan terhadap informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi.
- Pergeseran norma dan nilai sosial yang lebih menghargai peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

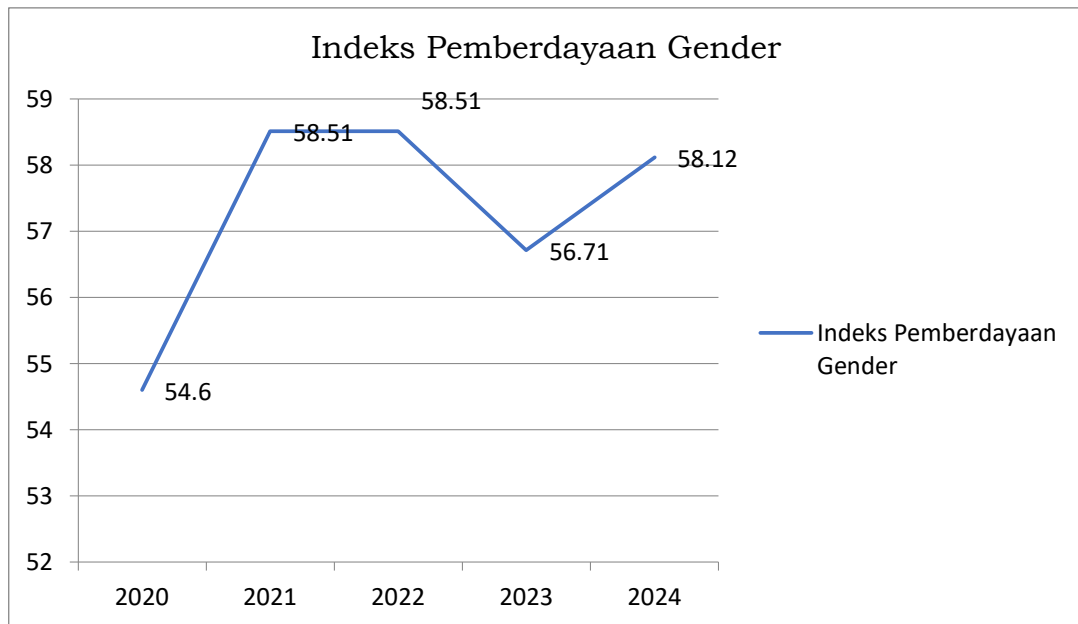
2.2.5.4 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur penting untuk menilai kesetaraan gender di suatu negara. Dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, IDG mencerminkan sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta mengakses peluang yang sama dengan laki-laki.

A. Dimensi Utama IDG

IDG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama:

- 1. Dimensi Partisipasi Politik:** Mengukur keterwakilan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan di tingkat parlemen dan pemerintahan.
- 2. Dimensi Keterlibatan Ekonomi:** Mengukur partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi.
- 3. Dimensi Ketercapaian Pendidikan:** Mengukur tingkat pendidikan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dari tingkat dasar hingga tinggi.



Grafik 2.21 Indeks Pemberdayaan Gender

Sumber: BPS Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan dengan data di atas, Indeks Pemberdayaan Gender memiliki angka yang cenderung konsisten, angka indeks pemberdayaan gender selama 5 tahun terakhir rata rata berada di angka 57. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi nilai tertinggi yang diraih Merangin selama sepuluh tahun terakhir dengan berada di angka 58,51, namun angka ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 56,71. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan capaian IDG menjadi 58,12. Penyebab fluktuasi capaian Indeks Pemberdayaan Gender Merangin dapat terjadi karena hal-hal berikut ini.

1. Dimensi Keterlibatan Ekonomi dan Ketercapaian Pendidikan:

- **Penurunan Proporsi Perempuan Berpendidikan:** Faktor ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kemiskinan, norma dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan, serta kurangnya akses ke infrastruktur pendidikan yang memadai.
- **Penurunan Proporsi Perempuan Bekerja di Sektor Formal:** Faktor ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurangnya keterampilan dan pelatihan yang dibutuhkan di pasar kerja, diskriminasi gender di tempat kerja, dan beban kerja rumah tangga yang tidak proporsional.



- **Peningkatan Pernikahan Anak Perempuan:** Faktor ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kemiskinan, norma dan budaya yang mendukung pernikahan dini, serta kurangnya akses ke pendidikan dan informasi.

2. Dimensi Politik:

- **Penurunan Proporsi Perempuan dalam Politik:** Faktor ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti stereotip gender yang masih kuat, kurangnya dukungan pendanaan dan pelatihan bagi politisi perempuan, serta budaya politik yang patriarki.
- **Penurunan Proporsi Perempuan Pimpinan Desa/Lurah:** Faktor ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan kepemimpinan, norma dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dalam kepemimpinan, serta hambatan birokrasi.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

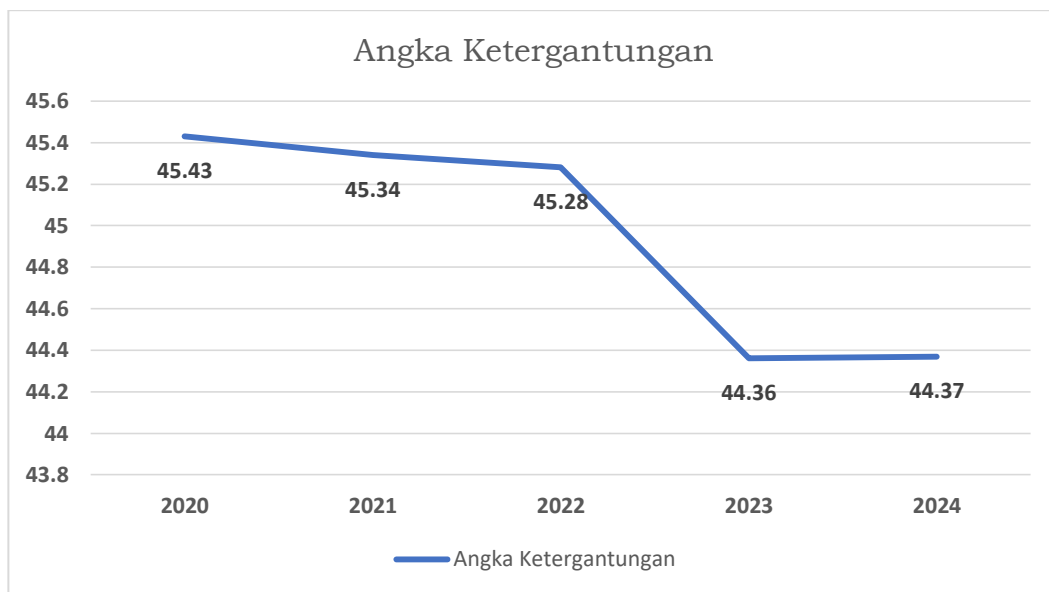
Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan. Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia. Berbagai fokus pembangunan tersebut memperlihatkan data makro capaian pembangunan daerah. Berikut adalah penjelasan rinci dari masing-masing fokus pada aspek daya saing daerah.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator keadaan ekonomi suatu negara termasuk negara maju atau negara sedang berkembang.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Grafik 2.22 Angka Ketergantungan

Sumber: Hasil Proyeksi Interim 2025

Berdasarkan grafik di atas, Angka Ketergantungan pada tahun 2024 berada pada angka 44,37. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung beban sekitar 44 orang yang tidak produktif. Dari rentang waktu 2020 sampai dengan 2024 Angka Ketergantungan Kabupaten Merangin mengalami fluktuasi identik dengan penurunan secara terus menerus.

Tren penurunan capaian di Kabupaten Merangin menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif. Hal ini dapat diartikan sebagai peningkatan potensi ekonomi dan produktivitas wilayah karena lebih banyak penduduk yang berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, penurunan Angka Ketergantungan juga mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup

dan kesehatan masyarakat yang memungkinkan lebih banyak individu masuk ke dalam kelompok usia produktif.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah, melakukan perencanaan, dan mengevaluasi hasil pembangunan. Ini juga memberikan informasi yang menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

PDRB dapat dihitung berdasarkan dua dasar harga:

- PDRB atas dasar harga berlaku: Nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Ini menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.
- PDRB atas dasar harga konstan: Nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun, tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Merangin terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, data di tabel bawah ini menunjukkan hasilnya.

**Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Merangin Tahun 2020 – 2024**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin (Persen)				
	2020	2021	2022*	2023**	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,74	4,85	6,63	5,12	2,77
Pertambangan dan Penggalan	2,43	11,24	10,14	-12,11	3,75
Industri Pengolahan	-0,88	5,88	4,39	7,94	1,91
Pengadaan Listrik dan Gas	5,16	5,2	6,34	12,91	5,45
Pengadaan Air,	4,67	5,95	3,6	0,36	0,05



Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin (Persen)				
	2020	2021	2022*	2023**	2024**
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
Konstruksi	0,65	7,11	-0,79	4,49	4,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,16	5,63	7,53	9,22	7,05
Transportasi dan Pergudangan	-2,45	8,45	11,89	6,06	5,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,47	5,6	5,92	8,67	7,78
Informasi dan Komunikasi	7,73	2,68	7,07	7,10	6,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84	5,77	-0,5	-0,72	0,52
Real Estate	-0,57	4,84	6,56	2,50	2,50
Jasa Perusahaan	-4,72	2,88	10,81	19,77	2,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,77	0,76	-0,22	3,77	13,10
Jasa Pendidikan	2,92	2,98	4,93	3,31	13,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,37	14,78	-0,28	5,67	14,14
Jasa lainnya	-3,28	3,68	7,72	4,57	7,61
Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto	0,78	5,24	5,72	5,28	4,55

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2025

Data empat tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin mencoba memperbaiki laju pertumbuhan PDRB ditopang dengan kondisi yang lebih stabil dibandingkan dengan tahun 2020. Fluktuasi Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan diperlukannya strategi untuk mengakselerasi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto.

Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan PDRB Kabupaten Merangin:

1. Mengembangkan Sektor Unggulan:

- Agrikultur: Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, seperti kopi, karet, dan kelapa sawit. Diversifikasi produk pertanian



dengan mengembangkan tanaman hortikultura dan peternakan. Memperkuat infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, dan penyimpanan hasil panen.

- **Pariwisata:** Mengembangkan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Merangin, seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, Air Terjun Renah Kemumu, dan Situs Megalitikum Muara Tembesi. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur wisata. Mengembangkan pemasaran dan promosi wisata melalui berbagai media.
- **Perindustrian:** Mendorong investasi di sektor industri pengolahan hasil pertanian, seperti industri pengolahan kopi, karet, dan kelapa sawit. Mengembangkan industri kreatif dan kerajinan tangan khas daerah.

2. Meningkatkan Daya Saing UMKM:

- Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM melalui program-program pemerintah dan lembaga keuangan.
- Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam hal manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk.
- Membangun infrastruktur seperti pasar tradisional dan modern untuk mendukung kegiatan UMKM.
- Mengembangkan *platform e-commerce* untuk membantu UMKM memasarkan produk mereka secara *online*.
- Memberikan peralatan bagi pelaku usaha.

3. Meningkatkan Investasi:

- Mempermudah proses perizinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Meningkatkan promosi potensi investasi Kabupaten Merangin kepada investor lokal dan asing.
- Memberikan insentif dan kemudahan bagi investor, seperti pembebasan pajak dan pengurangan biaya operasional.
- Membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung aktivitas investasi.

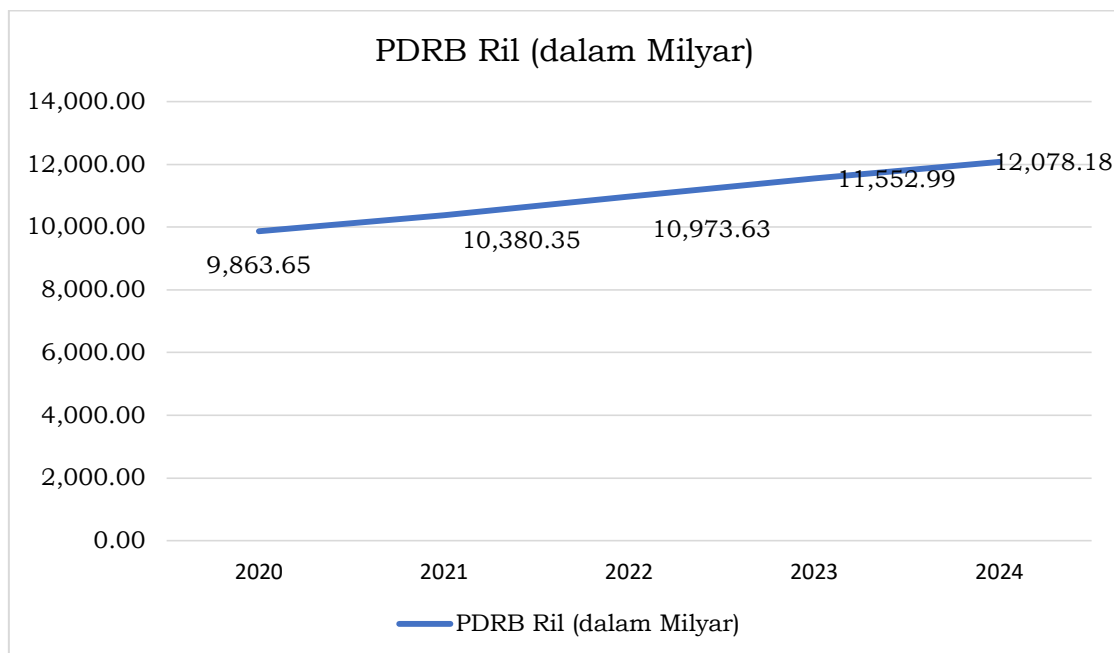
4. Meningkatkan Kualitas SDM:



- Meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah.
- Mengembangkan program pelatihan dan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup.

5. Memperkuat Peran Pemerintah Daerah:

- Melakukan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan terarah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- Menyusun kebijakan dan program yang berpihak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah daerah dan dengan pihak swasta.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.



Grafik 2.23 PDRB Riil Kabupaten Merangin

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan dalam PDRB Riil Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Merangin dari tahun 2020 ke tahun 2024. Kontribusi lapangan usaha terbesar pada capaian



masing-masing tahun ditunjang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sementara terendah pada pengadaan listrik dan gas. Kenaikan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil ADHK Kabupaten Merangin mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan daya saing sektor-sektor unggulan daerah.

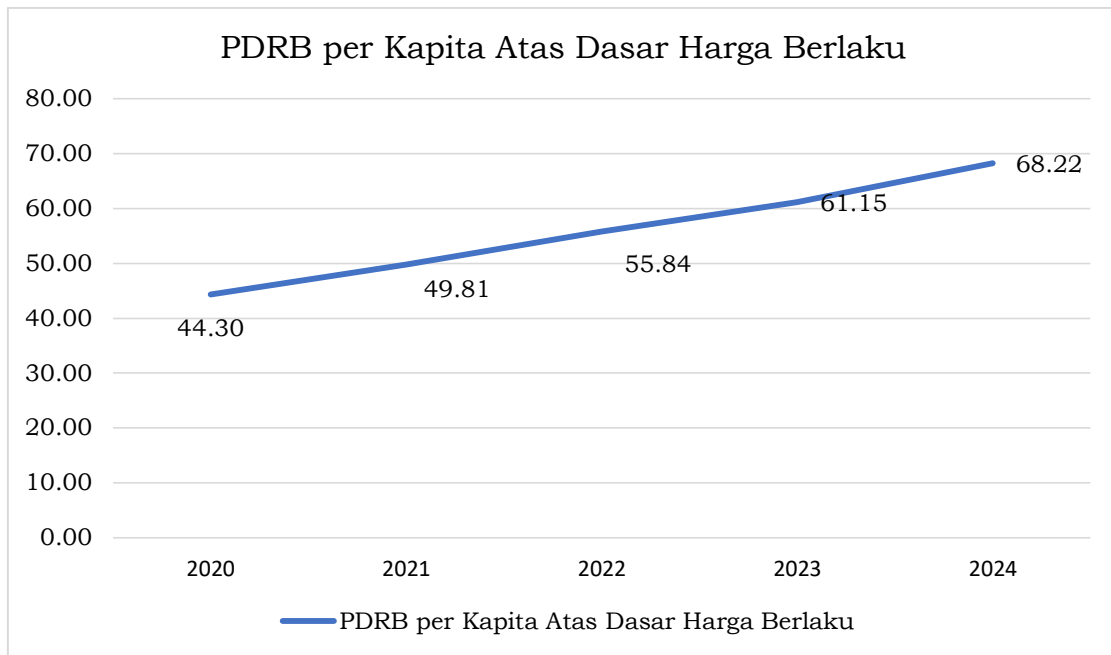
2.3.2.2 PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.

PDRB per kapita merupakan angka kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Namun, penghitungan PDRB per kapita memiliki kekurangan, yaitu tidak mampu menggambarkan pemerataan kesejahteraan. Kelemahan tersebut disebabkan oleh besaran angka PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besarnya PDRB dan jumlah penduduk di wilayah perhitungan. Oleh karena itu, analisis PDRB per kapita harus diimbangi dengan indikator kesejahteraan lainnya, khususnya bagi daerah yang perekonomiannya didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Adapun gambaran nilai PDRB per Kapita Kabupaten Merangin Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Grafik 2.24 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Merangin 2020-2024

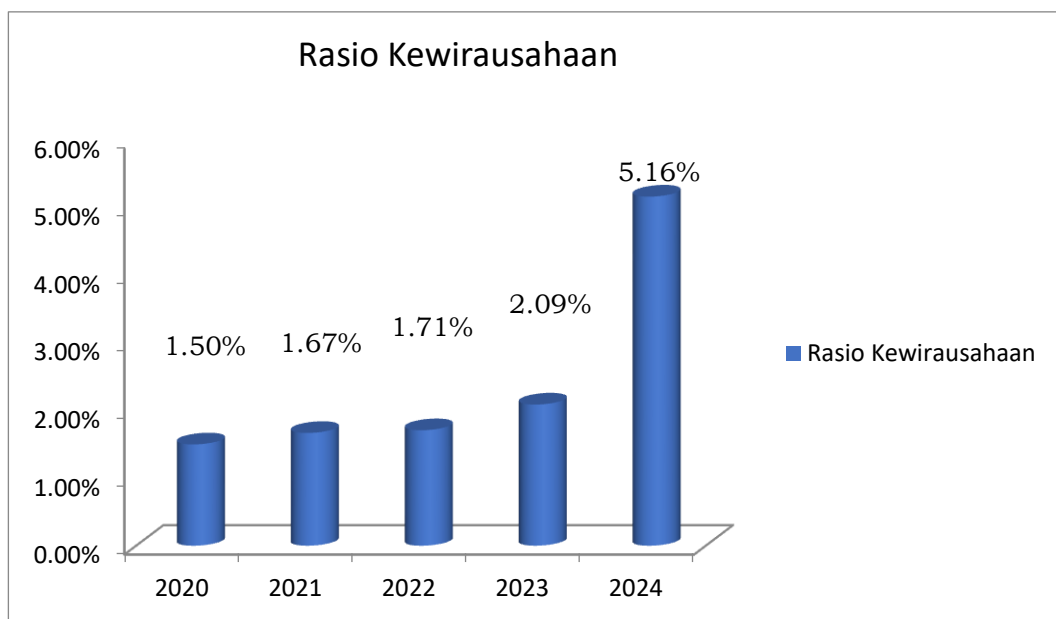
Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun, 2025

Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Merangin 2020-2024, secara nyata telah memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya daya beli masyarakat, oleh karena itu, dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, pemerintah daerah akan terus berusaha merangsang sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Upaya ini telah ditempuh melalui peluncuran berbagai kebijakan populis yang mampu merangsang, mendorong dan memacu pemberdayaan potensi sumber daya lokal dan membuka peluang usaha-usaha baru ekonomi produktif.

2.3.3.3 Rasio Kewirausahaan

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022, wirausaha adalah orang yang menjalankan, menciptakan, dan/atau mengembangkan suatu usaha. Perpres itu membedakan wirausaha menjadi dua jenis, yaitu "wirausaha pemula" dan "wirausaha mapan". "Wirausaha pemula" adalah pelaku usaha yang berusaha sendiri, serta pelaku usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar. Kemudian "wirausaha mapan" adalah pelaku usaha

yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Secara umum rasio kewirausahaan adalah perbandingan antara jumlah wirausaha dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rasio kewirausahaan merupakan ukuran mengenai jumlahnya wirausaha yang terdapat dalam suatu wilayah. Rasio kewirausahaan menjadi penting karena merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana kemandirian ekonomi kelompok masyarakat. Berikut merupakan rasio kewirausahaan di Kabupaten Merangin.



Grafik 2.25 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Merangin

*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
Kabupaten Merangin*

Berdasarkan data statistik Kabupaten Merangin tahun 2024, Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Merangin mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024 dengan nilai capaian akhir sebesar 5,16%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang pesat dibandingkan dengan nilai pada tahun 2020 yang hanya sebesar 1,50%, dan meningkat secara bertahap hingga 1,67% pada tahun 2021, 1,71% pada tahun 2022, serta 2,09% pada tahun 2023. Peningkatan yang tajam pada tahun 2024 mencerminkan adanya perkembangan yang signifikan dalam sektor kewirausahaan di Kabupaten Merangin.

Peningkatan rasio kewirausahaan ini dapat mencerminkan dampak positif dari kebijakan dan upaya pemerintah daerah dalam mendukung

pengembangan usaha kecil dan menengah. Meskipun demikian, tantangan dalam mendorong kewirausahaan tetap ada, terutama terkait dengan akses terhadap modal, pelatihan, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis. Kabupaten Merangin perlu melanjutkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan secara berkelanjutan, serta mendorong keberlanjutan usaha melalui pelatihan dan peningkatan kemampuan pelaku usaha agar rasio kewirausahaan dapat terus meningkat dalam jangka panjang.

2.3.3.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam konteks lebih luas, angkatan kerja mengacu pada jumlah individu yang berada dalam rentang usia kerja dan siap untuk bekerja. TPAK menggambarkan seberapa besar persentase angkatan kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk mencari pekerjaan atau bekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur persentase individu yang termasuk dalam angkatan kerja yang aktif ataupun potensial, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Tabel 2.20 Statistik Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Merangin dalam kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	70,17	69,85	69,50	71,17	74,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2024

Berdasarkan data statistik Kabupaten Merangin tahun 2024, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Merangin mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2020 hingga 2024 dengan nilai capaian akhir sebesar 74,73%. Capaian ini lebih tinggi dari capaian Provinsi Jambi sebesar 68,87% pada tahun 2024. Penurunan indikator TPAK di Kabupaten Merangin ini dapat mencerminkan dampak dinamika ekonomi dan



sosial yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja, termasuk dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi lapangan kerja dan aktivitas ekonomi. Sementara penurunan di tahun berikutnya menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam stabilisasi dan peningkatan partisipasi tenaga kerja. Kabupaten Merangin perlu kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan lapangan kerja, serta upaya pemulihan ekonomi yang lebih kuat untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Merangin.

2.3.3.5 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan efektivitas pemerintahan. Inovasi yang dimaksud mencakup pendekatan baru dalam tata kelola, layanan publik, dan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap tantangan dan peluang.

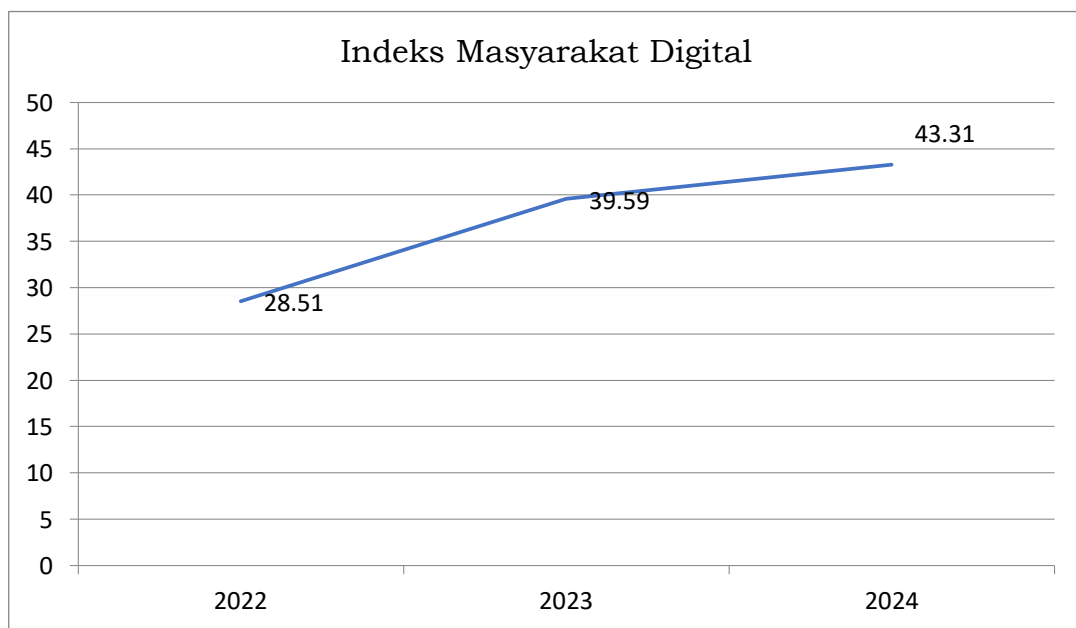
Pada tahun 2020, Kabupaten Merangin memperoleh skor IID sebesar 1.251 dan dikategorikan sebagai *Sangat Inovatif*. Namun, dampak pandemi menyebabkan penurunan tajam pada 2021 menjadi 35,63 (*Inovatif*) dan kembali menurun ke 18,8 pada 2022 (*Kurang Inovatif*). Penurunan ini menunjukkan tantangan besar dalam mempertahankan ekosistem inovasi. Upaya pemulihan mulai terlihat pada 2023, dengan meningkatnya nilai menjadi 46,74 (*Inovatif*), yang menunjukkan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan kapasitas aparatur dan kolaborasi lintas sektor mulai membuahkan hasil. Kemudian terdapat penurunan capaian IID pada tahun 2024 menjadi 36,18. Hal ini mengakibatkan perlunya integrasi dan inovasi kembali dalam implementasi suatu kebijakan.

2.3.2 Transformasi Digital

2.3.2.1 Indeks Masyarakat Digital

Masyarakat Digital adalah Sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. IMDI atau Indeks

Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan dilaksanakan setiap tahun. IMDI merupakan



Grafik 2.26 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Merangin 2022-2024

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Masyarakat Digital di Kabupaten Merangin menunjukkan peningkatan signifikan dari 28,51 pada tahun 2022 menjadi 43,31 pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan digital masyarakat yang semakin aktif memanfaatkan teknologi untuk komunikasi, pembelajaran, dan aktivitas ekonomi sehari-hari berperan besar dalam hal ini. Selain itu, program-program pemerintah yang masif, seperti pelatihan literasi digital, penyediaan akses internet publik, dan kegiatan berbasis teknologi di tingkat desa, turut mendorong adopsi digital di kalangan masyarakat. Di sisi lain, kemajuan infrastruktur teknologi informasi, khususnya penyediaan akses internet yang semakin merata, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan layanan dengan lebih cepat dan efisien, serta mendorong partisipasi dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah



dalam mengatasi kesenjangan digital telah efektif. Namun, meskipun pencapaian ini signifikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Merangin.

2.3.4 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.4.1 Indeks Daya Saing Infrastruktur

Kabupaten Merangin memiliki potensi untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah perkotaan di Kabupaten Merangin diharapkan dapat menjadi pusat jasa dan perdagangan yang terus maju, dengan fokus pada pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan perdesaan harus diarahkan agar semakin mandiri, dengan memperkuat sektor ekonomi lokal dan memperhatikan keberlanjutan sosial serta lingkungan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan mendorong kemajuan daerah secara keseluruhan. Berikut merupakan kecamatan, ibu kota dan kuantitas desa/kelurahan di Kabupaten Merangin pada tahun 2024.

Tabel 2.21 Nama Kecamatan, Ibukota, dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Merangin Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kelurahan
1	Jangkat	Muara Madras	11	0
2	Jangkat Timur	Rantau Suli	14	0
3	Muara Siau	Muara Siau	17	0
4	Lembah Masurai	Lembah Masurai	15	0
5	Tiang Pumpung	Sekancing	6	0
6	Pamenang	Pamenang	13	1
7	Pamenang Barat	Simpang Limbur Merangin	8	0
8	Renah Pamenang	Meranti	4	0
9	Pemenang Selatan	Tambang Emas	4	0
10	Bangko	Pasar Atas Bangko	4	4
11	Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	6	0
12	Nalo Tantan	Sungai Ulak	7	0
13	Batang Masumai	Lubuk Gaung	10	0
14	Sungai Manau	Sungai Manau	10	0
15	Renah Pembarap	Simpang Parit	12	0
16	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	8	0
17	Tabir	Pasar Rantau Panjang	6	5

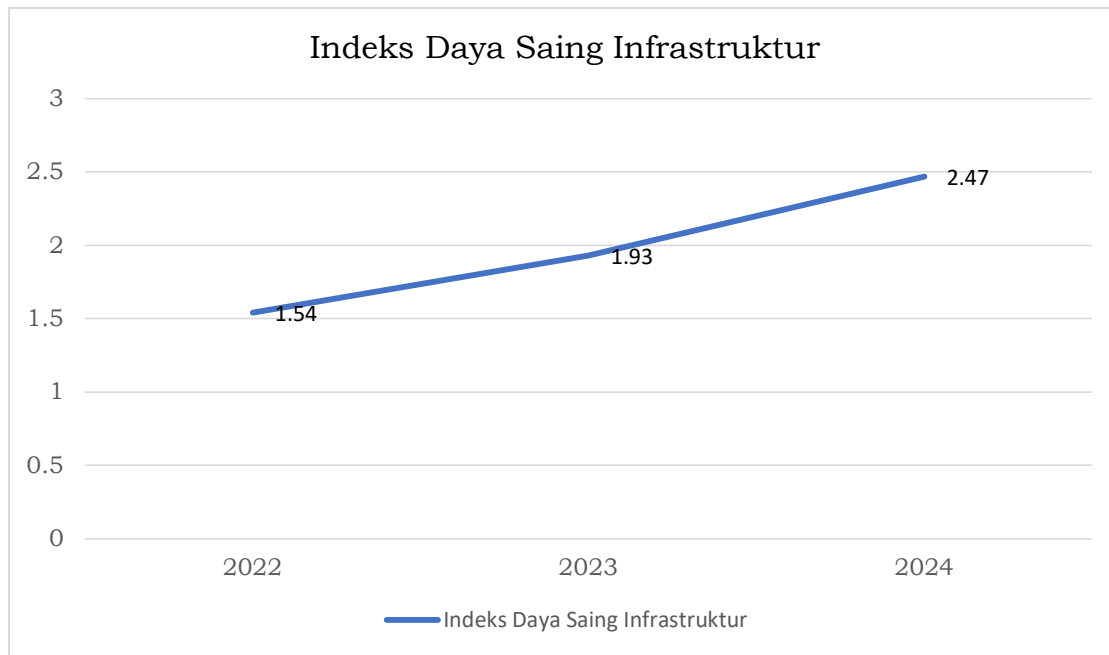


No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kelurahan
18	Tabir Ulu	Muara Jernih	6	0
19	Tabir Selatan	Rawa Jaya	8	0
20	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	7	0
21	Tabir Timur	Sungai Bulian	4	0
22	Tabir Lintas	Mensago	5	0
23	Margo Tabir	Tanjung Rejo	6	0
24	Tabir Barat	Muara Kibul	14	0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2024

Kondisi infrastruktur perkotaan dan pembangunan perdesaan digambarkan melalui data capaian Indeks Daya Saing Infrastruktur dan persentase desa mandiri. Data ini memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai tingkat kemajuan infrastruktur yang ada di wilayah perkotaan serta sejauh mana pembangunan perdesaan telah mencapai tingkat kemandirian. Dengan melihat capaian tersebut, kita dapat menilai seberapa efektif upaya yang telah dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan, serta mengidentifikasi area yang masih membutuhkan perhatian untuk mencapai keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut merupakan kondisi infrastruktur Kabupaten Merangin beserta capaian pembangunan pedesaannya.

Fasilitas dan infrastruktur wilayah memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Daya Saing Fasilitas ditunjukkan dengan Indeks Daya Saing Infrastruktur. Indeks Daya Saing Infrastruktur merupakan suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat kemajuan dan kualitas infrastruktur suatu wilayah atau negara. Berikut merupakan capaian Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Merangin 2022-2024.



Grafik 2.27 Indeks Daya Saing Infrastruktur

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Merangin mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut selama periode 2022-2024. Dengan adanya peningkatan indeks daya saing infrastruktur, dapat diantisipasi bahwa Kabupaten Merangin mengalami perbaikan dalam fasilitas publik, transportasi, akses ke layanan dasar, serta potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan ini dapat menjadi katalisator bagi perkembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Merangin.

2.3.4.2 Desa Mandiri

Pembangunan desa merupakan agenda strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Salah satu konsep yang menjadi fokus utama adalah Desa Mandiri. Konsep ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Desa Mandiri diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Desa ini mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memiliki infrastruktur yang memadai, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Status Desa Mandiri merupakan hasil dari pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Merangin diuraikan sebagai berikut:



Grafik 2.28 Peningkatan Desa Mandiri

Sumber: DPMD Kabupaten Merangin, 2025

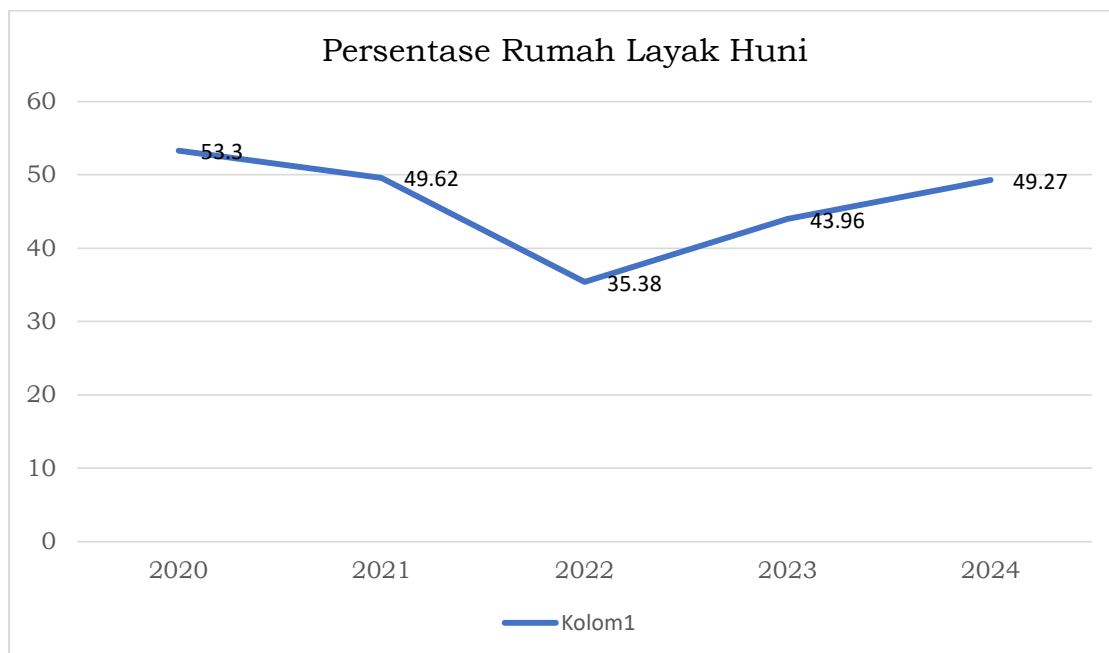
Berdasarkan data Persentase Peningkatan Desa Mandiri di Kabupaten Merangin, terlihat adanya kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2023 walaupun terdapat penurunan di tahun 2024. Tren Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam mengembangkan desa-desa di Kabupaten Merangin. Meski demikian, kenaikan ini masih berada pada tahap awal dan menunjukkan progres yang baik dalam pencapaian kemandirian desa.

Tren kenaikan yang terpantau pada indikator ini menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian desa, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur desa, sudah mulai memberikan dampak positif. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak desa di Kabupaten Merangin menuju status desa mandiri dalam beberapa tahun ke depan. Dengan adanya peningkatan capaian ini, diharapkan Kabupaten Merangin akan mengalami penguatan dalam kapasitas

desa untuk mengelola potensi sumber daya yang ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

2.3.4.3 Persentase Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi berbagai persyaratan penting guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Persyaratan keselamatan bangunan mencakup struktur yang kokoh dan tahan terhadap berbagai risiko seperti bencana alam, serta sistem kelistrikan dan sanitasi yang aman. Selain itu, rumah tersebut harus memiliki luas minimum yang memadai untuk memastikan penghuninya dapat hidup dengan nyaman. Aspek kesehatan juga penting, seperti sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami yang cukup, serta fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit. Dengan memenuhi kriteria-kriteria tersebut, rumah dapat memberikan perlindungan dan kualitas hidup yang optimal bagi penghuninya.



Grafik 2.29 Persentase Rumah Layak Huni

Sumber: Susenas, 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya fluktuasi signifikan dalam persentase rumah layak huni di Kabupaten Merangin selama periode 2020 hingga 2024. Persentase tersebut mengalami penurunan tajam pada satu

periode tertentu, diikuti dengan tren peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya, meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi awal. Pola ini menunjukkan dinamika yang cukup tajam dalam penyediaan atau pemenuhan standar rumah layak huni selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Secara diagnostik, fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penurunan tajam pada salah satu periode dapat mencerminkan dampak dari kondisi ekonomi makro yang kurang stabil, seperti pandemi Covid-19, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pembangunan atau perbaikan rumah tinggal. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah serta realokasi anggaran ke sektor-sektor darurat dapat mengurangi efektivitas program peningkatan kualitas rumah tinggal. Di sisi lain, tren peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya dapat mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi, penguatan kebijakan atau program pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal yang mulai membuahkan hasil. Faktor teknis lain seperti peningkatan akurasi pendataan atau metodologi survei juga dapat berkontribusi pada dinamika angka yang ditampilkan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan, program, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama periode tersebut sangat diperlukan untuk mengidentifikasi akar penyebab serta menentukan strategi intervensi yang lebih efektif ke depan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

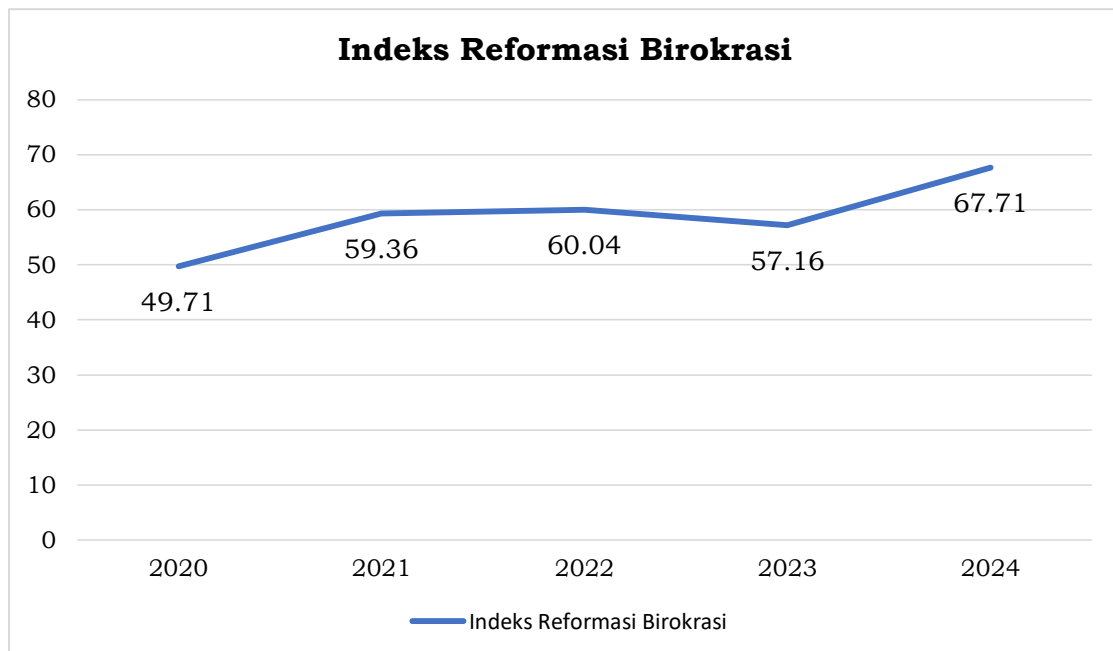
Pelayanan publik dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pengurangan pengangguran. Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Data capaian pada aspek pelayanan umum dipengaruhi oleh dokumen RPJMD periode sebelumnya, yang karenanya dilakukan perubahan sehingga terdapat indikator yang dihitung sebelum perubahan dan tidak digunakan kembali/diganti saat perubahan dokumen.

Beberapa capaian indikator untuk Aspek Pelayanan Umum dijelaskan sebagai berikut.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indikator ini mencakup perbaikan pada struktur kelembagaan, proses bisnis, tata kelola, dan penguatan kapasitas serta integritas aparatur. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



Grafik 2.30 Indeks Reformasi Birokrasi

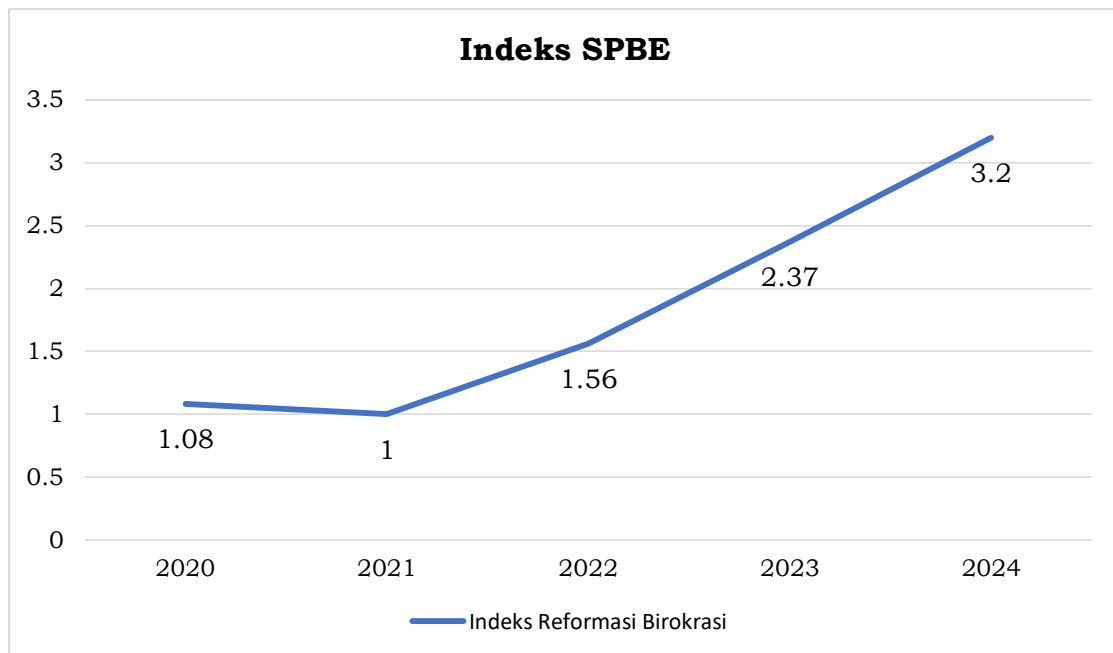
Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Sejak tahun 2020, Kabupaten Merangin menunjukkan kemajuan bertahap dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Nilai IRB meningkat dari 49,71 (kategori C) pada 2020 menjadi 59,36 (kategori CC) pada 2021, dan mencapai capaian tertinggi sebesar 60,04 (kategori B) pada 2022. Ini mencerminkan peningkatan kualitas dalam tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik. Namun, pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 57,16 (kategori CC), yang menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan momentum perbaikan birokrasi. Selanjutnya pada tahun

2024 terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam pencapaian reformasi birokrasi Kabupaten Merangin yakni dengan nilai 67,71 (kategori B). Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh dan penguatan strategi reformasi yang konsisten.

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah alat ukur untuk menilai tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan, yang mencakup aspek tata kelola, pelayanan publik, dan manajemen internal yang terintegrasi secara digital. Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).



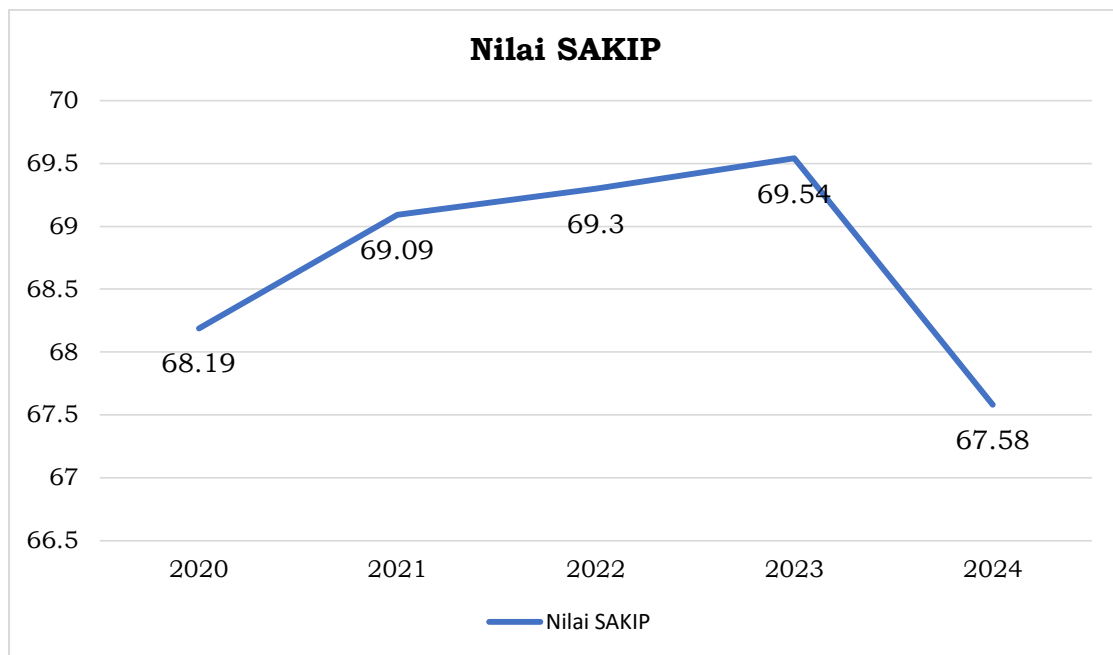
Grafik 2.31 Indeks SPBE

Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Kabupaten Merangin menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan SPBE. Setelah mencatat nilai stagnan sebesar 1,08 pada tahun 2020 dan penurunan ke 1,00 pada 2021, terjadi lonjakan menjadi 1,56 pada 2022. Peningkatan ini semakin kuat di tahun 2023 dengan capaian 2,37. Kemudian terdapat kenaikan pada tahun 2024 sebesar 3,20. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi pelayanan publik, peningkatan infrastruktur TIK, serta pelatihan aparatur untuk mendukung transformasi digital yang lebih luas.

2.4.1.3 Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

SAKIP merupakan sistem integratif yang menggabungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja dalam satu kerangka akuntabilitas pemerintahan. Nilai SAKIP mencerminkan seberapa baik instansi pemerintah merencanakan program, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi hasil berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan akuntabel.



Grafik 2.32 Nilai SAKIP

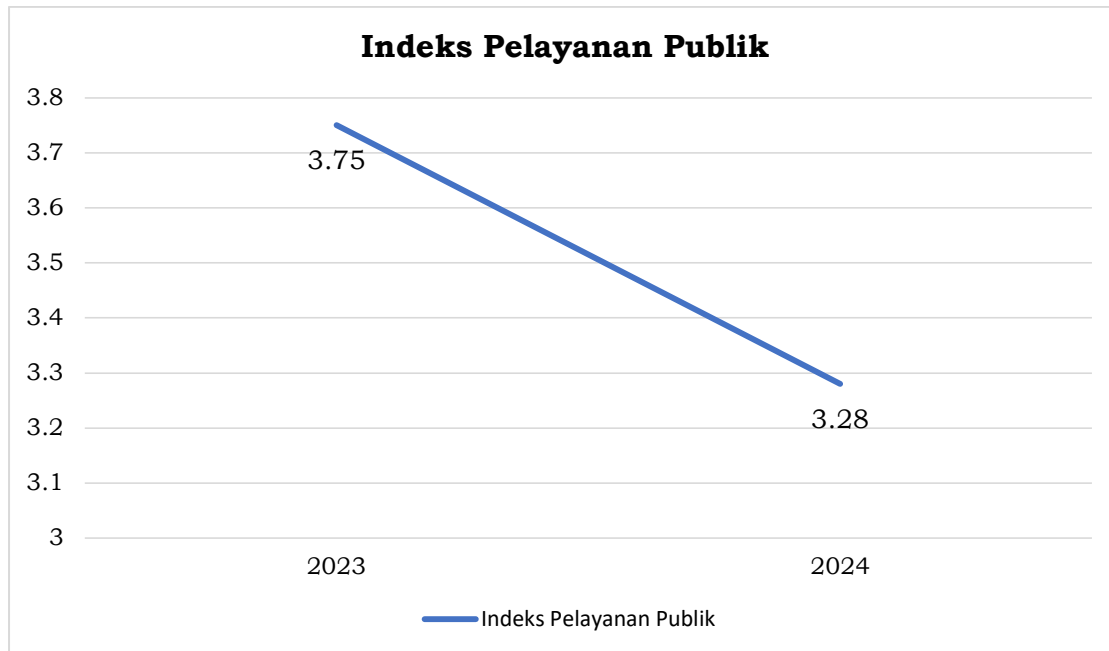
Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Selama periode 2020–2024, nilai SAKIP Kabupaten Merangin konsisten berada dalam kategori “B”, menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik. Nilai tercatat meningkat dari 68,19 (2020), 69,09 (2021), 69,30 (2022), 69,54 (2023) hingga 67,58 pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan capaian fluktuatif dalam konteks akuntabilitas kinerjanya. Namun, untuk mencapai kategori lebih tinggi, diperlukan penguatan manajemen kinerja berbasis hasil serta peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb)

Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan



Grafik 2.33 Indeks Pelayanan Publik

Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Pada tahun 2023, nilai IPP Kabupaten Merangin adalah sebesar 3,75. Capaian itu menurun menjadi 3,28 pada tahun 2024. Penurunan nilai IPP Kabupaten Merangin dari 3,75 pada tahun 2023 menjadi 3,28 pada tahun 2024 mengindikasikan adanya penurunan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan publik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang dapat menghambat kinerja pelayanan yang optimal. Selain itu, keterlambatan atau ketidakefektifan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana, seperti fasilitas yang kurang memadai atau sistem teknologi informasi yang tidak terintegrasi, dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat atau tidak efisien. Penurunan IPP ini juga bisa mencerminkan kurangnya akses dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik, yang berujung pada layanan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.



2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1 Persentase Penegakan Hasil Peraturan Daerah (Perda)

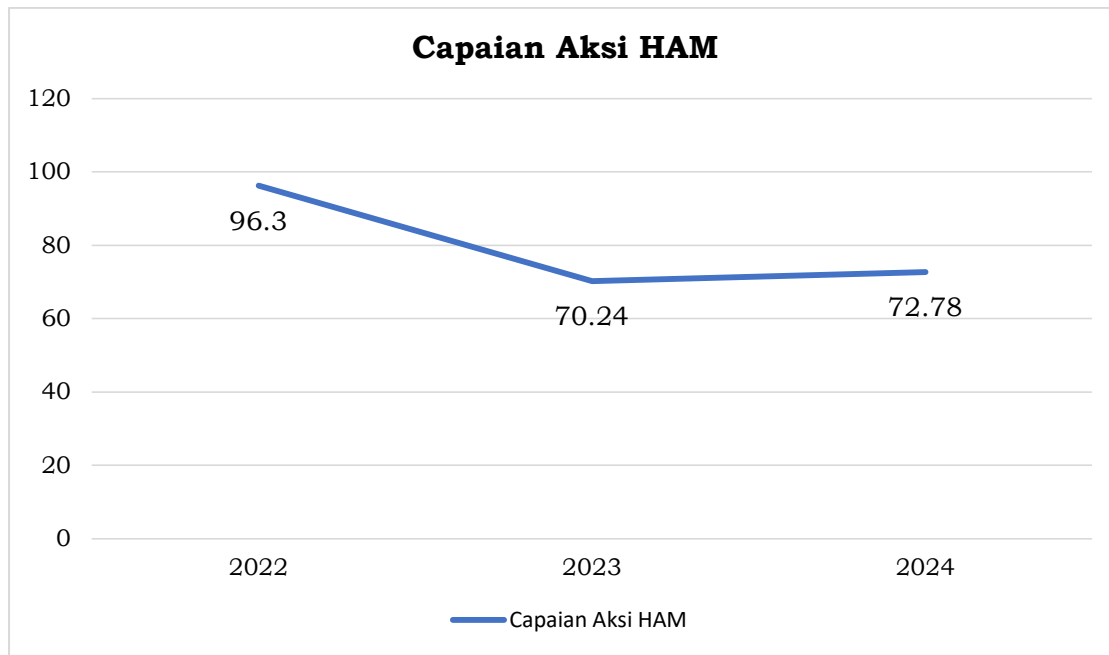
Persentase Penegakan Hasil Peraturan Daerah (Perda) adalah indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan regulasi daerah di lapangan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengawasi, menegakkan, dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap Perda yang telah disahkan. Semakin tinggi persentase penegakan, semakin baik pula tingkat efektivitas hukum daerah dalam mendukung keteraturan sosial dan tata kelola yang berkeadilan.

Di Kabupaten Merangin, capaian penegakan Perda terus menunjukkan kondisi yang positif dengan capaian 100% dari tahun 2021-2024. Capaian ini menandakan adanya konsistensi dalam memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda. Capaian ini tidak lepas dari berbagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Merangin, seperti penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan hukum daerah, peningkatan koordinasi lintas OPD, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Selain itu, adopsi teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan turut berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Tingkat penegakan yang terus meningkat ini menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang makin responsif dan berorientasi pada kepastian hukum. Untuk menjaga tren positif ini, diperlukan pengembangan inovasi kebijakan penegakan hukum daerah yang lebih adaptif serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan sosial terhadap implementasi Perda.

2.4.2.2 Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)

Capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hasil dari pelaksanaan program-program yang dirancang untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM di suatu wilayah, baik itu tingkat nasional maupun daerah. Aksi HAM merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah.



Grafik 2.34 Capaian Aksi HAM

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data capaian Aksi HAM di Kabupaten Merangin, terlihat adanya perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan nilai capaian akhir sebesar 72,78%. Capaian ini mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 yang mencapai 96,3% ke angka 70,24% pada tahun 2023. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan dan tindakan terkait hak asasi manusia (HAM) yang terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi. Sementara itu, angka yang sedikit meningkat pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya pemulihan dan perbaikan dalam implementasi kebijakan HAM di daerah tersebut. Kabupaten Merangin perlu lebih memperhatikan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan implementasi HAM, serta menanggulangi hambatan yang ada agar capaian Aksi HAM dapat lebih optimal dan berkelanjutan ke depannya..

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang



komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. Untuk Kabupaten/Kota Indeks Daya Saing Daerah terdapat 48 Indikator.

Tabel 2.22 Indeks Daya Saing Daerah

Tahun	Indikator	Angka
2022	Indeks Daya Saing Daerah	2,81
2023	Indeks Daya Saing Daerah	3,02
2024	Indeks Daya Saing Daerah	3,33

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

Pada tahun 2022, indeks daya saing daerah Kabupaten Merangin mencapai 2,81, yang mengindikasikan posisi kompetitif Kabupaten Merangin dalam hal faktor-faktor ekonomi, infrastruktur, inovasi, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan IDSD Kabupaten Merangin meningkat menjadi 3,02, dan meningkat kembali sebesar 3,33 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi dan kondisi usaha di wilayah tersebut. Kenaikan ini dapat mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Merangin secara keseluruhan. Dengan adanya indeks daya saing yang lebih tinggi, diharapkan Kabupaten Merangin dapat terus menjadi destinasi investasi yang menarik serta memperkuat posisinya dalam perekonomian regional maupun nasional.

2.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 merupakan gambaran kinerja urusan yang berisi capaian Indikator Kinerja Kunci. Lebih Lanjut capaian kinerja urusan pemerintahan daerah Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:



2.4.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.4.1.1 Urusan Pendidikan

Tabel 2.23 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	53,69	91,36	100,00	89,63	86,31
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,48	96,70	100,00	94,32	111,11
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	52,14	46,58	100,00	44,48	84,95
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,16	6,9	7,48	4,33	63,33

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi pada tingkat partisipasi warga negara dalam beberapa program pendidikan dari tahun 2020 hingga 2024. Beberapa indikator menunjukkan tren kenaikan yang stabil, sementara yang lainnya mengalami penurunan atau fluktuasi yang lebih signifikan. Salah satu indikator yang menunjukkan kenaikan stabil adalah tingkat partisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD), yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Di sisi lain, indikator tingkat partisipasi pada kelompok usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama cenderung mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir termasuk tingkat partisipasi pada pendidikan dasar dan tingkat partisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Secara diagnostik, fluktuasi dan penurunan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan pendidikan yang diterapkan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta aksesibilitas dan kualitas fasilitas pendidikan. Sebagai contoh, penurunan tingkat partisipasi pada pendidikan menengah pertama dapat disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam akses pendidikan, baik karena faktor geografis maupun ekonomi, yang menghambat kemampuan keluarga untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, perubahan kebijakan yang terjadi pada tingkat pusat atau daerah juga bisa memengaruhi tingkat partisipasi tersebut, terutama dalam hal penyediaan anggaran dan dukungan untuk program pendidikan. Fluktuasi dalam beberapa indikator lainnya juga bisa terkait dengan perubahan dalam prioritas anggaran daerah, yang lebih terfokus pada sektor lain, atau kurangnya efektivitas dalam program pendampingan pendidikan yang diimplementasikan. Faktor-faktor ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh penyebab perubahan dalam tingkat partisipasi pendidikan di daerah tersebut.

2.4.4.1.2 Urusan Kesehatan

**Tabel 2.24 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan di Kabupaten Merangin Tahun 2020-
2024**

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,11	0,10	1,06	1,09	1,22
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	82,81	85,26	100,00	86,26	63,53
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	84,08	88,28	96,40	88,50	74,52
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	88,93	90,54	99,69	90,30	82,66
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	90,44	90,68	100,00	89,15	77,82
Persentase anak usia pendidikan dasar yang	46,13	91,95	92,36	95,95	95,95



IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	23,06	66,93	74,35	61,72	69,72
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62,27	100,00	100,00	96,35	95,46
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,30	64,96	74,81	76,37	76,55
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	96,29	98,36	98,90	99,03
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	78,82	90,14	98,04	98,26	98,88
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00	65,98	62,81	92,82	95,20
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	67,33	55,40	68,21	54,60

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi dan tren kenaikan pada beberapa indikator pelayanan kesehatan dari tahun 2020 hingga 2024. Beberapa indikator, seperti persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi, persentase penderita HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV, dan persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, menunjukkan hasil yang relatif stabil dan bahkan mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, terdapat juga indikator yang menunjukkan penurunan pada tahun-tahun tertentu, seperti rasio daya tampung rumah sakit rujukan yang mengalami penurunan secara bertahap. Selain itu, beberapa indikator lainnya, seperti persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, juga mengalami fluktuasi.



Secara diagnostik, fluktuasi dan kenaikan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik internal maupun eksternal. Misalnya, peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya dapat berhubungan dengan program pemerintah daerah yang fokus pada peningkatan infrastruktur dan akreditasi rumah sakit. Penurunan pada rasio daya tampung rumah sakit rujukan bisa disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan, sementara kapasitas rumah sakit tetap atau tidak mengalami penambahan yang signifikan. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebijakan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang deteksi dini penyakit, serta program-program intervensi yang lebih intensif bisa menjadi alasan mengapa indikator tertentu menunjukkan hasil yang lebih baik atau lebih buruk.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan dalam anggaran daerah, yang dapat memengaruhi kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Ketersediaan sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta evaluasi terhadap efektivitas program kesehatan yang berjalan, juga dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi fluktuasi dan hasil yang tercatat dalam data tersebut. Sebagai contoh, fluktuasi dalam pelayanan kesehatan terkait TBC atau diabetes melitus juga dipengaruhi oleh ketepatan dan cakupan skrining serta pengobatan yang tersedia. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali faktor-faktor yang lebih mendalam terkait perubahan-perubahan ini.

2.4.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan

Tabel 2.25 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	32,74	32,74	32,74	32,74	33,22



IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00	0,00	100,00	100,00	33,22
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,98	40,87	64,99	64,99	15,55
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	50,49	50,99	24,77	65,82	74,36
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	4,57	31,51	32,77	32,77	89,59
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	7,11	73,69	71,90	41,00	41,50
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	21,40	61,79	61,79	62,18	16,01
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi pada beberapa indikator yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan perencanaan ruang dari tahun 2020 hingga 2024. Beberapa indikator menunjukkan tren stabil dan kenaikan, seperti persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air minum domestik, yang menunjukkan peningkatan signifikan. Namun, terdapat juga indikator yang mengalami penurunan, seperti tingkat kematian jalan kabupaten/kota yang menunjukkan fluktuasi negatif pada beberapa tahun terakhir. Indikator lain, seperti rasio daya tampung rumah sakit rujukan dan jumlah operator teknis yang memiliki sertifikat kompetensi, menunjukkan fluktuasi yang lebih tidak teratur.

Secara diagnostik, fluktuasi dan kenaikan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kenaikan pada indikator yang terkait dengan akses terhadap air minum dan pengolahan air domestik dapat mencerminkan peningkatan kualitas infrastruktur publik dan lebih banyaknya proyek yang difokuskan pada penyediaan layanan dasar tersebut. Program pemerintah daerah yang berfokus pada perbaikan jaringan air bersih dan pengelolaan air domestik juga bisa menjadi faktor yang mendorong kenaikan ini.

Namun, penurunan pada tingkat kematian jalan kabupaten/kota dan indikator lainnya bisa terkait dengan kurangnya pemeliharaan jalan yang memadai, perubahan kebijakan atau keterbatasan anggaran yang mempengaruhi proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, fluktuasi dalam jumlah operator teknis yang memiliki sertifikat kompetensi juga bisa dipengaruhi oleh faktor pengembangan sumber daya manusia yang masih terbatas atau kurangnya pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam terkait keberlanjutan program, efektivitas anggaran, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur publik dan pengembangan kapasitas teknis di daerah tersebut.

2.4.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Tabel 2.26 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Merangin 2020-2024**

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	0,00	7,72	100,00	9,96	63,53
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10,72	9,27	9,27	13,89	9,82



IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,03	80,00	0,00	4,48	55,67

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang di atas, terdapat fluktuasi pada beberapa indikator diantaranya adalah Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Sementara terdapat beberapa indikator menunjukkan tren yang relatif stabil, seperti penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi masyarakat yang terdampak dan rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas air minum dan penurunan jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Secara diagnostik, fluktuasi pada beberapa indikator, seperti persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani, berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dan jumlah perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), dapat dijelaskan oleh beberapa faktor teknis yang mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas infrastruktur yang mempengaruhi proses pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam manajemen proyek perumahan juga menjadi tantangan yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Di sisi lain, peningkatan kualitas perencanaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta berkontribusi pada stabilitas indikator seperti penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana, relokasi masyarakat yang terdampak, serta penurunan jumlah unit RTLH. Penerapan kebijakan yang terfokus pada akses air minum dan prasarana dasar lainnya juga mendorong pencapaian yang stabil, karena kebijakan tersebut didukung oleh pendanaan yang lebih terarah dan prioritas yang jelas dari pemerintah. Semua faktor ini saling berinteraksi dalam mempengaruhi fluktuasi dan stabilitas indikator-indikator tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada

kemajuan pembangunan perumahan dan infrastruktur yang layak bagi masyarakat.

2.4.4.1.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.27 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	63,64	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,00	100,00	66,67	66,67	98,83
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,00	100,00	50,00	66,67	0,30
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,00	0,00	100,00	97,57	35,92
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	39,29	100,00	100,00	100,00	100,00
Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	0,00	17,42	10,00	10,00	7,50

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi pada beberapa indikator yang terkait dengan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dari tahun 2020 hingga 2024. Beberapa indikator menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat, seperti persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, yang mencapai angka 100% pada tahun-tahun berikutnya. Indikator lain, seperti persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, menunjukkan angka yang relatif stabil dan hampir mencapai 100%. Selain itu, terdapat indikator yang menunjukkan kenaikan yakni waktu tanggap (*response time*) penanganan

kebakaran, yang mengalami capaian signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara diagnostik, fluktuasi yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Kenaikan pada indikator yang terkait dengan penyelesaian gangguan trantibum dan pelayanan penyelamatan korban kebakaran dapat dipengaruhi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal pelatihan personel maupun dalam pengembangan sistem koordinasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik. Selain itu Pemerintah daerah telah mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan respons terhadap kejadian darurat. Sementara, kenaikan pada indikator waktu tanggap penanganan kebakaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya menurunnya kasus dan bahaya kebakaran, digitalisasi pelayanan, adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

2.4.4.1.6 Urusan Sosial

Tabel 2.28 Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	15,18	47,72	31,81	18,93	7,24
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	20	55	40,4	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang signifikan pada beberapa indikator terkait penanganan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan korban bencana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu indikator yang mengalami fluktuasi besar adalah persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai, yang

menunjukkan angka tinggi pada tahun tertentu, namun mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun berikutnya. Sementara itu, indikator lain yang menunjukkan fluktuasi adalah persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Secara diagnostik, fluktuasi pada indikator penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya disebabkan oleh perbedaan dalam implementasi program kesejahteraan sosial, keterbatasan anggaran, atau perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi distribusi bantuan. Program penanganan untuk kelompok ini masih mengalami tantangan dalam hal cakupan, pengawasan, dan efektivitas distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. Penurunan atau fluktuasi angka pada kelompok rentan ini bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kesulitan dalam pendataan yang akurat, atau ketergantungan pada program yang bergantung pada kondisi tertentu yang tidak selalu terduga. Di sisi lain, penanganan korban bencana alam menunjukkan bahwa upaya tanggap darurat, distribusi bantuan, serta koordinasi antarlembaga penanggulangan bencana telah berjalan dengan baik, dan sistem yang terdapat cukup responsif terhadap kebutuhan korban walaupun masih terdapat peningkatan kesiapsiagaan dalam merespon bencana serta penguatan sistem informasi dan manajemen darurat yang perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa sektor, perlu adanya perhatian lebih pada penguatan program kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan agar fluktuasi ini dapat diminimalkan. Evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas kebijakan dan alokasi anggaran untuk kelompok rentan dan korban bencana sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

2.4.4.2 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

2.4.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2.29 Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	0	68	68	100
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0	0,068	0,26	0,29	0,47
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	51,71	54,02	56,64	61,97	60,54
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	0	100	52,63	0	22,63
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	48,86	0	39,42	9,92	16,23

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan pada beberapa indikator terkait dengan tenaga kerja dari tahun 2020 hingga 2024. Beberapa indikator menunjukkan kenaikan yang tajam pada tahun-tahun tertentu, seperti persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Selain itu, indikator produktivitas tenaga kerja juga menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, meskipun terdapat penurunan di tahun 2024. Namun, terdapat juga indikator yang menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan turun seperti persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja, yang mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir.

Secara diagnostik, fluktuasi dan kenaikan pada indikator-indikator tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Kenaikan pada indikator tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan tata kelola kerja yang layak bisa disebabkan oleh peningkatan kualitas pelatihan, kebijakan pemerintah daerah yang mendukung sertifikasi tenaga kerja, dan kesadaran perusahaan untuk menerapkan standar yang lebih baik dalam pengelolaan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dapat dipengaruhi oleh efisiensi

yang lebih baik dalam pelaksanaan pekerjaan dan adopsi teknologi baru yang meningkatkan kinerja pekerja.

Namun, penurunan pada indikator tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja bisa disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, seperti penurunan jumlah lowongan kerja yang tersedia, keterbatasan dalam jangkauan layanan antarkerja, atau perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi program penempatan tenaga kerja. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih dinamis, dengan lebih banyak tenaga kerja yang memilih untuk bekerja secara mandiri atau di luar sistem formal.

Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja, serta efektivitas program pelatihan dan penempatan kerja berperan penting dalam fluktuasi yang terjadi. Untuk itu, evaluasi dan penguatan kebijakan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan industri sangat penting agar fluktuasi ini dapat diminimalkan dan hasil yang lebih stabil dapat tercapai.

2.4.4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel 2.30 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Merangin 2020-2024**

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4,57	70,29	94,75	94,25	1,18
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100*	100*	100,00	100,00	100,00
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,00	13,87	18,50	15,36	7,99

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang signifikan pada beberapa indikator terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu indikator yang menunjukkan fluktuasi besar adalah persentase anggaran perencanaan daerah (ARG) pada belanja langsung APBD, yang mengalami peningkatan tajam dari tahun ke

tahun, namun menurun drastis pada tahun terakhir. Di sisi lain, indikator yang menunjukkan stabilitas tinggi adalah persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait, yang tetap berada pada angka 100% sepanjang periode, menunjukkan efektivitas dalam penanganan kasus kekerasan anak. Namun, terdapat penurunan pada indikator rasio kekerasan terhadap perempuan, yang mengalami peningkatan pada beberapa tahun, meskipun menunjukkan penurunan pada tahun terakhir.

Secara diagnostik, fluktuasi pada anggaran perencanaan daerah dapat dipengaruhi oleh perubahan prioritas anggaran daerah atau fluktuasi dalam kebijakan pemerintah yang mengarahkan lebih banyak dana untuk sektor-sektor lain yang lebih mendesak, sehingga mempengaruhi pemberdayaan perempuan. Penurunan drastis pada tahun terakhir juga mencerminkan adanya perubahan dalam perencanaan anggaran atau program prioritas yang berbeda.

Sementara itu, indikator yang menunjukkan hasil stabil dalam penanganan kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai peningkatan efektivitas program perlindungan anak yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga terkait, dengan koordinasi yang baik dalam menangani korban kekerasan. Penurunan pada indikator rasio kekerasan terhadap perempuan dapat disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat dan intervensi yang lebih baik dalam melaporkan dan menangani kasus-kasus kekerasan. Meskipun demikian, fluktuasi pada rasio ini dapat juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang menghambat upaya-upaya pencegahan kekerasan, serta ketimpangan dalam penegakan hukum dan penyediaan layanan perlindungan yang memadai bagi korban.

Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti perubahan kebijakan anggaran, peningkatan kualitas program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap isu kekerasan bisa menjadi penyebab utama fluktuasi yang tercatat. Untuk itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas kebijakan dan program yang terdapat serta pemantauan berkelanjutan terhadap keberhasilan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah tersebut.



2.4.4.2.3 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.31 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengentasan desa tertinggal	54,34	33,33	37,5	70,00	33,33
Persentase peningkatan status desa mandiri	25,19	13,38	21,18	41,66	37,88

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang signifikan pada persentase pengentasan desa tertinggal dan peningkatan status desa mandiri. Pada indikator pengentasan desa tertinggal, terdapat pergerakan yang bervariasi, dengan angka tertinggi mencapai 700,00 pada satu titik waktu, namun diikuti dengan penurunan yang cukup tajam di titik lainnya, khususnya pada tahun terakhir yang tercatat di angka 33,33. Sementara itu, indikator peningkatan status desa mandiri menunjukkan kecenderungan fluktuatif.

Fluktuasi yang terjadi pada kedua indikator tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan desa, alokasi anggaran, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Penurunan yang signifikan pada persentase pengentasan desa tertinggal dan peningkatan status desa mandiri pada titik waktu terakhir dapat menunjukkan adanya perubahan prioritas kebijakan, adanya kendala dalam implementasi program, atau penurunan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Faktor eksternal seperti dampak sosial ekonomi, seperti perubahan kondisi pasar atau akses ke fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program desa, juga dapat menjadi penyebab fluktuasi tersebut. Selain itu, penurunan yang terjadi pada indikator peningkatan status desa mandiri bisa jadi berkaitan dengan keterbatasan dana atau ketidaktersediaan dukungan yang cukup untuk mendukung upaya desa dalam mencapai kemandirian.



2.4.4.2.4 Urusan Pangan

Tabel 2.32 Urusan Pangan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	13,7	10	10,85	12,4	8,58

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang signifikan pada persentase ketahanan pangan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada awal periode, ketahanan pangan tercatat cukup tinggi, namun kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2021, yang diikuti dengan kenaikan yang tajam pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 angka ketahanan pangan mengalami penurunan lagi.

Secara diagnostik, fluktuasi yang terjadi pada indikator ketahanan pangan ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Penurunan tajam pada tahun 2021 berkaitan dengan gangguan dalam rantai pasokan pangan yang disebabkan oleh bencana alam, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau faktor-faktor lain yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan. Sebaliknya, kenaikan yang tajam pada tahun 2023 bisa dipengaruhi oleh upaya pemulihan dan kebijakan yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, seperti peningkatan cadangan pangan lokal dan perbaikan sistem distribusi pangan di tingkat daerah.

Penurunan kembali pada tahun 2024 berkaitan erat dengan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan pangan, seperti fluktuasi iklim, perubahan harga pangan global, atau kebijakan yang kurang mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan lokal. Perubahan dalam kebijakan anggaran dan prioritas daerah yang mengarah pada sektor lain juga bisa memengaruhi alokasi sumber daya untuk ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih stabil dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.

2.4.4.2.5 Urusan Pertanahan

Tabel 2.33 Urusan Pertanahan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,00	0,00	100,00	100,00	59,23
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	81,38	81,38	100,00	100,00	100,00
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tersedianya Tanah Objek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,00	0,00	79,33	100,00	41,00
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80,00	75,00	100,00	100,00	88,89

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang signifikan pada beberapa indikator yang terkait dengan urusan pertanahan dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu indikator yang mengalami fluktuasi besar adalah persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya, yang tercatat sangat tinggi pada tahun-tahun awal, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2024. Indikator lain yang mengalami fluktuasi adalah persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang menunjukkan angka yang relatif stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun tertentu. Terkait dengan ketersediaan tanah untuk pembangunan, indikator lain seperti persentase tanah yang siap didistribusikan menunjukkan peningkatan, namun terdapat penurunan yang cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir.

Secara diagnostik, fluktuasi pada indikator pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dengan

kenyataan di lapangan, masalah dalam pengawasan penggunaan tanah, atau perubahan dalam kebijakan perizinan yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penggunaan tanah. Penurunan pada indikator ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau pengawasan dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya, atau ketidaksesuaian dalam perencanaan yang menyebabkan beberapa proyek tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Peningkatan pada ketersediaan tanah yang siap didistribusikan bisa menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Namun, penurunan pada beberapa indikator lainnya, seperti penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, dipengaruhi oleh faktor administratif atau kendala dalam proses persetujuan dan alokasi lahan. Beberapa faktor eksternal, seperti fluktuasi harga tanah atau kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi distribusi lahan, juga dapat memengaruhi fluktuasi ini.

Secara keseluruhan, untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan tanah dan perencanaan yang lebih baik di masa depan, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan tata ruang dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan lahan. Perubahan dalam kebijakan atau program terkait pertanahan, serta penyesuaian dengan kebutuhan pembangunan daerah, akan sangat mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan lahan di Kabupaten Merangin.

2.4.4.2.6 Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.34 Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten /Kota	46,00	69,20	66,53	70,05	65,82
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	42,00	48,60	48,56	67,20	70,15
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	2,85	1,5	0,77	1,98	7,69

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025



Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang signifikan pada beberapa indikator yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 hingga 2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan tren yang cukup positif, dengan peningkatan signifikan pada beberapa tahun, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Indikator pengelolaan sampah juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan angka yang lebih tinggi setiap tahunnya. Namun, terdapat fluktuasi besar pada indikator ketaatan terhadap izin lingkungan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Secara diagnostik, fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Peningkatan pada indikator IKLH dan pengelolaan sampah dapat mencerminkan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kebijakan dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terkait pentingnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini bisa didorong oleh keberhasilan program-program pengelolaan sampah, pendidikan lingkungan, serta keberlanjutan dari kebijakan lingkungan hidup yang lebih baik.

Namun, penurunan pada indikator kepatuhan terhadap izin lingkungan berkaitan dengan tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait izin lingkungan yang diberikan kepada pelaku usaha atau sektor lain yang berpotensi merusak lingkungan. Penurunan tersebut juga bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait dalam melakukan pemantauan yang efektif, atau ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, fluktuasi dalam kepatuhan terhadap izin lingkungan ini juga bisa dipengaruhi oleh perubahan regulasi, yang membuat implementasi menjadi lebih kompleks atau kurang mendukung penerapan kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan, perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan, kebijakan yang ada, serta prioritas anggaran yang berfokus pada sektor lingkungan hidup. Program-program untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan kualitas hidup di daerah tersebut harus terus didorong, agar fluktuasi ini dapat



diminimalkan dan tercapai tujuan jangka panjang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2.4.4.2.7 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel 2.35 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Merangin 2020-2024**

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Perekaman KTP elektronik	103,47	105,68	97,49	99,12	99,52
Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	35,00	45,54	42,48	45,19	48,44
Kepemilikan akta kelahiran	100,57	92,42	99,70	99,68	99,46
Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	1	1	1	1	1

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi pada beberapa indikator yang terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu indikator yang menunjukkan fluktuasi besar adalah persentase kepemilikan KTP elektronik yang awalnya tinggi, tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya. Meskipun demikian, indikator ini menunjukkan sedikit pemulihan di tahun 2024. Di sisi lain, indikator terkait kepemilikan akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) menunjukkan peningkatan yang stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun tertentu. Selain itu pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah masih terbilang minim dan belum berjalan dengan maksimal dalam lima tahun terakhir.

Secara diagnostik, fluktuasi yang terjadi pada indikator KTP elektronik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan dalam proses perekaman data atau masalah administratif yang menghambat penerbitan KTP elektronik dalam jumlah yang lebih besar. Penurunan tersebut juga bisa terkait dengan masalah teknis dalam pengelolaan data kependudukan, atau hambatan dalam distribusi layanan kepada masyarakat

yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Peningkatan pada indikator kepemilikan akta kelahiran dan KIA menunjukkan perbaikan dalam pelayanan publik, dengan adanya upaya yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk memastikan semua anak mendapatkan hak atas identitas mereka sejak dini.

Stagnansi yang terjadi pada jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dapat disebabkan oleh perbedaan dalam kepatuhan dan koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan penerapan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan data kependudukan. Sementara fluktuasi pada capaian kepemilikan akta kelahiran diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran, serta persepsi akan proses yang rumit atau Panjang. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan, penting untuk terus memperbaiki sistem administrasi kependudukan dengan memastikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen penting, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait. Evaluasi lebih lanjut terhadap kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data kependudukan dan pelaksanaan kebijakan terkait sangat diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih efisien dan inklusif.

2.4.4.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Tabel 2.36 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Merangin 2020-2024**

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28	2,11	2,18	2,18	2,18
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	79,86	75,30	76,30	79,81	78,17
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	6,56	9,69	7	6,02	3,97

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan pada ketiga indikator yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2024.

Indikator pertama, yaitu Angka Kelahiran Total (TFR), menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan sedikit di tahun 2021, angka ini kembali naik di tahun berikutnya dan berakhir sedikit meningkat pada 2024. Pada indikator kedua, yaitu persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), terdapat fluktuasi yang lebih besar. Meskipun dimulai dengan angka yang relatif tinggi, terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2021, diikuti dengan fluktuasi lebih lanjut hingga tahun 2024, meskipun trennya cenderung lebih stabil menjelang akhir periode. Indikator ketiga, yaitu persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun fluktuasi tetap ada, terjadi penurunan signifikan pada beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan ber-KB di kabupaten Merangin.

Secara diagnostik, fluktuasi dan perubahan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Penurunan atau fluktuasi pada mCPR bisa jadi terkait dengan kurangnya akses atau efektivitas program kontrasepsi modern yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Program penyuluhan atau distribusi kontrasepsi tidak mencapai seluruh kelompok sasaran, atau terdapat hambatan sosial dan budaya yang mempengaruhi tingkat adopsi kontrasepsi. Sedangkan penurunan *unmet need* menunjukkan adanya keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan KB yang dipengaruhi oleh peningkatan program sosialisasi, distribusi, dan aksesibilitas alat kontrasepsi yang lebih baik. Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan termasuk perubahan dalam kebijakan daerah, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana, serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan keluarga untuk menggunakan kontrasepsi modern. Selain itu, fluktuasi yang terjadi bisa juga disebabkan oleh perubahan prioritas anggaran daerah atau perubahan dalam implementasi program-program terkait yang mempengaruhi kinerja pada indikator-indikator tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KB dan aksesibilitas kontrasepsi diperlukan.

2.4.4.2.9 Urusan Perhubungan

Tabel 2.37 Urusan Perhubungan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio konektivitas kabupaten/kota	0	0	0,8	0,8	0,8
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0	0,72	0	0	0,42

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Secara diagnostik, kondisi stabil pada rasio konektivitas jalan dari tahun 2022 hingga 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang terus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Stabilitas ini juga disebabkan oleh peningkatan aksesibilitas antar wilayah, yang memungkinkan pergerakan barang dan orang tetap terjaga dengan baik. Meskipun rasio konektivitas jalan stabil, penurunan kinerja lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan kapasitas jalan di beberapa titik, atau penurunan kualitas jalan akibat cuaca ekstrem dan kurangnya perawatan di beberapa lokasi. Selain itu, proyek infrastruktur yang belum selesai atau sedang dalam tahap konstruksi mempengaruhi kinerja lalu lintas di beberapa daerah. Upaya untuk menambah kapasitas jalan, seperti perluasan jalan atau pembangunan jalur alternatif, diperlukan untuk mengatasi penurunan kinerja lalu lintas tersebut.

2.4.4.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.38 Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	0	0	0	0
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	0	5,26	17,09	23,00	36,36
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	4,23

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada indikator perkembangan layanan publik di Kabupaten Merangin. Secara diagnostik, capaian ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya peningkatan pada kualitas layanan publik *online* yang terintegrasi dan adanya peningkatan infrastruktur yang memadai. Sementara belum optimalnya akses internet dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau kurangnya prioritas dalam meningkatkan kapasitas perangkat daerah pada sektor ini. Sementara itu, capaian pada persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik bisa dipengaruhi oleh ketidakseimbangan distribusi informasi yang tidak merata, keterbatasan dalam sistem komunikasi yang efektif, serta minimnya akses masyarakat terhadap platform atau kanal informasi yang tersedia. Oleh karena itu, faktor-faktor internal seperti kebijakan, alokasi anggaran, dan infrastruktur teknologi perlu diperhatikan secara lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab fluktuasi ini.

2.4.4.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 2.39 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	10,10	8,97	19,08	33,33	36,84
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	80,56	85,75	88,48	90,64	15,21

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi pada hasil Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam dua bidang utama, yakni "Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas" dan "Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha" dari tahun 2020 hingga 2024. Pada umumnya, kedua indikator ini menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, namun dengan variasi fluktuasi yang cukup besar. Kenaikan yang lebih stabil dapat terlihat pada indikator usaha mikro yang menjadi wirausaha, meskipun terdapat penurunan yang tajam pada tahun 2024. Sementara itu, peningkatan pada koperasi yang

berkualitas menunjukkan variasi yang lebih besar dengan fluktuasi yang sangat mencolok, terutama pada tahun 2022 dan 2023.

Secara diagnostik, fluktuasi dan penurunan yang terjadi dalam indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada indikator "Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas", ketidakstabilan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, keterbatasan akses pembiayaan bagi koperasi, atau pergeseran prioritas pembangunan daerah yang mempengaruhi sektor koperasi. Adapun penurunan tajam pada tahun 2024, baik pada koperasi maupun usaha mikro, dapat disebabkan oleh faktor ekonomi global atau kebijakan fiskal daerah yang memengaruhi sektor-sektor usaha kecil dan menengah. Selain itu, adanya ketimpangan dalam distribusi dukungan dan pelatihan yang tidak merata di antara wilayah-wilayah kabupaten juga dapat berperan dalam fluktuasi tersebut. Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap program-program pengembangan koperasi dan usaha mikro, serta peningkatan efektivitas dukungan pemerintah terhadap sektor-sektor ini, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil.

2.4.4.2.12 Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.40 Urusan Penanaman Modal Kabupaten Merangin 2022-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	220,84	465,86	74,72	171,03	39,54

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang signifikan pada persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota dari tahun 2020 hingga 2024. Setelah mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan tajam pada tahun 2022, diikuti oleh kenaikan kembali pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan lagi meskipun tidak sebesar penurunan yang terjadi pada tahun 2022. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika yang tidak stabil dalam pencapaian indikator peningkatan investasi tersebut.

Fluktuasi yang terjadi dalam data ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang berhubungan dengan kebijakan investasi

daerah, kondisi sosial ekonomi, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi daya tarik investasi di kabupaten/kota tersebut. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, atau insentif bagi investor yang lebih menarik pada periode tersebut. Namun, penurunan yang tajam pada tahun 2022 dan 2024 dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi global, perubahan kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi iklim investasi, atau bahkan kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung. Penurunan ini juga dapat terkait dengan faktor internal seperti kurangnya program pendampingan yang efektif, ketimpangan infrastruktur, atau kendala dalam koordinasi antarinstansi terkait. Fluktuasi lebih lanjut dapat terjadi akibat perubahan prioritas anggaran daerah atau perubahan dalam prioritas sektor pembangunan yang mempengaruhi tingkat kepercayaan investor. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab fluktuasi tersebut, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah.

2.4.4.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.41 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,01	0,01	0,03	0,02	0,04
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,86	1,2	3,26	1,72	6,62
Peningkatan prestasi olahraga	1,00	12	12,00	124,00	131,00

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan pada beberapa indikator yang berkaitan dengan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan, dan prestasi olahraga dari tahun 2020 hingga 2024. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan tren penurunan tajam, diikuti dengan fluktuasi yang cukup besar pada beberapa tahun berikutnya. Begitu

pula dengan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, yang mengalami penurunan beberapa tahun, meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun-tahun tertentu. Di sisi lain, prestasi olahraga menunjukkan tren kenaikan yang sangat signifikan, dengan peningkatan stabil dan terus berkembang pada periode yang tercatat.

Secara diagnostik, fluktuasi dan penurunan pada tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan organisasi kepemudaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi yang kurang mendukung bagi para pemuda untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mandiri, serta kurangnya akses atau motivasi untuk terlibat dalam organisasi-organisasi tersebut. Di sisi lain, kenaikan prestasi olahraga dapat dikaitkan dengan upaya yang lebih terstruktur dalam pengembangan program olahraga yang telah mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah atau adanya program pendampingan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan atlet lokal. Perubahan kebijakan, dukungan anggaran, dan faktor sosial-ekonomi juga berperan dalam membentuk pola fluktuasi atau kenaikan tersebut, yang memerlukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui penyebab pasti dari pergeseran ini.

2.4.4.2.14 Urusan Statistik

Tabel 2.42 Urusan Statistik Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	39,29	39,29	28,57	32,14	100,00
Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	39,29	39,29	28,57	32,14	100,00

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi yang terlihat pada persentase perangkat daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Beberapa tahun menunjukkan tren penurunan, sementara tahun lainnya mengalami kenaikan yang signifikan. Secara umum, terlihat adanya

kenaikan yang cukup besar pada tahun-tahun terakhir, meskipun terdapat fluktuasi antara tahun-tahun sebelumnya.

Secara diagnostik, fluktuasi dan penurunan pada beberapa tahun dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah adanya perubahan kebijakan atau prioritas dalam penggunaan data statistik oleh perangkat daerah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah tingkat pemahaman dan keterampilan aparat pemerintah daerah dalam memanfaatkan data statistik, yang dapat berfluktuasi tergantung pada pelatihan dan pembekalan yang diberikan. Selain itu, faktor terkait anggaran daerah, sumber daya manusia yang terbatas, serta kesulitan dalam integrasi data statistik dalam sistem perencanaan dan evaluasi daerah juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya fluktuasi dalam penggunaan data statistik tersebut. Kenaikan yang terjadi pada akhir periode dapat mencerminkan perbaikan atau peningkatan dalam kapasitas dan kesadaran penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

2.4.4.2.15 Urusan Persandian

Tabel 2.43 Urusan Persandian Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan angka yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan angka yang relatif stabil pada angka 0,03. Secara diagnostik, konsistensi tingkat keamanan informasi pemerintah yang stabil pada angka 0,03 dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk melindungi data pemerintah, seperti enkripsi dan firewall yang kuat. Selain itu, audit dan evaluasi keamanan informasi secara berkala yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, untuk mendeteksi dan mengatasi potensi kerentanannya, dapat memastikan bahwa risiko terhadap data tetap terkendali. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki dan



memperkuat sistem, angka yang tetap stabil menunjukkan bahwa tingkat ancaman terhadap keamanan informasi relatif terkendali, meskipun belum ada perubahan signifikan. Keberlanjutan implementasi kebijakan yang ada dan pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam menjaga tingkat keamanan informasi tetap pada angka yang stabil.

2.4.4.2.16 Urusan Kebudayaan

Tabel 2.44 Urusan Kebudayaan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Terlestarikannya Cagar Budaya	25	27,5	29,25	37,5	41,2

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat kenaikan capaian pelestarian cagar budaya di Kabupaten Merangin yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2024. Secara diagnostik, peningkatan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan kebijakan dan implementasi di lapangan. Salah satu faktor yang berperan adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian cagar budaya yang mendorong dukungan lebih besar dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang konservasi cagar budaya turut berkontribusi terhadap efektivitas pemeliharaan. Faktor eksternal, seperti perbaikan kondisi sosial ekonomi yang meningkatkan perhatian terhadap sektor pariwisata dan budaya, juga turut mendukung upaya pelestarian. Pergeseran minat masyarakat yang semakin menghargai nilai budaya lokal, bersama dengan dukungan sektor pariwisata yang lebih terarah, memperkuat pelaksanaan kebijakan konservasi. Beberapa faktor alam, meskipun dapat menjadi tantangan, pada umumnya dapat diatasi dengan upaya preventif dan perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kombinasi dari kebijakan yang tepat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dari berbagai pihak menyebabkan fluktuasi yang sebelumnya terjadi kini bertransformasi menjadi tren peningkatan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam pelestarian cagar budaya.

2.4.4.2.17 Urusan Perpustakaan

Tabel 2.45 Urusan Perpustakaan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	-	-	51,72	52,71
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	41,64	44,63

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat kenaikan yang signifikan pada nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat dari tahun 2023 hingga 2024. Secara diagnostik, peningkatan kegemaran membaca masyarakat yang berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kegemaran membaca meningkat berkat akses yang lebih luas terhadap sumber bacaan, seperti distribusi buku yang lebih merata, perpustakaan keliling, dan kemudahan platform digital yang memudahkan masyarakat mengakses materi bacaan. Program literasi yang digalakkan oleh pemerintah dan komunitas, seperti klub buku dan pameran literasi, juga berperan dalam mendorong minat baca masyarakat. Seiring dengan peningkatan kegemaran membaca, hal ini berlanjut pada pengembangan keterampilan literasi, di mana masyarakat tidak hanya membaca, tetapi juga mengkritisi dan memahami informasi dengan lebih mendalam. Faktor-faktor lain yang memperkuat literasi adalah pendidikan berkualitas yang mengajarkan teknik membaca efektif dan menyaring informasi secara bijak, serta kemajuan media digital yang menyediakan akses informasi lebih cepat dan luas, yang secara keseluruhan mendorong peningkatan IPLM.

2.4.4.2.18 Urusan Kearsipan

Tabel 2.46 Urusan Kearsipan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal	68,75	69,59	72,00	75,00	75,00



IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
40 dan 59 UU 43/2009)					
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0,00	0,00	14,17	15,17	16,60

*Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin,
2025*

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, serta tingkat keberadaan dan keutuhan arsip untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Secara diagnostik, peningkatan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, serta keberadaan dan keutuhan arsip untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang sistematis dan terstruktur, baik di lembaga pemerintah maupun sektor publik, yang mendorong penyimpanan arsip secara lebih tertata dan mudah diakses. Program pelatihan dan pembekalan mengenai manajemen arsip yang diselenggarakan oleh instansi terkait juga turut meningkatkan pemahaman mengenai cara pengelolaan arsip yang efektif. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi arsip memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian arsip secara lebih efisien, serta meningkatkan keutuhan dan keberlanjutan arsip. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan arsip secara profesional, seperti penerapan sistem informasi manajemen arsip yang terintegrasi, turut memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan memastikan keberadaan arsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan keandalan arsip yang dapat digunakan sebagai bukti sah dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.



2.4.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.4.4.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.47 Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	101,89	102,52	104,42	162,94	102,19

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat fluktuasi pada jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 hingga 2024. Secara diagnostik, fluktuasi dalam jumlah produksi perikanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi eksternal dan internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain perubahan iklim, yang dapat berdampak pada hasil tangkapan ikan dan kesuksesan budidaya perikanan, serta kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kawasan perikanan. Selain itu, kondisi infrastruktur dan sarana pendukung yang kurang memadai, seperti sistem distribusi, serta fluktuasi harga pasar, bisa mempengaruhi kemampuan pelaku usaha di sektor perikanan untuk mengoptimalkan produksi. Ketidakstabilan dalam program pendampingan serta perubahan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat juga dapat menjadi penyebab fluktuasi tersebut.

2.4.4.3.2 Urusan Pariwisata

Tabel 2.48 Urusan Pariwisata Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2	1	4	8	6

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	1,24	0,98	1,71	6,23	9,14
Tingkat hunian akomodasi	8,31	12,46	14,13	4,64	28,41
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,02	1,86	1,78	1,76	1,72
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,01	0,04	0,06	0,9	0,13

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, sektor pariwisata di Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa indikator dari tahun 2020 hingga 2024. Beberapa indikator, seperti pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, dan tingkat hunian akomodasi, menunjukkan adanya penurunan pada beberapa tahun, diikuti dengan sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB cenderung mengalami hasil yang sangat fluktuatif, sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami kenaikan.

Secara diagnostik, fluktuasi signifikan yang terjadi pada sektor pariwisata di Kabupaten Merangin, khususnya pada indikator seperti pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, dan tingkat hunian akomodasi, disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Penurunan pada beberapa tahun, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, berpengaruh besar terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung, baik domestik maupun internasional, serta pembatasan perjalanan yang memengaruhi sektor pariwisata secara global. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, hal ini mencerminkan upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti kampanye promosi wisata dan perbaikan fasilitas pariwisata. Di sisi lain, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang fluktuatif disebabkan



oleh kurangnya keberagaman produk wisata serta ketergantungan yang tinggi pada beberapa destinasi utama, sehingga apabila destinasi-destinasi tersebut mengalami penurunan kunjungan, kontribusinya terhadap ekonomi daerah tidak signifikan. Namun, peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mencerminkan keberhasilan dalam optimalisasi sumber daya dan pengelolaan destinasi wisata, yang pada gilirannya memperkuat sektor pariwisata dalam memberikan kontribusi yang lebih stabil terhadap perekonomian daerah di masa yang akan datang..

2.4.4.3.3 Urusan Pertanian

Tabel 2.49 Urusan Pertanian Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	442,45	466,72	465,90	485,55	601,72
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	19,63	6,69	23,75	15,4	2,37

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, sektor pertanian di Kabupaten Merangin menunjukkan adanya tren kenaikan yang stabil pada produktivitas pertanian per hektar per tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi dan hasil produksi pertanian yang tercatat setiap tahunnya. Di sisi lain, indikator terkait persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (zoonosis) mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, dengan penurunan tajam pada beberapa tahun, sementara tahun lainnya menunjukkan hasil yang bervariasi.

Secara diagnostik, peningkatan produktivitas pertanian dipengaruhi oleh perbaikan dalam teknologi pertanian, penerapan metode budidaya yang lebih efisien, serta ketersediaan input pertanian yang lebih baik. Faktor lain yang turut berperan adalah keberhasilan dalam program pendampingan petani dan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian. Sementara itu, fluktuasi dalam penurunan kejadian penyakit hewan menular dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan kesehatan hewan yang diterapkan, keberhasilan program vaksinasi, serta

pengawasan yang lebih ketat terhadap penyakit yang dapat menular. Penurunan tajam pada beberapa tahun dapat mengindikasikan adanya keberhasilan dalam menangani kasus penyakit menular pada hewan.

2.4.4.3.4 Urusan Perdagangan

Tabel 2.50 Urusan Perdagangan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,00	100,00	9,44	35,00	61,31
Persentase kinerja realisasi pupuk	22,73	0,02	100,00	87,49	85,30
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	69,62	69,97	87,47	93,28	27,63

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, sektor perdagangan di Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada beberapa indikator dari tahun 2020 hingga 2024. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan mengalami penurunan tajam setelah tahun 2021, meskipun terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Kinerja realisasi pupuk menunjukkan hasil yang bervariasi, namun secara keseluruhan tetap stabil meski terdapat sedikit penurunan pada beberapa tahun. Sementara itu, persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku mengalami penurunan yang signifikan setelah tahun 2022.

Secara diagnostik, fluktuasi pada indikator pertama terkait izin usaha dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan perizinan, ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan, atau bahkan perubahan dalam prosedur yang berlaku. Penurunan yang tajam pada tahun-tahun tertentu kadangkala berkaitan dengan kendala administratif atau kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang ada. Di sisi lain, kinerja realisasi pupuk yang stabil meskipun terdapat sedikit penurunan dapat dipengaruhi oleh keberlanjutan distribusi pupuk yang

memadai dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Faktor ekonomi dan ketersediaan pasokan pupuk yang berfluktuasi dapat mempengaruhi realisasi ini. Sementara itu, penurunan yang signifikan pada persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku dapat terkait dengan pengawasan yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengujian dan sertifikasi, atau perubahan kebijakan dalam regulasi UTTP. Fluktuasi dalam indikator-indikator ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan sektor perdagangan yang perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

2.4.4.3.5 Urusan Perindustrian

Tabel 2.51 Urusan Perindustrian Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	2,76	3,49	1,30	9,63	4,67
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, sektor perindustrian di Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa indikator antara tahun 2020 hingga 2024. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah menunjukkan adanya kenaikan pada beberapa tahun, meskipun angka tersebut mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu.



Di sisi lain, indikator terkait izin usaha industri, baik untuk industri kecil maupun menengah, ketersediaan informasi industri tidak memiliki capaian kinerja dalam kurun waktu 2020-2024.

Secara diagnostik, fluktuasi signifikan pada sektor perindustrian di Kabupaten Merangin, khususnya pada indikator seperti penambahan jumlah industri kecil dan menengah, disebabkan oleh perubahan dinamika pasar dan penyesuaian kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kemampuan industri kecil dan menengah untuk berkembang. Kenaikan jumlah industri tersebut pada beberapa tahun mencerminkan adanya dukungan kebijakan yang efektif serta pertumbuhan permintaan pasar terhadap produk lokal, meskipun penurunan pada tahun-tahun tertentu bisa dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat, kendala dalam akses permodalan, atau fluktuasi harga bahan baku. Di sisi lain, indikator terkait izin usaha industri dan ketersediaan informasi industri yang tidak memiliki capaian kinerja pada periode 2020-2024 disebabkan oleh kurangnya sistem yang efisien untuk memfasilitasi perizinan atau kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku industri mengenai pentingnya pengurusan izin usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4.4.5 Fokus Layanan Urusan Penunjang

2.4.4.5.1 Urusan Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.52 Urusan Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	39,78	31,34	36,47	33,83	35,99
Rasio PAD	7,39	8	10,66	8	6,73
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	3,00	2,66	2,51	3,00
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	72,61	56,86	68,06	61,52	63,84
Opini Laporan Keuangan	8,00	6,00	10,00	10,00	10,00

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025



Berdasarkan data yang disajikan, sektor perencanaan dan keuangan di Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi pada beberapa indikator dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan cenderung menurun secara bertahap, menunjukkan penurunan yang stabil dalam proporsi belanja pegawai terhadap anggaran daerah. Sebaliknya, rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengalami penurunan tajam, mencerminkan penurunan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya lokal untuk pendapatan. Meskipun demikian, indikator lain seperti Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan stabilitas, dengan angka yang relatif tidak berubah, serta opini laporan keuangan yang tetap positif pada level yang lebih tinggi. Namun, rasio belanja urusan pemerintahan umum menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan kecenderungan meningkat pada beberapa tahun terakhir.

Secara diagnostik, penurunan pada rasio belanja pegawai dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran serta pergeseran prioritas dalam penggunaan dana, seperti alokasi lebih banyak pada sektor-sektor lain yang lebih mendesak. Penurunan rasio PAD dapat disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah yang tidak dapat digantikan dengan optimalisasi sumber daya lokal. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya tarik investasi atau perubahan dalam regulasi perpajakan juga bisa berkontribusi pada penurunan ini. Stabilitas dalam Maturitas SPIP dan opini laporan keuangan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga pengendalian dan transparansi keuangan yang memadai, meskipun terdapat tantangan dalam mencapai indikator lainnya. Fluktuasi pada rasio belanja urusan pemerintahan umum bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan anggaran atau pergeseran dalam prioritas pengeluaran pemerintah daerah, yang berdampak pada alokasi sumber daya untuk urusan pemerintahan umum. Faktor-faktor ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola keuangan dan perencanaan daerah.

2.4.4.5.2 Urusan Pengadaan

Tabel 2.53 Urusan Pengadaan Kabupaten Merangin 2020- 2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	13,77	12,63	5,09	6,83	12,01
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	53,75	10,65	27,64	27,62	42,72
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0,00	65,17	-4,64	103,42	58,33

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, sektor pengadaan di Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada beberapa indikator dari tahun 2020 hingga 2024. Persentase proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan ditandatangani pada kuartal pertama menunjukkan angka yang sangat rendah, bahkan tidak terdapat pencapaian yang signifikan setelah tahun 2020. Di sisi lain, persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mengalami fluktuasi yang bervariasi, meskipun cenderung lebih rendah pada beberapa tahun terakhir. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan juga mengalami fluktuasi yang cukup besar, dengan penurunan yang signifikan di beberapa tahun dan sedikit pemulihan pada tahun berikutnya. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, usaha mikro, kecil, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa menunjukkan fluktuasi tajam, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun tertentu, tetapi juga penurunan yang cukup besar di tahun lainnya.

Secara diagnostik, fluktuasi dalam pengadaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait kebijakan dan prosedur pengadaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Penurunan signifikan pada beberapa indikator mencerminkan adanya kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, baik dari sisi anggaran, perubahan regulasi, atau kurangnya kesiapan dalam proses pengadaan yang kompetitif. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan koperasi bisa

disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau koordinasi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta terbatasnya kapasitas usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah. Fluktuasi pada rasio nilai belanja pengadaan juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan prioritas anggaran atau ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi daya serap anggaran. Hal ini memerlukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

2.4.4.5.3 Urusan Kepegawaian

Tabel 2.54 Urusan Kepegawaian Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	427,68	72,02	78,82	72,63	75,66
Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,52	23,57	19,91	22,71	24,84
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,67	13,78	44,66	44,28	45,70

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, sektor kepegawaian di Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada beberapa indikator dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar cenderung mengalami penurunan tajam pada tahun-tahun awal, namun menunjukkan sedikit pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Rasio pegawai fungsional juga mengalami fluktuasi, meskipun cenderung menurun pada beberapa tahun, dengan sedikit peningkatan pada akhir periode. Sementara itu, rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi menunjukkan peningkatan yang lebih stabil, meskipun masih terdapat fluktuasi kecil sepanjang periode tersebut.

Secara diagnostik, fluktuasi dalam rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar bisa dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengangkatan atau pengurangan pegawai serta pergeseran dalam kebutuhan kepegawaian daerah. Penurunan rasio pegawai fungsional dapat disebabkan oleh faktor-

faktor seperti keterbatasan pelatihan atau kesulitan dalam pengisian posisi jabatan fungsional yang memadai. Kenaikan dalam rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi dipengaruhi oleh upaya untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih intensif. Namun, fluktuasi pada beberapa indikator ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada jumlah atau distribusi pegawai, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi perekrutan dan pelatihan pegawai fungsional. Selain itu, kurangnya sistem pendampingan atau motivasi bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensi juga bisa menjadi faktor penyebab fluktuasi ini.

2.4.4.5.4 Urusan Manajemen Keuangan

Tabel 2.55 Urusan Manajemen Keuangan Kabupaten Merangin 2020 - 2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	13,07	4,96	5,72	6,79	2,29
<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,09	3,04	17,03	4,88	1,92
Manajemen Aset	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<i>Cash Management:</i> Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,66	5,59	5,25	5,95	5,49

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, sektor manajemen keuangan di Kabupaten Merangin menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada beberapa indikator dari tahun 2020 hingga 2024. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dan deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD menunjukkan variasi yang cukup besar, dengan deviasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun tertentu, sementara indikator lainnya relatif stabil. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD juga menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil namun tetap berada dalam kisaran yang konsisten, mencerminkan pengelolaan anggaran yang relatif stabil. Di sisi lain, manajemen aset menunjukkan angka yang konstan dari tahun ke tahun, mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan aset daerah.

Secara diagnostik, fluktuasi pada deviasi realisasi belanja dan PAD dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan kebijakan pemerintah, ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi, serta faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian daerah seperti perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Misalnya, deviasi yang besar pada realisasi PAD dapat disebabkan oleh ketergantungan daerah pada sumber-sumber pendapatan yang tidak dapat diprediksi atau fluktuasi dalam sektor-sektor yang menjadi andalan PAD. Sementara itu, fluktuasi dalam rasio belanja yang dilakukan dapat mengindikasikan adanya perubahan prioritas pengeluaran atau ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan kebutuhan belanja aktual. Di sisi lain, stabilitas dalam rasio anggaran sisa menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang hati-hati dalam menyisakan dana, meskipun deviasi pada belanja dan PAD menunjukkan potensi adanya inefisiensi dalam proses perencanaan atau pengawasan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran dan pengawasan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

2.4.4.5.5 Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

Tabel 2.56 Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Merangin 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	0,00	57,14	57,14	57,14	99,63
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	0,00	33,33	33,33	33,33	100,00

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data yang disajikan, transparansi dan partisipasi publik di Kabupaten Merangin menunjukkan tren naik. Secara diagnostik, peningkatan yang signifikan pada transparansi dan partisipasi publik di Kabupaten Merangin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem transparansi, seperti penerapan teknologi informasi yang mempermudah akses publik terhadap

data terkait pelayanan, telah meningkatkan ketersediaan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan platform digital atau portal *online* yang menyediakan data secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, baik mengenai kebijakan, anggaran, maupun program pelayanan publik yang sedang berjalan. Selain itu, kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi melalui publikasi rutin dan laporan kinerja yang lebih transparan turut mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, seperti forum konsultasi publik, musyawarah desa, atau platform online untuk memberikan masukan, juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang lebih inklusif antara pemerintah dan masyarakat. Semua faktor ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam evaluasi dan pengawasan pelayanan publik.

2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis pelayanan dasar yang dimaksud mencakup urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari:

- a. Urusan Pendidikan
- b. Urusan Kesehatan
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Urusan Sosial.

Berikut merupakan capaian SPM Kabupaten Merangin 2022-2024:



Tabel 2.57 Capaian SPM Kabupaten Merangin 2022-2024

Urusan/Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1. Urusan Pendidikan									
Pendidikan Dasar	52.506	52.506	100%	100	100	100%	42.416	42.416	100%
Pendidikan Kesetaraan	1.921	1.921	100%	100	100	100%	1.921	1.921	100%
Pendidikan Anak Usia Dini	13.421	13.421	100%	100	100	100%	4.966	4.966	100%
2. Urusan Kesehatan									
Pelayanan kesehatan ibu hamil	7.440	6.215	84%	7.292	6290	86,26 %	6.881	5.841	84,89%
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	7.025	5.860	83%	6.869	6,253	91,03 %	6.459	4.626	71,62%
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7.009	5.854	84%	6.873	6,206	90,30 %	6.655	5.710	85,80%
Pelayanan kesehatan balita	27.944	21.364	76%	25.798	22,99	89,12 %	25.798	22.318	86,51%
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	11.520	10.593	92%	11,754	11.278	95,95 %	11.754	11.278	95,95%
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	217.365	160.876	74%	175076	13,5076	77,15 %	201.145	155.851	77,48%
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	29.002	28.309	98%	29.003	29,003	100%	24.494	21.436	87,52%
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	65.536	51.974	79%	70.125	53,551	76,37 %	69.278	53.130	76,69%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.812	2.766	98%	2,457	2,43	98,90 %	3.418	3.382	98,95%
Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	511	501	98%	516	507	98,26 %	538	532	98,88%
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	3.595	3.595	100%	3.273	3037	92,79 %	4.438	4.225	76,16%
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	7.926	4.040	51%	7.976	5.406	67,78 %	8.704	4.963	57,02%
3. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang									
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan	103.643	68.216	66%	103643	68216	100%	103.643	68.431	66,03%
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	103.643	33.960	33%	103643	76900	74,20 %	103.643	76.900	74,20%
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman									
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	Tidak Terjadi Bencana	0%	0	0	100,0 0%	0	0	100%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	Tidak Ada Relokasi	0%	1	1	100,0 0%	0	0	100%
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat									
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	10	0	0%	40	0	0%	14	0	0%
Pelayanan informasi rawan bencana	24	24	100%	380.323	380.323	100%	722	706	97,78%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	334.673	334.673	100%	380.323	32.784	100%	722	706	97,75%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	287	287	100%	380.323	17,448	11,67 %	722	706	92,78%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	26	12	46%	4	4	100%	6	6	100%
6. Urusan Sosial									
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	10	10	100%	25	0	0%	21	21	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	15	15	100%	15	0	0%	0	0	
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	16	0	0%	25	25	100%	54	54	100%



Urusan/Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	55	55%	500	202	100%	200	200	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, 2025

2.6 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara, sehingga prinsip yang terkandung di dalam pengelolaan keuangan daerah masih terintegrasi dengan keberadaan undang-undang di bidang keuangan negara seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan pengaturan yang komprehensif yang mampu mengakomodasi serta menyinkronkan seluruh pengaturan mengenai aspek pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Hak Pemerintah Daerah salah satunya adalah mengelola beberapa jenis Pajak. Bila Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengelola pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola beberapa jenis pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian serta memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Gambaran pengelolaan keuangan membahas mengenai analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, juga menganalisis perkembangan neraca daerah yang meliputi: aset dan utang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah perlu diketahui sebagai dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien.

2.6.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.



Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan (5) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.6.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas: a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; dan c) Pembiayaan Daerah. Aspek Penerimaan Daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Aspek Pengeluaran Daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin pada tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel berikut.



Tabel 2.58 Realisasi Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	PENDAPATAN					
01.01	Pendapatan Asli Daerah	100.322.387.750,97	107.879.827.143,34	116.712.554.237,02	107.976.482.974,79	94.830.759.645,51
01.01.01	Pajak Daerah	23.205.906.081,76	29.071.195.348,54	28.572.619.327,45	30.753.014.946,82	32.240.409.337,40
01.01.02	Retribusi Daerah	4.842.449.301,00	3.997.414.340,92	4.224.761.130,65	5.256.138.946,00	23.555.443.977,67
01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	5.896.472.394,43	6.265.202.339,18	7.100.359.765,78	7.268.658.153,62	7.488.236.682,97
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	66.377.559.973,78	68.546.015.114,70	76.814.814.013,14	64.698.670.928,35	31.546.669.647,47
01.02	Pendapatan Transfer	1.212.946.036.307,04	1.215.423.156.196,00	1.209.257.465.659,00	1.290.285.622.944,00	1.352.003.997.917,00
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.143.680.847.706,00	1.138.073.160.957,00	1.118.725.234.640,00	1.185.973.856.788,00	1.280.081.569.300,00
01.02.02	Transfer Antardaerah	69.265.188.601,04	77.349.995.239,00	90.532.231.019,00	104.311.766.156,00	71.922.428.617,00
01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	57.351.730.000,00	52.326.232.732,00	2.005.511.000,00	3.082.000.000,00	12.441.166.103,00
01.03.01	Pendapatan Hibah	57.351.730.000,00	52.326.232.732,00	2.005.511.000,00	3.082.000.000,00	-
01.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	-	-	-	-	12.441.166.103,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.370.620.154.058,01	1.375.629.216.071,34	1.327.975.530.896,02	1.401.344.105.918,79	1.459.275.923.665,51
2	BELANJA					
02.01	Belanja Operasi	858.046.249.225,80	878.733.677.513,42	888.230.487.697,40	888.240.891.846,63	996.592.669.538,96
02.01.01	Belanja Pegawai	591.599.189.208,44	554.502.039.676,00	526.735.638.444,00	502.287.898.830,00	591.839.454.626,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	246.352.552.712,60	295.657.727.021,06	306.227.317.743,40	320.864.442.422,63	336.876.303.542,96
02.01.03	Belanja Bunga	1.288.171.889,76	6.135.542.212,36	6.209.544.210,00	1.714.899.127,00	-
02.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
02.01.05	Belanja Hibah	18.806.335.415,00	22.438.368.604,00	49.057.987.300,00	63.373.651.467,00	67.876.911.370,00
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
02.02	Belanja Modal	274.675.116.400,83	342.885.337.718,86	73.706.411.814,00	176.724.837.147,30	193.627.335.532,00
02.02.01	Belanja Tanah	-	51.252.775,00	249.810.800,00	34.410.489,00	-
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	65.899.755.565,40	40.659.324.362,00	23.692.032.524,00	30.982.388.967,30	43.409.708.584,00
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	56.317.056.028,65	71.053.839.643,91	21.395.823.253,00	79.711.057.271,00	62.655.071.883,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.965.142.398,78	226.172.708.937,95	24.645.828.895,00	61.398.124.429,00	83.315.634.140,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap lainnya	5.493.162.408,00	4.948.212.000,00	3.518.291.542,00	4.563.950.991,00	3.837.445.925,00



No	Uraian	Realisasi				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
02.02.06	Belanja Aset lainnya	-	-	204.624.800,00	34.905.000,00	409.475.000,00
02.03	Belanja Tidak Terduga	21.265.282.024,00	14.000.367.515,00	743.803.650,00	5.511.000,00	52.802.850,00
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	21.265.282.024,00	14.000.367.515,00	743.803.650,00	5.511.000,00	52.802.850,00
02.04	Belanja Transfer	268.308.541.343,62	259.527.273.046,00	261.240.324.393,00	273.037.421.910,00	264.500.360.350,00
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.685.620.869,80	4.729.557.185,00	4.455.909.193,00	3.443.388.110,00	3.911.348.550,00
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	265.622.920.473,82	254.797.715.861,00	256.784.415.200,00	269.594.033.800,00	260.589.011.800,00
	JUMLAH BELANJA	1.422.295.188.994,25	1.495.146.655.793,28	1.223.921.027.554,40	1.338.008.661.903,93	1.454.773.168.270,96
	SURPLUS/DEFISIT	-51.675.034.936,24	-119.517.439.721,94	104.054.503.341,62	63.335.444.014,86	4.502.755.394,55
3	Pembiayaan					
03.01	Penerimaan Pembiayaan	116.185.426.640,27	185.331.530.570,46	61.787.013.804,99	82.250.272.316,44	79.190.915.420,30
03.01.01	SiLPA	94.872.246.889,27	64.556.845.310,46	61.787.013.804,99	82.250.272.316,44	79.190.915.420,30
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	-				
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-				
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	21.313.179.751,00	120.774.685.260,00			
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman daerah	-				
03.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-				
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	-	4.000.000.000,00	83.193.064.100,00	66.394.800.911,00	2.000.000.000,00
03.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-		81.193.064.100,00	60.894.800.911,00	
03.02.02	Penyertaan Modal Daerah	-	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00
03.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	-				
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-				
03.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-				
	PEMBIAYAAN NETTO	116.185.426.640,27	181.331.530.570,46	-21.406.050.295,01	15.855.471.405,44	77.190.915.420,30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	64.510.391.704,03	61.814.090.848,52	82.648.453.046,61	79.190.915.420,30	81.693.670.814,85

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2025

Berdasarkan data di atas Realisasi Keuangan Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024, terdapat tren peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun ada penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Pendapatan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.370.620.154.058,01 dan meningkat menjadi Rp1.375.629.216.071,34 pada 2021. Namun, pada tahun 2022, pendapatan turun menjadi Rp1.327.975.530.896,02. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fluktuasi dalam dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi, penurunan sektor pajak dan retribusi akibat kondisi ekonomi, atau dampak eksternal seperti pandemi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Belanja daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, belanja tercatat sebesar Rp1.422.295.188.994,25 dan meningkat menjadi Rp1.495.146.655.793,28 pada 2021. Namun, pada tahun 2022, belanja menurun menjadi Rp1.223.921.027.554,40. Penurunan ini bisa disebabkan oleh pengurangan alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur atau perubahan prioritas pengeluaran daerah. Selain itu, kebijakan penghematan atau penundaan kegiatan proyek besar juga dapat mempengaruhi besarnya belanja yang terealisasi.

Terkait dengan surplus dan defisit, pada tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Merangin mengalami defisit masing-masing sebesar Rp51.675.034.936,24 dan Rp119.517.439.721,94. Namun, pada tahun 2022 terjadi surplus sebesar Rp104.054.503.341,62. Pencapaian surplus ini bisa dipengaruhi oleh intensifikasi penerimaan daerah, penghematan belanja, atau pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien. Surplus tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah setelah defisit pada tahun sebelumnya.

Perubahan dalam pembiayaan daerah juga perlu dianalisis lebih lanjut. Penerimaan pembiayaan tercatat mencapai Rp116.185.426.640,27 pada 2020, dan meningkat pada 2021 menjadi Rp185.331.530.570,46, namun pada 2023, pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh pengurangan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, serta strategi pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan pengelolaan sumber daya internal yang efisien. Untuk ke depan, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan, memperbaiki

efisiensi belanja, serta menjaga stabilitas pembiayaan agar keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan.

2.6.1.2 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Keuangan Daerah menjelaskan bahwa neraca adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu.

Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin selama kurun waktu 2020-2024 seperti terlihat tabel berikut dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut.



Tabel 2.59 Neraca daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
1.01.00	ASET LANCAR					
1.01.01	Kas	104.013.390.359,94	126.686.754.175,20	142.738.624.822,45	141.135.897.693,48	81.696.714.509,85
1.01.03	Piutang	-13.137.720.150,42	-28.112.739.328,08	-17.918.052.394,79	-20.197.651.380,85	94.003.311.299,75
1.01.06	Beban Dibayar di Muka	845.322.935,02	1.492.387.296,92	151.208.630,45	209.540.746,75	176.667.199,13
1.01.07	Persediaan	5.663.735.407,82	6.473.319.073,97	6.158.321.319,40	9.517.986.488,00	7.318.105.345,55
	JUMLAH ASET LANCAR	97.384.728.552,36	106.539.721.218,01	131.130.102.377,51	130.665.773.547,38	183.194.798.354,28
1.02.00	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1.02.01	Investasi Nonpermanen	139.588.041,75	139.588.041,75	139.588.041,75	139.588.041,75	139.588.041,75
1.02.02	Investasi Permanen	55.771.920.569,23	58.743.063.493,94	60.579.935.829,74	65.842.883.784,10	66.178.789.629,87
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	55.911.508.610,98	58.882.651.535,69	60.719.523.871,49	65.982.471.825,85	66.318.377.671,62
1.03.00	ASET TETAP					
1.03.01	Tanah	81.484.483.285,00	183.839.623.660,00	166.360.741.012,00	166.917.774.692,00	77.819.213.616,80
1.03.02	Peralatan dan Mesin	514.767.994.896,27	585.883.318.635,00	598.638.876.742,63	623.775.520.818,93	657.887.033.482,23
1.03.03	Gedung dan bangunan	892.908.194.978,84	1.004.744.796.900,63	1.018.568.236.506,38	1.073.668.954.507,08	1.137.342.528.606,58
1.03.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.034.078.115.337,35	2.337.006.853.898,08	2.366.792.487.690,77	2.456.940.782.222,88	2.555.148.058.990,88
1.03.05	Aset tetap lainnya	73.787.231.419,00	77.993.154.519,00	82.378.977.869,00	80.969.380.348,00	84.813.629.548,00
1.03.06	Konstruksi dalam pengerjaan	171.562.857.278,10	6.188.238.163,00	20.117.935.652,42	130.620.000,00	
1.03.07	Akumulasi Penyusutan	-1.689.428.102.011,28	-1.891.104.916.869,69	-1.998.786.861.664,13	-2.179.220.923.852,25	-2.358.124.322.262,61
	JUMLAH ASET TETAP	2.079.160.775.183,28	2.304.551.068.906,02	2.254.070.393.809,07	2.223.182.108.736,64	2.154.886.141.981,88
1.04.00	ASET LAINNYA					
1.04.01	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-
1.04.02	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-
1.04.03	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-
1.04.04	Aset tak berwujud	498.147.930,00	499.302.048,00	354.614.666,00	4.400.345.172,40	583.737.960,00
1.04.05	Aset lain-lain	37.857.704.665,42	36.841.666.403,54	60.056.496.988,90	47.892.497.401,54	51.238.054.909,92
1.04.06	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)			6.904.372.496,00	31.152.575.000,00	5.564.440.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	38.355.852.595,42	37.340.968.451,54	67.315.484.150,90	83.445.417.573,94	57.386.232.869,92
1.05.00	PROPERTI INVESTASI					
1.05.01	Properti Investasi	-	-	-	16.706.877.174,15	16.373.324.424,91
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	-	-	-	16.706.877.174,15	16.373.324.424,91
	JUMLAH ASET DAERAH	2.270.812.864.942,04	2.507.314.410.111,26	2.513.235.504.208,97	2.519.982.648.857,96	2.478.158.875.302,61
2	KEWAJIBAN					



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.01.00	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.01.01	Utang perhitungan pihak ketiga	100.875.925,00	313.192.525,00	29.879.818,00	341.640,00	293.695,00
2.01.02	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		81.193.065.721,00	60.894.800.911,00		
2.01.03	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-
2.01.04	Pendapatan diterima di muka	347.560.440,24	245.145.009,58	155.964.201,49	197.226.198,22	213.480.860,42
2.01.05	Utang belanja	8.829.032.169,32	27.505.347.328,29	12.062.476.723,35	17.110.872.929,60	23.896.743.295,00
2.01.06	Utang jangka pendek lainnya	76.631.134.418,22		29.324.592.639,42	1.557.055.984,00	1.565.155.984,00
2.01.07	Utang Pihak ketiga lainnya					
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	85.908.602.952,78	109.256.750.583,87	102.467.714.293,26	18.865.496.751,82	25.675.673.834,42
2.02.00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
2.02.07	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	21.313.179.751,00	60.894.799.290,00	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	21.313.179.751,00	60.894.799.290,00	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	107.221.782.703,78	170.151.549.873,87	102.467.714.293,26	18.865.496.751,82	25.675.673.834,42
3	EKUITAS DANA					
	Ekuitas	2.163.591.082.238,26	2.337.162.860.237,39	2.410.767.789.915,71	2.501.117.152.106,14	2.452.483.201.468,19
	JUMLAH EKUITAS	2.163.591.082.238,26	2.337.162.860.237,39	2.410.767.789.915,71	2.501.117.152.106,14	2.452.483.201.468,19
	JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS	2.270.812.864.942,04	2.507.314.410.111,26	2.513.235.504.208,97	2.519.982.648.857,96	2.478.158.875.302,61

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2024

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, dan (4) aset lainnya. Melalui data di atas, dapat dilihat jika aset di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dalam periode waktu 4 (empat) tahun. Pada kategori aset terlihat bahwa Kas mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun dari Rp104.013.390.559,94 pada tahun 2020 menjadi Rp141.135.897.693,48 pada tahun 2023. Investasi Nonpermanen mengalami pertumbuhan stabil, mencapai Rp139.588.041,75 pada tahun 2024 dan investasi Permanen menunjukkan tren yang sama, meningkat hingga Rp66.178.789.629,87 pada tahun 2024.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam kategori kewajiban jangka pendek dari data keuangan Kabupaten Merangin di atas, terlihat jika pendapatan diterima di muka menurun dari Rp347.560.440,24 pada tahun 2020 menjadi Rp213.480.860,42 pada tahun 2024. Utang belanja mengalami fluktuasi dari Rp8.829.032.169,32 pada tahun 2020 menjadi Rp23.896.743.295,00 pada tahun 2024. Utang jangka pendek lainnya menunjukkan fluktuasi besar, dengan penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp1.565.155.984,00.

Kewajiban jangka panjang Kabupaten Merangin hanya terdapat pada utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada tahun 2020 sebesar Rp21.313.179.751,00 dan tahun 2021 sebesar Rp60.894.799.290,00. Kemudian total ekuitas menunjukkan tren yang meningkat dari Rp2.163.591.082.238,26 pada tahun 2020 menjadi Rp2.452.483.201.468,19 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, Kabupaten Merangin menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam ekuitasnya selama periode 2020-2024. Meskipun kewajiban jangka pendek mengalami fluktuasi dan akhirnya menurun pada tahun 2024, ekuitas perusahaan terus meningkat, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan nilai ekuitasnya.

Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki manajemen yang efektif dalam mengelola kewajiban dan meningkatkan asetnya.

2.6.2 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

2.6.2.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah dihitung sebagai total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Data kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin selama beberapa tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.60 Data Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029

No	Uraian	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan	1.718.928.849.177,00	1.829.907.614.488,00	1.842.134.095.214,00	1.872.366.883.833,00	1.904.987.973.617,00	2,63%
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	21,67%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah						
	Total penerimaan	1.733.928.849.177,00	1.854.907.614.488,00	1.867.134.095.214,00	1.902.366.883.833,00	1.934.987.973.617,00	2,81%
	Dikurangi:						
5	Belanja Operasi (Pegawai, dan Barang dan Jasa)	1.211.077.973.540,00	1.257.868.771.602,00	1.264.595.252.328,00	1.288.595.252.328,00	1.307.478.579.421,00	1,94%
6	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	17.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	49,71%
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	517.850.875.637,00	580.038.842.886,00	592.538.842.886,00	603.771.631.505,00	617.509.394.196,00	4,58%

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2025

Tabel 2.61 Data Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	Proyeksi				
		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	517.850.875.637,00	580.038.842.886,00	592.538.842.886,00	603.771.631.505,00	617.509.394.196,00
2	Prioritas I (60%)	310.710.525.382,20	348.023.305.731,60	355.523.305.731,60	362.262.978.903,00	370.505.636.517,60
3	Prioritas II (40%)	207.140.350.254,80	232.015.537.154,40	237.015.537.154,40	241.508.652.602,00	247.003.757.678,40

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2025



2.6.2.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berikut adalah proyeksi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran Tahun 2024-2029.

Tabel 2.62 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Merangin Tahun 2024-2029

Kode	URAIAN	Proyeksi				
		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
4	PENDAPATAN	1.718.928.849.177	1.829.907.614.488	1.842.134.095.214	1.872.366.883.833	1.904.987.973.617
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	156.536.139.644	167.151.464.955	170.151.464.955	178.345.601.423	190.445.601.423
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	67.981.000.000	73.553.081.386	75.553.081.386	79.753.081.486	86.853.081.486
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	64.937.212.855	69.780.456.780	70.780.456.780	73.215.024.580	77.215.024.580
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.057.977.543	8.157.977.543	8.157.977.543	8.702.978.221	9.702.978.221
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.559.949.246	15.659.949.246	15.659.949.246	16.674.517.136	16.674.517.136
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.544.554.369.533	1.642.855.369.533	1.652.081.850.259	1.674.120.502.410	1.693.641.592.194
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.435.007.480.862	1.531.308.480.862	1.539.534.961.588	1.560.573.613.739	1.571.094.703.523
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	109.546.888.671	111.546.888.671	112.546.888.671	113.546.888.671	122.546.888.671
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.838.340.000	19.900.780.000	19.900.780.000	19.900.780.000	20.900.780.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.838.340.000	19.900.780.000	19.900.780.000	19.900.780.000	20.900.780.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	1.728.928.849.177	1.837.907.614.488	1.857.134.095.214	1.892.366.883.833	1.924.987.973.617
5.1	BELANJA OPERASI	1.211.077.973.540	1.257.868.771.602	1.264.595.252.328	1.288.595.252.328	1.307.478.579.421
5.1.1	Belanja Pegawai	766.335.829.598	791.299.025.702	795.299.025.702	799.299.025.702	810.696.892.851
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	410.789.980.000	430.890.765.000	433.617.245.726	453.617.245.726	457.890.896.900
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	33.952.163.942	35.678.980.900	35.678.980.900	35.678.980.900	38.890.789.670
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	225.174.847.537	277.025.010.890	289.525.010.890	297.757.799.509	307.966.455.100
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.208.894.246	49.180.980.000	48.780.980.000	49.780.980.000	51.234.567.000
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	66.417.652.971	79.980.689.900	87.980.689.900	91.213.478.519	93.890.567.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	124.456.789.000	145.080.980.000	148.980.980.000	152.980.980.000	158.679.900.890



Kode	URAIAN	Proyeksi				
		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.951.511.320	2.642.360.990	3.642.360.990	3.642.360.990	4.021.420.210
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.3	BELAJA TIDAK TERDUGA	10.025.579.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.025.579.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	282.650.449.100	298.013.831.996	298.013.831.996	301.013.831.996	304.542.939.096
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.338.515.700	8.412.127.400	8.412.127.400	9.412.127.400	9.821.234.500
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	275.311.933.400	289.601.704.596	289.601.704.596	291.601.704.596	294.721.704.596
	Total Surplus/(Defisit)	(10.000.000.000)	(8.000.000.000)	(15.000.000.000)	(20.000.000.000)	(20.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000	8.000.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	15.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
6.1.2	Pencairan dana Cadangan					
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	17.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	17.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	• Bank Jambi	5.000.000.000,00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	• PDAM Tirta Merangin		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	• BUMD		10.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2025

A. Kebijakan Pendapatan

Dari tabel di atas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Merangin untuk 5 (lima) tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada tabel proyeksi, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, aparat penegak hukum, serta pihak swasta.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Mendorong pendirian dan pengembangan badan usaha milik daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024-2029 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Merangin dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, pemenuhan visi dan misi melalui program unggulan Kepala Daerah dan penyelenggaraan urusan lainnya.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung program strategis nasional (ProSN) yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan.
4. Selain itu, belanja daerah juga dialokasikan untuk mendukung penyertaan modal dalam pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendanaan untuk BUMD ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui penyertaan modal ini, diharapkan BUMD dapat berkembang menjadi badan usaha yang profesional dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Penyertaan modal juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya peningkatan peran BUMD dalam perekonomian nasional, serta sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 2 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
3. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Analisis isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

2.7.1 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Merangin dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan analisis mendalam atas hasil evaluasi pembangunan jangka menengah periode sebelumnya, berikut identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih akan dihadapi dan harus ditangani pemerintah Kabupaten Merangin :

2.7.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

- Ketidaksesuaian dengan RTRW dapat menyebabkan pembangunan yang tidak terencana dengan baik, termasuk pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan pengelolaan risiko yang buruk. Ini dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat;
- Meningkatnya alih fungsi lahan karena banyaknya penambangan emas tanpa izin di lahan pertanian dan badan air, serta banyaknya bukaan hutan yang dipergunakan untuk kawasan perkebunan;
- Meskipun Merangin merupakan daerah penghasil padi utama, namun produktivitas padi masih rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penerapan teknologi pertanian yang belum optimal, minimnya akses petani terhadap modal dan pupuk, kerusakan infrastruktur irigasi;
- Jumlah penduduk di Kabupaten Merangin semakin meningkat karena dipengaruhi faktor-faktor jumlah kelahiran (natalitas) yang tinggi, kematian (mortalitas) serta adanya perpindahan (migrasi) antara satu daerah ke daerah lain; dan
- Meningkatnya angka pengangguran di kalangan penduduk usia produktif.

2.7.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antarsektor;
- Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan; dan
- Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

2.7.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

- Belum optimalnya capaian aksi HAM.

2.7.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pendidikan



- Kualitas layanan pendidikan yang belum memenuhi standar nasional;
- Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata;
- Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi;
- Masih rendahnya kompetensi kepala sekolah;
- Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik;
- Distribusi tenaga pendidik yang tidak merata;
- Masih rendahnya PKBM yang terakreditasi;
- Masih rendahnya PAUD yang terakreditasi minimal B; dan
- Masih rendahnya PAUD yang berstatus negeri.

2. Urusan Kesehatan

- Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi secara optimal;
- Kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat masih rendah;
- Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Neonatal, dan Bayi;
- Masih rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak;
- Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan (sarana, prasarana, maupun SDM) sesuai standar yang berlaku;
- Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata; dan
- Masih tingginya angka prevalensi *stunting*.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya capaian pembangunan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap;
- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jembatan;
- Belum optimalnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan infrastruktur irigasi; dan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Jumlah *Backlog* perumahan di Kabupaten Merangin bertambah setiap tahunnya; dan
- Keterbatasan data pertanahan milik Pemerintah Daerah.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Kesadaran warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum untuk mentaati Perda dan/atau Perkada masih rendah;
- Masih kurangnya dukungan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- Ketersediaan dokumen pendukung dan regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana masih belum memadai; dan
- Keterbatasan kemampuan dan jumlah petugas yang melaksanakan penanggulangan bencana.

6. Sosial

- Banyak PSKS yang tidak memiliki keterampilan bekerja; dan
- Banyak PSKS tidak dapat membuka usaha sendiri.

7. Tenaga Kerja

- Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja;
- Ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
- Kurangnya peluang kerja atau lapangan pekerjaan; dan
- Lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Ketimpangan gender dalam bidang ekonomi; dan
- Ketergantungan ekonomi perempuan.

9. Pangan

- Belum optimalnya kedaulatan pangan daerah.

10. Lingkungan Hidup

- Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
- Masih tingginya kasus kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya pelayanan publik dan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel.

12. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Kurangnya pengetahuan tentang manfaat KB.

13. Perhubungan

- Kurangnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk uji kendaraan bermotor (KIR).
- Masih rendahnya rasio konektivitas antar wilayah.

14. Komunikasi dan Informatika

- Penerapan *e-government system* dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan belum berjalan maksimal;
- Belum adanya regulasi penerapan SPBE di Kabupaten Merangin;
- Belum adanya jaringan intranet dalam Kabupaten Merangin;
- Belum adanya dokumen perencanaan penerapan SPBE; dan
- Belum adanya perangkat IT yang memadai dalam memberikan pelayanan publik.

15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Rendahnya daya saing UMKM dan Koperasi.

16. Kepemudaan dan Olahraga

- Partisipasi pemuda yang rendah dalam mengikuti kegiatan;
- Belum optimalnya kualitas pembinaan atlet; dan
- Kurangnya prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional.

17. Penanaman Modal

- Peluang potensi investasi belum termanfaatkan secara optimal;
- Mekanisme pelayanan terpadu satu pintu belum sepenuhnya berjalan; dan
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum berjalan dengan optimal.

18. Statistik

- Belum terpenuhinya data statistik sektoral secara maksimal;
- Belum adanya aplikasi statistik sektoral; dan
- Belum adanya Data Analis *Center* di Kabupaten Merangin.

19. Persandian

- Masih minimnya pengelolaan sandi dan keamanan informasi.

20. Kebudayaan

- Kurangnya pengembangan produk budaya kreatif;
- Kurangnya promosi budaya ke tingkat nasional dan internasional; dan
- Pengelolaan warisan budaya yang kurang optimal.



21. Perpustakaan

- Sosialisasi minat baca masyarakat belum maksimal.

22. Kearsipan

- Pengelolaan arsip belum maksimal.

23. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Masih terbatasnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan benih ikan;
- Masih rendahnya produksi perikanan tangkap di perairan umum; dan
- Masih rendahnya daya saing ekonomi Kabupaten Merangin.

24. Urusan Pariwisata

- Masih rendahnya daya saing destinasi wisata dan jumlah kunjungan wisata;
- Masih rendahnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; dan
- Belum optimalnya pengelolaan *Geopark* Merangin Jambi.

25. Urusan Pertanian

- Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
- Masih rendahnya populasi ternak;
- Masih rendahnya produksi hasil ternak; dan
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian.

26. Urusan Perdagangan

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan; dan
- Masih rendahnya daya saing ekonomi Kabupaten Merangin.

27. Urusan Perindustrian

- Masih rendahnya daya saing produk industri lokal; dan
- Masih rendahnya daya saing ekonomi Kabupaten Merangin.

28. Perencanaan dan Keuangan

- Belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern; dan
- Belum efektifnya perencanaan keuangan.

29. Pengadaan

- Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan pengadaan.

30. Kepegawaian

- Belum optimalnya integrasi data kepegawaian;
- Penataan organisasi yang belum optimal; dan

- Penerapan sistem merit yang belum konsisten.

31. Manajemen Keuangan

- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

32. Transparansi dan Partisipasi Publik

- Belum optimalnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

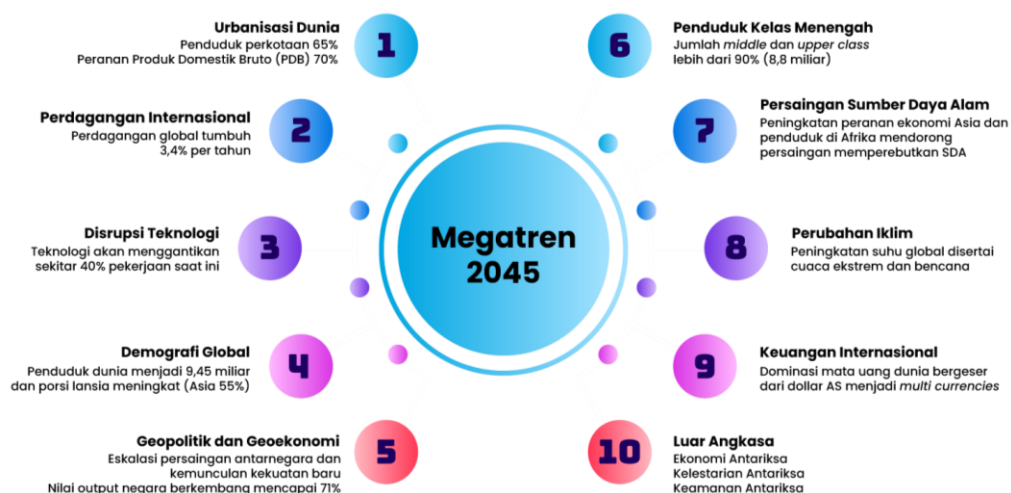
2.7.2 Isu strategis

Penentuan isu strategis Kabupaten Merangin dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional, dan regional yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2025-2029.

2.7.2.1 Isu Strategis Internasional

2.7.2.1.1 Megatren Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks mengikuti perubahan yang sangat cepat di segala aspek. Megatren global yang penting dalam 20 tahun ke depan akan mengubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan Sistem keuangan digital.



Gambar 2.17 Megatren Global

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2023

1. Perubahan Demografi Global

- a) Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan akan semakin meningkat, hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 akan meningkatkan tantangan pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (pangan, energi dan air) dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan;
- b) Proporsi demografi seperti bertambahnya penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan;
- c) Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis yang menyebabkan turunnya angka kelahiran.

2. Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi

- a) Geopolitik:
 - Eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional; dan
 - Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan.
- b) Geoekonomi:
 - Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang; dan
 - Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak tiga kali dibanding tahun 2015 yakni USD 74,0 triliun dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia

3. Kemajuan Teknologi

- Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan Masyarakat;
- Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari Masyarakat;

- Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor; dan
- Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur dan sektor Pendidikan, menyebabkan sejumlah jenis pekerjaan akan tergantikan oleh teknologi, serta berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi dan cara kerja pemerintah.

4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

- Dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di Kawasan perkotaan pada tahun 2050 di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies, dan urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota; dan
- Tekanan penduduk dan Pembangunan perkotaan pada di negara emerging economies umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik sehingga dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

5. Konstelasi Perdagangan Global

- Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika;
- Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital; dan
- Kerja sama Kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis.

6. Tata Kelola Keuangan Global

- Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi pada perubahan struktur ekonomi dan demografi, di mana pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 berpotensi menyebabkan komposisi belanja negara akan lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun;
- Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara; dan

- Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan, di mana ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

- Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen dari populasi dunia, di mana pertumbuhan kelas menengah yang pesat tersebut akan menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik; dan
- Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru di masa mendatang, yakni pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.

8. Peningkatan Persaingan

Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yakni kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang akibat bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi.

9. Perubahan Iklim

- Perubahan iklim, bersama kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (*Triple Planetary Crisis*) secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari;
- Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global; dan
- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

2.7.2.1.2 KTT G-20

Isu strategis internasional juga memperhatikan beberapa kesepakatan Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 di Bali. G20 atau *Group of Twenty* yang merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar

di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 85% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Spanyol selalu diundang sebagai tamu.

Isu yang dibahas oleh para pemimpin G20 telah berkembang dari ekonomi hingga perubahan iklim, energi berkelanjutan, pengampunan utang internasional dan pajak perusahaan multinasional. Tiga isu strategis dalam G20 tahun 2022 adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi menuju energi baru terbarukan. Sedangkan pilar prioritas presidensi G20 Indonesia 2022 meliputi peningkatan produktivitas untuk pemulihan ekonomi, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.

Isu yang dibahas dalam bidang keuangan dan moneter (*finance track*) G20 adalah koordinasi kebijakan global dalam memulihkan ekonomi termasuk terkait *exit policy*, membahas dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perekonomian, penyusunan prinsip umum pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC), pembiayaan berkelanjutan, digitalisasi sistem pembayaran antarnegara, inklusi keuangan yang meliputi digitalisasi dan kredit UMKM serta perpajakan mencakup di antaranya reformasi perpajakan. Sedangkan isu dalam bidang nonkeuangan dan moneter (*sherpa track*) pada pertemuan antarmenteri antara lain energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, Pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi dan industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan dan perubahan iklim, hubungan luar negeri. Isu dalam bidang nonkeuangan dan moneter (*sherpa track*) pada pertemuan di luar pemerintahan membahas tentang bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, parlemen, lembaga audit tertinggi.

Komitmen G20 yang merupakan kesepakatan para pemimpin dunia antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem

multilateral, menangani krisis ekonomi, termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi dan komitmen bersama untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) guna mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor kesehatan. Komitmen G20 yang telah disepakati sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi

2.7.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana- mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil, dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Komitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.

2.7.2.2 Isu Strategis Nasional

A. Aging Population Negara Maju

- Usia produktif negara maju menurun
- Potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia

B. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif bagi Perekonomian Indonesia

- Hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar

C. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

- Sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional

D. Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global

- Produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global

E. Tantangan Transisi Energi, Namun terdapat Peluang Untuk Pemerataan

- Perlu *National Grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau
- Perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan.

F. Isu Strategis Kewilayahan Sumatera

- Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dll.
- Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.
- Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
- Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T.
- Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah.
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera.

2.7.2.3 Isu Strategis Provinsi

Isu strategis Provinsi Jambi tidak bisa terlepas dari risiko global dan isu jangka menengah nasional sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Selain itu, isu strategis tersebut juga berhubungan langsung dengan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:

1. Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan
2. Rantai nilai komoditas unggulan Provinsi Jambi
3. Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Degradasi lingkungan

5. Tata kelola pemerintahan

2.7.2.4 Isu Strategis Kabupaten Merangin

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak, yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang terdapat di Kabupaten Merangin. Secara konseptual, isu strategis, belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam penentuan isu strategis berlandaskan pada permasalahan yang terjadi serta beberapa pilar yang meliputi dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata Kelola, Berikut adalah isu strategis yang terdapat di Kabupaten Merangin yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang inklusif di Kabupaten Merangin merupakan isu strategis yang sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, membutuhkan upaya optimalisasi infrastruktur pendidikan, pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa anak-anak di wilayah terpencil dapat mengakses materi pembelajaran yang setara dengan anak-anak di pusat kota. Langkah-langkah ini akan memperkuat kualitas SDM di daerah, yang siap bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global.

Sementara itu, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja juga menjadi perhatian utama. Optimalisasi akses terhadap pendidikan vokasional dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memastikan mereka memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, perluasan kesempatan kerja perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor-sektor potensial, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat

dibutuhkan untuk memastikan tenaga kerja Merangin siap bersaing di pasar tenaga kerja yang terus berkembang.

Di sisi lain, peningkatan kualitas dan akses kesehatan yang setara dan adil menjadi aspek penting dalam pengembangan SDM. Kesenjangan antara fasilitas dan tenaga medis di daerah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemerataan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis ke wilayah yang lebih terpencil. Dengan upaya ini, setiap individu, tanpa memandang lokasi geografisnya, akan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini akan menciptakan SDM yang sehat dan produktif, mendukung pertumbuhan pembangunan daerah secara keseluruhan.

2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Optimalisasi daya saing ekonomi berbasis potensi lokal menjadi isu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin memiliki berbagai potensi alam dan budaya yang sangat berharga, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Potensi ini perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pemberdayaan UMKM, pengembangan produk unggulan lokal, dan promosi pariwisata berbasis kearifan lokal dapat menjadi langkah-langkah strategis yang meningkatkan daya saing ekonomi Merangin. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mendorong keberlanjutan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.

Iklim investasi dan kemudahan berusaha juga merupakan faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian insentif fiskal, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung sektor usaha akan menjadikan Merangin lebih menarik bagi investor. Dengan adanya kebijakan yang memudahkan dan mendukung dunia usaha, akan lebih banyak lapangan kerja tercipta, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk memberikan dukungan teknis dan akses terhadap modal bagi pelaku usaha lokal.

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi kunci untuk mendukung perkembangan ekonomi di Kabupaten Merangin. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Peningkatan akses jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya akan membuka peluang investasi dan pengembangan sektor pariwisata, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Daerah perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi tantangan keterbatasan anggaran dan geografis dalam membangun infrastruktur yang memadai.

Tata Kelola Pengembangan Unesco Global *Geopark* (UGGp) Merangin juga menjadi aspek penting dalam memperkuat ekonomi berbasis pariwisata. *Geopark* Merangin berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi daerah melalui pengembangan geowisata dan konservasi alam yang berbasis pada keunikan geologi dan keanekaragaman hayati. Untuk itu, pengelolaan yang baik, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, akan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari status UGGp ini.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan merupakan isu strategis yang sangat penting untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang optimal dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah Kabupaten Merangin perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan dengan transparansi yang tinggi. Meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesionalisme sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Salah satu langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan tata kelola adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum konsultasi publik dan mekanisme partisipatif lainnya, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Selain itu, sistem pengawasan yang baik, baik secara internal maupun eksternal, juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa



program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik juga sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Langkah-langkah ini akan memperkuat akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Tabel 2.63 Perumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Merangin 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya penduduk usia produktif	Jumlah penduduk di Kabupaten Merangin semakin meningkat	Belum optimalnya layanan kesehatan masyarakat	Megatren Global	Aging Population Negara Maju	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan					
	Meningkatnya angka pengangguran di kalangan penduduk usia produktif.	Ketimpangan sosial ekonomi	KTT G-20	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif bagi Perekonomian Indonesia	Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
		Sarpras belum memadai (air bersih, sampah, parkir, jalan)	Sustainable Development Goals (SDGs)	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.	
				Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dll.	
				Tantangan Transisi Energi, Namun terdapat Peluang Untuk Pemerataan	Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah.	
Kawasan swasembada pangan air dan energi	Produktivitas padi masih rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.				Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera.	
	Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar-sektor;					
Kawasan swasembada pangan air dan energi	Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;					



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
energi Kawasan komoditas unggulan sawit dan karet Kawasan Agropolitan Kompleks- Masurai	Ketidaksesuaian dengan RTRW dapat menyebabkan pembangunan yang tidak terencana dengan baik, termasuk pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan pengelolaan risiko yang buruk. Ini dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat;					
	Meningkatnya alih fungsi lahan karena banyaknya penambangan emas tanpa izin di lahan pertanian dan badan air, serta banyaknya bukaan hutan yang dipergunakan untuk kawasan perkebunan;					
	Belum optimalnya capaian aksi HAM					
	Belum optimalnya tatakelola pemerintahan daerah		Tata kelola pemerintahan (SDM, koordinasi dan dana desa)			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel



Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Kabupaten Merangin. Isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Kabupaten Merangin disajikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel



BAB III

VISI, MISI, dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB III

VISI, MISI, dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Bagian ini memaparkan mengenai Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029. Rumusan Visi dan Misi dalam RPJMD ini merujuk pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu **H. M. Syukur, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Khafidh, M.M.**, yang telah dilantik secara sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi, dan Program Strategis yang merupakan janji politik kepala daerah terpilih harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama lima tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis pembangunan Kabupaten Merangin. Proses elaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Merangin.

3.1 Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD Kabupaten Merangin 2025-2045 dalam jangka waktu 20 tahun yakni:

“MERANGIN BERDAYA SAING, MAJU, dan BERKELANJUTAN”

Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Merangin, yang sangat dinamis oleh karena itu penyusunan Visi Jangka Menengah selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Oleh karena itu, berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Merangin tahun 2025-2045, maka disusun sebuah cita-cita atau Visi pembangunan masyarakat Merangin dalam periode 2025-2029. Visi tersebut adalah:

"MENUJU MERANGIN BARU 2030"

**Dengan semangat BARU, Merangin Berdaya saing, Akuntabel,
Reformis, dan Unggul**

- **Berdaya saing**, artinya Kabupaten Merangin yang kaya akan Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus dibangun dengan konsep berkelanjutan dan terencana dengan baik, fokus, dan tuntas agar memiliki daya saing antardaerah khususnya di Provinsi Jambi.
- **Akuntabel**, artinya Pemerintah Daerah harus bekerja dengan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Merangin dalam rangka melayani masyarakat, Pemerintah Daerah harus selalu hadir saat dibutuhkan masyarakat.
- **Reformis**, Pemerintah Kabupaten Merangin harus berani mereformasi kinerja Pemerintah Daerah sesuai potensi dan keunggulan daerah dan dimulai dari kompetensi Aparatur dan dan sistem Merit dan perencanaan berbasis Proses bisnis.
- **Unggul**, Pemerintah Kabupaten Merangin harus memiliki Program Prioritas dan tepat sasaran agar Program Pembangunan berjalan sesuai proses bisnis Perencanaan untuk Merangin Unggul.

3.2 Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi



Pembangunan Kabupaten Merangin selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2025-2029**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
"MENUJU MERANGIN BARU 2030" Dengan semangat BARU, Merangin Berdaya saing, Akuntabel, Reformis, dan Unggul"	Unggul	Misi 1: Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya.
	Merangin Berdaya saing	Misi 2: Memantapkan infrastruktur daerah.
	Merangin Berdaya saing	Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata dan UMKM).
	Akuntabel dan Reformis	Misi 4: Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).

Sumber: Diolah Penyusun 2025

Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan empat Misi Kepala Daerah Kabupaten Merangin selama tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Misi : Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya.
2. Misi 2: Memantapkan infrastruktur daerah.
3. Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (*Green Economy*) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata, dan UMKM).
4. Misi 4: Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).

Berdasarkan hasil penelaahan dan penyesuaian terhadap Proses Bisnis daerah serta kebutuhan strategis Kabupaten Merangin ke depan, rumusan misi Kepala Daerah mengalami penyesuaian. Semula terdapat empat misi utama, dan setelah dilakukan penyesuaian, jumlah misi disederhanakan menjadi tiga misi inti. Penyederhanaan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat fokus pembangunan serta memastikan keterpaduan antarprogram prioritas, dengan substansi penguatan infrastruktur daerah tidak lagi dicantumkan sebagai misi tersendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam dukungan lintas sektor pada misi yang telah dirumuskan. Berikut merupakan rumusan misi pembangunan Kabupaten Merangin 2025-2029 berdasarkan hasil penyesuaian:

1. Misi 1: Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya.
2. Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (*Green Economy*) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata dan UMKM).
3. Misi 3: Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).



Gambar 3.1 Kontribusi Misi Kabupaten Merangin terhadap Astacita

Sumber: Diolah Penyusun 2025

Telaah Misi Pembangunan Kabupaten Merangin:

- **Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Merangin yang Unggul dan Berbudaya**

Misi ini diselenggarakan untuk mendukung pokok visi Merangin “**Unggul**”. Misi ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompetensi tinggi, memiliki karakter dan budaya yang kuat, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi individu secara inklusif dan penguatan nilai budaya lokal, Kabupaten Merangin diharapkan mampu menghasilkan generasi yang siap bersaing dalam berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan SDM yang unggul dan inklusif akan menjadi kunci untuk mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. Melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan karakter yang menjangkau semua kelompok masyarakat, kesempatan untuk berkembang dapat diperluas secara merata. Keberhasilan misi ini akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, berbudaya, dan inklusif, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

- **Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dengan Skema Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata, dan UMKM)**

Misi ini diimplementasikan untuk mendukung pokok visi Merangin “**Berdaya Saing**”. Misi ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip ekonomi hijau. Pendekatan inklusif dalam pembangunan ekonomi diharapkan dapat memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi yang dicapai.

Dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM, Kabupaten Merangin akan mampu membangun perekonomian yang tangguh dan kompetitif. Strategi ini

juga akan mendorong pelestarian lingkungan sekaligus memperluas kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Keberhasilan misi ini akan menjadi fondasi utama dalam menguatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.

- **Misi 3: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat (Berbasis Teknologi Informasi 5.0)**

Misi ini dirancang untuk mencapai pokok visi **“Akuntabel dan Reformis”**. Misi ini bertujuan untuk membangun pemerintahan yang transparan, efektif, dan profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Penerapan tata kelola yang baik dan bersih merupakan landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan digitalisasi layanan berbasis teknologi informasi 5.0, Kabupaten Merangin diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan misi ini akan menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang inovatif, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Memperhatikan kesesuaian dengan visi misi Kepala Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, visi misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan tahap dalam perencanaan strategis yang memuat kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan menjadi salah satu tahap penting dalam perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Tahap ini memiliki urgensi tinggi karena apabila penjabaran visi misi kepala daerah tidak dilakukan secara teknokratik dalam tujuan, hal tersebut dapat mempengaruhi sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi tujuan yang dirumuskan untuk benar-benar mencerminkan sasaran yang hendak dicapai.

Rumusan tujuan merupakan turunan yang lebih operasional dari misi pembangunan daerah dan mencerminkan kondisi yang akan dicapai, serta dapat mendukung pencapaian misi daerah. Tujuan yang telah dirumuskan dapat diukur tingkat keberhasilan dan pencapaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap tujuan yang tercantum dalam RPJMD harus memiliki indikator yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa capaian dapat dipantau secara objektif.

Sejalan dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja, perencanaan pembangunan daerah berbasis pada kinerja, dengan penekanan pada target kinerja yang mencakup hasil (*outcome*), dampak (*impact*), maupun keluaran (*output*) dari capaian sebuah sasaran, program, maupun kegiatan. Pendekatan ini mengutamakan pencapaian hasil yang nyata dan terukur, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih tepat terhadap efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.

Perumusan tujuan harus memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya menjadi landasan dalam perumusan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Oleh karena itu, penting agar tujuan yang dirumuskan tidak hanya mencerminkan aspirasi jangka panjang, tetapi juga mempertimbangkan tantangan dan potensi yang terdapat di tingkat lokal. Terdapat **tiga tujuan** sebagai operasionalisasi Visi dan Misi Kabupaten Merangin antara lain:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
3. Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi

Ketiga tujuan di atas diuraikan pada masing-masing sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029

Tujuan	Ikhtisar	Sasaran
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Tujuan pertama adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Meningkatnya derajat



Tujuan	Ikhtisar	Sasaran
	Untuk mencapai tujuan ini, sasaran yang ditetapkan mencakup peningkatan kualitas pendidikan yang dapat memajukan kemampuan intelektual masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik, serta peningkatan kualitas pembangunan pemuda untuk menciptakan generasi penerus yang tangguh. Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, sebagai bagian integral dari kemajuan sosial, serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.	kesehatan masyarakat Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Meningkatnya Kualitas Hidup Anak Meningkatnya taraf hidup masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Tujuan kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran dari tujuan ini meliputi peningkatan daya saing industri pengolahan yang akan memperkuat sektor ekonomi daerah, serta meningkatkan kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum yang relevan dengan kebutuhan pasar. Fokus juga diberikan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, daya saing produk pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sektor-sektor tersebut. Selain itu, pencapaian realisasi investasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah akan mempercepat kemajuan ekonomi secara menyeluruh. Peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam dan dapat berkelanjutan.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Meningkatnya Daya Saing Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan Meningkatnya Realisasi Investasi Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah Meningkatnya kualitas Lingkungan sebagai penunjang ekonomi yang berkelanjutan Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Tujuan ketiga adalah meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. Sasaran yang ingin	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

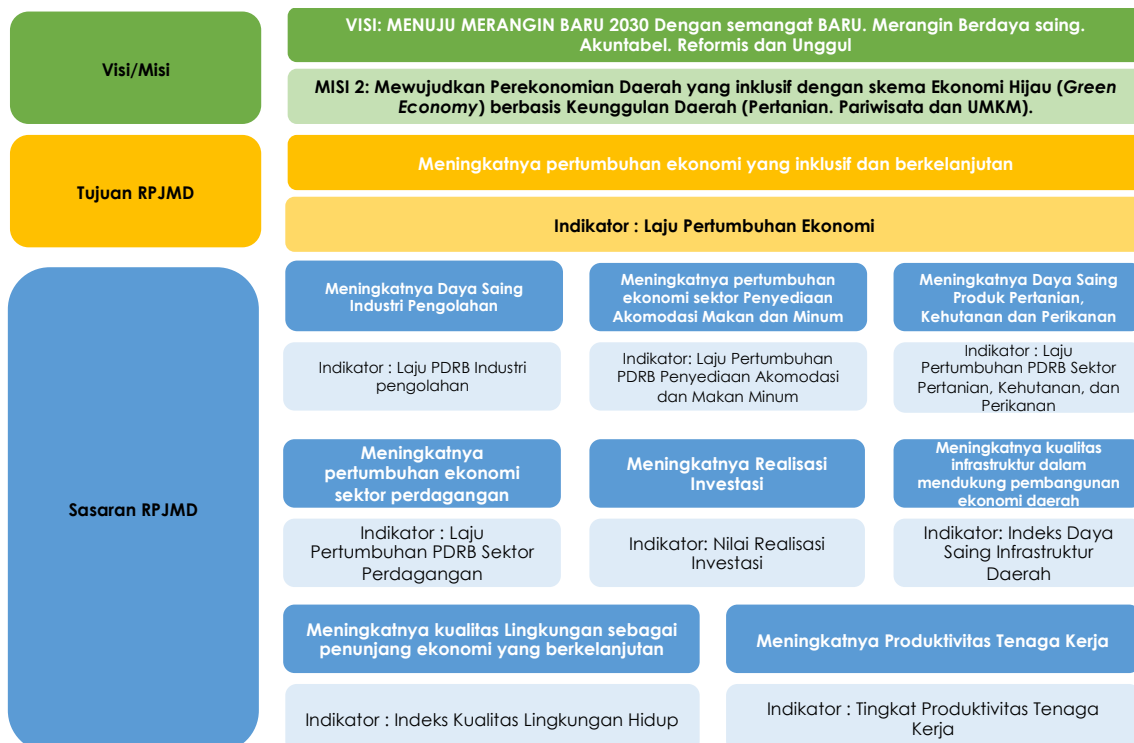


Tujuan	Ikhtisar	Sasaran
	dicapai dalam tujuan ini mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, yang akan membawa efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, pengelolaan arsip berbasis digital dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan integritas dan efektivitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki pegawai yang kompeten dan profesional. Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, kualitas pelayanan publik yang prima serta pengendalian intern pemerintah yang lebih baik juga menjadi sasaran yang harus dicapai, diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Meningkatnya kualitas Manajemen ASN Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Sebagai upaya mewujudkan penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029, maka diuraikan *cascading* kinerja dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.2 Cascading Misi 1: Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya



Gambar 3.3 Cascading Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (*Green Economy*) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata, dan UMKM)



Gambar 3.4 Cascading Misi 3: Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0)

Cascading kinerja RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 dipetakan dengan dengan rincian target kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir 2030	PD Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
MENUJU MERANGIN BARU 2030													
Dengan semangat BARU, Merangin Berdaya saing, Akuntabel, Reformis dan Unggul													
Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72.65	73.26	73.88	74.49	75.10	75.71	76.33	76.33	
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	12.26	12.27	12.28	12.28	12.29	12.31	12.32	12.32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.4	8.48	8.60	8.72	8.84	8.95	9.07	9.07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	74.13	74.35	74.50	74.65	74.80	74.95	75.10	75.10	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	49	55.5	56	56.5	57	57.5	57.5	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89.37	89.58	89.78	89.99	90.19	90.40	90.60	90.60	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	62.64	63.53	64.41	65.30	66.18	67.07	67.95	67.95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	11.425	11.712	11.998	12.285	12.571	12.858	13.144	13.144	1, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (Green Economy) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata dan UMKM)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4.55	4.92	5.34	5.76	6.18	6.60	7.02	7.02	
		Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Laju PDRB Industri pengolahan	Persentase	1.91	2.06	2.21	2.36	2.51	2.66	2.81	2.81	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persentase	7.78	7.88	7.98	8.08	8.18	8.28	8.38	8.38	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga
		Meningkatnya Daya Saing Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor	Persentase	2.77	3.14	3.51	3.88	4.25	4.62	4.99	4.99	Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi Akhir 2030	PD Penanggung Jawab
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan										Hortikultura
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	7.05	7.2	7.35	7.5	7.65	7.8	7.95	7.95	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (miliar)	207.4	228.14	262.36	314.83	393.54	511.60	690.67	690.67	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks	2.47	3.09	3.14	3.20	3.25	3.30	3.35	3.35	DPUPR, Dishub, Dinas Perkim, DLH
		Meningkatnya kualitas Lingkungan sebagai penunjang ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.82	74.63	74.84	75.05	75.27	75.45	75.66	75.66	DLH
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	60.54	62.75	64.96	67.16	69.37	71.58	73.79	73.79	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0)	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67.71	69	70.25	71.5	72.75	73.5	74.76	74.76	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks SPBE	Indeks	3.2	3.4	3.55	3.7	3.85	4	4.15	4.15	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	67.58	69.5	71	72.5	74	75.5	77	77	Sekretariat Daerah, Bappeda, Inspektorat
		Meningkatnya kualitas Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Indeks	114	250	265	275	285	295	305	305	BKPSDMD
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.28	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	3.55	3.55	Sekretariat Daerah, OPD Sampel pelayanan Publik
		Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	3.04	3.048	3.078	3.1	3.28	3.33	3.40	3.40	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	68.012	69.5	70.5	73.5	76.5	80	83	83	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



3.4 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan

Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Merangin periode 2025–2029, diperlukan strategi yang komprehensif dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Strategi ini disusun dengan pendekatan yang berbasis pada isu strategis, tantangan utama, serta peluang yang dapat dioptimalkan guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan pembangunan Kabupaten Merangin dapat berjalan secara terarah, terukur, serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, dalam subbab berikut akan dipaparkan strategi pembangunan daerah di Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029.

3.4.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Merangin 2025-2029

1. Strategi Pembangunan Tahun 2025

Strategi pembangunan Kabupaten Merangin pada tahun 2025 akan berfokus pada **Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial serta Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif Inovatif dan inklusif**. Upaya pembangunan tahun ini diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi sosial melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang inklusif, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Daerah akan memperluas cakupan layanan kesehatan primer dan menengah, meningkatkan mutu fasilitas pendidikan serta kompetensi tenaga pengajar, dan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, pembangunan SDM juga akan difokuskan pada penciptaan generasi yang produktif, sehat, dan inovatif melalui pengembangan program pelatihan vokasional, beasiswa, dan penguatan pendidikan karakter.

2. Strategi Pembangunan Tahun 2026

Strategi pembangunan Kabupaten Merangin pada tahun 2026 akan berfokus pada **Penguatan Produktivitas dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah**. Pembangunan tahun ini diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi lokal dengan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan,



dan pariwisata berbasis ekowisata. Pemerintah Daerah akan mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah, serta memperluas akses pasar bagi pelaku ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan produksi, jaringan energi, dan konektivitas digital menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas usaha juga akan diperkuat sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas daerah secara menyeluruh.

3. Strategi Pembangunan Tahun 2027

Strategi pembangunan Kabupaten Merangin pada tahun 2027 akan berfokus pada **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Berdampak**. Pada tahun ini, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Pemerintah Daerah akan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis hasil. Penguatan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola yang adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan global.

4. Strategi Pembangunan Tahun 2028

Strategi pembangunan Kabupaten Merangin pada tahun 2028 akan berfokus pada **Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi, dan Stabilitas Ekonomi**. Pembangunan pada tahun ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial dan politik yang kondusif bagi kelangsungan pembangunan daerah. Pemerintah akan memperkuat peran aparat keamanan dan penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum serta memperluas ruang partisipasi publik dalam demokrasi lokal. Di sisi ekonomi, stabilitas akan dijaga melalui penguatan sektor strategis seperti pertanian dan pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan dan kesinambungan ekonomi. Pendekatan inklusif juga akan diterapkan



agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata.

5. Strategi Pembangunan Tahun 2029 (I)

Strategi pembangunan Kabupaten Merangin pada tahun 2029 akan berfokus pada **Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Landasan dan Modal Dasar Pembangunan**. Pembangunan pada tahun ini menempatkan pelestarian budaya lokal dan perlindungan lingkungan hidup sebagai elemen utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Pemerintah Daerah akan mengembangkan program pelestarian nilai-nilai budaya, seni, dan warisan sejarah sebagai bagian dari identitas daerah. Di sisi lain, penguatan kesadaran ekologis masyarakat dan penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan akan menjadi pijakan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

6. Strategi Pembangunan Tahun 2029 (II)

Selain itu, strategi pembangunan Kabupaten Merangin pada tahun 2029 juga akan difokuskan pada **Peningkatan Pembangunan Wilayah Potensi Ekonomi Tinggi melalui Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana yang Berwawasan Lingkungan**. Pembangunan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah akan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan energi, dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Optimalisasi sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh pelosok Merangin.

3.4.2 Pentahapan Pembangunan Daerah

Penahapan pembangunan Kabupaten Merangin adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Merangin 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan: Meningkatnya Penguatan Layanan Dasar dan Pemetaan Potensi Daerah sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan	Tema Pembangunan: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi dan Budaya Daerah	Tema Pembangunan: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah melalui Inovasi, Klasterisasi, dan pemerataan pembangunan	Tema Pembangunan: Mewujudkan Stabilitas Sosial Ekonomi dan Pemantapan Inovasi Daerah	Tema Pembangunan: Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan melalui SDM Inovatif, Ketahanan Sosial Budaya, dan Tata Kelola Berkualitas
Peningkatan akses layanan dasar kesehatan dan pendidikan di wilayah prioritas	- Perluasan layanan kesehatan dan pendidikan dengan peningkatan kualitas SDM produktif - Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan	- Optimalisasi layanan kesehatan dan pendidikan berbasis teknologi dan inovasi - Peningkatan kualitas SDM inovatif	- Penyempurnaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial secara merata dan inovatif - Pengembangan SDM yang produktif dan inovatif secara menyeluruh	Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial serta Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif dan Inovatif
- Pengkajian dan pemetaan potensi sosial budaya dan ekologi daerah - Kampanye kesadaran pelestarian budaya dan lingkungan	- Penguatan pelestarian sosial budaya dan ekologi pada komunitas prioritas - Pengembangan forum budaya dan lingkungan	- Pelaksanaan pelestarian sosial budaya dan ekologi berkelanjutan - Penguatan pelibatan komunitas lokal	Pelestarian sosial budaya dan ekologi sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Sebagai Landasan dan Modal Dasar Pembangunan
- Identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal - Penguatan kewirausahaan skala kecil	- Penguatan akses permodalan untuk usaha berbasis potensi daerah - Dukungan pada pengembangan UMKM dan agroindustri	- Pengembangan klaster ekonomi daerah dan diversifikasi usaha - Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi lokal	- Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan potensi daerah secara maksimal - Peningkatan daya saing daerah	Penguatan Produktivitas dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah
- Penguatan keamanan masyarakat di tingkat desa/kelurahan - Penguatan prinsip demokrasi partisipatif	- Penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal - Penguatan stabilitas ekonomi daerah	- Konsolidasi ketenteraman dan demokrasi yang sehat - Penjaminan stabilitas ekonomi yang lebih kokoh	- Penguatan ketenteraman umum, demokrasi yang matang, dan stabilitas ekonomi yang kokoh - Penguatan sistem penegakan hukum	Penguatan Ketenteraman dan ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi
- Preservasi jalan Buy The Service (BTS) Kota Bangko-BTS. Kab.Sarolangun - Studi kelayakan proyek pembangunan kawasan perkotaan - Perencanaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan berbasis potensi daerah	- Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dengan standar lingkungan - Penyediaan fasilitas pendukung wilayah potensi ekonomi tinggi	- Perluasan pembangunan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan - Pengembangan kawasan ekonomi berkelanjutan	Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur ramah lingkungan untuk kesinambungan pembangunan	Peningkatan Pembangunan Wilayah Potensi Ekonomi Tinggi Melalui Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan
- Penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan transparansi - Penguatan kapasitas aparatur	- Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan - Penerapan sistem e-governance awal	- Evaluasi dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan berdasarkan data dan hasil monitoring - Penguatan akuntabilitas publik	- Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berdampak terimplementasi penuh - Penguatan layanan publik berbasis teknologi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Berdampak

3.4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Merangin 2025-2029

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Merangin 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Merangin
2025-2029**

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya.	1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial serta Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif dan Inovatif 2. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Sebagai Landasan dan Modal Dasar Pembangunan	
2.	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (<i>Green Economy</i>) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata dan UMKM).	1. Penguatan Produktivitas dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah 2. Penguatan Ketenteraman dan ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi 3. Peningkatan Pembangunan Wilayah Potensi Ekonomi Tinggi Melalui Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	
3.	Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Berdampak	

1. Arah Kebijakan I Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial serta Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif dan Inovatif

Pada periode ini, kebijakan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi sosial melalui peningkatan akses dan inklusivitas terhadap pelayanan dasar di bidang kesehatan (termasuk dukungan advokasi posyandu), pendidikan, dan perlindungan sosial. Upaya ini juga diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan inovatif, dengan menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai prasyarat utama pembangunan manusia yang berkelanjutan. Periode ini menjadi pijakan dasar bagi keberlanjutan pembangunan di fase berikutnya.



2. Arah Kebijakan II Penguatan Produktivitas dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah

Pada tahap ini, fokus utama adalah membangun fondasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata berbasis ekowisata. Kabupaten Merangin juga akan memulai langkah awal untuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil pertanian dan produk kayu. Dalam upaya ini, mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang maju, khususnya BUMD aneka usaha, akan menjadi strategi kunci untuk memperkuat perekonomian daerah dan mempercepat pemanfaatan potensi lokal. Infrastruktur dasar, seperti jalan produksi, fasilitas energi, dan akses digital, akan diperkuat untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih efisien. Selain itu, sejalan dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025, dilakukan percepatan pendirian, pengembangan, atau revitalisasi koperasi desa/kelurahan merah putih dalam mendukung pemerataan ekonomi..

3. Arah Kebijakan III Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Berdampak

Arah kebijakan pada periode ini adalah "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Berdampak." Fokus utama adalah membangun fondasi yang kokoh untuk transformasi tata kelola melalui penguatan sistem, kapasitas kelembagaan, dan SDM aparatur. Program-program utama mencakup digitalisasi pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas, dan reformasi birokrasi berbasis kinerja. Upaya ini bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan global.

4. Arah Kebijakan IV Penguatan Ketenteraman dan ketertiban Umum, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi

Pada periode ini, kebijakan difokuskan pada "Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Demokrasi, dan Stabilitas Ekonomi." Fondasi yang kuat diperlukan untuk menciptakan kestabilan sosial-politik dan keamanan yang mendukung iklim pembangunan yang sehat. Kebijakan pada periode ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, membangun kapasitas



aparatus penegak hukum untuk menjaga ketertiban umum, serta mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam proses demokrasi. Di sisi ekonomi, periode ini akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar, pembangunan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya alam, serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi pilar ekonomi daerah. Keberlanjutan dan pemerataan pembangunan menjadi fokus utama, dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diterapkan.

5. Arah Kebijakan V Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Sebagai Landasan dan Modal Dasar Pembangunan

Pada periode ini, fokus utama kebijakan pembangunan adalah memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Selama lima tahun ini, Kabupaten Merangin akan mengupayakan pembangunan yang berbasis pada pelestarian budaya lokal serta pemeliharaan ekosistem yang berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk membangun rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dari masyarakat, yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan memastikan bahwa kebutuhan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin diarahkan pada beberapa prioritas strategis. Di antaranya adalah pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Bangko sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang berfungsi mendukung pelayanan administrasi, ekonomi, dan sosial. Selain itu, dilakukan pula preservasi jalan sebagai bagian dari skema *Buy The Service* (BTS) pada koridor Kota Bangko–Kabupaten Sarolangun guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik. Di samping itu, Kabupaten Merangin juga difokuskan sebagai kawasan swasembada yang terintegrasi dalam ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan pengembangan energi terbarukan sebagai bentuk



dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan ketahanan daerah..

6. Arah Kebijakan VI Peningkatan Pembangunan Wilayah Potensi Ekonomi Tinggi Melalui Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Pada periode ini, arah kebijakan berfokus pada "Peningkatan Pembangunan Wilayah Potensi Ekonomi Tinggi Melalui Pemenuhan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan." Di tahap awal ini, Kabupaten Merangin akan memprioritaskan pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan dengan potensi ekonomi tinggi. Upaya ini akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, mengintegrasikan aspek ramah lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal akan menjadi landasan untuk menciptakan kestinambungan pembangunan, di mana peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing wilayah menjadi prioritas utama.

3.4.4 Arah Pembangunan Kewilayahan

Dalam konteks Kabupaten Merangin, rencana pembangunan kewilayahan tidak hanya memperhatikan kebutuhan lokal, tetapi juga terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terdapat rencana pembangunan infrastruktur yang disajikan dalam bentuk lokasi prioritas dan highlight indikasi intervensi yang sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Merangin. Lebih detail berikut akan ditunjukkan keterkaitan prioritas pembangunan kewilayahan di Kabupaten Merangin dengan Nasional dan Provinsi.

Tabel 3.6 Lokasi Prioritas Pembangunan Kewilayahan dan *Highlight* Indikasi Intervensi

No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
1	Kawasan pertumbuhan; Kawasan Perkotaan Bangko: 1. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu 2. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau 3. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan 4. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan 5. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bangko (PHTC) 6. Pengembangan SPAM Perkotaan Bangko 7. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kolonel Abundjani (PHTC) 8. Preservasi jalan ruas Bangko–Muara Bungo–Muara Tebo, Bangko–Sarolangun–Rupit, Bangko–Sungai Penuh	1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bangko 2. Preservasi Jalan BTS. Kota Bangko – BTS. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin	KAWASAN PERKOTAAN BANGKO	Kec. Bangko	1. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu 2. Penataan Jalur 3 di wilayah kota bangko dengan status jalan nasional dan kabupaten menjadi 2 jalur dengan status Jalan Nasional 3. Penataan RTH sepanjang jalur lintas sumatera di dalam kota Bangko 4. Penataan lampu PJU 5. Penataan taman kota 6. Penataan Jam Gento dan Pasar Lereng 7. Penataan Pasar dan PKL di Kawasan Perkotaan Bangko 8. Penataan TPS 9. Penataan TPA Langling 10. Penataan Pedestrian dan jalur sepeda 11. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau 12. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan dan komunitas 13. Peningkatan kualitas SDM dan



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
					komunitas melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi petani urban, pengelola bank sampah, pemandu wisata alam, dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye lingkungan 14. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan 15. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bangko (PHTC) 16. Pengembangan kawasan perkotaan dengan konsep <i>Green City</i> berbasiskan pelestarian ekosistem alami, pengelolaan sampah berbasis komunitas, transportasi dan mobilitas berkelanjutan, penggunaan sistem GIS untuk pemantauan RTH, DAS, aplikasi pelaporan sampah liar dan illegal dumping serta mendorong pengembangan IPAL Komunal 17. Pengembangan konsep smart city melalui konektivitas jaringan intranet, akses wifi gratis di ruang publik, cctv di lokasi strategis dan ruang kontrol terpusat. 18. Penataan Hutan kota/Arboretum Rio Alif sebagai bagian dari dukungan <i>Geopark</i> Merangin



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
					Jambi 19. Pembatasan kendaraan pada waktu-waktu tertentu (<i>Car and Motorcycle Free Day</i>)
			PENGEMBANGAN SPAM PERKOTAAN BANGKO (PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN)	Kec. Bangko (Kawasan perkotaan Bangko, Sungai Ulak dan Sungai Kapas)	1. Peningkatan cakupan layanan SPAM di perkotaan bangko untuk mencapai layanan 100% 2. Optimalisasi waktu pelayanan dan ketersediaan pasokan air ke tiap rumah dan reduksi <i>idle capacity</i> yang masih berlangsung 3. Upaya mengatasi kondisi Diameter Jaringan Pipa Distribusi Utama Kecil sehingga Pelayanan dan Supply Distribusi tidak optimal
2	Kawasan Swasembada Pangan Air dan Energi: 1. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Batanghari, terutama pada Sub-DAS Batang Merangin-Tembesi 2. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Kerinci dan Sub-DAS Batang Merangin-Tembesi 3. Pembangunan Bendungan Merangin dan PLTA Bendungan Merangin 4. Pembangunan infrastruktur PLTA Merangin 5. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan	1. Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial 2. Peningkatan	KAWASAN SWASEMBADA PANGAN (PADI)	Cluster I (Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Batang Masumai) Cluster II (Kec. Jangkat, Jangkat Timur, Lembah Masurai, Muara Siau dan Kec. Tiang Pumpung) Cluster III (Tabir Lintas, Margo Tabir, Tabir, Tabir Ulu, Tabir Barat,	1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pertanian 2. Optimalisasi peran penyuluh 3. Penguatan peran dan fungsi kelompok tani 4. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pertanian 6. Intensifikasi dan diversifikasi lahan 7. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
	irigasi kewenangan pemerintah daerah 6. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 7. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) 8. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura 9. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 10. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik 11. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui	produksi dan produktivitas ternak melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan		Tabir Ulu dan Tabir Selatan) Cluster IV (Pamenang Barat, Pamenang, Renah Pamenang dan Pamenang Selatan)	peternakan) 8. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura, Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 9. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik 10. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan, prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen 11. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi		Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
	peningkatan prasarana pascapanen 12. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama 13. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian				pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama 12. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
			KAWASAN SWASEMBADA PANGAN (JAGUNG)	1. Kec. Muara Siau, 2. Kec. Pamenang Barat, 3. Kec. Pamenang, 4. Kec. Renah	1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pertanian 2. Optimalisasi peran penyuluh 3. Penguatan peran dan fungsi kelompok tani 4. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
				Pamenang, dan 5. Kec. Pamenang Selatan 6. Kec. Renah Pembarap 7. Kec. Sungai Manau	air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pertanian 6. Intensifikasi dan diversifikasi lahan
			KAWASAN SENTRA PETERNAKAN	1. Tabir Selatan 2. Pamenang 3. Margo Tabir 4. Renah Pamenang 5. Sungai Manau 6. Renah Pembarap 7. Pamenang Barat 8. Bangko Barat 9. Batang Masumai 10. Pamenang Selatan 11. Jangkat 12. Jangkat Timur 13. Tabir Ulu	1. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) 2. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura, Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk peternakan 3. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik 4. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan, prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
					akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen 5. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama 6. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani,



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi		Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
					serta penguatan implementasi hasil riset pertanian 7. Pengembangan sentra peternakan rakyat (SPR) pada komoditi Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Domba, Unggas keseluruhan (termasuk ayam ras pedaging)
			KAWASAN SENTRA BUDIDAYA PERIKANAN	Kec. Jangkat (Desa Rantau Kermas, Desa Pulau Tengah, Desa Renah Alai) Desa Sungai Kapas (C2)	1. Pengembangan budidaya ikan pada sungai deras dan masih terjaga pada areal perlindungan dan masuk delineasi hutan adat atau hutan desa di Kec. Jangkat 2. Pengembangan budidaya ikan di kolam pada kawasan dataran rendah (Desa Sungai Kapas) dengan jenis nila, lele, patin dan gurame 3. Budidaya perikanan sungai deras terfokus pada 14 jenis ikan lokal, di antaranya semah (<i>Tor Gray</i>), Kelari Batu (<i>Schismatorhynchus Endecarhapis</i>) dan Berau (<i>Hampala Macrolepidota</i>) 4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung 5. Upaya <i>restocking</i> pada areal dilindungi/lubuk larangan 6. Mendorong tumbuhnya Industri pengolahan perikanan skala industri kecil dan rumah tangga 7. Dukungan penyediaan alat pengolahan ikan seperti Alat Ikan



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
					Asap, Alat Pembuatan Abon dll, serta didukung alat Packing 8. Perlu alokasi anggaran untuk Pembebasan Tanah yang diperuntukkan bagi Perikanan Kawasan
			PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA BERBASIS GEOPARK MERANGIN JAMBI	1. Kec. Renah Pembarap 2. Kec. Sungai Manau 3. Kec. Bangko Barat 4. Kec. Tiang Pumpung 5. Kec. Lembah Masurai 6. Kec. Jangkat 7. Kec. Jangkat Timur 8. Kec. Bangko 9. Kec. Renah Pamenang 10. Kec. Tabir	1. Aksesibilitas Wisata Geopark • Peningkatan jalan menuju situs fosil tertua (Sungai Manau, Air Batu, dan sekitarnya) • Penambahan rambu dan informasi geowisata 2. Fasilitas Pariwisata Berbasis Komunitas • Pusat informasi <i>Geopark</i> dengan upaya relokasi dan renovasi bentuk bangunan yang mengacu kepada rumah adat rantau panjang, homestay, toilet umum, tempat istirahat • Galeri budaya dan produk UMKM lokal (kopi, batik fosil, dll.) 3. Infrastruktur Digital dan Promosi • Penguatan jaringan internet dan sistem informasi wisata digital • Papan interpretasi geologi dan aplikasi pemandu wisata daring 4. Konservasi dan Edukasi Lingkungan • Kawasan edukasi lingkungan dan mitigasi bencana (geo-hazard)



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
					• Fasilitas riset geowisata dan pengelolaan sampah wisata
			DUKUNGAN PENERAPAN PEMBANGUNAN BERBASIS EKONOMI HIJAU	Kab. Merangin	1. Dukungan pengelolaan PLTMH 2. Fasilitas pelaksanaan program Koridor Rimba agar dokumen yang disusun bisa diimplementasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan
			KAWASAN UNGGULAN KOMODITAS KOPI	1. Lembah Masurai 2. Jangkat Timur 3. Jangkat 4. Muara Siau	1. Peningkatan Produktivitas perkebunan dan kualitas produksi 2. Pengembangan dan perlindungan kawasan perkebunan kopi 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perkebunan kopi 4. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi kopi 1. Upaya perlindungan dan pengelolaan daerah penyangga/konservasi, agar keberlanjutan perkebunan kopi tetap terjaga dan sebagai upaya mitigasi bencana alam
3	Kawasan Komoditas Unggulan; Sawit dan Karet: 1. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet) 2. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet) 3. Penyediaan sarana dan prasarana	1. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk	PENGEMBANGAN KAWASAN UNGGULAN KOMODITAS SAWIT dan KARET	1. Kec. Pamenang, 2. Kec. Tabir Selatan 3. Kec. Renah Pamenang, 4. Kec. Pamenang Selatan 5. Kec. Bangko	2. Peningkatan Produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet) 3. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri(sawit dan karet) 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi



No	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Highlight Indikasi Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Lokasi Prioritas	Lokasi	Highlight Indikasi Intervensi
	pendukung produksi pertanian (sawit dan karet) 4. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet) 5. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet 6. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura	2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri		6. Kec. Batang Masumai 7. Kec. Bangko Barat 8. Kec. Tabir 9. Kec. Tabir Timur 10. Kec. Pamenang Barat 11. Kec. Renah Pamenang 12. Kec. Tabir Ulu 13. Kec. Tabir Barat	pertanian(sawit dan karet) 5. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri(sawit dan karet) 6. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet

Sumber: Diolah Penyusun 2025



3.4.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029, diperlukan perumusan langkah-langkah strategis yang diwujudkan melalui pelaksanaan program prioritas pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Program-program prioritas tersebut disusun berdasarkan identifikasi terhadap isu strategis yang dihadapi daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, potensi unggulan daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Sebagai kabupaten dengan dinamika pertumbuhan yang progresif, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya lokal, dan posisi geografis yang strategis dalam konteks wilayah regional, Kabupaten Merangin menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap program prioritas yang dirancang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang mendukung kelestarian lingkungan hidup.



Tabel 3.7 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Merangin 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
MENUJU MERANGIN BARU 2030						
Dengan semangat BARU. Merangin Berdaya saing. Akuntabel. Reformis dan Unggul						
Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia		
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan		Harapan lama sekolah Rata-Rata Lama Sekolah		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Kemampuan Literasi dan numerasi 2. Angka Partisipasi Sekolah 3. Proporsi Satuan PAUD yang berakreditasi minimal B 4. Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia harapan hidup		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Indikator nasional mutu 2. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular 3. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular 4. Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional menuju UHC 5. Persentase Puskesmas yang melaksanakan ILP (Integrasi Layanan Primer)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		Indeks Pembangunan Gender		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		Indeks Perlindungan Anak		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program pemenuhan hak anak (PHA)	



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
MENUJU MERANGIN BARU 2030						
Dengan semangat BARU. Merangin Berdaya saing. Akuntabel. Reformis dan Unggul						
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak	
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat		Pendapatan Perkapita		
			Meningkatnya kualitas SDM dan sertifikasi usaha mikro	1. Persentase Pelaku Usaha Mikro Sudah Mengikuti Pelatihan Usaha Dengan Tingkat Pemahaman Materi Diatas 75% 2. Persentase Usaha Mikro Sudah Sertifikasi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	
			1. Meningkatkan pengembangan Usaha Mikro melalui bantuan peralatan digitalisasi pemasaran 2. Meningkatkan pengembangan Usaha Mikro melalui bantuan peralatan digitalisasi pemasaran	1. Persentase Usaha Mikro Yang Menerima Bantuan Peralatan Usaha 2. Persentase Usaha Mikro Yang Menerapkan Pemasaran Digital	Program Pengembangan UMKM	
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (Green Economy) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian. Pariwisata dan UMKM).	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan		Laju PDRB Industri pengolahan		
			Meningkatnya SDM dan teknologi industri	1. Persentase Pelaku IKM Unggulan Sudah Mengikuti Pelatihan Sesuai Jenis Usahanya Dengan Tingkat Pemahaman Materi Diatas 75% 2. Persentase IKM Unggulan Menggunakan Teknologi Produksi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Wisata	Program pemasaran pariwisata	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
MENUJU MERANGIN BARU 2030						
Dengan semangat BARU. Merangin Berdaya saing. Akuntabel. Reformis dan Unggul						
		Meningkatnya Daya Saing Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Usaha perikanan budidaya yang dikelola	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan perkebunan	1. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan 2. Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana TPH	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan perkebunan	1. Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Peternakan 2. Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana TPH	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		
			Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan	Rasio Pedagang Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Investasi		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	1. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai SOP 2. Persentase pengaduan yang diselesaikan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase layanan transportasi darat yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
MENUJU MERANGIN BARU 2030						
Dengan semangat BARU. Merangin Berdaya saing. Akuntabel. Reformis dan Unggul						
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Menurunnya proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh liar, atau rumah tidak layak huni	Persentase proporsi populasi penduduk perkotaan dan pedesaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman air atau rumah yang tidak layak	Program Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah yang layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Terpenuhinya rumah baru yang layak, sehat dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan rumah baru yang sehat, layak dan berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	
		Meningkatnya kualitas Lingkungan sebagai penunjang ekonomi yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	Program pengelolaan persampahan	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
			Meningkatnya kapasitas/kompetensi tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang Terlindungi	Persentase pengusaha yang mentaati peraturan	Program hubungan industrial	



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
MENUJU MERANGIN BARU 2030						
Dengan semangat BARU. Merangin Berdaya saing. Akuntabel. Reformis dan Unggul						
Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital		Indeks SPBE		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pemenuhan unsur- unsur SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Nilai SAKIP		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase capaian SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas Manajemen ASN		Indeks Sistem Merit		
			1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian 2. Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN 3. Meningkatkan tata kelola pengembangan karir ASN 4. Meningkatkan kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi	Program Kepegawaian Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima		Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
MENUJU MERANGIN BARU 2030						
Dengan semangat BARU. Merangin Berdaya saing. Akuntabel. Reformis dan Unggul						
			1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan 2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	1. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai SOP 2. Persentase pengaduan yang diselesaikan"	Program pelayanan penanaman modal	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Program pencatatan sipil	
		Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah		Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang ditindaklanjuti	Program penyelenggaraan pengawasan	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
			1. Meningkatnya tata kelola anggaran 2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan 3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	1. Persentase Bj Pegawai diluar Tunjangan Guru yg dialokasikan melalui TKD dan Persentase Alokasi Bj Infrastruktur pelayanan Publik 2. Persentase Realisasi Anggaran bj urusan wajib pelayanan dasar 3. Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	Program pengelolaan keuangan daerah	

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Merangin 2025-2029 terdapat **Program Unggulan Kepala Daerah** yang dikelompokkan ke dalam lima pilar utama pembangunan. Kelima kelompok ini mencerminkan fokus pembangunan daerah yang holistik dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah periode 2025–2029.

Kelima pilar tersebut meliputi:

1. **Merangin Pintar dan Berbudaya**, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pendidikan, pelestarian budaya lokal, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
2. **Merangin Berdaya**, yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur ekonomi, hilirisasi produk unggulan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital.
3. **Merangin Sehat**, yang mengedepankan peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. **Merangin Religius**, yang mendukung penguatan lembaga keagamaan serta peningkatan kesejahteraan para pelayan umat dan tokoh masyarakat berbasis nilai-nilai religius.
5. **Merangin Reformis**, yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif melalui reformasi birokrasi dan peningkatan integritas kelembagaan.

Pengelompokan ini diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah, memudahkan integrasi antarprogram, serta memperjelas prioritas dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Merangin.

 Merangin Pintar dan Berbudaya 1. Program Kursus Bahasa Asing untuk anak-anak di setiap Kecamatan, Bantuan Perlengkapan sekolah bagi anak yatim, Fakir miskin, dan beasiswa anak / berprestasi 2. Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga 3. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan serta pembayaran sertifikasi tepat waktu, termasuk pembayaran TPP ASN 4. Penguatan Adat Istiadat dan budaya serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	 Merangin Berdaya 1. Memantapkan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah. 2. Membangun pasar-pasar Baru sebagai pusat ekonomi baru. 3. Hilirisasi hasil pertanian padi dengan membangun Pabrik Beras Modern. 4. Mendorong Pembangunan Jaringan Sekuler pada wilayah Destinasi Wisata dan Wilayah Unggulan Pertanian. 5. Memberi kemudahan perizinan bagi UMKM dan Investor berbasis digital. 6. Menjadikan kota bangko Pusat ekonomi modern Jambi wilayah Barat yang indah dan nyaman. 7. Program ekonomi digital bagi pelaku usaha milenial, UMKM dan masyarakat. 8. Pengembangan secara berkelanjutan Kawasan Strategis Kabupaten dan Geopark Merangin Jambi (UGGP) untuk pertanian dan pariwisata. 9. Program Replanting Sawit dan menyediakan bibit sawit bersubsidi. 10. Pengembangan Perkebunan Kopi Rakyat.	 Merangin Sehat 1. Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum dan Puskesmas serta Mengupayakan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D	 Merangin Religius 1. Bantuan untuk Pesantren, bantuan tambahan insentif untuk pegawai syara' dan guru ngaji dan RT	 Merangin Reformis 1. Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan reformasi birokrasi serta penguatan sistem merit 2. Bupati dan Wakil Bupati ber Kantor di kecamatan secara bergilir 3. Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba
--	---	--	---	--

Gambar 3.5 Pilar Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Merangin 2025-2029

Sumber: Diolah Penyusun 2025



Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Merangin 2025-2029 mendukung prioritas pembangunan kewilayahan sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Dukungan Program Unggulan Kepala Daerah terhadap prioritas pembangunan kewilayahan berbasis RPJMN

No	Lokasi Prioritas Pembangunan Kewilayahan berbasis RPJMN	Dukungan Program Unggulan Kepala Daerah
1.	Kawasan Perkotaan Bangko	1. Memantapkan Infrastruktur dan Daya Saing Daerah. 2. Program Kursus Bahasa Asing untuk anak-anak di setiap Kecamatan, Bantuan Perlengkapan sekolah bagi anak yatim, Fakir miskin, dan beasiswa anak/berprestasi. 3. Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga. 4. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan serta pembayaran sertifikasi/tepat waktu, termasuk pembayaran TPP ASN. 5. Penguatan Adat Istiadat dan budaya serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. 6. Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum dan Puskesmas serta Mengupayakan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D. 7. Bantuan untuk Pesantren, bantuan tambahan insentif untuk pegawai syar' dan guru ngaji dan RT. 8. Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan reformasi birokrasi serta penguatan sistem merit. 9. Bupati dan Wakil Bupati berkantor di kecamatan secara bergilir. 10. Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba 11. Membangun pasar-pasar Baru sebagai pusat ekonomi baru. 12. Menjadikan kota bangko Pusat ekonomi modern Jambi wilayah Barat yang indah dan nyaman. 13. Mendorong Pengembangan Jaringan Selular pada wilayah Destinasi Wisata dan Wilayah



No	Lokasi Prioritas Pembangunan Kewilayahan berbasis RPJMN	Dukungan Program Unggulan Kepala Daerah
		Unggulan Perikanan. 14. Memberi kemudahan perizinan bagi UMKM dan Investor berbasis digital. 15. Program ekonomi digital bagi pelaku usaha milenial, UMKM dan masyarakat.
2.	Kawasan Komoditas Unggulan; Sawit dan Karet	Program <i>Replanting</i> Sawit dan pertanian yang bibit sawit bersubsidi.
3.	Kawasan Swasembada Pangan Air dan Energi	1. Hilirisasi hasil pertanian padi dengan membangun Pabrik Beras Modern. 2. Pengembangan secara berkelanjutan Kawasan Strategis Kabupaten dan <i>Geopark</i> Merangin Jambi (UGGp) untuk pertanian dan pariwisata. 3. Pengembangan Perkebunan Kopi Rakyat.

Sumber: Diolah Penyusun 2025

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Merangin 2025-2029 diuraikan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.9 Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Merangin 2025-2029

Visi/Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu	
Visi: "MENUJU MERANGIN BARU 2030" Dengan semangat BARU, Merangin Berdaya saing, Akuntabel, Reformis dan Unggul.						
Misi 1: Mengembangkan Sumber daya manusia Merangin yang Unggul dan berbudaya	Program Kursus Bahasa Asing untuk anak-anak di setiap Kecamatan, Bantuan Perlengkapan sekolah bagi anak yatim, Fakir miskin, dan beasiswa anak / berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan pendidikan PAUD.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dikbud	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD	Dikbud	
			Kegiatan Pengelolaan pendidikan SD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD	Dikbud	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SD	Dikbud	
			Kegiatan Pengelolaan pendidikan SMP	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Dikbud	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SMP	Dikbud	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah Menengah Pertama	Dikbud		
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Kesra
		Penguatan Adat Istiadat dan budaya serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Pendaftaran Objek diduga cagar budaya	Dikbud
	Penetapan cagar budaya				Dikbud	
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota			Pelindungan cagar budaya	Dikbud	
				Pengembangan cagar budaya	Dikbud	
				Pemanfaatan cagar budaya	Dikbud	
	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kab/Kota			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional		
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga kesenian tradisional		Dikbud	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Dikbud	



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dikbud
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam kab/kota	pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Dikbud
				pembinaan sumberdaya manusia, lembaga, dan pranata adat	Dikbud
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	Dikbud
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
		Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan:Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinsospppa
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinsospppa
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinsospppa
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinsospppa
				Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinsospppa



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan serta pembayaran sertifikasi/tepat waktu, termasuk pembayaran TPP ASN	Program Pengelolaan Pendidikan		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinsospmpa
			Kegiatan Pengelolaan pendidikan SD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dikbud
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Kegiatan Pengelolaan pendidikan SMP	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dikbud
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes
			Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota	Pembinaan dan Pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Dinkes
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/Kota	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Dinkes
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD
		Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsospmpa
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kesra
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kelurahan
	Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi	Disparpora



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
				Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Disparpora
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/ Kota	Disparpora
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Disparpora
				Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/ Kota	Disparpora
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Disparpora
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	Disparpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Disparpora
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Disparpora
				Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan Kabupaten/ Kota serta Kejuaraan	Disparpora



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
				Paralimpik Pelajar Tingkat Kabupaten/kota	
				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Disparpora
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Disparpora
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Disparpora
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan, dan Petualangan	Disparpora
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Disparpora
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Disparpora
				Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Disparpora
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Misi: 2 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang inklusif dengan skema Ekonomi Hijau (Green Economy) berbasis Keunggulan Daerah (Pertanian,	Memantapkan infrastruktur dan daya saing daerah	Program Pengembangan Umkm	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Pembangunan Jalan	DPUPR
				Rekonstruksi Jalan	DPUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	DPUPR
				Rehabilitasi Jembatan	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	DPUPR
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPUPR
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPUPR
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	DPUPR
		Program Pengelolaan dan	Kegiatan Pengelolaan dan		



Visi/Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
Pariwisata dan UMKM)		Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DPUPR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPR
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPR
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPR
	Bantuan untuk Pesantren dan tambahan insentif untuk pegawai syara', guru ngaji dan RT	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	DPUPR
	Hilirisasi hasil pertanian padi dengan membangun Pabrik Beras Modern	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DTPH
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	DTPH
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	DTPH
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DTPH
				Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DTPH
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	DTPH
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	DTPH
Program Penyuluhan Pertanian		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DTPH	



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DTPH
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
				Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
	Membangun pasar-pasar Baru sebagai pusat ekonomi baru.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas KUKMPP
	Mendorong Pembangunan Jaringan Selular pada wilayah Destinasi Wisata dan Wilayah Unggulan Pertanian	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Diskominfo
				Penyediaan Akses Internet	Diskominfo
	Program Replanting Sawit, dan menyediakan bibit sawit bersubsidi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Disnakhun
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Disnakhun
	Pengembangan Perkebunan kopi rakyat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Disnakhun
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Disnakhun
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Disnakhun
	Memberi kemudahan perizinan bagi UMKM dan Investor berbasis digital	Program Layanan Penanaman Modal	Kegiatan Pelayanan Perizinan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP-TK



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
			Kabupaten/ Kota		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP-TK
			Kegiatan Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	DPMPTSP-TK
		Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP-TK
	Pengembangan secara berkelanjutan Kawasan Strategis Kabupaten dan Geopark Merangin Jambi (UGGp) untuk pertanian dan pariwisata	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Dinas Perikanan
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Magot Sebagai Pakan Alternatif	Dinas Perikanan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/ Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	DISPARPORA
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	DISPARPORA
			Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata	DISPARPORA
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	DISPARPORA
				Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitas	DISPARPORA



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
				i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPARPORA
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPARPORA
			Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPARPORA
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPARPORA
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPARPORA
			Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar Nomor 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kabupaten/Kota	DISPARPORA
		Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	DISPARPORA
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	DISPARPORA
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPARPORA
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	DISPARPORA
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DISPARPORA
		Program Pengembangan	Kegiatan Pengembangan	Penguatan Kelembagaan Ekonomi	DISPARPORA



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
		Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kreatif Daerah	
				Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	DISPARPORA
				Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	DISPARPORA
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	DPUPR
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	DTPH
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DKUKMPP
		Program Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten/kota	pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	DIKBUD
	Menjadikan kota bangko Pusat ekonomi modern Jambi wilayah Barat yang indah dan nyaman	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD
				Penyusunan Rencana Kontijensi	BPBD



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten/Kota	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya (Limbah B3)	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	DLH
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	DLH
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di Kabupaten/Kota	DLH
				Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	DLH bermitra dengan Dinkes, Koperindag
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di Kabupaten/Kota	DLH
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	DLH
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	DLH
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Sehat	DLH
				Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	DLH



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
				Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	DLH, PMD, Kecamatan, Kelurahan dan RT
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	DLH
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	DLH
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan sampah	DLH
				Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	DLH
				Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Sampah Kembali	DLH
				Penyediaan dan Operasionalisasi Sarana Pemilahan Sampah Ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	DLH
				Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	DLH
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	DLH
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA	DLH
				PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan,	



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
				biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
				Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	DLH
				Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	DLH
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	DLH
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	DPUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DPUPR
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Nonkebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Damkar
			Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Damkar
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Damkar



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
		Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melalui Program 1de C1ek Oemah "1 Dewan 1 Rumah"	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengendalian pemugaran /peremajaan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				1. Persiapan	
				2. Perencanaan	
				3. Pelaksanaan	
				4. Pemantauan dan Evaluasi	
				5. Legalisasi dan Serah Terima	
			Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dan drainase pada kawasan permukiman kumuh.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				1.Persiapan	
				2.Perencanaan	
				3.Pelaksanaan	
				4.Pemantauan dan Evaluasi	
				5.Serah Terima dan Pengelolaan	
			Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.Persiapan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2. Penyusunan Kebijakan	
				3. Review dan Revisi	
				4. Legalisasi	
			Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5. Implementasi dan Pemantauan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penerbitan SK Bupati Merangin tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Merangin per tahun dengan tahapan sebagai berikut:	
				1.Persiapan	
				2.Identifikasi dan Survei Lapangan	
				3.Analisis Data	
				4.Penetapan Lokasi	
				5.Pemantauan dan Evaluasi	



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
		Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
		Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program ekonomi digital bagi pelaku usaha milenial, UMKM dan masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pengembangan Usaha Mikro	DKUKMPP
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	DKUKMPP
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	DKUKMPP
		Program Pengembangan Umkm	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	DKUKMPP
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	DKUKMPP
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskoperindag
		Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DISPARPORA
Misi 3: Membangun Tata kelola Pemerintahan	Bupati dan Wakil Bupati berkantor di kecamatan secara bergilir	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0)	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan reformasi birokrasi serta penguatan sistem merit	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat
		Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDMD
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDMD
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPSDMD
				Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDMD
		Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Kesbangpol
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes
	Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum dan Puskesmas.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinkes



Visi/ Misi	Program Unggulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perangkat daerah			OPD Pengampu
	Berobat gratis bagi masyarakat kurang mampu di luar BPJS, dengan penyiapan dana SKTM. Mengupayakan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengembangan Rumah Sakit	Dinkes Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	Dinkes
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	Dinkes
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Dinsos-PPPA
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Dinsos-PPPA
				Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos-PPPA
				Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos-PPPA

Sumber: Diolah Penyusun, 2025

3.4.6 Dukungan Program Strategis Nasional

Dukungan terhadap Program Strategis Nasional di Kabupaten Merangin dapat tercapai melalui implementasi program prioritas dan program perangkat daerah yang berfokus pada pemajuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut merupakan bentuk dukungan Kabupaten Merangin dalam menjawab Program Strategis Nasional.

Tabel 3.10 Dukungan Kabupaten Merangin terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Outcome Program Kabupaten Merangin	Dukungan Program Perangkat Daerah Kabupaten Merangin
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		1. Meningkatkan pengembangan Usaha Mikro melalui bantuan peralatan digitalisasi pemasaran 2. Meningkatkan pengembangan Usaha Mikro melalui bantuan peralatan digitalisasi pemasaran	Program Pengembangan UMKM
		Meningkatnya kualitas SDM dan sertifikasi usaha mikro	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Sekolah Rakyat	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	Terpenuhinya rumah baru yang layak, sehat dan berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan
4	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Program penanganan kerawanan pangan
5	Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Makan Bergizi Gratis		
7	Pembangunan dan revitalisasi Pendidikan dasar dan menengah	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
8	Pengendalian Inflasi	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan



No	Program Strategis Nasional/ Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Outcome Program Kabupaten Merangin	Dukungan Program Perangkat Daerah Kabupaten Merangin
		pangan	
9	Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya kesehatan koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Meningkatnya permodalan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
10	Kemudahan Perizinan di Daerah	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal



BAB IV

PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

dan KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH





BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH dan KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai indikasi program dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mencapai pemenuhan layanan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup target Indikasi Program dan Pagu Indikatif. Program-program yang dimaksud adalah program yang dikelola oleh masing-masing urusan Perangkat Daerah. Sementara itu, Pagu Indikatif menggambarkan besaran dana yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan program tahunan.

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat daerah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Setiap program dirancang untuk menjawab isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta potensi sumber pendanaan lainnya. Kerangka pendanaan disusun secara indikatif guna memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan. Berikut ini adalah rincian program dan kerangka pendanaan Kabupaten Merangin selama periode 2025-2029:



Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Merangin 2025-2029

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp1.823.210.75 0	100%	Rp1.835.756.92 9	100%	Rp1.848.303.10 8	100%	Rp1.860.849.28 7	100%	Rp1.873.395.46 6		
		Nilai AKIP OPD	72.66	Rp330.150.108. 050	73.16	Rp332.421.991. 535	73.66	Rp334.693.875. 020	74.16	Rp336.965.758. 506	74.66	Rp339.237.641. 991		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan													
	Outcome: Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Kemampuan Literasi dan numerasi	61.1	Rp26.288.850.0 00	63.1	Rp27.319.494.8 20	65.1	Rp27.743.815.7 36	67.1	Rp28.169.194.8 10	69.1	Rp28.549.073.1 36		
		Angka Partisipasi Sekolah	82.81	Rp147.081.502. 392	86.06	Rp152.847.779. 293	87.39	Rp155.221.780. 358	88.73	Rp157.601.701. 625	89.93	Rp159.727.054. 200		
		Proporsi Satuan PAUD yang berakreditasi minimal B	41.6	Rp2.499.286.25 0	45.63	Rp2.597.269.86 0	50.55	Rp2.637.610.13 5	56.36	Rp2.678.051.00 9	62.16	Rp2.714.166.11 8		
		Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas	68.14	Rp1.960.250.00 0	69.69	Rp2.037.100.89 0	71.24	Rp2.068.740.73 2	72.79	Rp2.100.459.47 7	74.34	Rp2.128.785.42 1		
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum													
	Outcome: Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal	100%	Rp554.000.000	100%	Rp604.000.000	100%	Rp654.000.000	100%	Rp704.000.000	100%	Rp754.000.000		
1.01.04	Program Pendidik dan tenaga Kependidikan													
	Outcome: Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Tenaga pendidik yang bersertifikasi	30%	Rp260.000.000	33%	Rp298.333.333	35.00 %	Rp336.666.667	37.50 %	Rp375.000.000	39.00%	Rp398.000.000		
				Rp510.617.207.		Rp519.961.726.		Rp525.204.791.		Rp530.455.014.		Rp535.382.116		



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Kesehatan termasuk UPT RSUD Kol.Abunjani Bangko
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	89%	Rp39.739.353.9 86	89.50 %	Rp57.043.000.0 00	89.60 %	Rp57.103.500.0 00	89.70 %	Rp57.481.000.0 00	89.80%	Rp58.273.500.0 00	
		Nilai AKIP OPD	80.91	Rp 145.986.051.32 3	81.41	Rp182.430.559. 481	81.91	Rp186.454.559. 481	82.41	Rp190.478.559. 481	82.91	Rp194.502.559. 481	
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat												
	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indikator nasional mutu	69%	Rp47.504.130.6 72	71%	Rp49.061.246.3 45	73%	Rp50.618.362.0 17	75%	Rp52.235.366.7 54	77%	Rp53.912.260.5 56	
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	98%	Rp6.225.500.00 0	98%	Rp6.429.562.75 2	98%	Rp6.633.625.50 3	98.50 %	Rp6.845.536.82 2	98.50%	Rp7.065.296.70 9	
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	92%	Rp2.612.500.00 0	92%	Rp2.698.133.91 5	92%	Rp2.783.767.83 0	92%	Rp2.872.695.35 8	92%	Rp2.964.916.49 7	
		Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional menuju UHC	83.12%	Rp37.868.540.0 00	86.10 %	Rp39.109.815.1 54	89.07 %	Rp40.351.090.3 09	92.05 %	Rp41.640.106.8 15	98%	Rp42.976.864.6 74	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan ILP (Integrasi Layanan Primer)	55%	Rp12.993.900.0 00	66%	Rp13.419.820.9 68	77%	Rp13.845.741.9 37	88%	Rp14.288.044.4 81	100%	Rp14.746.728.6 01	
1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome: Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap Populasi	40%	Rp1.903.500.00 0	45%	Rp2.266.437.50 0	50%	Rp2.629.375.00 0	55%	Rp2.992.312.50 0	60%	Rp2.355.250.00 0	
1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman												
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Fasilitas Keparmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	64%	Rp383.000.000	65%	Rp386.447.000	66%	Rp393.222.000	67%	Rp396.600.000	68%	Rp396.000.000	
1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan												
	Outcome: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Penduduk menerapkan Perilaku Hidup Sehat	64%	Rp735.000.000	67%	Rp741.580.000	70%	Rp754.700.000	73%	Rp761.500.000	76%	Rp762.000.000	
				Rp295.951.475. 981		Rp353.586.603. 115		Rp361.567.944. 077		Rp369.991.722. 211		Rp377.955.376 .517	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
0.00.00	Program Penunjang Urusan daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan												Dinas Pekerjaan Penataan Ruang
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pemerintahan Penunjang Urusan	98%	Rp4.972.981.00 0	98%	Rp5.045.304.74 9	98%	Rp5.117.628.49 9	98%	Rp5.189.952.24 8	98%	Rp5.262.275.99 7	
		Nilai AKIP OPD	70.76	Rp12.236.035.1 01	71.76	Rp13.450.947.5 66	72.76	Rp13.617.454.7 67	73.76	Rp13.783.961.9 67	74.76	Rp13.950.469.1 68	
1.03.02	program pengelolaan sumber daya air (SDA)												
	Outcome: Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya	Persentase sawah teraliri irigasi	61.41%	Rp5.162.000.00 0	62.32 %	Rp5.230.985.25 3	63.86 %	Rp5.299.970.50 7	64%	Rp5.368.955.76 0	65%	Rp5.437.941.01 4	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	akses masyarakat terhadap irigasi												
1.03.03	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum												
	Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air minum yang layak	68.25%	Rp1.777.245.000	68.86 %	Rp1.792.999.333	69%	Rp1.808.753.666	70%	Rp1.824.507.999	71%	Rp1.840.262.332	
1.03.05	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah												
	Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah yang layak	33.60%	Rp604.067.500	33.90 %	Rp606.760.283	34%	Rp609.453.065	35%	Rp612.145.848	35%	Rp614.838.630	
1.03.06	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase												
	Outcome: Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	55.05%	Rp1.502.284.000	55.68 %	Rp1.519.339.904	56%	Rp1.536.395.807	57%	Rp1.553.451.711	58%	Rp1.570.507.615	
1.03.08	program penataan bangunan gedung												
	Outcome: Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	55%	Rp12.317.009.000	55.50 %	Rp12.428.981.809	56%	Rp10.055.572.800	57%	Rp10.145.354.700	57%	Rp10.235.136.600	
1.03.09	program penataan bangunan dan lingkungannya												
	Outcome: Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	57%	Rp12.295.045.500	58.00 %	Rp13.442.568.250	59%	Rp14.590.091.000	60%	Rp15.737.613.750	61%	Rp16.885.136.500	
1.03.10	program penyelenggaraan jalan												
	Outcome: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	44.00%	Rp104.867.770.000	45.00 %	Rp109.526.034.973	46%	Rp109.230.074.594	47%	Rp113.686.226.891	48%	Rp118.142.379.187	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.03.11	program pengembangan jasa konstruksi												
	Outcome: Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi bersertifikasi	68.50%	Rp1.043.200.000	68.68 %	Rp1.045.865.109	69%	Rp1.012.465.109	69%	Rp979.065.109	69%	Rp945.665.109	
1.03.12	program penyelenggaraan penataan ruang												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang	75.00%	Rp1.000.000.000	77.00 %	Rp1.003.039.856	79%	Rp1.006.079.712	81%	Rp1.009.119.568	83%	Rp1.012.159.424	
				Rp157.777.637.101		Rp165.092.827.085		Rp163.883.939.526		Rp169.890.355.551		Rp175.896.771.576	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan	98%	Rp792.019.948	98%	Rp796.914.398	98%	Rp801.808.849	98%	Rp806.703.299	98%	Rp811.597.749	
		Nilai AKIP OPD	80.91	Rp4.080.787.821	81.41	Rp4.106.005.890	81.91	Rp4.131.223.957	82.41	Rp4.156.442.026	82.91	Rp4.181.660.095	
1.04.02	program pengembangan perumahan												
	Outcome: Terpenuhinya rumah baru yang layak, sehat dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan rumah baru yang sehat, layak dan berkelanjutan	84%	Rp380.515.000	85.00 %	Rp385.044.940	86%	Rp389.574.881	87%	Rp394.104.821	88%	Rp398.634.762	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.03	program kawasan permukiman												
	Outcome: Menurunnya proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh liar, atau rumah tidak layak	Persentase proporsi populasi penduduk perkotaan dan pedesaan yang tinggal di daerah kumuh,	68%	Rp1.935.844.000	72.00 %	Rp2.049.717.176	76%	Rp2.163.590.353	80%	Rp2.277.463.529	84%	Rp2.391.336.706	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	huni	permukiman air atau rumah yang tidak layak											
1.04.05	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)												
	Outcome: Meningkatnya perumahan yang dilengkapi PSU	Persentase unit perumahan yang telah dilengkapi dengan PSU secara layak	85%	Rp200.000.000	87.50 %	Rp205.882.353	90%	Rp211.764.706	93%	Rp217.647.059	95%	Rp223.529.412	
				Rp7.389.166.76 9		Rp7.543.564.75 7		Rp7.697.962.74 6		Rp7.852.360.73 4		Rp8.006.758.7 24	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1.05	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota daerah												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp1.131.566.00 0	98%	Rp1.147.673.70 1	98%	Rp1.163.781.40 2	98%	Rp1.179.889.10 3	98%	Rp1.195.996.80 4	
		Nilai AKIP OPD	70.25	Rp6.789.263.59 8	71.25	Rp7.035.599.12 4	72.25	Rp7.096.229.21 1	73.25	Rp7.156.859.29 8	74.25	Rp7.217.489.38 4	
1.05.04	program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran												
	Outcome: 1) Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran;	1. Persentase upaya pencegahan kebakaran yang berkualitas	100%	Rp1.462.231.50 0	100%	Rp4.315.932.27 0	100%	Rp1.894.906.32 8	100%	Rp1.939.543.83 9	100%	Rp1.994.482.31 4	
	2) Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Sesuai Standar	100%	Rp2.796.296.60 0	100%	Rp3.472.695.83 0	100%	Rp3.623.721.77 2	100%	Rp3.709.084.26 1	100%	Rp3.814.145.78 6	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Rp12.179.357.698		Rp15.971.900.925		Rp13.778.638.713		Rp13.985.376.501		Rp14.222.114.288	
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp404.160.000	98%	Rp406.999.798	98%	Rp409.839.595	98%	Rp412.679.393	98%	Rp415.519.190	
		Nilai AKIP OPD	71.16	Rp2.612.391.227	71.66	Rp2.630.746.983	72.16	Rp2.649.102.740	72.66	Rp2.667.458.496	73.16	Rp2.685.814.252	
1.05.03	program penanggulangan bencana												
	Outcome: 1) Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 2) Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat; 3) Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanggulangan Bencana yang berkualitas	100%	Rp2.182.450.000	100%	Rp2.397.220.200	100%	Rp2.611.990.400	100%	Rp2.826.760.600	100%	Rp3.041.530.800	
				Rp5.199.001.227		Rp5.434.966.981		Rp5.670.932.735	Rp75	Rp5.906.898.489		Rp6.142.864.242	
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Satuan Polisi Pamong Praja
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp1.522.994.450	98%	Rp1.533.474.731	98%	Rp1.543.955.012	98%	Rp1.554.435.293	98%	Rp1.564.915.574	
		Nilai AKIP OPD	72.66	Rp8.168.871.425	73.16	Rp8.263.608.352	73.66	Rp8.306.127.424	74.16	Rp8.348.646.495	74.66	Rp8.391.165.566	
1.05.02	program												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum												Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	Outcome: 1) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada; 2) Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; 3) Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat; 4) Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan "	100%	Rp2.823.714.70 0	100%	Rp2.863.500.70 0	100%	Rp2.830.714.70 0	100%	Rp3.873.714.70 0	100%	Rp3.423.714.70 0	
		2. Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100%	Rp800.000.000	100%	Rp800.000.000	100%	Rp800.000.000	100%	Rp800.000.000	100%	Rp800.000.000	
		3. Persentase perlindungan masyarakat yang dilaksanakan	100%	Rp400.000.000	100%	Rp400.000.000	100%	Rp400.000.000	100%	Rp400.000.000	100%	Rp400.000.000	
		4. Persentase SDM PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	Rp300.000.000	100%	Rp300.000.000	100%	Rp300.000.000	100%	Rp300.000.000	100%	Rp300.000.000	
				Rp14.015.580.575		Rp14.160.583.783		Rp14.180.797.136		Rp15.276.796.488		Rp14.879.795.840	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp599.510.000	99%	Rp603.713.548	99%	Rp607.917.096	99%	Rp612.120.644	99%	Rp616.324.192	
		Nilai AKIP OPD	71.31	Rp4.367.437.502	71.81	Rp4.398.060.398	72.31	Rp4.428.683.295	72.81	Rp4.459.306.191	73.31	Rp4.489.929.088	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.06.02	program pemberdayaan sosial												
	Outcome: Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	95%	Rp265.000.000	96%	Rp267.789.474	97%	Rp270.578.947	98%	Rp273.368.421	99%	Rp276.157.895	
1.06.04	program rehabilitasi sosial												
	Outcome: Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	95%	Rp404.780.000	96%	Rp409.040.842	97%	Rp413.301.684	98%	Rp417.562.526	100%	Rp426.084.211	
1.06.05	program perlindungan dan jaminan sosial												
	Outcome: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	Rp329.736.000	100%	Rp336.751.660	100%	Rp343.767.319	100%	Rp350.782.979	100%	Rp350.782.979	
1.06.06	program penanganan bencana												
	Outcome: Meningkatnya Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Pemenuhan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang menerima Bantuan	100%	Rp277.000.000	100%	Rp297.000.000	100%	Rp317.000.000	100%	Rp337.000.000	100%	Rp357.000.000	
1.06.07	program pengelolaan taman makam pahlawan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Lokasi	Rp55.000.000	1 Lokasi	Rp55.000.000	1 Lokasi	Rp55.000.000	1 Lokasi	Rp55.000.000	1 Lokasi	Rp55.000.000	
				Rp6.298.463.50 2		Rp6.367.355.92 2		Rp6.436.248.34 1		Rp6.505.140.76 1		Rp6.571.278.3 65	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	Outcome: Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	100%	Rp30.250.000	100%	Rp32.875.000	100%	Rp35.500.000	100%	Rp38.125.000	100%	Rp40.750.000	
2.07.03	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja												
	Outcome: Meningkatnya kapasitas/kompete nsi tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bersertifikat	90%	Rp508.117.000	95%	Rp536.345.722	100%	Rp564.574.444	100%	Rp592.803.166	100%	Rp621.031.888	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja												
	Outcome: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20%	Rp44.490.000	22%	Rp48.939.000	24%	Rp53.388.000	26%	Rp57.837.000	28%	Rp62.286.000	
2.07.05	program hubungan industrial												
	Outcome: Meningkatnya pekerja Indonesia yang Terlindungi	Persentase pengusaha yang mentaati peraturan	8.05%	Rp32.264.700	8.49%	Rp34.028.236	8.93%	Rp35.791.773	9.40%	Rp37.555.309	9.81%	Rp39.318.846	
				Rp615.121.700		Rp652.187.958		Rp689.254.217		Rp726.320.475		Rp763.386.734	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2.08.02	program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan												Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	95.25%	Rp100.000.000	95.75 %	Rp101.397.144	96.25 %	Rp102.794.289	96.75 %	Rp102.794.289	97.25%	Rp104.191.433	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pembangunan												
		Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	65.53%	Rp166.156.000	66.42 %	Rp166.156.000	67.30 %	Rp166.156.000	68.19 %	Rp167.553.144	69.07%	Rp167.553.144	
2.08.03	program perlindungan perempuan												
	Outcome: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan pelayanankomprehensif	100%	Rp520.000.000	100%	Rp530.000.000	100%	Rp540.000.000	100%	Rp550.000.000	100%	Rp560.000.000	
2.08.05	program pengelolaan sistem data gender dan anak												
	Outcome: Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase data terpilah gender dan anak	100%	Rp40.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp60.000.000	100%	Rp70.000.000	100%	Rp80.000.000	
2.08.06	program pemenuhan hak anak (PHA)												
	Outcome: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	58.64%	Rp270.000.000	58.66 %	Rp290.000.000	58.70 %	Rp310.000.000	58.72 %	Rp330.000.000	58.74%	Rp350.000.000	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak												
	Outcome: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	76.01%	Rp150.000.000	76.10 %	Rp180.000.000	76.15 %	Rp262.000.000	76.20 %	Rp280.000.000	76.25%	Rp290.000.000	
				Rp1.246.156.000		Rp1.317.553.144		Rp1.440.950.289		Rp1.500.347.433		Rp1.551.744.577	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan												Dinas Ketahanan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Pangan
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp544.950.000	98%	Rp553.180.630	98%	Rp561.411.260	98%	Rp569.641.889	98%	Rp577.872.519	
		Nilai AKIP OPD	70.21	Rp2.664.193.43 ₃	71.21	Rp2.750.804.97 ₉	72.21	Rp2.785.787.51 ₀	73.21	Rp2.820.770.04 ₃	74.21	Rp2.855.752.57 ₅	
2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan												
	Outcome: Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase desa tahan pangan	67%	Rp2.375.500.00 ₀	69.50 %	Rp2.488.250.00 ₀	72%	Rp2.601.000.00 ₀	75%	Rp2.713.750.00 ₀	77%	Rp2.826.500.00 ₀	
2.09.03	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat												
	Outcome: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Menurunnya Konsumsi Beras	100%	Rp679.780.000	100%	Rp577.500.000	100%	Rp581.000.000	100%	Rp575.689.070	100%	Rp566.000.000	
2.09.04		Persentase Ketersediaan Energi (AKE)	100.2	Rp470.520.000	100.1	Rp569.929.990	100	Rp563.559.980	99.5	Rp566.000.000	99.2	Rp572.819.960	
	program penanganan kerawanan pangan												
	Outcome: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Cadangan Pangan daerah	50%	Rp356.500.000	57.50 %	Rp525.000.000	65.00 %	Rp700.000.000	72.50 %	Rp805.000.000	80.00%	Rp951.200.000	
		Persentase daerah rawan pangan	29%	Rp1.058.000.00 ₀	28.75 %	Rp1.101.675.00 ₀	28.50 %	Rp1.138.850.00 ₀	28.25 %	Rp1.246.025.00 ₀	28%	Rp1.312.000.00 ₀	
2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan yang aman	94%	Rp140.500.000	96.00 %	Rp143.489.362	98.00 %	Rp146.478.723	100.00 %	Rp149.468.085	100.00 %	Rp149.468.085	
				Rp8.289.943.43 3		Rp8.709.829.96 1		Rp9.078.087.47 3		Rp9.446.344.08 7		Rp9.811.613.1 39	
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2.10.04	program penyelesaian sengketa tanah garapan												Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase konflik sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	Rp22.000.000	100%	Rp29.000.000	100%	Rp36.000.000	100%	Rp43.000.000	100%	Rp50.000.000	
2.10.08	program pengelolaan tanah kosong												
	Outcome: Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	85%	Rp24.000.000	87.50 %	Rp24.705.882	90.00 %	Rp25.411.765	92.50 %	Rp26.117.647	95.00%	Rp26.823.529	
2.10.10	program penatagunaan tanah												
	Outcome: Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Penatagunaan Tanah berdasarkan RDTR	100%	Rp19.750.000	100%	Rp19.750.000	100%	Rp19.750.000	100%	Rp19.750.000	100%	Rp19.750.000	
				Rp65.750.000		Rp73.455.882		Rp81.161.765		Rp88.867.647		Rp96.573.529	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Lingkungan Hidup
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp1.687.892.09 1	99%	Rp1.699.745.26 6	99%	Rp1.711.598.44 1	99%	Rp1.723.451.61 5	99%	Rp1.735.304.79 0	
		Nilai AKIP OPD	71.2	Rp5.318.643.95 0	71.7	Rp5.750.981.58 1	72.2	Rp5.785.522.62 0	72.7	Rp5.820.063.65 9	73.2	Rp5.854.604.69 8	
2.11.02	program perencanaan lingkungan hidup												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	70.00%	Rp750.000.000	70.25 %	Rp752.678.571	70.50 %	Rp755.357.143	70.75 %	Rp758.035.714	80.00%	Rp857.142.857	
2.11.03	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup												
	Outcome: Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	36.92	Rp455.000.000	37.17	Rp477.000.000	37.42	Rp500.000.000	37.67	Rp522.000.000	37.92	Rp535.000.000	
		2. Indeks Kualitas Udara	93.96	Rp94.000.000	94.21	Rp102.000.000	94.46	Rp109.000.000	94.71	Rp117.000.000	94.96	Rp134.000.000	
2.11.04	program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)												
	Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Pengelolaan RTH	100%	Rp1.017.887.18 0	100%	Rp1.300.000.00 0	100%	Rp1.400.000.00 0	100%	Rp1.500.000.00 0	100%	Rp1.600.000.00 0	
2.11.05	program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)												
	Outcome: Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	60%	Rp5.500.000	61%	Rp7.500.000	62%	Rp9.500.000	63%	Rp11.500.000	64%	Rp13.500.000	
2.11.06	program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	(PPLH)												
	Outcome: Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	90%	Rp16.500.000	90.25 %	Rp16.545.833	90.50 %	Rp16.591.667	90.75 %	Rp16.637.500	91.00%	Rp16.683.333	
2.11.07	program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH												
	Outcome: Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20.00%	Rp100.000.000	21%	Rp105.000.000	22%	Rp110.000.000	23%	Rp115.000.000	24%	Rp120.000.000	
2.11.08	program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat												
	Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	25%	Rp18.487.679	25.00 %	Rp20.987.679	25.00 %	Rp23.487.679	25.00 %	Rp25.987.679	25.00%	Rp28.487.679	
2.11.09	program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat												
	Outcome: Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50%	Rp19.000.000	51.00 %	Rp19.380.000	52.00 %	Rp19.760.000	53.00 %	Rp20.140.000	54.00%	Rp20.520.000	
2.11.10	program penanganan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pengaduan lingkungan hidup												
	Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	Rp9.000.000	100.00 %	Rp9.000.000	100.00 %	Rp73.987.409	100.00 %	Rp78.987.409	100.00 %	Rp83.987.409	
2.11.11	program pengelolaan persampahan												
	Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	31%	Rp7.762.030.134	71%	Rp7.813.344.096	72%	Rp7.864.658.059	73%	Rp7.915.972.021	74%	Rp7.967.285.984	
				Rp17.253.941.034		Rp18.074.163.026		Rp18.379.463.018		Rp18.624.775.597		Rp18.966.516.750	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp1.372.912.750	99%	Rp1.382.540.469	99%	Rp1.392.168.188	99%	Rp1.401.795.907	99%	Rp1.411.423.626	
		Nilai AKIP OPD	71.3	Rp3.933.143.355	71.8	Rp3.960.725.006	72.3	Rp3.988.306.656	72.8	Rp4.015.888.307	73.3	Rp4.043.469.957	
2.12.02	program pendaftaran penduduk												
	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan digital	99.55%	Rp246.525.000	100%	Rp251.140.421	100%	Rp255.755.841	100%	Rp260.371.262	100%	Rp264.986.682	
2.12.03	program pencatatan sipil												
	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan	99.55%	Rp226.030.000	100.00 %	Rp230.645.421	100.00 %	Rp235.260.842	100.00 %	Rp239.876.263	100.00 %	Rp244.491.684	
2.12.04	program pengelolaan informasi administrasi kependudukan												
	Outcome: Meningkatnya	Persentase Perjanjian	80%	Rp138.500.000	100%	Rp143.115.421	100%	Rp147.730.842	100%	Rp152.346.263	100%	Rp156.961.684	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemanfaatan informasi kependudukan	Kerjasama Pengelolaan Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan											
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan												
	Outcome: Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase buku kependudukan yang tersusun	100%	Rp70.000.000	100%	Rp72.000.000	100%	Rp74.000.000	100%	Rp76.000.000	100%	Rp78.000.000	
				Rp5.987.111.105		Rp6.040.166.738		Rp6.093.222.369		Rp6.146.278.002		Rp6.199.333.633	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	37.50%	Rp680.183.500	40%	Rp684.779.335	42.50 %	Rp689.375.169	45%	Rp693.971.003	47.50%	Rp698.566.838	
		Nilai AKIP OPD	74	Rp4.510.875.900	74.5	Rp4.541.354.791	75	Rp4.571.833.682	75.5	Rp4.602.312.574	76	Rp4.632.791.465	
2.13.02	Program Penataan Desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase desa tertata dengan baik	37%	Rp600.000.000	40%	Rp600.000.000	45%	Rp600.000.000	47%	Rp600.000.000	50%	Rp600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	program peningkatan kerjasama desa												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kerjasama antar desa aktif	32%	Rp100.000.000	35.00 %	Rp250.000.000	37.00 %	Rp355.000.000	40.00 %	Rp440.000.000	45.00%	Rp520.000.000	
2.13.04	program administrasi pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kualitas penyelenggaraa n administrasi desa	58%	Rp3.063.772.800	60.50 %	Rp5.789.898.384	63.00 %	Rp6.046.589.424	65.50 %	Rp7.070.227.008	68.00%	Rp8.383.809.632	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.13.05	program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat												
	Outcome: Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	35%	Rp1.125.000.000	40.00 %	Rp2.395.000.000	45.00 %	Rp2.548.000.000	50.00 %	Rp2.691.000.000	55.00%	Rp2.832.000.000	
				Rp10.079.832.200		Rp14.261.032.510		Rp14.810.798.275		Rp16.097.510.585		Rp17.667.167.935	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp532.150.000	98%	Rp6.940.484.728	98%	Rp500.407.385	98%	Rp7.010.746.683	98%	Rp7.073.803.911	
		Nilai AKIP OPD	71.6	Rp6.908.125.000	72.1	Rp551.747.500	72.6	Rp6.496.057.070	73.1	Rp585.400.000	73.6	Rp574.300.000	
	Program Pengendalian Penduduk												
2.14.02	Outcome: Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	2.74	Rp650.000.000	2.76	Rp765.000.000	2.78	Rp885.000.000	2.8	Rp990.000.000	2.82	Rp1.021.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)												
2.14.03	Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive)	82.17	Rp1.418.500.000	82.67	Rp1.427.131.496	83.17	Rp1.435.762.991	83.67	Rp1.444.394.487	84.17	Rp1.453.025.983	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pembinaan Keluarga Berencana (KB)	(mCPR)											
		2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	5.52	Rp3.125.200.00 0	5.02	Rp3.144.216.67 2	4.52	Rp3.163.233.34 6	4.02	Rp3.182.250.01 8	3.52	Rp3.201.266.69 1	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)												
	Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta keluarga dalam menurunkan angka stunting	Persentase Keluarga yang berisiko stunting	7%	Rp3.433.800.00 0	6.80%	Rp3.454.866.25 8	6.40%	Rp3.475.932.51 6	6.20%	Rp3.496.998.77 4	5.80%	Rp3.518.065.03 2	
				Rp16.067.775.0 00		Rp16.283.446.6 54		Rp15.956.393.3 08		Rp16.709.789.9 62		Rp16.841.461. 617	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Perhubungan
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	95%	Rp4.974.824.00 0	96%	Rp5.008.800.39 7	97%	Rp5.042.776.79 3	98%	Rp5.076.753.19 0	99%	Rp5.110.729.58 7	
		Nilai AKIP OPD	73.21	Rp3.722.506.38 5	73.71	Rp3.974.052.03 4	74.21	Rp3.997.221.72 7	74.71	Rp4.020.391.42 0	75.21	Rp4.043.561.11 2	
2.15.02	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)												
	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase layanan transportasi darat yang berkualitas	90%	Rp2.547.337.20 0	91.50 %	Rp2.589.792.82 0	93.00 %	Rp2.632.248.44 0	94.50 %	Rp2.674.704.06 0	96.00%	Rp2.717.159.68 0	
				Rp11.244.667.5 85		Rp11.572.645.2 51		Rp11.672.246.9 60		Rp11.771.848.6 70		Rp11.871.450. 379	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
0.00.00	Program Penunjang												Dinas



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Komunikasi dan Informatika
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	96%	Rp449.522.000	97.00 %	Rp452.662.875	98.00 %	Rp455.803.750	99.00 %	Rp458.944.624	100.00 %	Rp462.085.499	
		Nilai AKIP	71.56	Rp4.101.536.65 ₁	72.06	Rp4.311.065.17 ₀	72.56	Rp4.335.286.36 ₀	73.06	Rp4.359.507.55 ₀	73.56	Rp4.383.728.73 ₉	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik												
	Outcome: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks keterbukaan informasi publik (KIP)	78%	Rp3.192.726.70 ₀	80.00 %	Rp3.295.717.88 ₄	82.00 %	Rp3.398.709.06 ₈	84.00 %	Rp3.501.700.25 ₂	86.00%	Rp3.604.691.43 ₅	
2.16.03	program pengelolaan aplikasi informatika												
	Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pemenuhan unsur- unsur SPBE	35%	Rp4.585.295.80 ₈	40.00 %	Rp5.240.338.06 ₆	45.00 %	Rp5.895.380.32 ₅	50.00 %	Rp6.550.422.58 ₃	55.00%	Rp7.205.464.84 ₁	
				Rp12.329.081.159		Rp13.299.783.995		Rp14.085.179.503		Rp14.870.575.009		Rp15.655.970.514	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	97.50%	Rp934.500.000	98.00 %	Rp943.035.681	98.50 %	Rp961.571.362	99.00 %	Rp980.107.042	99.50%	Rp998.642.723	
		Nilai AKIP OPD	70.25	Rp4.363.788.80 ₀	71.25	Rp5.005.550.67 ₁	72.25	Rp5.063.554.78 ₂	73.25	Rp5.121.558.89 ₃	74.25	Rp5.179.563.00 ₄	
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi												
	Outcome:	Persentase	27%	Rp96.850.000	29.50	Rp105.817.593	32.00	Rp114.785.185	34.50	Rp123.752.778	37.00%	Rp132.720.370	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi Bersertifikat NIK			%		%		%				
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi												
	Outcome: Meningkatnya kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP-Koperasi Berpredikat Sehat	7%	Rp100.000.000	8.00%	Rp114.285.714	9.00%	Rp128.571.429	10.00 %	Rp142.857.143	11.00%	Rp157.142.857	
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian												
	Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Sudah Mengikuti Pelatihan Koperasi dengan Tingkat Pemahaman Materi Diatas 75%	5%	Rp140.000.000	5%	Rp147.368.421	5%	Rp154.736.842	5%	Rp162.105.263	5%	Rp169.473.684	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi												
	Outcome: Meningkatnya permodalan koperasi	Persentase Pertumbuhan modal koperasi	1.50%	Rp113.409.000	1.50%	Rp120.113.500	1.50%	Rp126.818.000	1.50%	Rp133.522.500	1.50%	Rp140.227.000	
2.17.07	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)												
	Outcome : Meningkatnya kualitas SDM dan sertifikasi usaha mikro	Persentase Pelaku Usaha Mikro Sudah Mengikuti Pelatihan Usaha Dengan Tingkat Pemahaman Materi Diatas 75%	0.60%	Rp410.000.000	1%	Rp430.000.000	1.60%	Rp640.000.000	2.20%	Rp850.000.000	2.50%	Rp1.050.000.000	
		Persentase Usaha Mikro	0.90%	Rp105.000.000	1.30%	Rp120.000.000	1.50%	Rp160.000.000	2.00%	Rp200.000.000	2.50%	Rp250.000.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
		Sudah Sertifikasi												
2.17.08	Program Pengembangan UMKM													
	Outcome: Meningkatnya pengembangan Usaha Mikro melalui bantuan peralatan digitalisasi pemasaran	Persentase Usaha Mikro Yang Menerima Bantuan Peralatan Usaha	0.89%	Rp760.000.000	0.89%	Rp790.259.500	0.89%	Rp833.129.000	0.89%	Rp875.998.500	0.89%	Rp918.868.000		
		Persentase Usaha Mikro Yang Menerapkan Pemasaran Digital	0.27%	Rp317.390.000	0.44%	Rp320.000.000	0.44%	Rp330.000.000	0.44%	Rp340.000.000	0.44%	Rp350.000.000		
				Rp7.340.937.80 0		Rp8.096.431.08 0		Rp8.513.166.60 0		Rp8.929.902.11 9		Rp9.346.637.6 38		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp2.163.776.97 0	99.50 %	Rp5.178.927.34 8	100.00 %	Rp2.194.077.72 6	100.50 %	Rp2.209.228.10 4	101.00 %	Rp2.224.378.48 2		
		Nilai AKIP OPD	71.41	Rp6.063.512.47 1	71.91	Rp6.195.795.48 5	72.41	Rp6.232.551.62 9	72.91	Rp6.269.307.77 2	73.41	Rp6.306.063.91 6		
2.18.02	program pengembangan iklim penanaman modal													
	Outcome: Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai target investasi (miliar)	328.49	Rp279.450.000	348.57	Rp296.528.871	368.64	Rp313.607.741	388.72	Rp330.686.612	408.79	Rp347.765.482		
2.18.03	Program promosi penanaman modal													
	Outcome: Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100%	Rp372.500.000	100%	Rp583.300.000	100%	Rp794.100.000	100%	Rp1.004.900.00 0	100%	Rp1.215.700.00 0		
2.18.04	program pelayanan penanaman modal													
	Outcome: Meningkatnya perizinan berusaha	Persentase Pelaku Usaha yang	75%	Rp74.480.000	80.00 %	Rp79.445.334	85.00 %	Rp84.410.666	90.00 %	Rp89.367.000	95.00%	Rp94.341.334		



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	berbasis risiko	Memperoleh Izin Sesuai SOP											
		Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%	Rp26.000.000	100%	Rp27.733.333	100%	Rp29.466.667	100%	Rp31.200.000	100%	Rp32.933.333	
2.18.05	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal												
	Outcome: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan pelaporan pelaksanaan penanaman modal (Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pelaksanaan penanaman modal / jumlah seluruh pelaku usaha x 100)	85%	Rp60.000.000	87.50 %	Rp61.764.706	90.00 %	Rp63.529.412	92.50 %	Rp65.294.118	95.00%	Rp67.058.824	
2.18.06	program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal												
	Outcome: Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	Rp19.960.000	100%	Rp21.690.000	100%	Rp23.420.000	100%	Rp25.150.000	100%	Rp26.880.000	
				Rp9.059.679.441		Rp12.445.185.077		Rp9.735.163.841		Rp10.025.133.606		Rp10.315.121.371	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
2.19.02	program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan												Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	Outcome: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirasaha Muda	0.12%	Rp376.443.000	0.14%	Rp501.924.000	0.16%	Rp564.664.500	0.18%	Rp627.405.000	0.20%	Rp690.145.500	
2.19.03	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan												
	Outcome: Meningkatnya pembudayaan dan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	0.8%	Rp4.400.761.100	0.9%	Rp4.840.837.210	1%	Rp5.280.913.320	1.1%	Rp5.720.989.430	1.2%	Rp6.161.065.540	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	prestasi olah raga												
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan												
	Outcome: Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	5.21%	Rp400.000.000	5.25%	Rp415.189.873	5.29%	Rp430.379.747	5.33%	Rp445.569.620	5.37%	Rp460.759.494	
				Rp5.177.204.100		Rp5.757.951.083		Rp6.275.957.567		Rp6.793.964.050		Rp7.311.970.534	
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2.20.02	program penyelenggaraan statistik sektoral												Dinas Komunikasi dan Informatika
	Outcome: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.1%	Rp148.140.000	2.30%	Rp160.485.000	2.50%	Rp172.830.000	2.70%	Rp185.175.000	2.90%	Rp197.520.000	
				Rp148.140.000		Rp160.485.000		Rp172.830.000		Rp185.175.000		Rp197.520.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
2.21.02	program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi												Dinas Komunikasi dan Informatika
	Outcome : Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Keamanan SPBE	1.65%	Rp48.000.000	1.85%	Rp64.628.571	1.95%	Rp80.828.571	2.15%	Rp97.028.571	2.35%	Rp113.142.857	
				Rp48.000.000		Rp64.628.571		Rp80.828.571		Rp97.028.571		Rp113.142.857	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	100%	Rp450.000.000	100%	Rp475.000.000	100%	Rp500.000.000	100%	Rp525.000.000	100%	Rp550.000.000	
2.22.03	Program pengembangan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kesenian tradisional												
	Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang dikembangkan	35%	Rp1.200.000.00 0	36.00 %	Rp1.400.000.00 0	37.00 %	Rp1.600.000.00 0	38.00 %	Rp1.800.000.00 0	39.00%	Rp2.000.000.00 0	
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah												
	Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya												
	Outcome : Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diakui secara nasional	35%	Rp2.400.000.00 0	36.00 %	Rp2.468.571.42 9	37.00 %	Rp2.537.142.85 7	38.00 %	Rp2.605.714.28 6	39.00%	Rp2.674.285.71 4	
				Rp4.100.000.00 0		Rp4.393.571.42 9		Rp4.687.142.85 7		Rp4.980.714.28 6		Rp5.274.285.7 14	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
2.23.02	program pembinaan perpustakaan												Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Outcome : Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	66%	Rp596.245.000	68.00 %	Rp614.313.030	70.00 %	Rp632.381.061	72.00 %	Rp650.449.091	74.00%	Rp668.517.121	
2.23.03	program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno												
	Outcome : Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah nasional	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100%	Rp49.000.000	100%	Rp50.625.000	100%	Rp52.250.000	100%	Rp53.875.000	100%	Rp55.500.000	
				Rp645.245.000		Rp664.938.030		Rp684.631.061		Rp704.324.091		Rp724.017.121	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan												Dinas Arsip dan Perpustakaan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp363.459.400	98%	Rp665.831.541	98%	Rp668.203.681	98%	Rp670.575.822	98%	Rp672.947.963	
		Nilai AKIP	76.61	Rp4.066.374.15 0	77.11	Rp4.170.417.51 0	77.61	Rp4.192.186.04 0	78.11	Rp4.213.954.57 0	78.61	Rp4.235.723.09 9	
2.24.02	program pengelolaan arsip												
	Outcome : Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Ketersediaan Arsip	100%	Rp58.939.950	100%	Rp175.939.950	100%	Rp177.939.950	100%	Rp179.939.950	100%	Rp181.939.950	
2.24.03	program perlindungan dan penyelamatan arsip												
	Outcome : Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	25%	Rp23.614.500	26.50 %	Rp75.031.370	28.00 %	Rp76.448.240	29.50 %	Rp77.865.110	31.00%	Rp79.281.980	
				Rp4.512.388.00 0		Rp5.087.220.37 1		Rp5.114.777.91 1		Rp5.142.335.45 2		Rp5.169.892.9 92	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp828.295.000	98%	Rp862.980.720	98%	Rp897.666.441	98%	Rp932.352.161	98%	Rp967.037.881	
		Nilai AKIP OPD	65.94	Rp3.422.835.86 0	67.56	Rp3.805.582.67 4	69.76	Rp3.937.904.10 8	70.5	Rp4.070.225.54 3	71.89	Rp4.202.546.97 8	
3.25.03	program pengelolaan perikanan tangkap												
	Outcome : Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase usaha perikanan tangkap di PUD yang dikelola	30%	Rp46.000.000	32.50 %	Rp49.833.333	35.00 %	Rp53.666.667	37.50 %	Rp57.500.000	40.00%	Rp61.333.333	
3.25.04	program pengelolaan perikanan budidaya												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome : Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Usaha perikanan budidaya yang dikelola	45%	Rp1.230.000.00 0	46.50 %	Rp1.337.666.66 7	48.00 %	Rp1.445.333.33 3	49.50 %	Rp1.553.000.00 0	51.00%	Rp1.660.666.66 7	
3.25.05	program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan												
	Outcome : Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	persentase usaha perikanan yang terawasi	88%	Rp75.000.000	89.00 %	Rp75.852.273	90.00 %	Rp76.704.545	91.00 %	Rp77.556.818	92.00%	Rp78.409.091	
3.25.06	program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan												
	Outcome : Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase peningkatan pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	24%	Rp170.000.000	26.00 %	Rp184.166.667	28.00 %	Rp198.333.333	30.00 %	Rp212.500.000	32.00%	Rp226.666.667	
				Rp5.772.130.86 0		Rp6.316.082.33 4		Rp6.609.608.42 7		Rp6.903.134.52 2		Rp7.196.660.6 17	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp940.940.000	98%	Rp947.034.960	98%	Rp953.129.921	98%	Rp959.224.881	98%	Rp965.319.842	
		Nilai AKIP OPD	76.21	Rp5.963.333.37 0	76.71	Rp6.611.627.86 5	77.21	Rp6.648.422.35 5	77.71	Rp6.685.216.84 5	78.21	Rp6.722.011.33 5	
3.26.02	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata												
	Outcome : Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0.8%	Rp7.857.810.00 0	0.98%	Rp8.840.036.25 0	1.16%	Rp9.822.262.50 0	1.34%	Rp10.804.488.7 50	1.51%	Rp11.786.715.0 00	
3.26.03	program pemasaran pariwisata												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome : Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Wisata	12%	Rp322.823.400	12.5%	Rp368.941.029	14%	Rp415.058.657	15.2%	Rp461.176.286	15.6%	Rp507.293.914	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual												
	Outcome : Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	2.1%	Rp334.459.125	2.5%	Rp363.482.438	2.9%	Rp392.505.750	3.3%	Rp421.529.063	3.7%	Rp450.552.375	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif												
	Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	2.3%	Rp427.205.626	2.8%	Rp464.277.189	3.3%	Rp501.348.751	3.8%	Rp538.420.314	4.3%	Rp575.491.876	
				Rp15.846.571.5 21		Rp17.595.399.7 31		Rp18.732.727.9 34		Rp19.870.056.1 39		Rp21.007.384. 342	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3.27	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Dinas Pernakan dan Perkebunan
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp1.025.905.00 0	98%	Rp1.032.964.62 7	98%	Rp1.040.024.25 4	98%	Rp1.047.083.88 1	98%	Rp1.054.143.50 8	
		Nilai AKIP OPD	72.66%	Rp7.670.525.95 7	73.16 %	Rp8.093.555.48 3	73.66 %	Rp8.141.006.11 6	74.16 %	Rp8.188.456.74 8	74.66%	Rp8.235.907.38 1	
3.27.02	Program Penyediaan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	dan Pengembangan Sarana Pertanian												
	Outcome : Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan perkebunan	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	23.15%	Rp1.050.000.000	25.49 %	Rp1.155.000.000 0	25.49 %	Rp1.270.500.000 0	30.84 %	Rp1.397.550.000 0	30.84%	Rp1.537.305.000 0	
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	22.81%	Rp950.000.000	25.09 %	Rp1.045.000.000 0	25.09 %	Rp1.149.500.000 0	30.36 %	Rp1.264.450.000 0	30.36%	Rp1.390.895.000 0	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian												
	Outcome : Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan perkebunan	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Peternakan	43.05%	Rp1.220.000.000 0	46.71 %	Rp1.342.000.000 0	50.68 %	Rp1.476.200.000 0	54.99 %	Rp1.623.820.000 0	59.66%	Rp1.786.202.000 0	
		Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Perkebunan	28.78%	Rp1.731.349.250	31.23 %	Rp1.904.484.175	33.88 %	Rp2.094.932.593	36.76 %	Rp2.304.425.852	39.89%	Rp2.534.868.437	
3.27.04	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner												
	Outcome : Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit ternak yg tertangani	9.75%	Rp139.650.000	9.75%	Rp145.650.000	9.75%	Rp151.650.000	9.75%	Rp157.650.000	9.75%	Rp163.650.000	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian												
	Outcome : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	5%	Rp65.842.968	5.00%	Rp71.556.614	5.00%	Rp77.270.260	5.00%	Rp82.983.906	5.00%	Rp88.697.552	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27.06	program perizinan usaha pertanian												Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Outcome : Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	40%	Rp25.440.250	40.00 %	Rp27.647.875	40.00 %	Rp29.855.500	40.00 %	Rp32.063.125	40.00%	Rp34.270.750	
				Rp13.878.713.425		Rp14.817.858.774		Rp15.430.938.723		Rp16.098.483.512		Rp16.825.939.628	
3.27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp1.109.968.750	100%	Rp1.113.389.933	100%	Rp1.116.811.117	100%	Rp1.120.232.300	100%	Rp1.123.653.484	
		Nilai AKIP OPD	81.11	Rp19.180.735.027	81.36	Rp20.678.544.872	81.61	Rp20.733.244.461	81.86	Rp20.787.944.052	82.11	Rp20.842.643.641	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian												
	Outcome : Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana TPH	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	62%	Rp3.120.479.000	65.00 %	Rp3.271.469.919	68.00 %	Rp3.422.460.839	71.00 %	Rp3.573.451.758	74.00%	Rp3.724.442.677	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian												
	Outcome : Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana TPH	Persentase Terbangun dan terehabnya Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	88%	Rp2.150.281.000	89.00 %	Rp2.174.716.011	90.00 %	Rp2.199.151.023	91.00 %	Rp2.223.586.034	92.00%	Rp2.248.021.045	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian												
	Outcome : Meningkatnya	Persentase Tanaman	58%	Rp75.000.000	61.00 %	Rp78.879.310	64.00 %	Rp82.758.621	67.00 %	Rp86.637.931	70.00%	Rp90.517.241	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pengendalian dan pengendalian penanggulangan bencana pertanian	Pangan dan Hortikultura yang Terkendali dari Bencana Pertanian											
3.27.07	program penyuluhan pertanian												
	Outcome : Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani Kelas Madya	13%	Rp1.332.655.000	14%	Rp1.475.880.870	15%	Rp1.619.106.740	16%	Rp1.762.332.610	17%	Rp1.905.558.480	
				Rp26.969.118.777		Rp28.792.880.915		Rp29.173.532.801		Rp29.554.184.685		Rp29.934.836.568	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan												Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Outcome : Meningkatnya tertib usaha fasilitas pengemasan, pelabelan dan distribusi barang berbahaya	Persentase Fasilitas Pengemasan, Pelabelan dan distribusi barang berbahaya yang tertib usaha	8.00%	Rp50.000.000	10%	Rp62.500.000	12%	Rp75.000.000	14%	Rp87.500.000	15%	Rp93.750.000	
3.30.03	program peningkatan sarana distribusi perdagangan												
	Outcome : Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan	Rasio Pedagang Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan	83%	Rp4.065.000.000	84%	Rp4.153.369.565	85%	Rp4.241.739.130	86%	Rp4.330.108.696	87%	Rp4.418.478.261	
3.30.04	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting												
	Outcome : Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rata-Rata Selisih Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Pasar Rakyat Terhadap Harga Acuan	≤ 8%	Rp60.000.000	≤ 8%	Rp70.000.000	≤ 8%	Rp80.000.000	≤ 7.5%	Rp90.000.000	≤ 7%	Rp100.000.000	
3.30.05	Program Pengembangan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Ekspor												Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	Outcome : Meningkatnya pembinaan produk unggulan daerah potensial ekspor	Nilai Ekspor Luar Daerah Produk Unggulan Daerah	50 Juta	Rp120.000.000	55 Juta	Rp150.000.000	60 Juta	Rp170.000.000	65 Juta	Rp190.000.000	70 Juta	Rp210.000.000	
3.30.06	Program standardisasi dan perlindungan konsumen												
	Outcome : Meningkatnya tertib niaga	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	28%	Rp57.000.000	29%	Rp60.000.000	30%	Rp65.000.000	31%	Rp70.000.000	32%	Rp75.000.000	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri												
	Outcome : Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Dipromosikan Meningkat Penjualannya	50%	Rp150.000.000	50%	Rp153.750.000	50%	Rp157.500.000	50%	Rp161.250.000	50%	Rp161.250.000	
				Rp4.502.000.00 0		Rp4.649.619.56 5		Rp4.789.239.13 0		Rp4.928.858.69 6		Rp5.058.478.2 61	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3.31.02	program perencanaan dan pembangunan industri												
	Outcome : Meningkatnya SDM dan teknologi industri	Persentase Pelaku IKM Unggulan Sudah Mengikuti Pelatihan Sesuai Jenis Usahanya Dengan Tingkat Pemahaman Materi Diatas 75%	7%	Rp325.000.000	7%	Rp450.000.000	7%	Rp510.000.000	7%	Rp560.000.000	7%	Rp615.000.000	
		Persentase IKM Unggulan Menggunakan Teknologi Produksi	2.54%	Rp657.000.000	3%	Rp562.300.000	3%	Rp562.600.000	3%	Rp593.200.000	3%	Rp603.500.000	
3.31.03	program pengendalian izin												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	usaha industri kabupaten/kota												
	Outcome : Meningkatnya perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase IKM Unggulan Memiliki Izin	2%	Rp16.000.000	2%	Rp17.230.769	2%	Rp18.461.538	2%	Rp19.692.308	2%	Rp20.923.077	
3.31.04	program pengelolaan sistem informasi industri nasional												
	Outcome : Meningkatnya data dan informasi industri	Persentase IKM Unggulan Update Laporan Produksi di SIINas	3%	Rp7.000.000	3%	Rp8.750.000	3%	Rp10.500.000	3%	Rp12.250.000	3%	Rp14.000.000	
				Rp1.005.000.000		Rp1.038.280.769		Rp1.101.561.538		Rp1.185.142.308		Rp1.253.423.077	
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
3.32.04	program pengembangan kawasan transmigrasi												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase penyelesaian permasalahan transmigran	3 Laporan	Rp5.147.200	3 Laporan	Rp6.147.200	3 Laporan	Rp7.147.200	3 Laporan	Rp8.147.200	3 Laporan	Rp9.147.200	
				Rp5.147.200		Rp6.147.200		Rp7.147.200		Rp8.147.200		Rp9.147.200	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01	SEKRETARIAT DAERAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Sekretariat Daerah
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp22.578.650.103	98%	Rp22.722.280.193	98%	Rp22.865.910.282	98%	Rp23.009.540.372	98%	Rp23.153.170.462	
		Nilai AKIP OPD	78.6	Rp17.390.354.897	79.1	Rp19.476.532.526	79.6	Rp19.583.156.921	80.1	Rp19.689.781.316	80.6	Rp19.796.405.711	
4.01.02	program pemerintahan dan kesejahteraan rakvat												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	98%	Rp9.101.679.00 0	98.00 %	Rp9.152.518.50 0	98.00 %	Rp9.203.358.00 0	98.00 %	Rp9.254.197.50 0	98.00%	Rp9.305.037.00 0	
4.01.03	program perekonomian dan pembangunan												
	Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	98%	Rp905.000.000	98%	Rp915.000.000	98%	Rp925.000.000	98%	Rp935.000.000	98%	Rp945.000.000	
				Rp49.975.684.0 00		Rp52.266.331.2 19		Rp52.577.425.2 03		Rp52.888.519.1 88		Rp53.199.613. 173	
4.02	SEKRETARIAT DPRD												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Sekretariat DPRD
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp24.525.641.9 96	99.33 %	Rp25.131.113.7 37	99.66 %	Rp25.736.585.4 78	99.99 %	Rp26.342.057.2 19	100.32 %	Rp26.947.528.9 61	
		Nilai AKIP OPD	60.76	Rp5.721.041.30 4	62.26	Rp6.035.083.03 9	63.76	Rp6.152.916.51 5	65.26	Rp6.270.749.99 0	66.76	Rp6.388.583.46 5	
4.02.02	program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD												
	Outcome : 1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	98%	Rp12.606.666.7 00	99.00 %	Rp13.596.396.5 74	100.00 %	Rp14.586.126.4 47	100.00 %	Rp15.575.856.3 21	100.00 %	Rp16.565.586.1 94	
	2. Meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan												
				Rp42.853.350.0 00		Rp44.762.593.3 50		Rp46.475.628.4 40		Rp48.188.663.5 30		Rp49.901.698. 620	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01	PERENCANAAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Bappeda
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp1.254.654.50 0	98%	Rp1.387.428.00 0	98%	Rp2.365.950.00 0	98%	Rp1.855.800.00 0	98%	Rp1.581.216.34 0	
		Nilai AKIP OPD	87.76	Rp5.606.799.48 0	88.01	Rp5.824.467.23 2	88.26	Rp5.921.769.68 1	88.51	Rp5.968.894.13 3	88.76	Rp6.076.772.24 5	
5.01.02	program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah												
	Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuain Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97%	Rp619.966.000	97.50 %	Rp1.554.900.00 0	98.00 %	Rp810.000.000	98.50 %	Rp1.180.200.00 0	99.00%	Rp1.378.500.00 0	
5.01.03	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah												
	Outcome : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatkan kualitas	Persentase capaian SAKIP Komponen Perencanaan Dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	83%	Rp3.336.050.80 0	84.50 %	Rp3.052.285.00 0	86.00 %	Rp2.860.087.00 0	87.50 %	Rp3.268.000.00 0	89.00%	Rp3.458.570.00 0	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA												
				Rp10.817.470.780		Rp11.819.080.232		Rp11.957.806.681		Rp12.272.894.133		Rp12.495.058.585	
5.02	KEUANGAN												
5.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp3.980.176.960	98%	Rp4.006.729.175	98%	Rp4.033.281.389	98%	Rp4.059.833.604	98%	Rp4.086.385.818	
		Nilai AKIP OPD	74.95	Rp8.371.599.174	75.45	Rp8.427.447.067	75.95	Rp8.483.294.960	76.45	Rp8.539.142.853	76.95	Rp8.594.990.747	
5.02.02	program pengelolaan keuangan daerah												
	Outcome :	1. Persentase Bj Pegawai diluar Tunjangan Guru yg dialokasikan melalui TKD dan Persentase Alokasi Bj Infrastruktur pelayanan Publik	30%	Rp1.436.592.294	30%	Rp1.441.500.000	30%	Rp1.444.750.000	30%	Rp1.451.500.000	30%	Rp1.454.750.000	
	1. Meningkatnya tata kelola anggaran												
	2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan												
	3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan												
		2.Persentase Realisasi Anggaran bj urusan wajib pelayanan dasar	94%	Rp291.716.080.056	95%	Rp291.731.378.100	96%	Rp291.736.500.000	97%	Rp291.741.500.000	98%	Rp291.760.778.100	
		3. Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	100%	Rp2.643.355.750	100%	Rp2.648.150.000	100%	Rp2.664.778.100	100%	Rp2.678.028.100	100%	Rp2.680.500.000	
5.02.03	program pengelolaan barang milik daerah												
	Outcome : Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan nilai aset tetap	100.00 %	Rp960.000.000	100.00 %	Rp964.897.959	100.00 %	Rp969.795.918	100.00 %	Rp974.693.878	100.00 %	Rp979.591.837	
				Rp309.107.804.		Rp309.220.102.		Rp309.332.400.		Rp309.444.698.		Rp309.556.996	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.02	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp1.601.112.38 5	98%	Rp1.636.558.08 5	98%	Rp1.666.965.42 9	98%	Rp1.713.976.45 1	98%	Rp1.791.904.47 3	
		Nilai AKIP OPD	76.81	Rp5.726.257.76 1	77.31	Rp5.738.510.08 3	77.81	Rp5.755.800.76 1	78.31	Rp5.756.487.76 1	78.81	Rp5.726.257.76 1	
5.02.04	program pengelolaan pendapatan daerah												
	Outcome : 1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	1. Persentase Peningkatan PAD	3.13%	Rp468.537.000	3.48%	Rp473.000.000	3.83%	Rp477.230.000	4.18%	Rp482.502.300	4.53%	Rp483.594.334	
	Outcome : 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	70.00%	Rp288.781.000	70.50 %	Rp293.515.000	71.00 %	Rp296.070.150	71.50 %	Rp300.550.852	72.00%	Rp313.876.545	
	Outcome : 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	3. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	70.00%	Rp1.105.162.00 0	70.50 %	Rp1.113.531.88 3	71.00 %	Rp1.124.313.61 7	71.50 %	Rp1.132.127.49 9	72.00%	Rp1.135.276.65 4	
				Rp9.189.850.14 6		Rp9.255.115.05 1		Rp9.320.379.95 7		Rp9.385.644.86 3		Rp9.450.909.7 67	
5.03	KEPEGAWAIAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp819.080.000	98%	Rp824.716.389	98%	Rp830.352.777	98%	Rp835.989.166	98%	Rp841.625.555	
		Nilai AKIP OPD	72.66	Rp6.730.688.50 0	73.16	Rp7.040.745.05 8	73.66	Rp7.079.663.91 7	74.16	Rp7.118.582.77 5	74.66	Rp7.157.501.63 3	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.03.02	program kepegawaian daerah												
	Outcome : 1. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Formasi ASN	Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi	93%	Rp1.642.047.000	93.00 %	Rp1.668.531.629	94.00 %	Rp1.695.016.258	94.00 %	Rp1.721.500.887	94.00%	Rp1.747.985.516	
	2. Tercapainya penempatan jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi												
	3. Meningkatnya ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan												
	4. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN												
				Rp9.191.815.500		Rp9.533.993.076		Rp9.605.032.952		Rp9.676.072.828		Rp9.747.112.704	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia												Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Outcome : Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Manajerial ASN	Persentase peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN	95%	Rp2.162.800.000	95.00 %	Rp2.265.308.000	96.00 %	Rp2.367.816.000	96.00 %	Rp2.470.324.000	96.00%	Rp2.572.832.000	
				Rp2.162.800.000		Rp2.265.308.000		Rp2.367.816.000		Rp2.470.324.000		Rp2.572.832.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Badan Penelitian dan Pengembangan Merangin
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp446.884.250	98%	Rp453.867.908	98%	Rp460.851.565	98%	Rp467.835.223	98%	Rp474.818.880	
		Nilai AKIP OPD	63.01	Rp2.835.085.750	64.01	Rp3.024.340.576	65.01	Rp3.064.332.539	66.01	Rp3.104.324.503	67.01	Rp3.144.316.466	
5.05.02	program penelitian dan pengembangan daerah												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome : 1. Meningkatkan pemanfaatannya hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah 4. Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Inovasi Daerah	17.8	Rp870.030.000	19.6	Rp876.200.426	21.4	Rp882.370.851	23.2	Rp888.541.277	25	Rp894.711.702	
				Rp4.152.000.000		Rp4.354.408.910		Rp4.407.554.955		Rp4.460.701.003		Rp4.513.847.048	
6.01	INSPEKTORAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Inspektorat
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp4.951.396.838	100%	Rp4.966.695.926	100%	Rp4.981.995.014	100%	Rp4.997.294.102	100%	Rp5.012.593.190	
		Nilai AKIP OPD	80.91	Rp9.262.787.740	81.16	Rp9.651.368.239	81.41	Rp9.675.391.189	81.66	Rp9.699.414.140	81.91	Rp9.723.437.090	
6.01.02	program												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	penyelenggaraan pengawasan												
	Outcome : Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang ditindaklanjuti	76%	Rp4.672.478.01 8	78%	Rp5.267.606.52 7	79%	Rp5.862.735.03 6	80%	Rp6.457.863.54 5	81%	Rp7.052.992.05 4	
6.01.03	program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi												
	Outcome : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100.00 %	Rp1.641.307.00 0	100.00 %	Rp1.905.161.75 0	100.00 %	Rp2.169.016.50 0	100.00 %	Rp2.432.871.25 0	100.00 %	Rp2.696.726.00 0	
				Rp20.527.969.5 96		Rp21.790.832.4 42		Rp22.689.137.7 39		Rp23.587.443.0 37		Rp24.485.748. 334	
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01	KECAMATAN BANGKO												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Bangko
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98.40%	Rp958.805.000	98.60 %	Rp965.256.386	98.80 %	Rp971.707.772	99.00 %	Rp978.159.158	99.20%	Rp984.610.544	
		Nilai AKIP OPD	74.31	Rp6.576.123.07 2	74.81	Rp7.263.494.99 1	75.31	Rp7.305.448.45 0	75.81	Rp7.347.401.90 9	76.31	Rp7.389.355.36 8	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	97.75%	Rp108.700.000	98.00 %	Rp108.978.005	98.25 %	Rp102.122.000	98.50 %	Rp102.122.000	98.75%	Rp102.122.000	
7.01.03	program												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												Kecamatan Tabir
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp4.011.023.928	100%	Rp4.745.798.928	100%	Rp4.746.348.928	100%	Rp4.746.898.928	100%	Rp4.747.448.928	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp25.000.000	100%	Rp27.000.000	100%	Rp29.000.000	100%	Rp31.000.000	100%	Rp33.000.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp55.040.000	100%	Rp57.640.000	100%	Rp57.740.000	100%	Rp57.940.000	100%	Rp58.140.000	
				Rp11.734.692.000		Rp13.168.168.310		Rp13.212.367.150		Rp13.263.521.995		Rp13.314.676.840	
7.02	KECAMATAN TABIR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Tabir
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp652.000.000	99%	Rp661.106.145	99%	Rp670.212.290	99%	Rp679.318.436	99%	Rp688.424.581	
		Nilai AKIP OPD	71.6	Rp4.759.000.000	72.6	Rp4.825.466.481	73.6	Rp4.891.932.961	74.6	Rp4.958.399.441	75.6	Rp5.024.865.922	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp56.026.000	100%	Rp58.026.000	100%	Rp60.026.000	100%	Rp62.026.000	100%	Rp64.026.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	96%	Rp4.910.000.000	96,50 %	Rp5.015.000.000	97.00 %	Rp5.320.000.000	97.50 %	Rp5.625.000.000	98.00%	Rp5.930.000.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp3.000.000	100%	Rp5.000.000	100%	Rp7.000.000	100%	Rp9.000.000	100%	Rp11.000.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp15.000.000	100%	Rp17.000.000	100%	Rp19.000.000	100%	Rp21.000.000	100%	Rp23.000.000	
				Rp10.395.026.000		Rp10.581.598.626		Rp10.968.171.251		Rp11.354.743.877		Rp11.741.316.503	
7.03	KECAMATAN PAMENANG												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Pamenang
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan	99%	Rp316.483.045	99%	Rp320.912.479	99%	Rp325.341.913	99%	Rp329.771.346	99%	Rp334.200.780	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemerintahan daerah	Pemerintahan											
		Nilai AKIP OPD	71.45	Rp3.019.669.22 ₃	72.45	Rp3.061.931.91 ₃	73.45	Rp3.104.194.60 ₃	74.45	Rp3.146.457.29 ₄	75.45	Rp3.188.719.98 ₄	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp43.255.500	100%	Rp45.255.500	100%	Rp47.255.500	100%	Rp49.255.500	100%	Rp51.255.500	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp1.356.393.23 ₂	100%	Rp1.380.355.87 ₉	100%	Rp1.480.789.30 ₀	100%	Rp1.495.364.90 ₀	100%	Rp1.458.960.00 ₀	
7.01.04	program koordinasi ketentrman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentrman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp4.500.000	100%	Rp6.500.000	100%	Rp8.500.000	100%	Rp10.500.000	100%	Rp12.500.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp52.400.000	100%	Rp74.917.626	100%	Rp97.435.252	100%	Rp119.952.878	100%	Rp142.470.504	
				Rp4.792.701.00 ₀		Rp4.889.873.39 ₇		Rp5.063.516.56 ₈		Rp5.151.301.91 ₈		Rp5.188.106.7 ₆₈	
7.04	KECAMATAN PAMENANG BARAT												
0.00.00	Program Penunjang												Kecamatan



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Pamenang Barat
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp291.097.000	98%	Rp292.999.595	98%	Rp294.902.190	98%	Rp296.804.784	98%	Rp298.707.379	
		Nilai AKIP OPD	76.5	Rp1.868.886.00 0	77	Rp1.881.100.94 1	77.5	Rp1.893.315.88 2	78	Rp1.905.530.82 4	78.5	Rp1.917.745.76 5	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp33.726.000	100%	Rp35.726.000	100%	Rp37.726.000	100%	Rp39.726.000	100%	Rp41.726.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp37.661.000	100%	Rp39.661.000	100%	Rp41.661.000	100%	Rp43.661.000	100%	Rp45.661.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp3.000.000	100%	Rp5.000.000	100%	Rp7.000.000	100%	Rp9.000.000	100%	Rp11.000.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome:	Persentase desa	100%	Rp53.000.000	100%	Rp75.817.627	100%	Rp98.635.253	100%	Rp121.452.880	100%	Rp144.270.506	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	yang administrasi tertib											
				Rp2.287.370.000		Rp2.330.305.163		Rp2.373.240.325		Rp2.416.175.488		Rp2.459.110.650	
7.05	KECAMATAN TABIR ULU												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Tabir Ulu
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp451.656.000	98%	Rp458.111.918	98%	Rp464.567.835	98%	Rp471.023.753	98%	Rp477.479.671	
		Nilai AKIP OPD	69.96	Rp1.579.713.000	70.96	Rp1.653.375.855	71.96	Rp1.671.110.461	72.96	Rp1.688.845.066	73.96	Rp1.706.579.672	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp100.000.000	100%	Rp115.000.000	100%	Rp130.000.000	100%	Rp145.000.000	100%	Rp160.000.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp160.000.000	100%	Rp170.000.000	100%	Rp180.000.000	100%	Rp190.000.000	100%	Rp200.000.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga	100%	Rp18.000.000	100%	Rp22.000.000	100%	Rp26.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp34.000.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat											
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp75.000.000	100%	Rp102.500.000	100%	Rp130.000.000	100%	Rp157.500.000	100%	Rp185.000.000	
				Rp2.384.369.00 0		Rp2.520.987.77 3		Rp2.601.678.29 6		Rp2.682.368.81 9		Rp2.763.059.3 43	
7.06	KECAMATAN TABIR SELATAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp270.000.000	100%	Rp271.821.616	100%	Rp273.643.233	100%	Rp275.464.850	100%	Rp277.286.466	
		Nilai AKIP OPD	74.11	Rp1.551.000.00 0	74.61	Rp1.561.464.17 5	75.11	Rp1.571.928.35 0	75.61	Rp1.582.392.52 4	76.11	Rp1.592.856.70 0	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp20.795.000	100%	Rp22.795.000	100%	Rp24.795.000	100%	Rp26.795.000	100%	Rp28.795.000	Kecamatan Tabir Selatan
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp38.000.000	100%	Rp40.000.000	100%	Rp42.000.000	100%	Rp44.000.000	100%	Rp46.000.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp14.000.000	100%	Rp16.000.000	100%	Rp18.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp22.000.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp50.000.000	100%	Rp72.500.000	100%	Rp95.000.000	100%	Rp117.500.000	100%	Rp140.000.000	
				Rp1.943.795.000		Rp1.984.580.791		Rp2.025.366.583		Rp2.066.152.374		Rp2.106.938.166	
7.07	KECAMATAN TABIR TIMUR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Tabir Timur
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp215.900.000	98%	Rp218.917.470	98%	Rp221.934.941	98%	Rp224.952.411	98%	Rp227.969.881	
		Nilai AKIP OPD	71.55	Rp1.376.677.000	72.55	Rp1.395.917.769	73.55	Rp1.415.158.537	74.55	Rp1.434.399.306	75.55	Rp1.453.640.075	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp22.000.000	100%	Rp24.500.000	100%	Rp27.000.000	100%	Rp29.500.000	100%	Rp32.000.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp53.000.000	100%	Rp55.000.000	100%	Rp57.000.000	100%	Rp59.000.000	100%	Rp61.000.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata- rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp15.000.000	100%	Rp17.000.000	100%	Rp19.000.000	100%	Rp21.000.000	100%	Rp23.000.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp54.900.000	100%	Rp74.350.000	100%	Rp93.800.000	100%	Rp113.250.000	100%	Rp132.700.000	
				Rp1.737.477.00 0		Rp1.785.685.23 9		Rp1.833.893.47 8		Rp1.882.101.71 7		Rp1.930.309.9 56	
7.08	KECAMATAN TABIR ILIR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Tabir Ilir
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp222.296.000	99.50 %	Rp225.487.157	100.00 %	Rp228.678.314	100.50 %	Rp231.869.471	101.00 %	Rp235.060.628	
		Nilai AKIP OPD	69.66	Rp1.399.077.00 0	70.66	Rp1.419.161.36 7	71.66	Rp1.439.245.73 4	72.66	Rp1.459.330.10 1	73.66	Rp1.479.414.46 8	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya	Persentase pelayanan	100%	Rp59.980.000	100%	Rp61.980.000	100%	Rp63.980.000	100%	Rp65.980.000	100%	Rp67.980.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	publik kecamatan yang berkualitas											
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp40.700.000	100%	Rp42.700.000	100%	Rp44.700.000	100%	Rp46.700.000	100%	Rp48.700.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp23.000.000	100%	Rp24.500.000	100%	Rp26.000.000	100%	Rp27.500.000	100%	Rp29.000.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp50.000.000	100%	Rp65.000.000	100%	Rp80.000.000	100%	Rp95.000.000	100%	Rp110.000.000	
				Rp1.795.053.000		Rp1.838.828.524		Rp1.882.604.048		Rp1.926.379.572		Rp1.970.155.096	
7.09	KECAMATAN TABIR BARAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Tabir Barat
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp292.779.000	98%	Rp297.046.293	98%	Rp301.313.587	98%	Rp305.580.880	98%	Rp309.848.174	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Nilai AKIP OPD	68.61	Rp1.675.765.50 0	69.61	Rp1.767.916.73 4	70.61	Rp1.789.703.14 2	71.61	Rp1.811.489.55 1	72.61	Rp1.833.275.95 9	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp14.727.500	100%	Rp16.727.500	100%	Rp18.727.500	100%	Rp20.727.500	100%	Rp22.727.500	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp145.200.000	100%	Rp157.800.000	100%	Rp170.400.000	100%	Rp183.000.000	100%	Rp195.600.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp24.200.000	100%	Rp26.300.000	100%	Rp28.400.000	100%	Rp30.500.000	100%	Rp32.600.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp98.000.000	100%	Rp100.000.000	100%	Rp102.000.000	100%	Rp104.000.000	100%	Rp106.000.000	
				Rp2.250.672.00 0		Rp2.365.790.52 7		Rp2.410.544.22 9		Rp2.455.297.93 1		Rp2.500.051.6 33	
7.1	KECAMATAN MARGO TABIR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan												Kecamatan Margo Tabir



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp279.580.300	98%	Rp283.466.058	98%	Rp287.351.816	98%	Rp291.237.575	98%	Rp295.123.333	
		Nilai AKIP OPD	71.95	Rp1.608.493.70 0	72.95	Rp1.775.803.10 9	73.95	Rp1.796.838.46 3	74.95	Rp1.817.873.81 6	75.95	Rp1.838.909.17 0	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp30.500.000	100%	Rp32.500.000	100%	Rp34.500.000	100%	Rp36.500.000	100%	Rp38.500.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp20.000.000	100%	Rp22.000.000	100%	Rp24.000.000	100%	Rp26.000.000	100%	Rp28.000.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata- rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp2.000.000	100%	Rp4.000.000	100%	Rp6.000.000	100%	Rp8.000.000	100%	Rp10.000.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas	Persentase desa yang administrasi	100%	Rp54.500.000	100%	Rp71.750.000	100%	Rp89.000.000	100%	Rp106.250.000	100%	Rp123.500.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	penyelenggaraan pemerintah desa	tertib											
				Rp1.995.074.000		Rp2.189.519.167		Rp2.237.690.279		Rp2.285.861.391		Rp2.334.032.503	
7.11	KECAMATAN TABIR LINTAS												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Tabir Lintas
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp270.766.000	99.50 %	Rp272.574.482	100.00 %	Rp274.382.965	100.50 %	Rp276.191.447	101.00 %	Rp277.999.930	
		Nilai AKIP OPD	74.86	Rp1.580.906.000	75.36	Rp1.591.465.084	75.86	Rp1.602.024.167	76.36	Rp1.612.583.251	76.86	Rp1.623.142.334	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp29.000.000	100%	Rp31.000.000	100%	Rp33.000.000	100%	Rp35.000.000	100%	Rp37.000.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp39.780.000	100%	Rp41.780.000	100%	Rp43.780.000	100%	Rp45.780.000	100%	Rp47.780.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman	100%	Rp2.000.000	100%	Rp4.000.000	100%	Rp6.000.000	100%	Rp8.000.000	100%	Rp10.000.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		dan ketertiban masyarakat											
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp54.000.000	100%	Rp71.000.000	100%	Rp88.000.000	100%	Rp105.000.000	100%	Rp122.000.000	
				Rp1.976.452.000		Rp2.011.819.566		Rp2.047.187.132		Rp2.082.554.698		Rp2.117.922.264	
7.12	KECAMATAN RENAH PAMENANG												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Renah Pamenang
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp271.624.000	100.00 %	Rp275.404.431	101.00 %	Rp279.184.863	102.00 %	Rp282.965.294	103.00 %	Rp286.745.726	
		Nilai AKIP OPD	71.85	Rp1.241.633.000	72.85	Rp1.258.913.905	73.85	Rp1.276.194.809	74.85	Rp1.293.475.714	75.85	Rp1.310.756.618	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	98%	Rp31.000.000	98.50 %	Rp33.000.000	99.00 %	Rp35.000.000	99.50 %	Rp37.000.000	100.00 %	Rp39.000.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	95%	Rp413.920.000	97.50 %	Rp569.880.000	100.00 %	Rp725.840.000	102.50 %	Rp881.800.000	105.00 %	Rp1.037.760.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp2.400.000	100%	Rp4.400.000	100%	Rp6.400.000	100%	Rp8.400.000	100%	Rp10.400.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	98%	Rp54.200.000	99.00 %	Rp73.800.000	100.00 %	Rp93.400.000	101.00 %	Rp113.000.000	102.00 %	Rp132.600.000	
				Rp2.014.777.000		Rp2.215.398.336		Rp2.416.019.672		Rp2.616.641.008		Rp2.817.262.344	
7.13	KECAMATAN PAMENANG SELATAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Pamenang Selatan
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp89.600.000	99%	Rp90.210.687	99%	Rp90.821.374	99%	Rp91.432.061	99%	Rp92.042.748	
		Nilai AKIP OPD	73.36	Rp1.450.370.000	73.86	Rp1.460.255.292	74.36	Rp1.470.140.583	74.86	Rp1.480.025.875	75.36	Rp1.489.911.167	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp11.500.000	100%	Rp13.500.000	100%	Rp15.500.000	100%	Rp17.500.000	100%	Rp19.500.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome:	Tingkat	100%	Rp29.674.000	100%	Rp31.674.000	100%	Rp33.674.000	100%	Rp35.674.000	100%	Rp37.674.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan											
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp1.500.000	100%	Rp3.500.000	100%	Rp5.500.000	100%	Rp7.500.000	100%	Rp9.500.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp52.600.000	100%	Rp68.400.000	100%	Rp84.200.000	100%	Rp100.000.000	100%	Rp115.800.000	
				Rp1.635.244.000		Rp1.667.539.979		Rp1.699.835.957		Rp1.732.131.936		Rp1.764.427.915	
7.14	KECAMATAN MUARA SIAU												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Muara Siau
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp258.000.000	98%	Rp261.603.352	98%	Rp265.206.704	98%	Rp268.810.056	98%	Rp272.413.408	
		Nilai AKIP OPD	71.6	Rp2.262.678.000	72.6	Rp2.493.753.974	73.6	Rp2.523.428.247	74.6	Rp2.553.102.521	75.6	Rp2.582.776.795	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang	100%	Rp33.600.000	100%	Rp34.871.000	100%	Rp36.142.000	100%	Rp37.413.000	100%	Rp38.684.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	berkualitas											
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp22.000.000	100%	Rp24.000.000	100%	Rp26.000.000	100%	Rp28.000.000	100%	Rp30.000.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp2.500.000	100%	Rp2.750.000	100%	Rp3.000.000	100%	Rp3.250.000	100%	Rp3.500.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp6.500.000	100%	Rp8.500.000	100%	Rp10.500.000	100%	Rp12.500.000	100%	Rp14.500.000	
				Rp2.585.278.000		Rp2.825.478.326		Rp2.864.276.951		Rp2.903.075.577		Rp2.941.874.203	
7.15	KECAMATAN TIANG PUMPUNG												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Tiang Pumpung
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp291.850.000	99.50 %	Rp295.928.966	100.00 %	Rp300.007.931	100.00 %	Rp304.086.897	100.00 %	Rp308.165.863	
		Nilai AKIP OPD	71.55	Rp1.819.255.000	72.55	Rp1.974.598.945	73.55	Rp1.998.054.641	74.55	Rp2.021.510.336	75.55	Rp2.044.966.031	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp21.075.000	100%	Rp30.262.500	100%	Rp39.450.000	100%	Rp48.637.500	100%	Rp57.825.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp54.365.000	100%	Rp56.365.000	100%	Rp58.365.000	100%	Rp60.365.000	100%	Rp62.365.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp2.190.000	100%	Rp4.190.000	100%	Rp6.190.000	100%	Rp8.190.000	100%	Rp10.190.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp50.000.000	100%	Rp70.660.000	100%	Rp91.320.000	100%	Rp111.980.000	100%	Rp132.640.000	
				Rp2.238.735.000		Rp2.432.005.411		Rp2.493.387.572		Rp2.554.769.733		Rp2.616.151.894	
7.16	KECAMATAN JANGKAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Jangkat



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp2.562.296.00 0	98%	Rp2.598.614.86 6	98%	Rp2.634.933.73 2	98%	Rp2.671.252.59 9	98%	Rp2.707.571.46 4	
		Nilai AKIP OPD	70.55	Rp48.600.000	71.55	Rp49.288.873	72.55	Rp49.977.746	73.55	Rp50.666.619	74.55	Rp51.355.493	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp148.000.000	100%	Rp205.962.500	100%	Rp263.925.000	100%	Rp321.887.500	100%	Rp379.850.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp76.500.000	100%	Rp94.750.000	100%	Rp113.000.000	100%	Rp131.250.000	100%	Rp149.500.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata- rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp1.500.000	100%	Rp3.500.000	100%	Rp5.500.000	100%	Rp7.500.000	100%	Rp9.500.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp113.000.000	100%	Rp164.000.000	100%	Rp215.000.000	100%	Rp266.000.000	100%	Rp317.000.000	
				Rp2.949.896.00		Rp3.116.116.23		Rp3.282.336.47		Rp3.448.556.71		Rp3.614.776.9	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.17	KECAMATAN JANGKAT TIMUR												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			0		9		8		8		57	Kecamatan Jangkat Timur
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp328.090.050	99.50 %	Rp332.703.888	100.00 %	Rp337.317.727	100.50 %	Rp341.931.565	101.00 %	Rp346.545.404	
		Nilai AKIP OPD	71.11	Rp1.545.824.45 0	72.11	Rp1.585.914.29 1	73.11	Rp1.602.548.01 9	74.11	Rp1.619.181.74 8	75.11	Rp1.635.815.47 7	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp54.850.000	100%	Rp57.000.000	100%	Rp59.150.000	100%	Rp61.300.000	100%	Rp63.450.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	97%	Rp21.203.000	100.00 %	Rp23.203.000	100.00 %	Rp25.203.000	100.00 %	Rp27.203.000	100.00 %	Rp29.203.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata- rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp18.640.500	100%	Rp20.213.750	100%	Rp21.787.000	100%	Rp23.360.250	100%	Rp24.933.500	
7.01.06	program pembinaan												

Kecamatan
Jangkat Timur



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	90%	Rp6.250.000	100%	Rp8.250.000	100%	Rp10.250.000	100%	Rp12.250.000	100%	Rp14.250.000	
				Rp1.974.858.000		Rp2.027.284.929		Rp2.056.255.746		Rp2.085.226.563		Rp2.114.197.381	
7.18	KECAMATAN SUNGAI MANAU												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Sungai Manau
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp186.045.000	100%	Rp188.633.992	100%	Rp191.222.985	100%	Rp193.811.977	100%	Rp196.400.970	
		Nilai AKIP OPD	71.86	Rp1.825.299.000	72.86	Rp1.850.699.766	73.86	Rp1.876.100.531	74.86	Rp1.901.501.297	75.86	Rp1.926.902.061	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp20.455.000	100%	Rp22.455.000	100%	Rp24.455.000	100%	Rp26.455.000	100%	Rp28.455.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp510.000.000	100%	Rp764.500.000	100%	Rp1.019.000.000	100%	Rp1.273.500.000	100%	Rp1.528.000.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya	Persentase rata-rata	100%	Rp23.000.000	100%	Rp27.000.000	100%	Rp31.000.000	100%	Rp35.000.000	100%	Rp39.000.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kondusifitas wilayah kecamatan	keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat											
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp50.000.000	100%	Rp68.200.000	100%	Rp86.400.000	100%	Rp104.600.000	100%	Rp122.800.000	
				Rp2.614.799.000		Rp2.921.488.758		Rp3.228.178.516		Rp3.534.868.274		Rp3.841.558.031	
7.19	KECAMATAN RENAH PEMBARAP												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp388.813.201	98%	Rp391.533.696	98%	Rp394.254.192	98%	Rp396.974.687	98%	Rp399.695.183	
		Nilai AKIP OPD	71.46	Rp1.500.123.299	71.96	Rp1.510.619.544	72.46	Rp1.521.115.788	72.96	Rp1.531.612.033	73.46	Rp1.542.108.278	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												Kecamatan Renah Pembarap
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp105.746.500	100%	Rp107.746.500	100%	Rp109.746.500	100%	Rp111.746.500	100%	Rp113.746.500	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam	100%	Rp74.980.000	100%	Rp76.980.000	100%	Rp78.980.000	100%	Rp80.980.000	100%	Rp82.980.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	pembangunan desa/kelurahan											
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp12.638.460	100%	Rp13.735.186	100%	Rp14.831.912	100%	Rp15.928.638	100%	Rp17.025.364	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp40.000.000	100%	Rp56.652.388	100%	Rp73.304.775	100%	Rp89.957.163	100%	Rp106.609.550	
				Rp2.122.301.460		Rp2.157.267.314		Rp2.192.233.167		Rp2.227.199.021		Rp2.262.164.875	
7.2	KECAMATAN PANGKALAN JAMBU												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Pangkalan Jambu
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp272.462.000	100%	Rp276.248.298	100%	Rp280.034.596	100%	Rp283.820.894	100%	Rp287.607.192	
		Nilai AKIP OPD	71.96	Rp1.753.376.000	72.96	Rp1.919.080.788	73.96	Rp1.941.779.176	74.96	Rp1.964.477.564	75.96	Rp1.987.175.952	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp52.400.000	100%	Rp55.600.000	100%	Rp58.800.000	100%	Rp62.000.000	100%	Rp65.200.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp92.200.000	100%	Rp117.300.000	100%	Rp142.400.000	100%	Rp167.500.000	100%	Rp192.600.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp2.400.000	100%	Rp4.400.000	100%	Rp6.400.000	100%	Rp8.400.000	100%	Rp10.400.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp52.400.000	100%	Rp76.100.000	100%	Rp99.800.000	100%	Rp123.500.000	100%	Rp147.200.000	
				Rp2.225.238.000		Rp2.448.729.086		Rp2.529.213.772		Rp2.609.698.458		Rp2.690.183.144	
7.21	KECAMATAN BATANG MASUMAI												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Batang Masumai
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	Rp291.790.500	100.00 %	Rp295.869.509	101.00 %	Rp299.908.132	102.00 %	Rp303.946.755	103.00 %	Rp307.985.378	
		Nilai AKIP OPD	71.26	Rp1.834.582.500	72.26	Rp1.891.132.807	73.26	Rp1.913.495.738	74.26	Rp1.935.858.670	75.26	Rp1.958.221.601	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	98%	Rp52.059.000	99.00 %	Rp54.059.000	100.00 %	Rp56.059.000	101.00 %	Rp58.059.000	102.00 %	Rp60.059.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp50.500.000	100%	Rp52.500.000	100%	Rp54.500.000	100%	Rp56.500.000	100%	Rp58.500.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp11.000.000	100%	Rp11.300.000	100%	Rp11.600.000	100%	Rp11.900.000	100%	Rp12.200.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp60.800.000	100%	Rp85.700.000	100%	Rp110.600.000	100%	Rp135.500.000	100%	Rp160.400.000	
				Rp2.300.732.000		Rp2.390.561.316		Rp2.446.162.870		Rp2.501.764.425		Rp2.557.365.979	
7.22	KECAMATAN BANGKO BARAT												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Bangko Barat
	Outcome : Meningkatnya kualitas	Persentase Pemenuhan Penunjang	98%	Rp378.119.770	98%	Rp383.426.714	98%	Rp388.733.658	98%	Rp394.040.602	98%	Rp399.347.546	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	penyelenggaraan pemerintahan daerah	Urusan Pemerintahan											
		Nilai AKIP OPD	71.25	Rp1.695.261.230	72.25	Rp1.758.706.462	73.25	Rp1.776.478.549	74.25	Rp1.794.250.637	75.25	Rp1.812.022.724	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp13.500.000	100%	Rp15.500.000	100%	Rp17.500.000	100%	Rp19.500.000	100%	Rp21.500.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp52.500.000	100%	Rp54.500.000	100%	Rp56.500.000	100%	Rp58.500.000	100%	Rp60.500.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp51.880.000	100%	Rp62.870.000	100%	Rp73.860.000	100%	Rp84.850.000	100%	Rp95.840.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp53.600.000	100%	Rp67.900.000	100%	Rp82.200.000	100%	Rp96.500.000	100%	Rp110.800.000	
				Rp2.244.861.000		Rp2.342.903.176		Rp2.395.272.207		Rp2.447.641.239		Rp2.500.010.270	
7.23	KECAMATAN LEMBAH MASURAI												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Lembah Masurai
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp311.500.000	98%	Rp315.850.558	98%	Rp320.201.116	98%	Rp324.551.675	98%	Rp328.902.234	
		Nilai AKIP OPD	71.6	Rp1.818.200.00 0	72.6	Rp2.011.885.30 7	73.6	Rp2.035.840.61 5	74.6	Rp2.059.795.92 2	75.6	Rp2.083.751.22 9	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp44.303.000	100%	Rp46.303.000	100%	Rp48.303.000	100%	Rp50.303.000	100%	Rp52.303.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp125.000.000	100%	Rp127.000.000	100%	Rp129.000.000	100%	Rp131.000.000	100%	Rp133.000.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata- rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	Rp5.000.000	100%	Rp7.000.000	100%	Rp9.000.000	100%	Rp11.000.000	100%	Rp13.000.000	
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp76.697.000	100%	Rp105.045.500	100%	Rp133.394.000	100%	Rp161.742.500	100%	Rp190.091.000	
				Rp2.380.700.000		Rp2.613.084.365		Rp2.675.738.731		Rp2.738.393.097		Rp2.801.047.463	
7.24	KECAMATAN NALO TANTAN												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												Kecamatan Nalo Tantan
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp258.986.000	98%	Rp260.678.719	98%	Rp262.371.438	98%	Rp264.064.157	98%	Rp265.756.876	
		Nilai AKIP OPD	76.5	Rp1.652.450.000	77	Rp1.870.856.389	77.5	Rp1.881.395.278	78	Rp1.891.934.167	78.5	Rp1.902.473.055	
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik												
	Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan publik kecamatan yang berkualitas	100%	Rp15.944.000	100%	Rp17.944.000	100%	Rp19.944.000	100%	Rp21.944.000	100%	Rp23.944.000	
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan												
	Outcome: Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	100%	Rp37.000.000	100%	Rp39.000.000	100%	Rp41.000.000	100%	Rp43.000.000	100%	Rp45.000.000	
7.01.04	program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum												
	Outcome: Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase rata- rata keterlibatan masvarakat	100%	Rp5.012.000	100%	Rp7.012.000	100%	Rp9.012.000	100%	Rp11.012.000	100%	Rp13.012.000	



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat											Badan Kesbangpol
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi tertib	100%	Rp53.884.000	100%	Rp70.826.000	100%	Rp87.768.000	100%	Rp104.710.000	100%	Rp121.652.000	
				Rp2.023.276.000		Rp2.266.317.108		Rp2.301.490.716		Rp2.336.664.324		Rp2.371.837.931	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
0.00.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota												
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98%	Rp647.553.150	99%	Rp657.252.868	99%	Rp666.952.585	99%	Rp676.652.303	99%	Rp686.352.021	
		Nilai AKIP OPD	66.76	Rp3.192.804.841	67.76	Rp3.679.966.502	68.76	Rp3.727.207.438	69.76	Rp3.774.448.373	70.76	Rp3.821.689.308	
8.01.02	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan												
	Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	Rp1.125.509.300	100%	Rp1.135.509.300	100%	Rp1.145.509.300	100%	Rp1.155.509.300	100%	Rp1.165.509.300	
8.01.03	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik												
	Outcome: Meningkatnya	Persentase pendidikan	100%	Rp1.187.989.000	100%	Rp1.197.989.000	100%	Rp1.207.989.000	100%	Rp1.217.989.000	100%	Rp1.227.989.000	

Badan
Kesbangpol



Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	etika dan budaya politik	politik yang dilaksanakan											
8.01.04	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan												
	Outcome: Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	Rp40.249.775	100%	Rp42.249.775	100%	Rp44.249.775	100%	Rp46.249.775	100%	Rp48.249.775	
8.01.05	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya												
	Outcome: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	1. Persentase Tingkat Keaktifan FKUB	100%	Rp57.795.950	100%	Rp62.795.950	100%	Rp62.795.950	100%	Rp62.795.950	100%	Rp62.795.950	
		2. Persentase Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan	100%	Rp81.450.860	100%	Rp81.450.860	100%	Rp86.450.860	100%	Rp91.450.860	100%	Rp96.450.860	
8.01.06	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial												
	Outcome: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase penanganan konflik yang diselesaikan	100%	Rp395.829.950	100%	Rp400.829.950	100%	Rp405.829.950	100%	Rp410.829.950	100%	Rp415.829.950	
				Rp6.729.182.826		Rp7.258.044.205		Rp7.346.984.858		Rp7.435.925.511		Rp7.524.866.164	
Total Pagu				Rp1.728.928.849.177		Rp1.837.907.614.488		Rp1.857.134.095.214		Rp1.892.366.883.833		Rp1.924.987.973.617	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memuat penjelasan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD). IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKD adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan.



Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						PD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72.65	73.26	73.88	74.49	75.10	75.71	76.33	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4.55	4.92	5.34	5.76	6.18	6.60	7.02	
Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	11.425	11.712	11.998	12.285	12.571	12.858	13.144	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persentase	7.78	7.88	7.98	8.08	8.18	8.28	8.38	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	2.77	3.14	3.51	3.88	4.25	4.62	4.99	Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan
Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (miliar)	207.4	228.14	262.36	314.83	393.54	511.60	690.67	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks	2.47	3.09	3.14	3.20	3.25	3.30	3.35	DPUPR, Dishub, Dinas Perkim, DLH
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67.71	69	70.25	71.5	72.75	73.5	74.76	
Nilai SAKIP	Nilai	67.58	69.5	71	72.5	74	75.5	77	Sekretariat Daerah
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.28	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	3.55	Sekretariat Daerah, OPD Sampel pelayanan Publik
Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	3.04	3.048	3.078	3.1	3.28	3.33	3.40	Inspektorat

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini khususnya berkaitan dengan pemenuhan kinerja pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum. Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja ini juga diperlukan oleh publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum. Aspek geografis dan demografis mencakup karakteristik fisik wilayah serta struktur dan dinamika penduduk di Kabupaten Merangin. Aspek ini meliputi lokasi geografis, luas wilayah, kondisi lingkungan, penyebaran penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, serta komposisi umur, jenis kelamin, dan mobilitas penduduk yang mempengaruhi perencanaan serta pengelolaan sumber daya daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator komposit dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan, serta kualitas hidup secara menyeluruh yang mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mencerminkan efektivitas pemanfaatan potensi sumber daya, inovasi, dan kebijakan daerah dalam meningkatkan produktivitas dan daya tarik investasi. Sedangkan aspek pelayanan umum mencakup seluruh bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar secara fisik



maupun sosial, seperti fasilitas jalan, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Indikator kinerja daerah Kabupaten Merangin tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah kabupaten Merangin 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI dan DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75.565	76.12	76.675	77.23	77.785	78.34	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	10.15	9.95	9.77	9.57	9.38	9.18	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	528	568	608	648	688	728	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	30	33.5	37	40.5	44	47.5	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74.63	74.84	75.05	75.27	75.45	75.66	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	83	83.63	84.25	84.88	85.5	86.13	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	15	18.5	22	22.5	29	32.5	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	20.87	24.83	28.79	32.74	36.7	40.66	
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	(Ton CO2eq) (Kumulatif)	746.300.56	803.366.32	864.795.60	930.922.07	1.002.104.88	1.078.730.68	
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	166	160.75	155.50	150.25	145	139.75	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.73	02.01	2.29	2.57	2.85	3.13	
12	Rasio Penduduk	%	102.87	102.63	102.40	102.17	101.93	101.70	
13	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	373168	377947	382726	387505	392284	397063	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.92	5.34	5.76	6.18	6.60	7.02	
2	Tingkat Kemiskinan	%	7.96	7.76	7.56	7.36	7.14	6.94	
3	PDRB Per Kapita (ribu rupiah)	Rp Juta	66.22	81.2	101.2	126.2	157.03	157.03	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.01	3.84	3.67	3.5	3.33	3.16	
5	Indeks Gini	Indeks	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	
6	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.37	3.41	3.45	3.49	3.52	3.54	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.26	73.88	74.49	75.10	75.71	76.33	
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.35	74.50	74.65	74.80	74.95	75.10	
9	Prevalensi Stunting	%	8.5	7.5	6.5	6	5	4.8	
10	<i>Universal Health Coverage</i>	%	80.15	83.12	86.1	89.07	92.05	98	
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.48	8.60	8.72	8.84	8.95	9.07	
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.27	12.28	12.28	12.29	12.31	12.32	
13	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	56.49	58.99	61.49	63.99	66.49	68.99	
14	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	65.86	66.96	68.06	69.16	70.26	71.36	
15	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	53.11	56.01	58.91	61.81	64.71	67.61	
16	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	60.95	62.45	63.95	65.45	66.95	68.45	
17	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Nilai	80.91	83.88	86.85	89.82	92.79	95.33	
18	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Nilai	98.06	98.34	98.62	98.9	99.18	99.47	
19	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Nilai	59.73	66.22	72.71	73.47	74.24	75	
20	Proporsi Jumlah Satuan Paud Terakreditasi Minimal B	Nilai	32.11	37.41	44.48	53.32	63.93	74.53	
21	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Nilai	44.79	45.79	46.79	47.79	48.79	49.79	
22	Iklim Inklusivitas (SD)	Nilai	59.14	61.64	64.14	66.64	69.14	71.64	
23	Iklim Inklusivitas (SMP)	Nilai	58.02	60.42	62.82	65.22	67.62	70.02	
24	Iklim Keamanan (SD)	Nilai	74.45	75.35	76.25	77.15	78.05	78.95	
25	Iklim Keamanan (SMP)	Nilai	69.74	71.24	72.74	74.24	75.74	77.24	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26	Iklim Kebinekaan (SD)	Nilai	68.71	69.71	70.71	71.71	72.71	73.71	
27	Iklim Kebinekaan (SMP)	Nilai	69.53	70.53	71.53	72.53	73.53	74.53	
28	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	47.62	50.61	53.6	56.59	59.58	62.57	
29	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	40	42.63	45.25	47.87	50.5	53.13	
30	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	73.99	74.59	75.19	75.79	76.39	76.99	
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	53.15	53.94	54.73	55.52	56.29	57.075	
32	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63.53	64.41	65.30	66.18	67.07	67.95	
33	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64.25	64.90	65.55	66.19	66.84	67.49	
34	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.63	0.58	0.54	0.49	0.45	0.4	
35	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89.58	89.78	89.99	90.19	90.40	90.60	
36	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	49	55.5	56	56.5	57	57.5	
37	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	
38	Angka kematian ibu (per100.000 kelahiran hidup)	Angka	59.80	59.35	58.90	58.45	58.0	57.55	
39	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Persen	64.63	65.65	66.68	67.70	68.72	69.74	
40	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	Persen	94.24	95.41	96.58	97.75	98.92	100	
41	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	89.84	92.38	94.92	97.46	99.98	100	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	45.21	45.16	45.12	45.07	45.03	44.98	
2	Laju PDRB Industri pengolahan	%	2.06	2.21	2.36	2.51	2.66	2.81	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7.88	7.98	8.08	8.18	8.28	8.38	
4	Rasio Kewirausahaan	%	2.34	2.63	2.93	3.22	3.52	3.81	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75.87	77.01	78.15	79.29	80.43	81.57	
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47.8	48.41	49.03	49.64	50.26	50.87	
7	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	27.3	30.26	33.22	36.17	39.13	42.09	
8	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.9	3.8	4.05	4.13	4.2	4.28	
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp	27.1	27.48	27.81	28.13	28.46	28.79	
10	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	17.75	17.96	18.18	18.39	18.60	18.81	
11	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks	3.09	3.14	3.20	3.25	3.30	3.35	
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	84.89	85.67	86.45	87.22	88	88.78	
13	Persentase Desa Mandiri	%	28.29	28.78	29.76	30.71	31.71	32.57	
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.3	0.38	0.45	0.53	0.6	0.68	
15	Tingkat Inflasi	%	2.5±1	2.5±1	2.5±1	2.5±1	2.5±1	2.5±1	
16	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	Jumlah	200	310	420	530	640	750	
17	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Persen	3.37	3.40	3.44	3.47	3.51	3.54	
18	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten (%)	Persen	97.56	97.50	97.44	97.38	97.31	97.25	
19	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	Persen	99.730	99.732	99.735	99.737	99.740	99.742	
20	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	0.71	0.83	0.95	1.07	1.19	1.31	
21	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	1.8	1.82	1.83	1.85	1.86	1.88	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	58.10	58.64	59.18	59.71	60.25	60.79	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.4	3.55	3.7	3.85	4	4.15	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	3.55	
4	Indeks Integritas Kabupaten	Indeks	70	71.25	72.5	73.75	75	76.25	
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	74.00	75.5	77	78.5	80	81.5	
7	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	96	96.5	97	97.5	98	98.5	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.09	3.16	3.23	3.3	3.44	3.51	
9	Indeks Transformasi Digital	Indeks	42.5	42.78	43.05	43.33	43.6	43.88	
10	Angka kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Angka	10.57	10.50	10.43	10.37	10.3	10.23	
11	Persentase penyelesaian konflik	Persen	100	100	100	100	100	100	
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
	(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
A	Pendidikan								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	112.11	113.11	114.11	115.11	116.11	117.11	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi	%	86.95	88.95	90.95	92.95	94.95	96.95	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dalam pendidikan menengah pertama								
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	64.83	66.33	67.83	69.33	70.83	72.33	
B	Kesehatan								
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	1.34	1.47	1.60	1.73	1.86	1.98	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	75.65	76.77	77.90	79.02	80.15	81.27	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	83.18	83.69	84.21	84.73	85.24	85.76	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	79.82	81.82	83.82	85.82	87.82	89.82	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96.45	96.95	97.45	97.95	98.45	98.95	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	71.22	72.72	74.22	75.72	77.22	78.72	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96.35	97.23	98.11	98.99	99.88	100.76	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	76.73	76.91	77.09	77.27	77.45	77.63	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	99.17	99.30	99.43	99.57	99.70	99.83	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	sesuai standar								
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	99.51	100.14	100.77	101.40	102.02	102.65	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	97.58	99.96	102.35	104.73	107.11	109.49	
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	55.40	56.21	57.01	57.82	58.62	59.43	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	33.70	34.18	34.67	35.15	35.63	36.11	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	33.70	34.18	34.66	35.14	35.62	36.10	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	65.99	66.99	67.99	68.99	69.99	70.99	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	76.36	78.36	80.36	82.36	84.36	86.36	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	90.59	91.59	92.59	93.59	94.59	95.59	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	42.00	42.50	43.00	43.50	44.00	44.50	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	63.18	64.18	65.18	66.18	67.18	68.18	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	64.53	65.53	66.53	67.53	68.53	69.53	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8.82	7.82	6.82	5.82	4.82	3.82	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	58.67	61.67	64.67	67.67	70.67	73.67	
E	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	66.97	67.27	67.57	67.87	68.17	68.47	
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	%	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	
F	Sosial								
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
	(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
A	Tenaga Kerja								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0.60	0.74	0.87	1.01	1.14	1.27	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	62.75	64.96	67.16	69.37	71.58	73.79	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur	%	23.63	24.63	25.63	26.63	27.63	28.63	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).								
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	22.54	28.84	35.15	41.46	47.76	54.07	
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	94.75	95.25	95.75	96.25	96.75	97.25	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	6.03	5.25	4.46	3.68	2.89	2.11	
C	Pangan								
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	10.22	11.87	13.51	15.15	16.80	18.44	
D	Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	50.00	59.00	68.00	77.00	86.00	95.00	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	
E	Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	74.63	74.84	75.05	75.27	75.45	75.66	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	71.62	73.09	74.56	76.02	77.49	78.96	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	8.19	8.69	9.19	9.69	10.19	10.69	
F	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Perekaman KTP elektronik	%	100.54	101.56	102.57	103.59	104.61	105.63	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	51.41	54.39	57.37	60.35	63.33	66.31	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99.68	99.90	100.12	100.33	100.55	100.77	
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	10	8	12	10	11	5	
G	Pemberdayaan masyarakat dan desa								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0	0	0	0	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	48.48	17.64	21.42	27.27	37.50	60	
H	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2.12	2.06	2.00	1.94	1.88	1.82	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi	%	81.67	85.18	88.68	92.18	95.68	99.19	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)								
3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	3.65	3.32	3.00	2.68	2.35	2.03	
I	Perhubungan								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0.80	1.04	1.28	1.52	1.76	2.00	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0.62	0.82	1.02	1.22	1.42	1.62	
J	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	46.73	57.09	67.46	77.83	88.19	98.56	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	4.23	5.23	6.23	7.23	8.23	9.23	
K	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	40.35	43.86	47.37	50.88	54.39	57.89	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	91.5	92	92.5	93	93.5	94	
L	Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	10	15	20	25	30	35	
M	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam	%	7.12	7.62	8.12	8.62	9.12	9.62	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan								
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	135.00	139.00	143.00	147.00	151.00	155.00	
N	Statistik								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
O	Persandian								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0.07	0.11	0.15	0.19	0.23	0.27	
P	Kebudayaan								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	45.25	49.30	53.35	57.40	61.45	65.50	
Q	Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	53.70	54.69	55.68	56.67	57.66	58.65	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	47.62	50.61	53.6	56.59	59.58	62.57	
R	Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan 59 UU No43/2009)	%	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	%	17.60	18.60	19.60	20.60	21.60	22.60	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat								
	(3) Urusan Pemerintahan Pilihan								
A	Kelautan dan Perikanan								
1	Persentase Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	108.50	110.50	112.50	114.50	116.50	118.50	
B	Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	11.14	13.14	15.14	17.14	19.14	21.14	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	28.91	29.41	29.91	30.41	30.91	31.41	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1.84	1.97	2.09	2.22	2.34	2.47	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0.25	0.38	0.50	0.63	0.75	0.88	
C	Pertanian								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kuintal/Ha	61.07	61.99	62.92	63.86	64.82	65.79	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentas e kasus zoonosis kab/ kota	%	2.32	2.27	2.22	2.17	2.12	2.07	
D	Perdagangan								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	%	63.31	65.31	67.31	69.31	71.31	73.31	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)								
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	86.05	86.80	87.55	88.30	89.05	89.80	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	72	82	88	92	94	95	
E	Perindustrian								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	6.17	7.67	9.17	10.67	12.17	13.67	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	0	0	0	0	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	5	6	7	8	9	9	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	5	6	7	8	9	9	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	%	5	6	7	8	9	9	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	5	6	7	8	9	9	
	Penunjang Urusan Pemerintahan								



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Perencanaan dan Keuangan								
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	38.15	40.31	42.47	44.63	46.79	48.95	
2	Rasio PAD	%	7.70	8.92	10.13	11.35	12.56	13.78	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3.048	3.078	3.1	3.28	3.33	3.40	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3	3	3	3	3	3	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	66.84	69.84	72.84	75.84	78.84	81.84	
6	Opini Laporan Keuangan	%	10	10	10	10	10	10	
B	Pengadaan								
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	12.63	13.25	13.87	14.49	15.11	15.73	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	45.22	47.72	50.22	52.72	55.22	57.72	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	67.83	77.33	86.83	96.33	105.83	115.33	
C	Kepegawaian								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	78.68	81.70	84.73	87.75	90.77	93.80	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	%	25.39	25.94	26.50	27.05	27.61	28.16	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kesehatan)								
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	46.20	46.59	46.85	47.20	47.59	47.85	
D	Manajemen Keuangan								
1	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2.24	2.19	2.14	2.09	2.04	1.99	
2	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1.87	1.82	1.77	1.72	1.67	1.62	
3	Manajemen Aset	%	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5.03	4.57	4.11	3.66	3.20	2.74	
E	Transparansi dan Partisipasi Publik								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	100	100	100	100	100	100	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	100	100	



BAB V

PENUTUP





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengarahkan pembangunan daerah secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah menetapkan fokus pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berbasis kebutuhan lokal dan diselaraskan dengan kebijakan nasional serta provinsi. Penyusunan dokumen ini mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang pembangunan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Daerah menyusun strategi pembangunan yang sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 yang menitikberatkan pada tujuh agenda utama. Agenda tersebut meliputi penguatan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, pelestarian lingkungan hidup, penguatan budaya, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Seluruh strategi daerah dirancang agar mendukung agenda nasional, khususnya dalam mendorong ekonomi berbasis potensi lokal, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan memperkuat pelayanan publik yang inovatif dan transparan.

Dokumen RPJMD ini turut memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi yang menekankan pemerataan pembangunan antarwilayah, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan dasar bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merangin mengarahkan kebijakan pembangunan pada peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. Keselarasan ini diharapkan menciptakan kesinambungan pembangunan antara daerah, provinsi, dan nasional secara terpadu.

Keberhasilan implementasi RPJMD bergantung pada kualitas perencanaan, komitmen pelaksanaan, serta kolaborasi lintas sektor.



Pemerintah Daerah menjalankan peran sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. Pelaku usaha didorong menjadi mitra strategis untuk mendorong investasi dan memperluas kesempatan kerja, sedangkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga sosial diharapkan memberikan kontribusi dalam bentuk masukan kebijakan dan pengawalan pelaksanaan program.

RPJMD ini disusun sebagai dokumen dinamis yang memuat sistem pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh. Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi berkala terhadap capaian program dan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan target serta dampaknya terhadap masyarakat. Penggunaan data yang akurat dan prinsip transparansi menjadi landasan dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Pemerintah Kabupaten Merangin menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan profesional. Seluruh elemen masyarakat perlu berpartisipasi aktif untuk memastikan implementasi RPJMD berjalan optimal. Melalui semangat kolaboratif dan inovasi, pembangunan daerah diharapkan mampu menciptakan Merangin yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

5.2 Pedoman Transisi

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 ini berakhir. Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2030 yang akan dilakukan pada Tahun 2029 tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 sepanjang belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Merangin periode berikutnya di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.

2. Penyusunan RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2030 tetap memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi yang berlaku.

5.3 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan RPJMD. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, agar memperhatikan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Lima tahunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan RPJMD ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.4 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut. Proses pengendalian dan evaluasi secara prinsip mengacu pada ketentuan pasal 299 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Lingkup pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD dilakukan untuk mengetahui:

- a. Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan
- b. Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD, namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJMD, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi RPJMD dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.


BUPATI MERANGIN,
M. SYUKUR